

**KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN
PARIWISATA**

**KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2018 - 2033**



POLITEKNIK PARIWISATA
MAKASSAR
2020



KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2018 - 2033



POLITEKNIK PARIWISATA
MAKASSAR
2020

**TAHUN
2018 - 2033**

**KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN
PARIWISATA**

KABUPATEN SOPPENG

Dr. Syamsu Rijal, M.Pd. CHE
Drs. Muhammad Arifin, M.Pd.
Syafuruddin, SH., MM.
Dra. Surya Dewi, MM. CHE



KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2018-2033

Dr. Syamsu Rijal, M.Pd. CHE
Drs. Muhammad Arifin, M.Pd
Syafuruddin, SH. MM
Dra. Surya Dewi, MM. CHE

**Penerbit:
Politeknik Pariwisata Makassar
2020**

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2018-2033**

Penulis:

Dr. Syamsu Rijal, M.Pd. CHE
Drs. Muhammad Arifin, M.Pd
Syafuruddin, SH. MM
Dra. Surya Dewi, MM. CHE

ISBN: 978-623-94120-2-9

Editor:

Muhammad Zainuddin Badollahi

Tata Letak/Desain Cover:

Ahmad Suthami Putra

Penerbit:

Politeknik Pariwisata Makassar

Redaksi:

Jl. Gunung Rinjani, Metro Tanjung Bunga Kota Mandiri
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90224
Telp/Fax +62411 838456
Email: email@poltekiparmakassar.ac.id

Cetakan Pertama, Juni 2020

Hak Penerbitan © 2020 Politeknik Pariwisata Makassar

Dilarang mengutip dan memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun, baik cetak photoprint, microfilm tanpa ijin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kabupaten Soppeng sebagai salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan bertekad menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan perekonomian daerah serta menjadi media pelestarian alam dan budaya sekaligus memperkenalkan potensi keindahan alam, letak strategis, kemudahan akses, keramahan penduduk serta sistem nilai masyarakat yang ramah dan religius

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng pada tahun 2018 bekerjasama dengan Politeknik Pariwisata Makassar telah melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Soppeng sebagai salah satu strategi pengembangan kepariwisataan yang menghasilkan arahan kebijakan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Soppeng dengan fokus pada potensi wisata bahari, budaya dan minat khusus sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan survey, diskusi kelompok terfokus dan serangkaian pembahasan bersama *stakeholders* kepariwisataan Kabupaten Soppeng telah dilakukan untuk menyepakati dan menyempurnakan RIPPARKAB sebagai dokumen publik yang dijadikan pedoman dan rujukan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat dalam mengembangkan kepariwisataan Daerah Kabupaten Soppeng.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga RIPPARKAB ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT menjadikan ibadah untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Juni 2020

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB - 1	
PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran	4
1.3. Keluaran	6
1.4. Ruang Lingkup.....	6
1.5. Metodologi	9
1.6. Jangka Waktu Perencanaan	17
1.7. Sistematika Pelaporan	18
BAB - 2	
KEPARIWISATAAN KABUPATEN SOPPENG	
2.1. Kepariwisata Kabupaten Soppeng Dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Nasional	20
2.2. Kepariwisata Kab. Soppeng Dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Prov. Sulsel.....	24
2.3. Kepariwisata Dalam Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten Soppeng	34
BAB - 3	
KONDISI WILAYAH KABUPATEN SOPPENG	
3.1. Sejarah Kabupaten Soppeng	39
3.2. Logo Kabupaten Soppeng	42
3.3. Kondisi Fisik Kabupaten Soppeng	44
3.4. Potensi Pariwisata Kabupaten Soppeng	46
3.5. Perekonomian Kabupaten Soppeng.....	52
BAB - 4	
KABUPATEN SOPPENG SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA	
4.1. Daya Tarik dan Sumber Daya Wisata Kab. Soppeng	59
4.2. Fasilitas Pariwisata Kabupaten Soppeng	102
4.3. Aksesibilitas Pendukung Pariwisata Kab. Soppeng.....	106

BAB - 5

INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG

- | | |
|----------------------------------------------------------|-----|
| 5.1. Usaha Pariwisata Kab. Soppeng..... | 108 |
| 5.2. Usaha Kecil dan Menengah Pendukung Pariwisata | 117 |

BAB - 6

PASAR DAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG

- | | |
|------------------------------------------------------------|-----|
| 6.1. Perkembangan Wisatawan Kabupaten Soppeng | 118 |
| 6.2. Karakteristik Pasar Wisatawan Kabupaten Soppeng | 128 |
| 6.3. Pemasaran Pariwisata Kabupaten Soppeng | 133 |

BAB - 7

KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SOPPENG

- | | |
|---------------------------------------------------|-----|
| 7.1. Unsur Akademisi (<i>Academician</i>) | 138 |
| 7.2. Unsur Birokrasi (<i>Government</i>)..... | 139 |
| 7.3. Unsur Masyarakat (<i>Community</i>)..... | 140 |
| 7.4. Unsur Pengusaha (<i>Business</i>)..... | 141 |
| 7.5. Unsur Media (<i>Media</i>)..... | 142 |

BAB - 8

PRINSIP DAN KONSEP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SOPPENG

- | | |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| 8.1 Tantangan dan Isu Strategis Pembangunan Kepariwisata | 144 |
| 8.2 Prinsip Pembangunan Kepariwisata..... | 147 |
| 8.3 Konsep Pembangunan Kepariwisata | 147 |
| 8.4 Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Kepariwisata | 153 |

BAB - 9

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SOPPENG

- | | |
|--------------------------------------------------------|-----|
| 9.1 Kebijakan Pembangunan Kepariwisata | 158 |
| 9.2 Strategi Pembangunan Kepariwisata | 159 |
| 9.3 Sistem Jaringan Prasarana Utama..... | 163 |
| 9.4 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya..... | 163 |
| 9.5 Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng | 168 |
| 9.6 Kawasan Strategis Kabupaten Soppeng | 177 |

BAB - 10

RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG

- | | |
|----------------------------------------------------------|-----|
| 10.1 Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) | 179 |
| 10.2 Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) | 181 |
| 10.3 Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) | 192 |

BAB - 11

PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SOPPENG

11.1	Arahan dan Strategi Dalam Aspek Tata Ruang.....	205
11.2	Arahan dan Strategi Pengembangan Produk Wisata	213
11.3	Arahan dan Strategi Pengembangan Industri dan Investasi	219
11.4	Arahan dan Strategi Pengembangan Pasar dan Pemasaran	224
11.5	Arahan dan Strategi Pengelolaan Lingkungan	228
11.6	Arahan dan Strategi Pengelolaan Kelembagaan dan SDM	230
	Daftar Pustaka.....	266
	Identitas Penulis	270

DAFTAR TABEL

NO.	TABEL	JUDUL TABEL	HALAMAN
1.	1.1	Bagan Kerangka Penyusunan Ripparkab Kabupaten Soppeng	1 – 14
2.	2.1	Perwilayahan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Kota Makassar Dan Sekitarnya Dalam RPPARDA Provinsi Sulawesi Selatan	2 - 20
3.	3.1	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng 2017	3 – 14
4.	3.2	Potensi Wisata Alam Kabupaten Soppeng Tahun 2018	3 – 16
5.	3.3	Potensi Wisata Sejarah dan Budaya Kabupaten Soppeng Tahun 2018	3 – 17
6.	3.4	Potensi Wisata Buatan Manusia dan Minat Khusus Kabupaten Soppeng Tahun 2018	3 – 22
7.	3.5	Distribusi Prosentae PDRB Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 – 2017	3 – 25
8.	3.6	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Soppeng Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2017	3 – 27
9.	3.7	PDRB Dan PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2017	3 – 33
10.	4.1	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan Di Kabupaten Soppeng Tahun 2017	4 – 77
11.	4.2	Data Jalan Menurut Kondisi Jalan Di Kabupaten Soppeng Tahun 2016	4 – 78
12.	4.3	Jumlah Langganan Menurut Jenis Tarif, KWH Terjual di PLN Kabupaten Soppeng Tahun 2017	4 – 78
13.	4.4	Jumlah Pelanggan dan Air Minum Yang Disalurkan Oleh PAM Kabupaten Soppeng Menurut Segmentasi Tahun 2017	4 – 79
14.	4.5	Banyaknya Sambungan Induk Telepon Menurut Segmen Pelanggan dan Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2017	4 – 81
15.	4.6	Jumlah Bank, Koperasi dan Lembaga Keuangan di Kabupaten Soppeng Tahun 2018	4 – 82
16.	4.7	Jumlah Bus dan Angkutan Umum Lainnya di Kabupaten Soppeng Tahun 2017	4 – 85

NO.	TABEL	JUDUL TABEL	HALAMAN
17.	4.8	Banyaknya Kunjungan Kapal Dan Jumlah/ Isi Kotor Menurut Bulan di Pelabuhan Soppeng Tahun 2017	4 – 64
18.	5.1	Jumlah Hotel, Kamar dan Tempat Tidur di Kabupaten Soppeng Tahun 2017	5 – 7
19.	5.2	Hotel, Jumlah Kamar, Tempat Tidur pada Hotel di Kabupaten Soppeng Tahun 2017	5 – 8
20.	5.3	Tingkat Penghunian Kamar Hotel di Kabupaten Soppeng Tahun 2017	5 – 9
21.	5.4	Jumlah Tamu Menginap dan Pemakaian Tempat Tidur Pada Hotel di Kabupaten Soppeng Tahun 2017	5 – 11
22.	5.5	Jumlah Restoran/ Cafe di Kabupaten Soppeng Tahun 2013- 2017	5 – 14
23	5.6	Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata di Kabupaten Soppeng Tahun 2017	5 – 17
24	5.7	Usaha Salon dan Spa di Kabupaten Soppeng Tahun 2017	5 – 18
25	10.1	Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Marioriawa Dan Sekitarnya	10 – 24
26	10.2	Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Donri-Donri Dan Sekitarnya	10 – 26
27	10.3	Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Lilirilau Dan Sekitarnya	10 – 28
28	10.4	Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Ganra Dan Sekitarnya	10 – 30
29	10.5	Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Lalabata Dan Sekitarnya	10 – 32
30	10.6	Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Marioriwawo Dan Sekitarnya	10 – 35
31	10.7	Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Citta Dan Sekitarnya	10 – 37
32	10.8	Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Liliriaja Dan Sekitarnya	10 – 38

DAFTAR GAMBAR

NO.	NO. GAMBAR	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
1	1.1	Pendekatan Pengembangan Berkelanjutan	1 - 21
2	1.2	Pengembangan Berbasis Masyarakat	1 – 23
3	1.3	Pendekatan Kesesuaian Antara Aspek Produk dan Pasar	1 – 24
4	1.4	Konsep Klaster Destinasi Pariwisata	1 – 27
5	1.5	Jangka Waktu RIPPARKAB Kabupaten Soppeng	1 – 31
6	2.1	Sistem Kepariwisata Nasional (Tatanan Makro)	2 – 5
7	2.2	Peta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Taka Bonerate dan Sekitarnya	2 – 9
8	2.3	Peta Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Wajo dan Sekitarnya	2 – 19
9	3.1	Logo Kabupaten Soppeng	3 – 8
10	3.2	Peta Wilayah Administratif Kabupaten Soppeng	3 – 13
11	4.1	Kawasan TWA Lejja	4 – 3
12	4.2	Kawasan TWA Danau Tempe	4 – 5
13	4.3	Kawasan TWA Citta	4 – 7
14	4.4	Gua Coddong	4 – 8
15	4.5	Kawasan TWA Lereng Hijau Buludua	4 – 9
16	4.6	Kawasan Taman Kalong	4 – 10
17	4.7	Pengolahan Kerajinan Sutera	4 – 11
18	4.8	Kawasan <i>Adventure Park</i> Gattareng Toa	4 – 12
19	4.9	Kawasan Mattabulu	4 – 13
20	4.10	Puncak Biccuing	4 – 14
21	4.11	AppejengngE	4 – 15

NO.	NO. GAMBAR	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
22	4.12	Air Terjun Sarasa Tanre	4 – 17
23	4.13	Air Terjun Lapasarengi	4 – 18
24	4.14	Air Terjun Batu Murue	4 – 20
25	4.15	Air Terjun Lamelle Tempoe	4 – 21
26	4.16	Air Terjun Luppereng Kajoe	4 – 22
27	4.17	Air Terjun Laposo	4 – 23
28	4.18	Puncak Sewo	4 – 24
29	4.19	Prosesi Perkawinan Masyarakat Soppeng	4 – 26
30	4.20	Tari Pattennung	4 – 27
31	4.21	Villa Yuliana	4 – 30
32	4.22	Kompleks Makam Jera LompoE	4 – 34
33	4.23	Kompleks Istana Datu Soppeng	4 – 35
34	4.24	Kompleks Makam Tuan Uddungeng	4 – 37
35	4.25	Makam Petta Bulu Matanre	4 – 39
36	4.26	Sketsa Gambar Pada Situs Lawo	4 – 41
37	4.27	Sketsa Gambar Pada Situs Tinco	4 – 43
38	4.28	Lumpang Batu Pada Situs Megalitik Sewo	4 – 46
39	4.29	Umpungeng	4 – 49
40	4.30	Patung Bunda Maria Pieta	4 – 50
41	4.31	Menhir Latemmamala (LamumpatuE)	4 – 55
42	4.32	Museum Calio	4 – 71
43	4.33	Permandian Ompo	4 – 74
44	4.34	Sao Mario	4 – 75

NO.	NO. GAMBAR	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
45	6.1	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Total Pengeluaran Tahun 2010-2017	6– 4
46	6.2	Distribusi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi Asal Tahun 2017	6– 6
47	6.3	Distribusi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi Tujuan Tahun 2017	6– 7
48	6.4	Distribusi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Aktivitas Wisata Yang Dilakukan Tahun 2017	6– 9
49	6.5	Distribusi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Akomodasi Yang Digunakan Tahun 2016-2017	6– 10
50	6.6	Distribusi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Maksud Kunjungan Tahun 2016-2017	6– 12
51	6.7	Rata-Rata Lama Bepergian Wisatawan Nusantara Tahun 2016-2017	6– 13
52	6.8	Rata-Rata Pengeluaran Per Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2016-2017	6– 16
53	6.9	Matriks Mc. Kinsey	6– 31
54	6.10	Prinsip dan Langkah Strategik Pengembangan Daya Saing Pariwisata	6– 38
55	10.1	Peta Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Kabupaten Soppeng	10– 4
56	10.2	Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Utara	10– 7
57	10.3	Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Timur	10– 11
58	10.4	Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Barat	10– 14
59	10.5	Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Selatan	10– 18
60	10.6	Peta Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Kabupaten Soppeng	10– 22

BAB - 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sinkronisasi sektor-sektor pembangunan merupakan modal dasar bagi tercapainya pembangunan pariwisata yang terpadu baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Pembangunan pariwisata terpadu (*integrated tourism development*) terkait erat dengan berbagai sektor dan aspek yang tidak terlepas dari pola dan sistem perencanaan pembangunan daerah.

Dalam upaya memaksimalkan keterkaitan antar sektor pembangunan tersebut, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata merupakan salah satu jawaban yang dapat mengakomodasi konstelasi tersebut, serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan sesuai dengan perubahan kondisi saat ini.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata diperlukan untuk; menghindari pembangunan yang bersifat sektoral, tumpang tindih atau terbengkalai karena saling mengharap; menghindari pembangunan pariwisata yang tidak terencana (bongkar pasang); dan meminimalisasi dampak negatif pariwisata yang mungkin timbul dan memaksimalkan dampak positif pariwisata.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Soppeng dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pariwisata sekaligus memberikan arah pengembangan yang jelas di dalam memposisikan kepariwisataan Kabupaten Soppeng pada tingkat provinsi maupun nasional dan yang tidak kalah pentingnya agar dapat bersinergi secara positif, dan menghindarkan benturan antar daerah.

Selain itu, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Soppeng dapat memberikan tatanan yang jelas dalam pelaksanaan pengembangan kepariwisataan di lapangan, termasuk dalam mekanisme kerjasama antar berbagai pihak yang terkait : siapa berbuat apa, baik untuk instansi tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten, dan kaitan antar sektor.

Pengembangan pariwisata Kabupaten Soppeng sebagai daerah tujuan wisata yang diunggulkan sebagai destinasi unggulan Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlepas dari kepopuleran alam dan potensi budaya yang cukup dikenal sehingga dalam pengembangannya tentu membutuhkan adanya suatu perhatian khusus dari para *stakeholders* untuk saling berinteraksi dan bersinergi satu sama lainnya.

Dalam *Road Map* dan Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional yang memposisikan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Destinasi Unggulan di luar Jawa-Bali sekaligus menempatkan Kabupaten Soppeng sebagai Destinasi Pariwisata Daerah (DPD)

Kawasan Selatan dalam pengembangan destinasi unggulan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pelibatan berbagai sektor dalam pengembangan pariwisata menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar mengingat pembangunan pariwisata tidak dapat berdiri sendiri dan bersinggungan dengan sektor-sektor pembangunan lainnya, seperti penyediaan jaringan listrik, penyediaan jalan, penyediaan air bersih dan penyediaan sarana telekomunikasi.

Di samping hal hal tersebut di atas, juga dipertimbangkan perubahan paradigma pembangunan yang sebelumnya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi menjadi pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dengan menyerasikan dengan sumber daya manusia dalam pembangunan. Dari konsep ini dapat disimpulkan :

- Pertama : Proses pembangunan berlangsung secara berlanjut ditopang oleh sumber daya alam, kualitas lingkungan dan manusia yang berkembang secara berkelanjutan.
- Kedua : Sumber daya alam terutama udara, air dan tanah memiliki ambang batas yang penggunaannya akan menciutkan kuantitas dan kualitas yang berakibat berkurangnya kemampuan lingkungan menopang pembangunan secara berkelanjutan dan akan menimbulkan gangguan pada keserasian sumber daya alam dengan sumber daya manusia.
- Ketiga : Kualitas lingkungan berkorelasi langsung dengan kualitas hidup, semakin baik mutu kualitas lingkungan, semakin positif pengaruhnya pada kualitas hidup, yang antara lain tercermin pada meningkatnya harapan usia hidup dan turunnya tingkat kematian.
- Keempat : Pola pembangunan sumber daya alam yang baik tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan pilihan lain di masa depan dalam penggunaan sumber daya alam.
- Kelima : Pembangunan ini memungkinkan generasi sekarang meningkat kesejahteraannya tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi mendatang.

Khusus mengenai pembangunan kepariwisataan berkelanjutan sekurang kurangnya harus berbasis pada enam hal yaitu :

1. Kehati-hatian dalam menggunakan sumber daya alam sampai pada batas daya dukung lingkungan;
2. Pengambilan keputusan *bottom-up* dengan mengikut sertakan berbagai *stakeholders*;
3. Menghapus kemiskinan, isu gender dan tetap menghormati hak asasi manusia;
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
5. Pelestarian keanekaragaman hayati dan sistem perlindungan kehidupan; dan
6. Pelestarian pengetahuan dan cara hidup lokal dengan tetap menghargai perbedaan.

beberapa akibat negatif yang dapat ditimbulkan apabila daerah tidak memiliki RIPPARKAB atau memiliki RIPPARKAB yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dalam pengembangan kepariwisataan antara lain adalah :

1. Pembangunan kepariwisataan tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga tidak ada kepastian dalam pembangunan kepariwisataan. Kepastian hukum ini sangat penting terutama bagi investor yang akan menanamkan modalnya pada bidang kepariwisataan di daerah. Investor sangat penting dalam pembangunan kepariwisataan mengingat kemampuan pemerintah terutama dalam bidang pembiayaan masih relatif sangat kurang. Investor sangat membutuhkan kepastian hukum karena dengan demikian akan menjamin bahwa investasi yang telah ditanamkan akan kembali dan selanjutnya akan memberi keuntungan.
2. Pembangunan kepariwisataan tidak berkelanjutan. Pembangunan kepariwisataan tidaklah mungkin dilakukan sekaligus sebab kepariwisataan merupakan fenomena yang terus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, disamping itu pembangunan kepariwisataan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga pembangunan kepariwisataan dilakukan secara bertahap. Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan kepariwisataan, dibutuhkan perencanaan yang matang. Pembangunan kepariwisataan yang dilakukan tanpa perencanaan yang matang akan terkesan bongkar pasang atau kemungkinan terjadi bila pemerintahan di daerah itu berganti maka berubah pula kebijakan pembangunan kepariwisataan. Artinya apa yang telah dibangun oleh pemerintahan daerah sebelumnya dapat saja dibongkar oleh pemerintahan daerah berikutnya. Bila suatu daerah telah memiliki RIPPARKAB yang baik hal ini dapat dihindari sebab walaupun pemerintahannya berganti namun pembangunan kepariwisataan akan dapat terus berlanjut berdasarkan RIPPARKAB yang telah ada.
3. Pembangunan kepariwisataan yang tidak terarah, hal ini dapat terjadi karena tidak adanya pedoman yang jelas dalam pembangunan kepariwisataan. RIPPARKAB tingkat kabupaten/ kota disusun berdasarkan RIPPARKAB tingkat provinsi dan RIPPARKAB tingkat provinsi disusun berdasarkan RIPPARKAB nasional dengan demikian pembangunan kepariwisataan secara nasional akan terarah, karena RIPPARKAB itu disusun secara hirarki, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara pembangunan kepariwisataan yang satu dengan yang lainnya.
4. Pembangunan kepariwisataan tidak terkoordinir dengan baik. Kepariwisataan merupakan pembangunan multi sektoral dan multi dimensional artinya pembangunan kepariwisataan tidak dapat berdiri sendiri melainkan melibatkan banyak sektor dan bidang oleh karena itu dibutuhkan koordinasi tingkat tinggi dalam pelaksanaan pembangunannya. Dengan adanya RIPPARKAB yang baik, sehingga ada dua hal yang dapat dihindari berkenaan dengan koordinasi yaitu pertama : terjadi saling mengaharapkan antara sektor atau bidang sehingga dapat menyebabkan pembangunan kepariwisataan justru terbengkalai (tidak terlaksana) dan yang kedua adalah antara satu sektor atau bidang melaksanakan pembangunan kepariwisataan yang

berbeda (tumpang tindih) sehingga justru menyebabkan pembangunan kepariwisataan yang tidak efisien dan efektif. Dalam RIPPARKAB yang baik, telah terdapat perencanaan yang matang termasuk keterlibatan sektor-sektor dan bidang-bidang yang terkait sehingga tiap sektor atau bidang sudah jelas apa yang harus dilakukan untuk pembangunan kepariwisataan itu.

Secara umum perencanaan pariwisata diperlukan dengan berbagai alasan di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Pariwisata modern merupakan suatu kegiatan yang relatif baru bagi sebagian besar daerah, dan umumnya tidak memiliki pengalaman untuk mengembangkan dengan baik dan tepat. Sebuah rencana induk yang menyeluruh dan terpadu dapat memberikan arahan kepada daerah untuk melakukan langkah-langkah pengembangan.
2. Pariwisata adalah sangat kompleks, multi-sektor dan melibatkan berbagai kegiatan seperti pertanian, kehutanan, industri, perikanan, kelautan, komponen rekreasi dan lain-lain. Perencanaan pariwisata mengorganisasi komponen-komponen tersebut sehingga dalam pengembangan yang dilakukan dapat terintegrasi dengan baik, bukan sebagai bagian yang terpisah atau parsial.
3. Pariwisata akan menimbulkan dampak ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga membutuhkan perencanaan yang terintegrasi.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

a. Maksud Penyusunan Ripparkab

Adapun maksud dari penyusunan RIPPARKAB Kabupaten Soppeng antara lain adalah sebagai berikut :

1. Visi, misi dan kebijakan pemerintah kabupaten Soppeng merupakan pedoman bagi seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan sehingga agar dapat sejalan dengan visi, misi dan kebijakan daerah, maka perlu menyusun RIPPARKAB.
2. Untuk mewujudkan keselarasan pembangunan, termasuk pembangunan kepariwisataan daerah kabupaten Soppeng, dibutuhkan penyesuaian dengan Ripparnas dan Ripparda provinsi Sulawesi Selatan.
3. Perubahan data potensi Kabupaten Soppeng. Perubahan perubahan tersebut antara lain :
 - a. Perubahan demografi dan pemerintahan
 - b. Perubahan objek dan daya tarik wisata potensial dan yang telah dikembangkan
 - c. Perubahan aksesibilitas dari dan menuju ke Kabupaten Soppeng dan khususnya dari dan menuju ke objek dan daya tarik wisata yang dimiliki.

- d. Perubahan usaha pariwisata yang telah dimiliki baik hotel (penginapan) maupun restoran (rumah makan) serta usaha pariwisata lainnya
 - e. Perubahan amenities atau fasilitas penunjang lainnya seperti Pos dan Telekomunikasi, Air bersih, Listrik, Bank, Sarana kesehatan, Pendidikan, Pos keamanan dan lain lain.
4. Analisa data yang digunakan dalam penyusunan RIPPARKAB ini yaitu dengan menggunakan 3 (tiga) teknik analisis yaitu analisa SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada, analisa *Point Rating System* yaitu dipergunakan untuk menentukan urutan prioritas pengembangan pembangunan pariwisata dan analisis tata ruang yaitu analisis yang digunakan untuk menentukan kawasan wisata unggulan.
 5. Penentuan kawasan wisata unggulan yang penting dilakukan untuk menentukan kawasan-kawasan yang menjadi unggulan pariwisata Kabupaten Soppeng.
 6. Penentuan sasaran pengembangan yang dilakukan agar pembangunan pariwisata mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas.
 7. Kebijakan, strategi dan indikasi pengembangan dibuat secara lebih mendalam dan terinci sehingga lebih mudah untuk dilaksanakan.

b. Tujuan Penyusunan Ripparkab

Tujuan penyusunan RIPPARKAB dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Tujuan umum adalah tujuan yang memuat tujuan pengembangan pariwisata daerah dikaitkan dengan visi dan misi serta kebijakan pemerintah daerah. Tujuan pengembangan pariwisata daerah secara umum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian daerah, serta pelestarian budaya dan lingkungan alam daerah.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus adalah tujuan yang ingin dicapai dengan menyusun RIPPARKAB sebagai berikut :

- a) Menyusun RIPPARKAB Kabupaten Soppeng tahun 2018-2033.
- b) Mewujudkan rencana pengembangan pariwisata yang berkualitas, serasi dan optimal sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah
- c) Mewujudkan kesesuaian antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung lingkungan, melalui pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan

- d) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai faktor pendukung utama pembangunan kepariwisataan.
- e) Mencapai keseimbangan pembangunan antar sektor dan antar wilayah
- f) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Sasaran Penyusunan Ripparkab

Sasaran dari kegiatan pengembangan pariwisata daerah secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tersusunnya konsep pengembangan kepariwisataan Kabupaten Soppeng yang dilandasi pendekatan perencanaan pariwisata dan isu-isu strategis yang terkait dengan sektor-sektor pembangunan lainnya.
2. Teridentifikasinya prioritas pengembangan daya tarik wisata yang dapat diunggulkan dan atau diandalkan di Kabupaten Soppeng.
3. Tersusunnya arahan kebijakan pengembangan pariwisata, strategi pengembangan pariwisata, dan indikasi program pengembangan pariwisata Kabupaten Soppeng.

1.3 Keluaran

Keluaran dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Soppeng ini adalah dokumen acuan dalam pengembangan potensi pariwisata sehingga pembangunan kepariwisataan Kabupaten Soppeng menjadi lebih terarah dan terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan serta kepariwisataan nasional, serta menjadi acuan dari sektor pendukung lainnya dalam meningkatkan sinergitas pembangunan daerah.

1.4 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup kajian dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Soppeng ini terdiri atas lingkup wilayah studi, lingkup materi, dan lingkup kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

1.4.1 Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah studi dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Soppeng adalah pada seluruh wilayah administratif Kabupaten Soppeng dengan luas wilayah tercatat 1.500 km² yang tersebar pada 8 (delapan) wilayah kecamatan, dengan jumlah 21 Kelurahan dan 49 desa, sebagai berikut :

- a. Kecamatan Mario Riawa;
- b. Kecamatan Donri-Donri;
- c. Kecamatan Ganra;
- d. Kecamatan Lili Rilau;

- e. Kecamatan Lili Riaja;
- f. Kecamatan Citta; dan
- g. Kecamatan Mario Riwawo;

1.4.2 Lingkup Materi

Lingkup materi dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

1. Gambaran dan kajian terhadap sumber daya pariwisata dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pariwisata Kabupaten Soppeng, yang mencakup aspek;
 - a. Aspek Pemasaran,
 - b. Aspek Pengembangan Produk Wisata,
 - c. Aspek Pemanfaatan Ruang untuk Pengembangan Pariwisata,
 - d. Aspek Pengelolaan Lingkungan,
 - e. Aspek Pengembangan Sumber Daya Manusia,
 - f. Aspek Pemberdayaan Masyarakat,
 - g. Aspek Investasi.
2. Pengkajian terhadap prospek pengembangan dan pemanfaatan sumber daya yang ada termasuk di dalamnya aspek kelembagaan dan sumber daya manusia.
3. Perumusan rencana pengembangan pariwisata bergantung pada sasaran pengembangan pariwisata yang akan dicapai, sumber daya yang dimiliki, serta kebijakan daerah.
4. Perumusan kebijakan pengembangan pariwisata, strategi pengembangan pariwisata dan indikasi program pengembangan pariwisata.

1.4.3 Lingkup Kegiatan

Agar penyusunan RIPPARKAB ini dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif, maka lingkup kegiatan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

TABEL 1.1
BAGAN KERANGKA PENYUSUNAN RIPPARKAB
KABUPATEN SOPPENG

NO	KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT	INDIKATOR
1	Pengumpulan data	Mengungkapkan potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi oleh kegiatan kepariwisataan sebagai suatu sektor kegiatan ekonomi, maupun sebagai bagian	Gambaran potensi dan permasalahan pengembangan pariwisata	Kebijakan Pembangunan Karakteristik daerah Ketersediaan produk wisata Aspek Pasar

Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Soppeng 2018-2033

		kegiatan pengembangan wilayah		
2	Analisis	Menilai keadaan masa kini, menilai kecenderungan perkembangan, menghitung kapasitas pengembangan, memperkirakan kebutuhan masa datang	Teridentifikasi prospek pengembangan dan pemanfaatan potensi	Kebijakan pembangunan wilayah, ketersediaan produk wisata & penunjang pasar dan proyeksi wisatawan, pola kunjungan wisatawan makro
3	Perumusan Sasaran Pembangunan Pariwisata	Menentukan sasaran jangka panjang 10-15 tahun Menentukan sasaran jangka pendek 5 tahun (merupakan bagian integral dari sasaran jangka panjang)	Sasaran Jangka Panjang Sasaran jangka pendek	Jumlah Kunjungan Wisatawan Aspek Ekonomi Aspek Sosial Budaya Aspek fisik/ lingkungan Hidup
4	Perumusan Rencana Pengembangan	Menyusun rencana pengembangan berdasarkan sasaran yg telah ditetapkan	Rencana pengembangan	Intensitas pemda Tingkat/ kecepatan pertumbuhan pariwisata Jangka waktu penyusunan rencana
5	Perumusan Kebijakan Pengembangan	Memberikan jawaban atas permasalahan/ isu-isu strategis yang dihadapi Menetapkan arahan, sebagai landasan bagi perumusan langkah- langkah pengembangan operanasional	Kebijakan pengembangan yang meliputi kebijakan pemasaran, pengembangan produk, pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan pengembangan SDM, pemberdayaan masyarakat & kebijakan investasi	Program Pemasaran Produk wisata Pengelolaan SDM Masyarakat

6	Perumusan Strategi Pengembangan	Menjelaskan langkah-langkah dasar yang akan dilakukan oleh daerah, sebagai penjabaran dari kebijakan dan arahan pengembangan	Strategi Pengembangan produk Strategi pemasaran	Perbedaan karakteristik daerah Pendekatan perencanaan yang berbeda Pengembangan ODTW Pengembangan sarana pariwisata Pengembangan aksesibilitas & infrastruktur Pengembangan Pasar Promosi Positioning Masyarakat
7	Indikasi Program Pengembangan	Menjabarkan secara rinci dari setiap strategi kedalam program yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu	Program jangka panjang Program jangka pendek	Program utama Program Pendukung

1.5 Metodologi

1.5.1 Kerangka Pendekatan

Dalam pengembangan kepariwisataan, destinasi pariwisata merupakan unsur vital sekaligus penggerak utama bagi wisatawan dalam memutuskan perjalanan dan kunjungan ke suatu daerah atau negara. Destinasi pariwisata yang dibentuk oleh serangkaian komponen produk wisata, wilayah dan citra atau karakteristik atraksi menjadi fokus penting dalam pengembangan kepariwisataan, khususnya dalam mengembangkan keunggulan banding (*Comparative Advantages*) dan keunggulan saing (*Competitive Advantages*) dalam berkompetisi untuk menarik pasar wisatawan regional maupun internasional.

Pemahaman terhadap Destinasi Pariwisata yang operasional perlu dijabarkan dalam pendekatan perencanaan pariwisata mengingat terdapat banyak rujukan yang dapat digunakan oleh karena itu definisi di bawah ini dijadikan dasar dalam perencanaan pengembangan pariwisata, sebagai berikut

Destinasi pariwisata merupakan gabungan komponen produk wisata (atraksi, amenities dan akses) yang menawarkan pengalaman utuh/ terpadu bagi konsumen atau wisatawan. Secara Tradisional, destinasi sering dikaitkan dengan suatu area dengan batasan geografis yang jelas, misalnya negara, pulau atau sebuah kota (Hall, 2000, Davidson and Maitland, 1997).

Lebih lanjut, dalam kerangka pengembangannya, Kelly & Nankervis (2001) menegaskan bahwa pengembangan destinasi pariwisata minimal mencakup lima komponen utama, yaitu ;

1. **Atraksi** (*attractions*) yang mencakup alam, budaya, buatan (*artificial*), *event* dan sebagainya.
2. **Aksesibilitas** (*accessibility*) yang mencakup dukungan sistem transportasi meliputi rute atau jalur transportasi, fasilitas terminal, bandara, pelabuhan dan moda transportasi.
3. **Amenitas** (*amenities*) yang mencakup fasilitas pendukung yang meliputi ketersediaan air bersih, listrik, telekomunikasi, pembuangan limbah, Bank, pemadam kebakaran, keamanan, Rumah sakit dan sebagainya. Dan fasilitas penunjang yang meliputi retail, toko cinderamata, fasilitas penukaran uang, biro perjalanan, pusat informasi pariwisata dan sebagainya.
4. **Akomodasi** (*accommodation*) yang mencakup ketersediaan sarana penginapan berupa hotel, pondok wisata, wisma dan sebagainya.
5. **Aktifitas** (*activities*) yang mencakup keseluruhan kegiatan yang dapat dilakukan di destinasi yang dapat diikuti atau dilakukan oleh wisatawan dalam kunjungannya ke lokasi tersebut.

Destinasi pariwisata dalam hal ini tidak hanya merupakan sekumpulan daya tarik wisata dengan suatu tema dominan, namun lebih dari itu adalah keterkaitan objek dengan unsur-unsur pendukung seperti amenitas, aksesibilitas dan unsur penunjang lain yang bekerja secara sinergis dalam suatu kesatuan sistem yang saling menunjang.

Berdasarkan tren, indikator dan motivasi wisatawan, World Tourism Organization (2004) Mengklasifikasikan bahwa destinasi pariwisata terdiri dari 17 jenis, yaitu :

1. Kawasan Perairan/Bahari (*coastal zone*)
2. Kawasan Pantai (*beach destination and sites*)
3. Gugusan Kepulauan (*small island*)
4. Kawasan Gurun (*destination in desert and arid areas*)
5. Kawasan Pegunungan (*mountain destination*)
6. Kawasan Taman Nasional (*natural and sensitive ecological areas*)
7. Kawasan Ekowisata (*ecotourism destinations*)
8. Kawasan Cagar Alam (*park and protected areas*)
9. Komunitas disekitar Kawasan Lindung/Konservasi (*communities within or adjacent to protected area*)
10. Jalur atau Rute Perjalanan (*trail and routes*)
11. Situs Peninggalan Sejarah (*built heritages sites*)
12. Kawasan Pemukiman Tradisional (*small and traditional communities*)
13. Kawasan Wisata Kota (*urban tourism*)
14. Pusat Kegiatan MICE dan Konvensi (*MICE and convention centre*)
15. Kawasan Taman Bertema (*theme park*)
16. Kawasan Taman Air (*water park*)

17. Kapal Pesiar dan Simpul-simpul perjalanannya (*cruise ship and their destinations*)

Selain itu perencanaan pariwisata dilakukan dengan pendekatan yang berkelanjutan, berorientasi sistem, komprehensif, terintegrasi dan memperhatikan lingkungan dengan fokus untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat.

Pendekatan perencanaan pariwisata yang dilakukan secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Soppeng mengacu pada konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*). Hal ini dilakukan karena di dalamnya terkandung makna pengembangan pariwisata yang tanggap terhadap kebutuhan wisatawan dan masyarakat setempat dengan tetap menekankan upaya perlindungan dan pengelolaannya yang berorientasi jangka panjang. Konsep pengembangan pariwisata secara berkelanjutan pada intinya menekankan 4 (empat) prinsip, yaitu :

a. Layak secara ekonomi (*economically viable*).

Bahwa proses pembangunan harus layak secara ekonomi dan efisien untuk dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pembangunan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

b. Berwawasan lingkungan (*enviromental viable*).

Bahwa proses pembangunan harus tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan (alam maupun budaya) dan menghindari dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan serta mengganggu keseimbangan ekologi.

c. Diterima secara sosial (*socially acceptance*).

Bahwa proses pembangunan dapat diterima secara sosial dan memperhatikan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai yang ada di masyarakat serta tidak merusak tatanan dan nilai-nilai budaya yang mendasar dimasyarakat.

d. Dapat diterapkan secara teknologis (*technologically appropriate*).

Bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan secara teknis dapat diterapkan, efisien dan memanfaatkan sumber daya lokal dan dapat diadopsi masyarakat setempat secara mudah untuk proses pengelolaan yang berorientasi jangka panjang.

Secara skematis konsep tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

GAMBAR 1.1
PENDEKATAN PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN



Sumber : Blue Print Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2006

Pendekatan perencanaan pembangunan berkelanjutan, secara rinci dijabarkan sebagai berikut ;

- 1) Prinsip pembangunan yang berpijak pada aspek pelestarian dan berorientasi jangka panjang.
- 2) Penekanan pada nilai manfaat bagi masyarakat lokal.
- 3) Prinsip pengelolaan aset sumber daya yang lestari.
- 4) Kesesuaian antara kegiatan pengembangan dengan skala, kondisi dan karakter daerah.
- 5) Keselarasan yang sinergis antara kebutuhan pengembangan, lingkungan hidup dan masyarakat lokal.
- 6) Antisipasi yang tepat dan pemantauan terhadap perubahan

2. Pendekatan Pengembangan Berbasis Masyarakat

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Soppeng mengacu pada Konsep Pemberdayaan Masyarakat atau Komunitas Lokal dengan memperhatikan kearifan lokal dan memberdayakan *local genuine*.

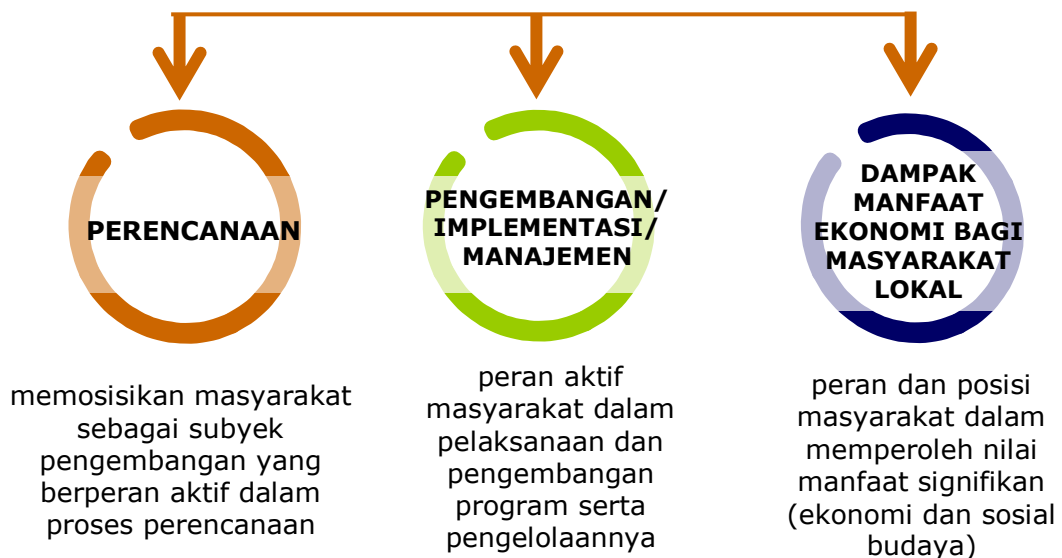
Pendekatan ini menegaskan bahwa pengembangan sumber daya budaya dan pariwisata harus sensitif dan responsif terhadap keberadaan dan kebutuhan komunitas lokal dan bahwa dukungan dari seluruh komunitas amat sangat diperlukan bagi keberhasilan pengembangan dan pengelolaan sumber daya budaya dan pariwisata di tingkat lokal.

Pemberdayaan masyarakat lokal selanjutnya didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- a. Memajukan taraf hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas budaya dan tradisi lokal.
- b. Meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis sekaligus mendistribusikan merata kepada penduduk lokal.
- c. Berorientasi pada pengembangan usaha berskala kecil dan menengah dengan daya serap besar dalam hal tenaga kerja dan berorientasi pada teknologi tepat guna.
- d. Mengembangkan semangat kompetisi sekaligus kooperatif.
- e. Memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai agen penyumbang tradisi budaya dengan dampak seminimal mungkin.

Pendekatan pengembangan berbasis masyarakat bertumpu pada penguatan masyarakat setempat sehingga sejak dalam tahapan perencanaan, pengelolaan hingga pelestarian sumber daya pariwisata pada setiap destinasi yang dikembangkan akan bersinergi dengan kearifan lokal masyarakat disekitar destinasi tersebut. Lebih jelasnya mengenai pendekatan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dapat dilihat pada gambar berikut :

GAMBAR 1.2
PENGEMBANGAN BERBASIS MASYARAKAT
(COMMUNITY BASED DEVELOPMENT)



Sumber : Blue Print Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2006

Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat lebih jauh dalam pembangunan pariwisata diperlukan upaya memberdayakan atau memperkuat posisi masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pengelolaan dan pengendalian pengembangan pariwisata.

3. Pendekatan Kesesuaian Aspek Produk dan Pasar

Perencanaan pengembangan pariwisata pada dasarnya mencari titik temu antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) yang dapat ditampilkan sebagai berikut :

GAMBAR 1.3
PENDEKATAN KESESUAIAN ANTARA ASPEK PRODUK DAN PASAR



didasarkan pada konsep tersebut mengingat kegiatan pariwisata tidak mengenal batas ruang dan wilayah, dan pergerakan wisatawan tidak bisa dibatasi atau dihambat oleh batasan-batasan administratif wilayah atau keharusan-keharusan yang membatasi akses atau pilihan terhadap produk, amenities, aksesibilitas dan sebagainya.

Oleh karena itu pengembangan pariwisata Kabupaten Soppeng harus mempertimbangkan konteks regional dengan membangun semangat kerjasama secara sinergis dengan daerah/kabupaten/ propinsi bahkan negara lain dengan mengaitkan produk-produk yang dikembangkan oleh daerah lain. Jaringan keterpaduan tersebut dapat membentuk daya tarik kolektif yang kuat dan sangat efektif dalam menarik arus kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara.

5. Pendekatan *Cluster*

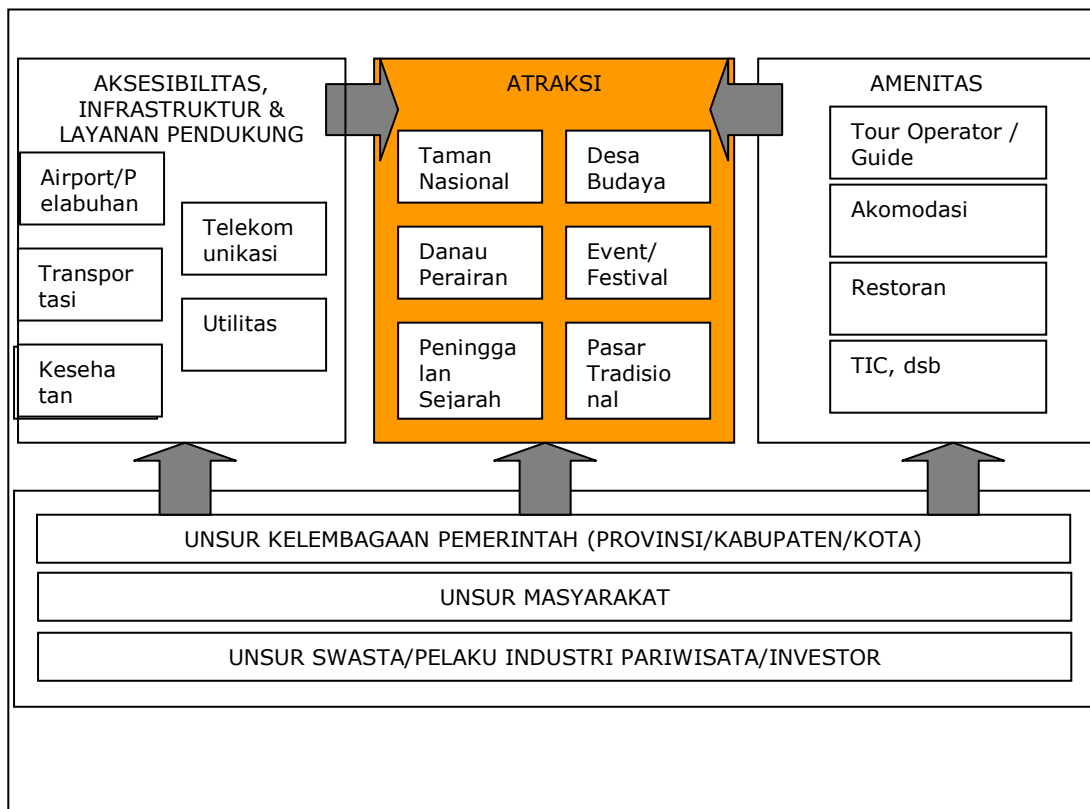
Pendekatan *cluster* banyak diterapkan dalam pengembangan usaha di sektor industri. Pendekatan tersebut menggambarkan sekelompok sektor usaha yang memiliki mata rantai atau keterkaitan fungsi yang saling mendukung dan dikembangkan secara terintegrasi pada suatu lokasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan daya saing usaha yang tinggi.

Pendekatan *cluster* dalam pengembangan destinasi dalam kaitan perencanaan pariwisata berorientasi pada fokus dan penguatan kualitas kinerja hubungan mata rantai usaha yang terkait dan sistem pendukung lainnya sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan daya saing destinasi. Dalam konteks pengembangan pariwisata, komponen *cluster* pariwisata dapat mencakup unsur-unsur;

- a. Atraksi/ daya tarik wisata (alam, budaya, buatan/ khusus)
- b. Amenitas dan infrastruktur pendukung pariwisata (hotel, fasilitas hiburan, fasilitas perbelanjaan, *tour operator* dan maskapai penerbangan, rumah makan dan bar, pemasok produk pariwisata)
- c. Institusi di bidang penyiapan sumber daya manusia, misalnya perguruan tinggi, sekolah tinggi pariwisata, sekolah menengah pariwisata, lembaga pelatihan dan sebagainya.
- d. Kelembagaan di sektor publik di tingkat daerah/lokal.

Komponen *cluster* pariwisata tersebut secara skematis dapat digambarkan konfigurasi dan keterkaitannya sebagai berikut :

GAMBAR 1.4
KONSEP KLASTER DESTINASI PARIWISATA



Sumber : Blue Print Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2006

6. Pendekatan Menyeluruh dan Terintegrasi

Seluruh aspek dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Soppeng, termasuk elemen-elemen yang bersifat kelembagaan serta implikasi-implikasinya terhadap lingkungan hidup dan sosial budaya, ekonomi, dianalisis, direncanakan, dan dikembangkan. Pendekatan perencanaan pariwisata yang menyeluruh dan terpadu dilakukan berdasarkan pada potensi dan permasalahan yang ada di wilayah tersebut, baik dalam wilayah perencanaan maupun dalam kaitan regional.

Pendekatan menyeluruh dalam pengembangan pariwisata memberi arti bahwa peninjauan permasalahan bukan hanya didasarkan pada kepentingan kawasan atau daerah dalam arti sempit, tetapi ditinjau dan dikaji pula dalam kepentingan yang lebih luas. Selain itu, penyelesaian permasalahan pengembangan pariwisata tidak hanya dipecahkan pada sektor pariwisata saja, tetapi didasarkan pada kerangka perencanaan terpadu antar sektor yang dalam perwujudannya berbentuk koordinasi dan sinkronisasi antarsektor.

Selain mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dalam penyusunan RIPPARKAB juga perlu memperhatikan antara lain :

- a. Kepentingan nasional dan daerah.
- b. Arah dan kebijakan pengembangan kepariwisataan nasional dan provinsi
- c. Arah dan kebijakan penataan ruang wilayah tingkat nasional dan provinsi.
- d. Pokok permasalahan daerah dan mengutamakan kepentingan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
- e. Keselarasan dengan aspirasi masyarakat.
- f. Persediaan dan peruntukan tanah, air dan sumber daya.
- g. Daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- h. RIPPARKAB Kabupaten lain yang berdekatan.

1.5.2 Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

Tahapan Kegiatan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) Soppeng ini dilakukan sesuai pedoman yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/ Kota, sebagai berikut :

1. Pembentukan Kelompok Kerja melalui nota kesepahaman antara Direktur Politeknik Pariwisata Makassar dengan Bupati Kabupaten Soppeng, yang selanjutnya dibentuk tim teknis yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik Pariwisata Makassar.
2. Pengumpulan Data, dilakukan melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner, wawancara maupun *focus*

group discussion serta peninjauan lapangan secara langsung untuk mengenali kondisi fisik, sosial dan ekonomi. Data sekunder dilakukan melalui data pustaka terkait karakteristik wilayah dan aspek-aspek dalam pengembangan kepariwisataan.

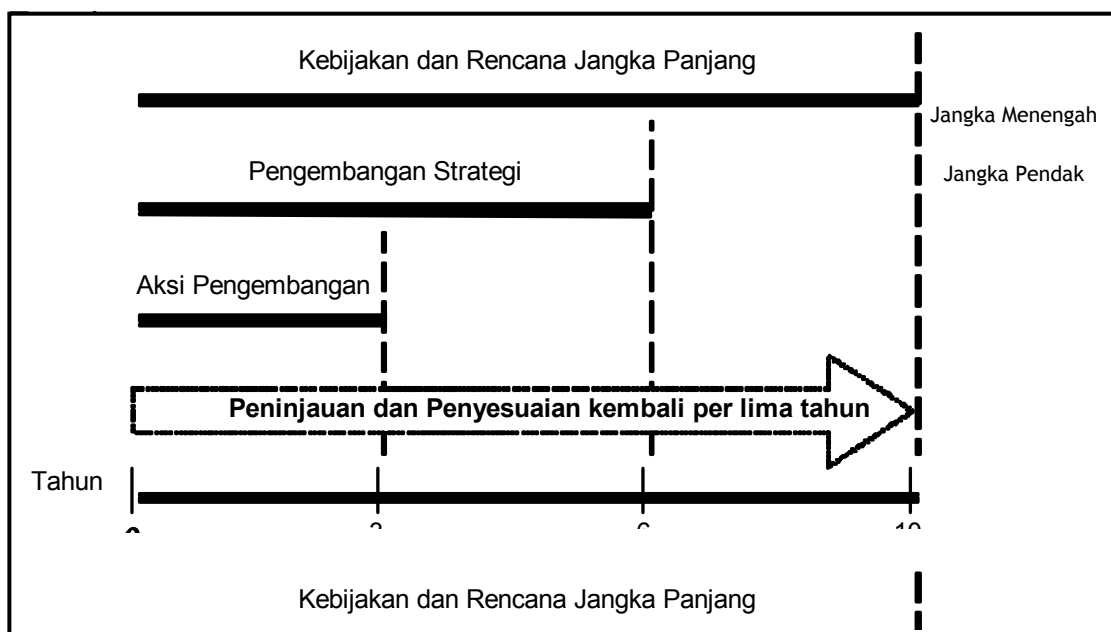
3. Penyusunan Rancangan RIPPARKAB Soppeng, dilakukan setelah data primer dan sekunder dianalisis dan selanjutnya dirumuskan sesuai dengan sistematika penulisan.
4. Uji Publik dilaksanakan untuk meminta tanggapan, masukan, dan saran dari para pemangku kepentingan pariwisata.
5. Penetapan RIPPARKAB Kabupaten Soppeng yang telah disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

1.6 Jangka Waktu Perencanaan

Jangka waktu perencanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan kabupaten Soppeng ini disusun berdasarkan amanah yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan pengembangan pariwisata disusun untuk jangka panjang 15 tahun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Soppeng, sebagai landasan perumusan rencana tingkat dibawahnya
2. Perumusan strategi pengembangan, disusun dalam kurun waktu 10 tahun yang dibagi atas strategi pengembangan 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua.
3. Indikasi program pengembangan disusun untuk jangka waktu tahunan pada periode 5 tahun pertama.
- 4.

GAMBAR 1.5
JANGKA WAKTU RIPPARKAB KABUPATEN SOPPENG



1.7 Sistematika Pelaporan

Untuk memberikan gambaran yang lebih terarah dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Soppeng disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang; maksud, tujuan dan sasaran; keluaran; ruang lingkup (lingkup wilayah, lingkup materi, dan lingkup kegiatan); metodologi; kerangka pendekatan; tahapan pelaksanaan pekerjaan; jangka waktu perencanaan; dan sistematika pelaporan.

Bab II Kepariwisata Kabupaten Soppeng Dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisata, meliputi Kepariwisata Kabupaten Soppeng dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Nasional; Kepariwisata Kabupaten Soppeng dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan; dan Kepariwisata Kabupaten Soppeng dalam Kebijakan dan Pembangunan Wilayah Kabupaten Soppeng.

Bab III Kondisi Wilayah Kabupaten Soppeng Dalam Mendukung Pembangunan Kepariwisata, meliputi Kondisi Fisik; Sejarah Sebagai Potensi Pariwisata; Kekayaan Ekologis Sebagai Potensi Pariwisata; Kondisi Sosial Budaya Sebagai Potensi Pariwisata; dan Perekonomian Kabupaten Soppeng.

Bab IV Kabupaten Soppeng Sebagai Destinasi Pariwisata, meliputi Daya Tarik Dan Sumber Daya Wisata Kabupaten Soppeng; Fasilitas Pariwisata; Fasilitas Umum Pendukung Pariwisata; Aksesibilitas Pendukung Pariwisata; Prasarana Umum Pendukung Pariwisata; Penduduk Sebagai Potensi Sumber Daya Manusia Pariwisata Kabupaten Soppeng.

Bab V Industri Pariwisata Kabupaten Soppeng meliputi Usaha Wisata; dan Usaha Kecil Dan Menengah Pendukung Pariwisata Kabupaten Soppeng.

Bab VI Pasar Pariwisata Dan Upaya Pemasaran Pariwisata Kabupaten Soppeng, meliputi Jumlah Dan Perkembangan Pasar Wisatawan; Karakteristik Pasar Wisatawan; Upaya Pemasaran Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Soppeng

Bab VII Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten Soppeng, meliputi Sumber Daya Manusia Pariwisata; Asosiasi Pariwisata; Kelembagaan Pemerintah Terkait Pariwisata; dan Kelembagaan Lain Terkait Pariwisata Kabupaten Soppeng.

Bab VIII Prinsip Dan Konsep Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Soppeng, meliputi Tantangan Dan Isu Strategis Pembangunan Kepariwisata; Prinsip Pembangunan Kepariwisata; Konsep

Pembangunan Kepariwisata; Visi; Misi; dan Tujuan Pembangunan Pariwisata Kabupaten Soppeng.

Bab IX Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Soppeng, meliputi Kebijakan Pembangunan Kepariwisata; dan Strategi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Soppeng.

Bab X Rencana Pengembangan Perwilayahan Pariwisata Kabupaten Soppeng, meliputi Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata; dan Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata Dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Soppeng

Bab XI Program Dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Soppeng.

BAB - 2

KEPARIWISATAAN KABUPATEN SOPPENG

2.1. Kepariwisata Kab. Soppeng Dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Nasional

Nilai penting dan kontribusi pariwisata memiliki dimensi yang luas, tidak hanya secara ekonomi, namun juga secara sosial politik, budaya, kewilayahan dan lingkungan. Secara ekonomi, sektor Pariwisata memberikan kontribusi nyata dalam perolehan devisa negara, pendapatan asli daerah dan juga pendapatan masyarakat yang tercipta dari usaha-usaha kepariwisataan yang dikembangkan.

Karakter kepariwisataan yang mampu menciptakan beragam mata rantai kegiatan ekonomi, juga terbukti menciptakan lapangan kerja yang luas dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Secara sosio-politik, pengembangan pariwisata menumbuhkan kebanggaan tentang kekayaan alam dan budaya bangsa dan melalui tumbuhnya perjalanan wisata nusantara, kepariwisataan juga efektif dalam menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air, serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara sosio-budaya, tumbuhnya pengakuan dunia terhadap kekayaan alam dan budaya Indonesia juga telah membangkitkan kebanggaan nasional dan sekaligus menjadi alat diplomasi budaya yang efektif untuk memperkuat pencitraan Indonesia di kancah internasional. Selanjutnya secara kewilayahan, kepariwisataan yang memiliki karakter multi-sektor dan lintas regional, secara konkret dan efektif mampu mendorong pembangunan infrastruktur dan fasilitas kepariwisataan yang pada gilirannya menggerakkan arus investasi dan pengembangan wilayah.

Kontribusi nyata sektor pariwisata tersebut menjadikan sektor ini memiliki posisi yang strategis dalam berbagai kebijakan pembangunan, khususnya bagi Indonesia yang memiliki asset kepariwisataan untuk diperkuat dan diberdayakan sebagai pilar ekonomi negara. Perekonomian nasional ke depan tidak lagi dapat mengandalkan sektor minyak dan gas sebagai andalan penyumbang devisa yang menopang perekonomian, karena cadangan minyak dan gas pada saatnya akan habis dan tidak dapat tergantikan lagi, oleh karenanya sektor pariwisata menjadi sektor kunci yang diharapkan mampu menyandang fungsi penyumbang devisa terbesar menggantikan sektor minyak dan gas.

Upaya memposisikan peran strategis sektor pariwisata dalam perekonomian nasional telah dirintis sejak 2 dekade yang lalu melalui program Visit Indonesia Year 1991. Dukungan yang konsisten untuk menjadikan pariwisata sebagai pilar ekonomi strategis masa depan semakin menunjukkan hasil yang positif dari tahun ke tahun. Apabila dibandingkan dengan kekayaan aset sumber daya wisata alam dan

budaya yang dimiliki negara Indonesia, maka kontribusi tersebut masih memiliki peluang yang sangat besar untuk ditingkatkan di waktu-waktu mendatang.

Pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan seperti penataan destinasi dan pengembangan produk wisata, promosi pariwisata, pembinaan industri pariwisata, dan penataan kelembagaan sebagai aspek-aspek dalam pembangunan kepariwisataan Indonesia. Penataan destinasi dilakukan melalui penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail Enam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan memfasilitasi tata kelola destinasi di 16 KSPN, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan wisata, pengembangan masyarakat lokal dengan pendekatan *Community Based Tourism*, Pengembangan Daya Tarik Wisata, Pengembangan Sistem Informasi Daya Tarik Wisata Nasional, Pembangunan Fasilitas Pariwisata, Pengembangan Manajemen Kunjungan Wisata. Upaya pengembangan produk wisata dilakukan melalui penyusunan Pola Perjalanan Wisata Tematik (Minat Khusus) Alam dan Buatan, Sejarah dan Budaya serta Ekowisata, implementasi Kebijakan Nasional Pengembangan Wisata Kapal (*Yacht*) Asing, Pengembangan Wisata Kapal Pesiar (*Cruise*), Pengembangan dan Pemutakhiran *Database* Situs Selam (*Dive Site*) Indonesia, Fasilitasi Pengembangan *Geopark* Global dan Nasional, Pengembangan Even Wisata Olahraga Rekreasi (*Sport Tourism Event*), Pengenalan Produk Kuliner dan Spa Tradisional melalui Penetrasi Kuliner dan Spa Indonesia ke Mancanegara, Pemetaan Destinasi Wisata Belanja, Pengembangan dan Penataan 16 Destinasi MICE di Indonesia melalui Pemetaan dan Pengklasifikasian 16 Destinasi MICE Nasional, Penyusunan Strategi dan *Action Plan* Pengembangan Destinasi MICE Nasional dan Pengembangan Produk *Special Event Carnival Indonesia*.

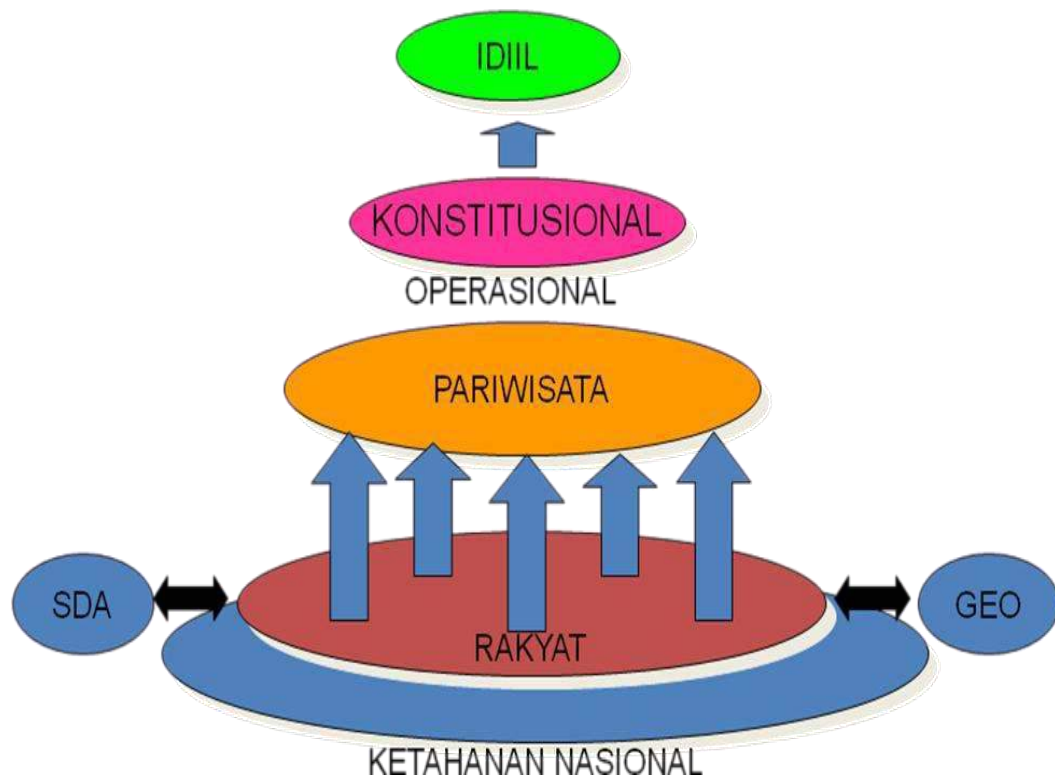
Terkait dengan upaya untuk meningkatkan potensi ekonomi dan kapasitas sertaantisipasi dampak negatif pariwisata terhadap masyarakat dilakukan melalui Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata, Kampanye Sapta Pesona, Gerakan Nasional Sadar Wisata di Kalangan Pramuka, Polisi Pariwisata, Lanjut Usia dan Remaja, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak dan Perempuan serta Pencegahan HIV dan AIDS di lingkungan Kepariwisata.

Kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan aset penting dalam pengembangan pariwisata, dimana pariwisata sebagai alat pelestari kebudayaan, yang dapat berperan secara aktif memperkenalkan hasil-hasil budaya Indonesia. Falsafah pengembangan kepariwisataan nasional dilandasi oleh konsep hidup bangsa Indonesia yang berkeseimbangan yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara sesama manusia dan manusia dengan lingkungan alam, baik yang berupa Lingkungan sumber daya alam maupun lingkungan geografis.

Pengembangan kepariwisataan nasional mengacu pada landasan idiil (Nilai-nilai Agama dan Pancasila) dan landasan konstitusional (UUD 1945 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009) yang secara operasional dilaksanakan oleh para pelaku utama pengembangan kepariwisataan. Para pelaku utama tersebut menggerakkan kegiatan pariwisata yang bertumpu pada pergerakan aspek-aspek ketahanan ideologi, politik,

ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang secara dinamis mendukung kepariwisataan nasional.

Gambar 2.1
Sistem Kepariwisata Nasional
(Tatanan Makro)



Sumber : Blue Print Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2006

Pelaku utama yang menggerakkan roda pembangunan pariwisata adalah unsur Dunia Usaha, Masyarakat (termasuk Pers, LSM, Akademisi) dan Pemerintah. Namun demikian pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator. Sedangkan usaha pariwisata dan masyarakat merupakan pelaku-pelaku langsung dari kegiatan pariwisata. Kepariwisataan nasional yang dilaksanakan dalam konsepsi tersebut di atas bersifat multi dimensi, interdisipliner dan partisipatoris dalam suatu sistem yang utuh dan terpadu.

Melalui pembangunan pariwisata yang dilakukan secara komprehensif dan integral dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dan kondisi geografis Indonesia secara arif, maka akan tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia, yang pada akhirnya akan menciptakan ketahanan nasional yang tangguh. Kondisi yang diharapkan dari aspek-aspek yang memberikan pengaruh dan sekaligus dipengaruhi oleh pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Ketahanan Ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
2. Ketahanan Politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif.
3. Ketahanan Ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan ekonomi kerakyatan, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi, kemampuan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.
4. Ketahanan Sosial Budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu dalam kehidupan yang serba selaras, serasi seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.
5. Ketahanan Pertahanan Keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas keamanan, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

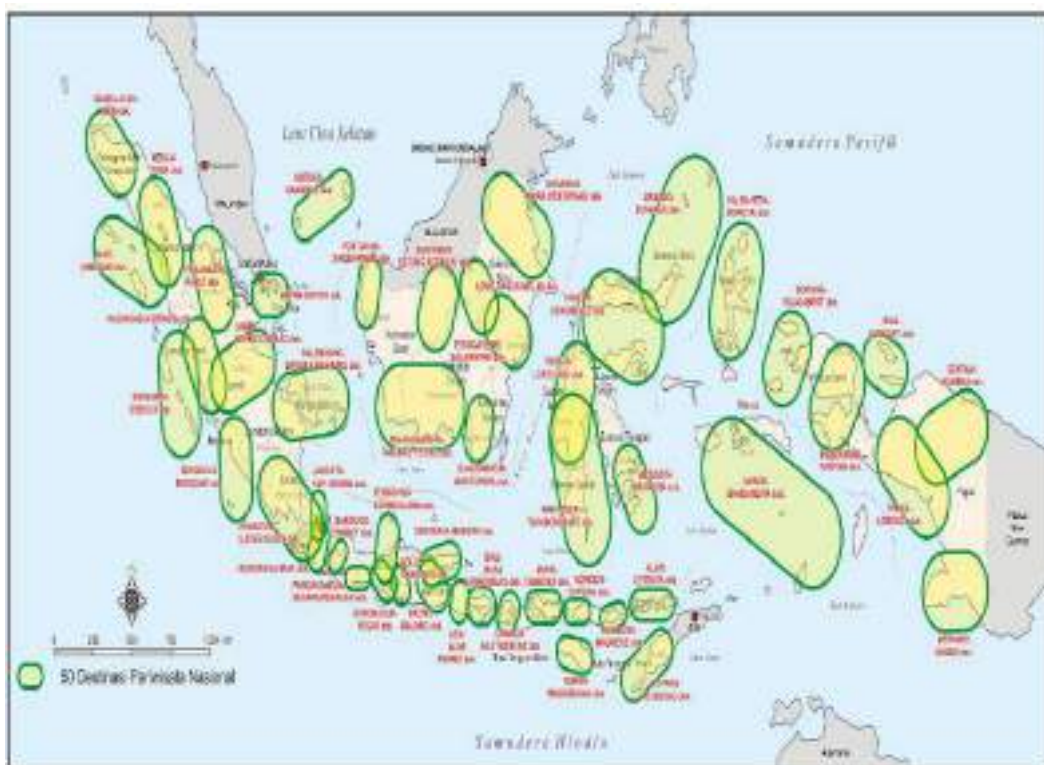
Untuk meningkatkan daya saing kepariwisataan serta meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke Indonesia, maka pemerintah pusat terus memacu potensi pariwisata daerah, melalui penetapan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP), dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP). Strategi tersebut mampu memacu pemerataan angka kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi yang ada sekaligus memberikan keanekaragaman pilihan yang menarik dan memanjakan wisatawan dalam berkunjung sekaligus meningkatkan pendapatan dari pengeluaran wisatawan pada setiap destinasi.

Dalam mendorong pembangunan kepariwisataan, pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025 dan menetapkan peta perwilayahan pembangunan 222 (dua ratus dua puluh dua) kawasan pengembangan pariwisata nasional (KPPN) pada 50 (lima puluh) Destinasi Pariwisata Nasional dan 88 (delapan puluh delapan) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Salah satu Destinasi Pariwisata Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional adalah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) ke 38 yaitu

Makassar-Takabonerate dan Sekitarnya dengan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional yang terdiri dari KPPN Makassar Kota dan sekitarnya, KPPN Maros Karst dan sekitarnya, KPPN Bulukumba dan sekitarnya, KPPN Sinjai dan sekitarnya, KPPN Soppeng dan sekitarnya dan KPPN Takabonerate dan sekitarnya. Sedangkan 3 (tiga) KPPN lainnya yaitu KPPN Sengkang dan sekitarnya, KPPN Toraja dan sekitarnya serta KPPN Palopo dan sekitarnya bergabung dengan provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah dalam DPN Toraja–Lorelindu dan sekitarnya.

Gambar 2.2
Peta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
Takabonerate dan sekitarnya



Sumber : Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, 2011

Dengan demikian menunjukkan bahwa Kabupaten Soppeng dengan segala keunikan alam dan budaya sebagai potensi dasar pariwisata telah ditetapkan dan menjadi bagian integral dari pembangunan kepariwisataan nasional sehingga menjadi prioritas pembangunan dan secara bersama-sama dengan kawasan lain, telah menjadi citra daya tarik kepariwisataan nasional.

2.2. Kepariwisataan Kab. Soppeng Dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Prov. Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu destinasi utama pariwisata nasional dengan potensi pariwisata yang sangat beragam dan menarik, baik wisata alam, budaya, sejarah, religius, dan wisata tematik. Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah Sulawesi

Selatan adalah **“Sulawesi Selatan Sebagai Tujuan Wisata Yang Berdaya Saing Di Indonesia dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi pembangunan kepariwisataan provinsi Sulawesi Selatan dijabarkan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan destinasi wisata yang aman, nyaman, menarik, mudah terjangkau, berwawasan lingkungan serta berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. Mewujudkan pemasaran pariwisata yang efektif meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- c. Mewujudkan kemitraan pengelolaan pariwisata yang mendorong berkembangnya industri pariwisata yang berdaya saing dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan kehidupan masyarakat;
- d. Mengembangkan kekayaan dan keragaman budaya serta merevitalisasi budaya maritim sebagai karakteristik entitas daerah;
- e. Mendorong perkembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya.

Berdasarkan PP 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, terdapat kawasan andalan yang berfungsi sebagai; tempat aglomerasi permukiman perkotaan, pusat kegiatan produksi dan atau pusat pengumpulan/ pengolahan komoditas wilayahnya dan wilayah sekitarnya, dan kawasan yang memiliki sektor-sektor unggulan berdasarkan potensi sumber daya alam kawasan. Adapun kawasan andalan di wilayah provinsi Sulawesi Selatan adalah:

- a. Mamminasata dan sekitarnya (Makassar, Maros, Gowa, Takalar, Pangkep) dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, perikanan, industri umum, dan agroindustri serta perdagangan;
- b. Palopo dan sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, perkebunan, pertanian, dan perikanan;
- c. Bulukumba – Watampone dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, dan perdagangan;
- d. Parepare dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, agroindustri, dan perdagangan;
- e. Kawasan laut Kapoposang dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata;
- f. Kawasan laut Teluk Bone dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, dan pertambangan;
- g. Kawasan laut Singkarang–Takabonerate dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata;
- h. Kawasan laut Selat Makassar dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.

Selain itu, terdapat kawasan yang diarahkan sebagai wilayah yang dapat dibudidayakan dan difungsikan untuk kepentingan pembangunan dalam bentuk kegiatan usaha berbagai sektor dan atau sub sektor pembangunan.

Sektor pariwisata, berbagai aspek seperti daya tarik keindahan alam darat maupun laut, budaya, sejarah, olahraga, Konvensi, dan belanja

bisa dijadikan tujuan. Secara umum Objek wisata budaya dan alam Tana Toraja merupakan ikon pariwisata Sulawesi Selatan yang sudah dikenal mendunia. Taman laut Takabonerate sangat potensial untuk menjadi ikon wisata bahari dengan mengembangkan faktor aksesibilitas, akomodasi, dan perlindungan terumbu karang dan anak-anak ikan. Selain itu, banyak ragam obyek wisata dengan daya tarik regional, nasional maupun lokal yang lokasinya tersebar di kabupaten-kabupaten dan kota di wilayah Sulawesi Selatan yang dapat dikembangkan secara aktif sehingga tumbuh berkembangnya lapangan kerja pemandu wisata, jasa transportasi, perhotelan, restoran, informasi pariwisata, komunikasi, cinderamata, kesenian, perdagangan jasa maupun produk lainnya yang bermuara pada peningkatan ragam sumber dan volume pendapat masyarakat lokal. Pengembangan pariwisata ini diharapkan tidak menurunkan kualitas lingkungan dan terganggunya habitat berbagai flora dan fauna.

Selain itu, pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan salah satu faktor urgen yang harus dipertimbangkan, daya dukung fisik, sosial, ekonomi, dan budaya perlu diperhatikan dengan; dengan menyediakan ruang untuk kehidupan manusia yang sehat dan nyaman beserta segenap kegiatan pembangunannya, menyediakan sumber daya untuk kepentingan manusia baik melalui penggunaan langsung maupun melalui proses produksi atau pengolahan, menyerap atau menetralkan limbah, serta melakukan fungsi-fungsi penunjang termasuk siklus biokimia, siklus hidrologi, dan lainnya. Mengacu pada azas keadilan, maka akses transportasi laut dan terutama akses informasi dan komunikasi perlu dipertimbangkan keseluruhan pulau-pulau kecil. Perairan pantai selatan dan timur Sulawesi Selatan yang potensial sebagai budidaya rumput laut dapat dikembangkan dengan agrobisnis maupun agroindustri khusus rumput laut yang mengikut sertakan komunitas petani rumput laut. Untuk peningkatan perekonomian rakyat dan perekonomian wilayah, maka wisata bahari tepat dikembangkan dengan potensi Kawasan Wisata Bahari Kapoposang dan sekitarnya, termasuk pulau-pulau kecil di Kota Makassar dan Kabupaten Takalar, kawasan wisata bahari dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Sinjai, serta Kawasan Wisata Bahari Takabonerate, Perairan pantai bila diperlukan juga dapat direklamasi untuk penambahan luas daratan untuk pembangunan dan atau perluasan pelabuhan, bandara, kawasan perkotaan seperti permukiman, perdagangan, industri, pergudangan.

Pengembangan strategi spasial pembangunan pariwisata dapat memberikan arahan yang lebih jelas dan mampu mengakomodir kegiatan dalam setiap wilayah pengembangan kepariwisataan di Provinsi Sulawesi Selatan. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan arus kunjungan wisata sehingga dapat memberikan pengaruh bagi kegiatan wisata yang ada dan dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata.

Tujuan dari analisis penentuan Satuan Kawasan Pengembangan Pariwisata (SKPP) adalah untuk memberikan pelayanan dan informasi tentang keberadaan objek dan daya tarik wisata dalam suatu DTW, sehingga para wisatawan mendapatkan gambaran tentang bagaimana DTW yang dikunjungi. Dalam penentuan SKPP di Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada jenis Daya Tarik Wisata (DTW), ditinjau dari aspek: karakteristik tiap daya tarik wisata dan ragam jenis daya tarik

wisata. Adapun SKPP dalam wilayah DTW Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

- a. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Makassar dan sekitarnya dengan pusat pelayanan terletak di Kota Makassar, yang terdiri wilayah Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto. Jenis daya tarik yang dikembangkan pada koridor ini diantaranya adalah DTW Alam, DTW Tirta, DTW Sejarah, DTW Budaya, DTW Agro.
- b. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Bulukumba dan sekitarnya, dengan pusat pelayanan terletak di Kabupaten Bulukumba. KSPD ini meliputi wilayah Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Bantaeng. Jenis daya tarik yang dikembangkan pada kawasan ini diantaranya adalah DTW Tirta, DTW Budaya, Alam, DTW, Agro, dan DTW Alam.
- c. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Kepulauan Selayar dan sekitarnya dengan pusat pelayanan di Kota Benteng. Pada kawasan ini dikhususkan dalam Kawasan Strategis Pariwisata Daerah karena selain pertimbangan letak geografis juga pertimbangan potensi Sumber Daya Alam yang khas dengan Daya Tarik Wisata Bahari.
- d. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Wajo dan sekitarnya dengan pusat pelayanan di Kabupaten Bone. Pada kawasan ini terdiri Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sidrap. Jenis Daya Tarik Wisata yang dapat dikemas dalam satu paket perjalanan wisata yang menjadi unggulan pada koridor tersebut yaitu terdiri dari DTW Alam, DTW Budaya, DTW Sejarah, DTW Tirta, dan DTW Agro, serta pengembangan daya tarik wisata minat khusus atau wisata penelitian yaitu pada kawasan industri Kerajinan dan pengolahan.
- e. Kawasan Strategis Pariwisata daerah (KSPD) Pare-Pare dan sekitarnya dengan pusat pelayanan di Kota Pare-pare. Pada kawasan ini terdiri dari wilayah Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, dan Kota Parepare. Jenis daya tarik yang dikembangkan pada koridor ini diantaranya adalah DTW Alam, DTW, Tirta, DTW Sejarah, DTW Budaya, DTW Agro dan Wisata Minat Khusus.
- f. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Palopo dan sekitarnya dengan pusat pelayanan di Kota Palopo. Pada kawasan ini terdiri dari Daya Tarik Wisata di Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara.
- g. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Toraja dan sekitarnya dengan pusat pelayanan di Kabupaten Tana Toraja. Pada kawasan ini terdiri dari Daya Tarik Wisata di Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara.

Rencana pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Sulawesi Selatan juga dibagi berdasarkan kelompok paket wisata dengan pertimbangan arah perjalanan wisata yang efektif dan efisien dengan tetap menikmati beberapa jenis daya tarik wisata dalam perwilayahan yang dikembangkan, dengan tetap mempertimbangkan aksesibilitas dan karakter budaya yang menyebar di Provinsi Sulawesi

Selatan. Berdasarkan kriteria dan pertimbangan-pertimbangan internal karakter wilayah provinsi tersebut, maka Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Sulawesi Selatan meliputi:

- a. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Makassar dan sekitarnya, terdiri dari wilayah Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto. Jenis daya tarik yang dikembangkan adalah DTW Alam, DTW, Tirta, DTW Sejarah, DTW Budaya, DTW Agro. Pusat pelayanan pada KPP terletak di Kota Makassar.
- b. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Bulukumba dan Sekitarnya, meliputi wilayah Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Bantaeng. Jenis daya tarik yang dikembangkan diantaranya adalah DTW Tirta, DTW Budaya, Alam, DTW, Agro, dan DTW Alam. Pusat pelayanan pada KPP terletak di Kabupaten Bulukumba.
- c. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Kepulauan Selayar, dengan mempertimbangkan arahan Destinasi Kepariwisata Nasional yang menetapkan daya tarik wisata Takabonerate sebagai salah satu destinasi pariwisata andalan nasional maka penetapan KSPD Selayar yang hanya mengkhususkan Kabupaten kepulauan Selayar dalam satu koridor pengembangan destinasi pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan yang juga mempertimbangkan letak geografis wilayah yang merupakan daerah kepulauan namun dengan potensi daya tarik wisata alam dan daya tarik wisata bahari yang sangat unik. Pusat Pelayanan KSPD Kepulauan Selayar ini ditetapkan di Kota Benteng yang juga merupakan Ibukota dari Kabupaten Kepulauan Selayar.
- d. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Wajo dan sekitarnya, terdiri dari Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sidrap. Pusat KSPD Bugis Pantai Timur ini terletak di Kabupaten Bone. Pada KSPD Wajo dan Sekitarnya terdapat beberapa daya tarik wisata yang dapat dikemas dalam satu paket perjalanan wisata yang menjadi unggulan yaitu terdiri dari DTW Alam, DTW Budaya, DTW Sejarah, DTW Tirta, dan DTW Agro, serta pengembangan daya tarik wisata minat khusus atau wisata penelitian yaitu pada kawasan industri Kerajinan dan pengolahan.

Posisi kepariwisataan kabupaten Soppeng dalam kebijakan pembangunan pariwisata provinsi Sulawesi Selatan ditempatkan sebagai Satuan Kawasan Pengembangan Pariwisata (SKPP), yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Wajo dan sekitarnya, terdiri dari Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sidrap dengan Pusat KSPD terletak di Kabupaten Bone. Pada KSPD Wajo dan Sekitarnya terdapat beberapa daya tarik wisata yang dapat dikemas dalam satu paket perjalanan wisata yang menjadi unggulan yaitu terdiri dari DTW Alam, DTW Budaya, DTW Sejarah, DTW Tirta, dan DTW Agro, serta pengembangan daya tarik wisata minat khusus atau wisata penelitian yaitu pada kawasan industri Kerajinan dan pengolahan.

Adapun posisi kepariwisataan kabupaten Soppeng dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.3
Peta Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Wajo dan Sekitarnya



Sumber : Ripparda Provinsi Sulawesi Selatan, 2015

Adapun daya Tarik wisata kabupaten Soppeng yang telah dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

**Perwilayahan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah
Wajo dan Sekitarnya**

No.	Nama Objek	Jenis Objek	Lokasi Obyek	Keterangan
1	Goa Mampu	Alam	Kecamatan Dua Boccoe Kab. Bone	Sudah dipasarkan
2	Bola Soba	Budaya	Kecamatan Tanete Riattang Kab. Bone	Sudah dipasarkan
3	Museum Lapa Wawoi	Budaya	Kecamatan Tanete Riattang Kab. Bone	Sudah dipasarkan
4	Makam Raja-Raja Bone	Sejarah	Kecamatan Tanete Riattang Kab. Bone	Sudah dipasarkan
5	Pelabuhan Bajoe	Tirta	Kecamatan Tanete Riattang Kab. Bone	Sudah dipasarkan
6	Permandian Alinge	Tirta	Kecamatan Ulaweng Kab. Bone	Belum dikembangkan
7	Pantai Palette	Tirta	Kecamatan Tanete Riattang Kab. Bone	Sudah dikembangkan
8	Bendungan Sanrego	Tirta	Kecamatan Kahu Kab. Bone	Sudah dikembangkan
9	Makam Raja-Raja Naga Ulang	Sejarah	Kecamatan Barebbo Kab. Bone	Sudah dikembangkan
10	Kerajinan Perak/Kuningan	Industri	Kecamatan Ajangale Kab. Bone	Sudah dikembangkan
11	Permandian Alam Wae Tuo	Alam	Kecamatan Kajuara Kab. Bone	Belum dikembangkan
12	Permandian Alam Saweng	Alam	Kecamatan Ponre Kab. Bone	Belum dikembangkan
13	Permandian Alam Panyiling	Alam	Kecamatan Palakka Kab. Bone	Belum dikembangkan
14	Kerajinan Songko To Bone	Industri	Kecamatan Awangpone Kab. Bone	Sudah dikembangkan
15	Permandian Naga Ulang	Alam	Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone	Sudah dikembangkan
16	Makam Laummasa	Sejarah	Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone	Belum dikembangkan
17	Makam Pette Bettae	Sejarah	Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone	Belum dikembangkan
18	Perkampungan Suku Bajo	Budaya	Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone	Belum dikembangkan
No.	Nama Objek	Jenis Objek		Keterangan

Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Soppeng 2018-2033

			Lokasi Obyek	
19	Pemburuan Rusa (Ma'jonga)	Wisata	Kecamatan Patimpeng Riattang Kabupaten Bone	Belum dikembangkan
20	Pantai Ujung Pattiro	Alam	Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone	Belum dikembangkan
21	Pantai Pasir Putih Bone Lampe	Tirta	Kecamatan Tellu Siattinge Kab. Bone	Belum dikembangkan
22	Permandian Alam Lanca	Alam	Kecamatan Tellu Siattinge Kab. Bone	Belum dikembangkan
23	Permandian Alam Taretta	Alam	Kecamatan Amali Kabupaten Bone	Belum dikembangkan
24	Makam Raja-Raja KalakkoE	Sejarah	Kecamatan Ranete Riattang Kab. Bone	Belum dipasarkan
25	Hutan Wisata Cani Sidenreng	Alam	Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone	Belum dipasarkan
26	Makam Raja Bone	Sejarah	Kecamatan Tanete Riattang Kab. Bone	Belum dipasarkan
27	Air Terjun Pammusureng	Alam	Kec. Bontocani Kabupaten Bone	Belum dipasarkan
28	Air Terjun Baruttungnge	Alam	Kecamatan Ulaweng Kab. Bone	Belum dipasarkan
29	Air Terjun Ladenring	Alam	Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone	Belum dipasarkan
30	Bendungan Salomekko	Alam	Kec. Salomekko Kabupaten Bone	Belum dipasarkan
31	Permandian Air Panas Lejja	Alam	Kec. Marioriwawo Kabupaten Soppeng	Sudah dipasarkan
32	Permandian Alam Ompo	Alam	Kec. Labalata Kab. Soppeng	Sudah dipasarkan
33	Pemeliharaan Ulut Sutera	Industri	Proses Pembuatan	Sudah dikembangkan
34	Pengolahan Tembakau Cabbenge	Industri	Kecamatan Lirilau Kabupaten Soppeng	Belum dikembangkan
35	Taman Kelelawar	Alam	Kabupaten Soppeng	Sudah dipasarkan
36	Kuburan Tua Raja-Raja Soppeng	Sejarah	Kabupaten Soppeng	Sudah dipasarkan
37	Sumber Air Panas Bebbae	Alam	Kabupaten Soppeng	Sudah dipasarkan
38	Kolam Renang Bebbae	Alam	Kabupaten Soppeng	Sudah dipasarkan
No.	Nama Objek	Jenis Objek		Keterangan

Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Soppeng 2018-2033

			Lokasi Obyek	
39	Permandian Alam Citta	Alam	Kabupaten Soppeng	Sudah dipasarkan
40	Sumber Air Panas Cimai	Alam	Kabupaten Soppeng	Sudah dipasarkan
41	Makam Petta Janggo	Sejarah	Kabupaten Soppeng	Sudah dipasarkan
42	Rumah Adat Batu-Batu	Budaya	Kabupaten Soppeng	Sudah dipasarkan
43	Daerah Fosil Simpou	Sejarah	Kabupaten Soppeng	Sudah dipasarkan
44	Daerah Megalistik Lawo	Sejarah	Kabupaten Soppeng	Sudah dipasarkan
45	Permandian Alam Lawo	Alam	Kabupaten Soppeng	Sudah dipasarkan
46	Vila Ratu Yuliana	Sejarah	Kabupaten Soppeng	Sudah dipasarkan
47	Kuburan Jera Lompoa	Sejarah	Kabupaten Soppeng	Sudah dipasarkan
48	Makam Jera Aleppoja	Sejarah	Kabupaten Soppeng	Sudah dipasarkan
49	Makam Datuk Mario	Sejarah	Kabupaten Soppeng	Sudah dipasarkan
50	Bekas Istana Raja Umpangan	Budaya	Kabupaten Soppeng	Sudah dipasarkan
51	Danau Tempe	Tirta	Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo	Sudah dipasarkan
52	Agro Wisata Sutera	Agro Industri	Kec. Sabbangparu Kabupaten Wajo	Sudah dipasarkan
53	Perkemahan dan Camping Ground	Alam	Kec.Majauleng Kabupaten Wajo	Sudah dipasarkan
54	Masjid Tua	Sejarah	Kec.Majauleng Kabupaten Wajo	Sudah dipasarkan
55	Rumah Adat AtakkaE	Budaya	Kec.Tanasitolo Kabupaten Wajo	Sudah dipasarkan
56	Taman Perburuan Rusa	Alam	Kec.Maniangpajo Kabupaten Wajo	Sudah dipasarkan
57	Situs Tosara	Sejarah	Kec.Majauleng Kabupaten Wajo	Sudah dipasarkan
58	Bendungan Kalola	Alam	Kec.Manjangpojo Kabupaten Wajo	Sudah dipasarkan
59	Pulau Karang	Alam	Kecamatan Keera Kabupaten Wajo	Belum dikembangkan
60	Agro Wisata Sutera	Agro	Kec.Sabbangparu Kabupaten Wajo	Sudah dipasarkan
No.	Nama Objek	Jenis Objek		Keterangan

Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Soppeng 2018-2033

			Lokasi Obyek	
61	Festival Danau Tempe	Budaya	Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo	Sudah dipasarkan
62	Rumah Terapung	Budaya	Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo	Sudah dipasarkan
63	Gua Nippon	Alam/ Sejarah	Kec. Takkalala Kabupaten Wajo	Belum dikembangkan
64	Wisata Bahari Desa Pasir Putih	Alam	Kecamatan Bola Kabupaten Wajo	Belum dikembangkan
65	Permandian Air Panas	Alam	Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo	Belum dikembangkan
66	Wisata Bahari Desa Tellesang	Alam	Kec. Pitumpinua Kabupaten Wajo	Belum dikembangkan
67	Air Terjun Desa Lompoloang	Alam	Kecamatan Keera Kabupaten Wajo	Belum dikembangkan
68	Gunung Pattirosompe	Alam	Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo	Belum dikembangkan
69	Komplek Penjual Tuak Palaguna	Alam	Kec. Pammana Kabupaten Wajo	Belum dikembangkan
70	Rumah Adat Saoraja	Budaya	Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo	Belum dikembangkan
71	Pohon Asem Tua	Budaya	Kec. Majauleng Kabupaten Wajo	Belum dikembangkan
72	Monumen	Sejarah	Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo	Belum dikembangkan
73	Perkampungan Tolotang	Budaya	Kec. Tellulimpoe Kabupaten Sidrap	Sudah dikembangkan
74	Danau Sidenreng	Tirta	Kabupaten Sidrap	Sudah dikembangkan
75	Rumah Adat di Pangkajene	Budaya	Kabupaten Sidrap	Belum dikembangkan
76	Makam Addatuang Sidenreng	Sejarah	Kabupaten Sidrap	Belum dikembangkan
77	Peternakan di Bila	Agro	Kabupaten Sidrap	Belum dikembangkan
78	Bukit Pattiro Sompe	Tirta	Kabupaten Sidrap	Belum dikembangkan
79	Hutan Lindung	Alam	Kabupaten Sidrap	Belum dikembangkan
80	Mesjid Tua Allakuang	Sejarah	Kabupaten Sidrap	Belum dikembangkan
81	Gua Tompo Batu Parinding	Alam	Kabupaten Sidrap	Belum dikembangkan
No.	Nama Objek	Jenis Objek		Keterangan

			Lokasi Obyek	
82	Taman Rekreasi DataE	Alam	Kec. Marritengngae Kabupaten Sidrap	Belum dikembangkan
83	Persuteraan Alam	Agro	Kabupaten Sidrap	Belum dikembangkan
84	Upacara Adat TUndang Sipulung dan Pesta Panen	Budaya	Kabupaten Sidrap	Belum dikembangkan

Sumber : Ripparda Provinsi Sulawesi Selatan, 2015

2.3. Kepariwisata dalam Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten Soppeng

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Soppeng tidak terlepas pada visi kabupaten Soppeng, yaitu "**Terwujudnya Pemerintahan Yang Melayani dan Lebih Baik**". Hal ini dimaksudkan dapat diwujudkan melalui penjabaran visi sebagai berikut :

- a. Pemerintahan adalah menggunakan kewenangan, ekonomi, politik, dan administra gunamengelola urusan yang menjadi kewenangannya karena pada hakekatnya kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya;
- b. Melayani dimaksudkan untuk mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan rakyat, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan rakyat untuk lebih baik;
- c. Lebih baik dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip Partisipasi aktif, transparansi, responsive, musyawarah mufakat, berkeadilan, efektif dan ekonomis, serta akuntabilitas.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah tersebut, maka Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng 2016-2021 memiliki 7 tekad pemerintahan melayani dan 2 tekad menjadikan Soppeng lebih baik, yaitu :

- a. 7 (tujuh) tekad Pemerintahan yang melayani, terdiri dari :
 1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro petani;
 2. Mewujudkan pendidikan unggul (lebih baik) dan murah serta berkeadilan bagi semua warga
 3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik;
 4. Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang baik dan nyaman;
 5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi;
 6. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul (lebih baik) dan murah; dan
 7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.
- b. 2 (dua) tekad menjadikan Soppeng lebih baik, melalui :

1. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan; dan
2. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembangunan kepariwisataan Kabupaten Soppeng mengacu pada pembangunan kepariwisataan nasional yang tetap menjunjung ciri khas bangsa Indonesia, seperti yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan Kabupaten Soppeng merujuk pada norma-norma agama dan nilai-nilai budaya dalam setiap segi kehidupan masyarakat. Falsafah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Soppeng menyangkut hubungan kehidupan yang berkeimbangan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam. Segala bentuk kegiatan kepariwisataan sejalan dengan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etika.

Pengembangan pariwisata Kabupaten Soppeng juga tidak mengenal perbedaan ras, suku, bangsa, agama, jenis kelamin, bahasa, seperti pengakuan atas prinsip dasar hak asasi manusia (HAM). Pemanfaatan lingkungan bagi pengembangan pariwisata Kabupaten Soppeng menerapkan keseimbangan mikro (manusia) dan makro (alam) untuk mencegah ketidakadilan, keserakahan, dan pengrusakan terhadap budaya dan alam Kabupaten Soppeng.

Selain itu, beberapa isu strategis utama pembangunan Kabupaten Soppeng juga bisa menjadi landasan pengembangan pariwisata Kabupaten Soppeng. Isu-isu strategis utama pembangunan kepariwisataan Kabupaten Soppeng tersebut adalah:

- a. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Mengembangkan Kebudayaan.
Faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan sektor kebudayaan adalah kurangnya antusias masyarakat sosial terhadap kegiatan-kegiatan kebudayaan yang telah di gelar oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang dikarenakan minimnya penanaman nilai budaya terhadap generasi muda pada perkembangan dunia pendidikan masa kini. Sehingga masyarakat lokal sebagian besar kurang mengetahui budaya-budaya lokal yang ada di Kabupaten Soppeng.
- b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Melestarikan Kebudayaan.
Isu strategis ini terlihat kronis pada pengelolaan asset situs serta benda cagar budaya dan museum disebabkan oleh karena minimnya jumlah tenaga ahli dalam bidang kebudayaan yang diberikan tanggung jawab pada teknis pemeliharaan situs dan benda cagar budaya serta museum, yang pada akhirnya berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat sosial dalam melestarikan kebudayaan lokal Kabupaten Soppeng.
- c. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kepariwisataan.
Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya wisatawan mancanegara berkunjung ke Kabupaten Soppeng, karena kurangnya sarana penunjang kepariwisataan yakni, hotel, rumah makan, sarana transportasi, sarana telekomunikasi, sarana olahraga, tempat hiburan,

- sarana perbelanjaan yang dapat memenuhi standar pelayanan untuk level wisatawan mancanegara.
- d. Belum Adanya Regulasi Jaminan Bagi Wisatawan.
Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Soppeng, belum ada regulasi yang dapat menjamin keamanan, kesehatan, kecelakaan selama berada di obyek wisata, sehingga terkadang wisatawan merasa tidak nyaman berada di Kabupaten Soppeng, terutama wisatawan mancanegara dimana kenyamanan dan keamanan merupakan hal yang prioritas.
 - e. Belum adanya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Soppeng (RIPPARKAB).
Ripparkab merupakan pedoman dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan daerah, diperburuk dengan kurangnya pengembangan database kepariwisataan, kurangnya aksesibilitas ke dan dari tempat pariwisata serta rendahnya kualitas sarana dan prasarana pariwisata.
 - f. Rendahnya kualitas media promosi, jangkauan promosi dan informasi pariwisata juga menyebabkan kurang dikenalnya daya tarik wisata daerah di lingkungan yang lebih luas.
 - g. Masih kurangnya jumlah objek wisata yang ada di Kabupaten Soppeng.
Peningkatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata perlu melibatkan seluruh potensi yang ada. Diwujudkan melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait serta koordinasi lintas sektor secara terpadu. Hal ini untuk peningkatan jumlah wisatawan yang lebih banyak, dan tentunya akan lebih merasa nyaman, dan lebih lama tinggal di Kabupaten Soppeng sehingga lebih banyak membelanjakan uangnya.

Isu-isu utama ini merupakan isu yang saling terkait dan harus dipecahkan bersama. Kualitas dan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak cukup terjadi di beberapa tempat saja, namun harus merata di seluruh wilayah Kabupaten Soppeng. Peningkatan kualitas dalam segala aspek secara merata diharapkan akan meningkatkan juga produktivitas dan kualitas masyarakat Kabupaten Soppeng dalam mengembangkan dan mengelola sumber daya yang ada sehingga diharapkan daya saing Kabupaten Soppeng pun semakin meningkat hingga Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pengembangan Pariwisata ke tingkat yang paling tinggi. Kesejahteraan yang merata diharapkan dapat berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan. Untuk itu, penerapan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus dilakukan secara disiplin dan dengan penuh kesadaran.

Sebagai salah satu sektor pembangunan daerah, visi dan misi pengembangan pariwisata Kabupaten Soppeng mengacu kepada visi pemerintah daerah Kabupaten Soppeng, yaitu **“Terwujudnya Pariwisata Kabupaten Soppeng Sebagai Destinasi Unggulan Wisata Tirta, Sejarah dan Budaya Berbasis Ekologi Di Provinsi Sulawesi Selatan Menuju Masyarakat Sejahtera”**

Visi pengembangan pariwisata yang ditetapkan tersebut mengandung pengertian bahwa :

- a. Destinasi unggulan Wisata Tirta adalah sesuai dengan karakteristik geografis wilayah yang berpengaruh terhadap potensi dan produk pariwisata Kabupaten Soppeng yang dikenal sebagai tujuan wisata Tirta di Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Destinasi unggulan Wisata Sejarah dan Budaya adalah sesuai dengan kondisi demografis dan budaya serta lintasan sejarah masa lalu yang menempatkan Kabupaten Soppeng sebagai salah satu posisi sentral dalam perjuangan kerajaan Bugis di Sulawesi Selatan, serta dikenal sebagai masyarakat yang sangat memegang teguh tradisi budayanya;
- c. Berbasis Ekologi mengandung makna bahwa dalam membangun kepariwisataan Kabupaten Soppeng harus didasari oleh prinsip pelestarian dan keberlanjutan, sehingga kemajuan pariwisata harus berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan dan sosial budaya masyarakat kabupaten Soppeng;
- d. Masyarakat sejahtera mengandung makna bahwa pariwisata merupakan salah satu potensi utama sebagai penggerak ekonomi masyarakat, meningkatkan daya saing serta kualitas hidup, serta mendorong pelibatan masyarakat.

Berdasarkan visi pembangunan kepariwisataan kabupaten Soppeng tersebut, ditetapkanlah misi pembangunan pariwisata kabupaten Soppeng sebagai berikut :

- a. Mengembangkan destinasi di Kabupaten Soppeng yang berdaya saing.
- b. Mengembangkan Seni dan Budaya Tradisional Kabupaten Soppeng sebagai daya tarik Destinasi Pariwisata Alam dan Budaya berbasis ekologi.
- c. Membangun Obyek Wisata Sejarah/ Arkeologi dan Wisata Agro sebagai daya tarik Destinasi Pariwisata Alam dan Budaya berbasis ekologi.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata, antara lain dengan menyediakan lapangan pekerjaan, dan menyediakan kesempatan investasi bagi masyarakat.
- e. Meningkatkan keterlibatan komunitas lokal dalam penyediaan prasarana dan sarana pariwisata.
- f. Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas koordinasi antara instansi dan sektor-sektor pariwisata.
- g. Meningkatkan arus perjalanan wisata ke Kabupaten Soppeng
- h. Meningkatkan penyediaan data dan informasi bagi wisatawan, serta pemasaran dan promosi pariwisata kabupaten Soppeng ke segmentasi pasar wisatawan yang tepat dan terarah.
- i. Mewujudkan iklim investasi yang harmonis dan menguntungkan bagi masyarakat Kabupaten Soppeng.
- j. Mempertimbangkan daya dukung lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya untuk pariwisata dalam rangka menciptakan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.
- k. Membangun jaringan Promosi dan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Soppeng.

Secara operasional, sasaran Pengembangan Pariwisata Kabupaten Soppeng diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Soppeng, dengan sasaran utama tahun 2018-2033 adalah :

1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan manca negara melalui peningkatan kualitas dan kuantitas daya tarik dan atraksi wisata, pengembangan aksesibilitas pariwisata, pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata, serta peningkatan citra pariwisata;
2. Meningkatkan lama tinggal wisatawan melalui pelaksanaan berbagai jenis even dan festival, pengembangan usaha akomodasi, dan pengembangan amenitas pariwisata;
3. Meningkatkan pendapatan dari belanja wisatawan melalui pemberdayaan potensi kreatif masyarakat serta penganeekaragaman produk dan atraksi wisata;
4. Meningkatkan perlindungan, pengelolaan dan pengembangan warisan budaya melalui pemberdayaan potensi budaya masyarakat, pengembangan sanggar seni dan budaya, pelestarian nilai-nilai sejarah dan budaya, serta pelestarian benda cagar budaya;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan serta kerjasama dan alih teknologi bersama perguruan tinggi, usaha pariwisata, asosiasi profesi, dan pemerintah.
6. Meningkatkan perlindungan, pengelolaan dan pengembangan potensi alam sebagai daya tarik pariwisata melalui perencanaan, pengawasan, dan konsistensi penegakan hukum yang adil dan bermartabat.

BAB - 3

KONDISI WILAYAH KABUPATEN SOPPENG

3.1. Sejarah Kabupaten Soppeng

Soppeng merupakan sebuah kota kecil yang dijelaskan dalam buku-buku lontara terdapat catatan tentang raja-raja yang pernah memerintah sampai berakhirnya status daerah Swapraja, Asal mula nama Soppeng sampai saat ini para pakar dan budayawan belum ada kesepakatan bahkan dalam sastra Bugis tertua I LA GALIGO telah tertulis nama Kerajaan Soppeng yang berbunyi: “*Iyyanae Sure Puada Adaengngi Tanae Ri Soppeng, Nawalainna Sewo-Gattareng, Noni Mabbanua Tauwe Ri Soppeng, Naiyya Tau Sewoe Iyanaro Ri Yaseng Tau Soppeng Riaja, Iyya Tau Gattarengnge Iyanaro Riaseng Tau Soppeng Rilau*” Berdasarkan naskah lontara tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk tanah Soppeng mulanya datang dari dua tempat yaitu *Sewo* dan *Gattareng*.

Menurut catatan sejarah yang tertulis dalam lontara, bahwa jauh sebelum terbentuknya kerajaan Soppeng, telah ada kekuasaan yang mengatur daerah Soppeng, yaitu sebuah pemerintahan berbentuk demokrasi karena berdasar atas kesepakatan dari 60 pemuka masyarakat, namun saat itu Soppeng masih merupakan daerah yang terpecah-pecah dalam bentuk kerajaan-kerajaan kecil. Hal ini dapat dilihat dari jumlah *Arung*, *Sulewatang*, *Paddanreng* serta *Pabbicara* yang mempunyai kekuasaan tersendiri. Setelah kerajaan Soppeng terbentuk maka dikoordinir oleh *Lili-Lili* yang kemudian disebut Distrik di Zaman Pemerintahan Belanda.

Pada suatu waktu terjadi musim kemarau yang menimbulkan huru-hara, kekacauan hingga kemiskinan dan kemelaratan terjadi dimana-mana. Olehnya itu 60 Pemuka Masyarakat bersepakat untuk mengangkat seorang junjungan yang dapat mengatasi semua masalah tersebut. Tampilah *Arung Bila* mengambil inisiatif mengadakan musyawarah besar yang dihadiri 30 orang *Matoa* dari Soppeng Riaja dan 30 orang *Matoa* dari Soppeng Rilau, sementara musyawarah berlangsung, seekor burung Kakatua terbang mengganggu diantara para hadirin dan *Arung Bila* memerintahkan untuk menghalau burung tersebut dan mengikuti kemana mereka terbang. Burung Kakatua tersebut akhirnya sampai di *Sekkanyili* dan di tempat inilah ditemukan seorang berpakaian indah sementara duduk diatas batu, yang bergelar *Manurungnge Ri Sekkanyili* atau *Latemmamala* sebagai pemimpin yang diikuti dengan ikrar yang terjadi antara *Latemmamala* dengan rakyat

Soppeng dan pada saat itulah *Latemmamala* menerima pengangkatan dengan Gelar *Datu Soppeng*, sekaligus sebagai awal terbentuknya Kerajaan Soppeng, dengan mengangkat Sumpah di atas Batu yang di beri nama "*Lamung Patue*" sambil memegang segenggam padi dengan mengucapkan kalimat yang artinya "isi padi tak akan masuk melalui kerongkongan saya bila berlaku curang dalam melakukan pemerintahan selaku *Datu Soppeng*".

Literatur yang ditulis tentang sejarah Soppeng masih sangat sedikit. Sebagaimana tentang daerah-daerah di *Limae Ajattappareng*, juga Mandar dan Toraja. Soppeng hanyalah daerah kecil dan mungkin kurang signifikan untuk diperebutkan oleh dominasi dua kekuatan besar di Sulawesi Selatan yakni Luwu dan Siam sebelum abad ke-16. Namun, seperti disebutkan oleh sebuah kronik Soppeng, dahulu Soppeng bersama Wajo, sangat bergantung kepada kerajaan Luwu.

Seiring menguatnya kekuatan persekutuan kerajaan Goa-Tallo di Makassar, maka untuk mengimbangnya, kerajaan Bone sempat mengajak Wajo dan Soppeng membentuk persekutuan *Tellumpocco* pada perjanjian *Timurung* tahun 1582. Akan tetapi, masuknya Islam di Sulawesi Selatan di paruh akhir abad ke-16, ditandai dengan masuknya *Karaeng Tallo I Mallingkang* yang lebih dikenal sebagai *Karaeng Matoaya* serta penguasa Goa / *Manga'rangi* yang kemudian bergelar Sultan Alauddin, telah mengubah peta politik di Sulawesi Selatan. Untuk sementara, kekuatan Bugis-Makassar menjadi sebuah kekuatan baru.

Perkembangan berikutnya sepanjang abad ke-17, menempatkan Soppeng pada beberapa perubahan keputusan politik ketika persaingan Bone dan Goa semakin menguat. Jauh sebelum perjanjian *Timurung* yang melahirkan persekutuan *Tellumpocco*, sebenarnya Soppeng sudah berada di pihak kerajaan Goa dan terikat dengan perjanjian *Lamogo* antara Goa dan Soppeng. Persekutuan *Tellumpocco* sendiri lahir atas restu Goa. Namun, ketika terjadi gejolak politik antara Bugis dan Makassar disebabkan oleh gerakan yang dipelopori oleh *Arung Palakka* dari Bone, Soppeng sempat terpecah dua ketika *Datu Soppeng*, *Arung Mampu*, dan *Arung Bila* bersekutu dengan Bone pada tahun 1660 sementara sebagian besar bangsawan Soppeng yang lain menolak perjanjian di atas rakit di *Atappang* itu

Soppeng yang memiliki sejarah cemerlang dimasa lalu, dengan memperhatikan berbagai masukan agar penempatan Hari Jadi Soppeng, diadakan seminar karena kurang tepat bila dihitung dari saat dimulainya Pelaksanaan Undang-undang Darurat Nomor 04 Tahun 1957, sebab jauh sebelumnya didalam lontara, Soppeng telah mengenal sistem Pemerintahan yang Demokrasi dibawah kepemimpinan Raja dan Datu. Maka dilaksanakanlah Seminar Sehari pada Tanggal 11 Maret 2000, yang dihadiri oleh para pakar, Budayawan, Seniman, Ahli Sejarah, Tokoh Masyarakat, AlimUlama, Generasi Muda dan LSM, dimana disepakati bahwa hari Jadi Soppeng dimulai sejak Pemerintahan *To Manurungnge Ri Sekkanyili* atau *Latemmamala* pada tahun 1261, berdasarkan

perhitungan dengan menggunakan *backward counting*, dan mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng untuk dibahas dalam Rapat Paripurna dan mengesahkan untuk dijadikan salam suatu Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Soppeng.

Dari hasil rapat Paripurna Dewan perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Soppeng, Tanggal 12 Maret 2001 telah menetapkan dan mengesahkan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng, Nomor 09 Tahun 2001, Tanggal 12 Maret 2001, bahwa Hari Jadi Soppeng Jatuh pada Tanggal 23 Maret 1261. Ringkasan arti dari pemakaian Hari jadi Soppeng yakni angka 2 dan angka 3, karena angka tersebut mempunyai makna sejarah dan filosofi sebagai berikut:

1. Angka 2 menunjukkan :
 - a. Dua ke-Datuan yakni Soppeng Rilau dan Soppeng Riaja;
 - b. Dua *Tomanurung* yaitu : *Tomanurung Ri Sekkanyili* dan *To Manurung Ri Gorie*;
 - c. Dua *Cakkelle* (Burung Kakatua) yang memperebutkan setangkai padi, yang merupakan petunjuk para *Matoa* yang bermusyawarah mengatasi krisis kelaparan, akhirnya menemukan *Tomanurungnge Ri Sekkanyili*;
 - d. Dua Pegangan hidup yaitu kejujuran dan keadilan;
 - e. Dua hal yang tidak bisa dihindari yaitu nasib dan takdir;
 - f. Dua *Tanranna Namaraja TanaE* – Seorang pemimpin harus jujur dan pintar – Masyarakat hidup aman, tentram dan damai.
2. Angka 3 menunjukkan :
 - a. Adanya perjanjian 3 kerajaan yaitu : Bone, Soppeng dan Wajo yang dikenal dengan *Tellu PoccoE*;
 - b. *Taring Tellu* menunjukkan tempat bertumpu yang sangat kuat dan stabil;
 - c. *Tellu Riala Sappo*, yaitu *Taue Ridewatae*, *Taue Ri Watakkale*, dan *Taue Ri Padatta Rupa Tau*.
 - d. *Tellu Ewangenna Lempue*, yaitu kejujuran, kebenaran dan keteguhan.
3. Angka *Dua Tellu* bermakna :
 - a. *Dua Tellu* bermakna antara lain murah resiko.
 - b. *Dua Temmasarang*, artinya Allah dan hambanya tidak pernah berpisah; dan *Tellu Temmalaiseng*, artinya Allah Malaikat dan hamba selalu bersama-sama.
 - c. *Tellu Dua Macciranreng*, *Tellu- Tellu Tea Pettu* bermakna berpintal dua sangat rapuh, berpintal tiga tidak akan putus.
 - d. *Mattulu Parajo Dua Siranreng Teppettu Sirangreng. Marutte Parajo, Mattulu Tellu Tempettu Silariang*, bermakna tidak saling membohongi, nanti akan putus jika putus bersama.
4. Dipilihnya bulan tiga atau Maret, karena :
 - a. Bulan terbentuknya Kabupaten Soppeng
 - b. Bulan pelaksanaan seminar hari Jadi Soppeng.
5. Selain itu angka dua atau tiga juga bermakna :
 - a. Jika angka $2 + 3 = 5$ yang berarti :

- 1) Makna kata dalam huruf *Karawi* lambang daerah yaitu *Ade, Rapang, Wari, Bicara, Sara*
 - 2) Rukun Islam
 - 3) Pancasila
- b. Jika angka $2 \times 3 = 6$ yang bermakna Rukun Islam 6.
6. Dipilihnya tahun 1261 adalah menggunakan *backward counting*, yaitu pemerintahan *Datu Soppeng* pertama *Tau Manurungnge Ri Sekkanyili* atau *Latemmamala* pada tahun 1261. sehingga dengan demikian hari jadi kabupaten Soppeng ditetapkan pada tanggal 23 Maret 1261.

3.2. Logo Kabupaten Soppeng

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang dan sistem nilai yang berakar di masyarakat kabupaten Soppeng, sekaligus menjadi landasan filosofis masyarakat dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat termasuk menerima wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Soppeng, berikut digambarkan logo dan makna dari logo kabupaten Soppeng sebagai berikut :

Gambar 3.1
Logo Kabupaten Soppeng



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Soppeng, 2018

- Adapun makna dari logo tersebut, diuraikan sebagai berikut :
1. Dalam mitologi pembentukan pemerintahan teratur, pertama burung Kakatua digambarkan sebagai duta pembawa berita sehingga diketemukan Raja pertama dari Soppeng yang membawa daerah ini kepada keamanan, keadilan dan kemakmuran.
 2. Kabupaten Soppeng dari dahulu adalah daerah agraris menyebabkan rakyatnya makmur dan dapat mengeksport bahan pangan seperti beras, jagung, kedele, kacang tanah, wijen. Begitupun tanaman-tanaman tahunan seperti tembakau, bawang dan lain-lain.
 3. “*Karawi*” adalah hiasan kanak-kanak yang digantung didadanya, biasanya diberikan ukiran-ukiran merupakan azimat.

4. Lukisan tengah dari *karawi* ini, merupakan gambar bunga yang bertajuk lima, melambangkan azimat Kabupaten Soppeng.
5. Lukisan pinggir *karawi* merupakan kata bahasa daerah yang diambil dari kalimat berbunyi ”*Eppamua Parajai Tanah, Iyami Naripagenne Lima Rirapimami AsellengengE Naritambaina Koritu Sara, Iyanaritu : Pammulanna Ade Maduanna Rapang, Matellunna Bicara, Maeppana Wari, Malimanna Sara.*
6. Kelima azas dalam kata-kata adat tersebut menjadi petunjuk dalam setiap bidang kehidupan yang memiliki makna:
 - a. *Ade*, maknanya keselarasan guna kebaikan umum;
 - b. *Rapang*, maknanya hukum/ pedoman
 - c. *bicara*, maknanya mufakat kepada yang bernilai tinggi atau peradilan;
 - d. *Wari*, maknanya pembidangan dan pembatasan untuk ketegasan batas-batas dan kedudukan tiap sesuatu; dan
 - e. *Sara*, maknanya hukum agama.
7. Semboyan ini berasal dari kalimat amanat masyarakat kepada pucuk pimpinan pemerintahan dikala pelantikannya. Dahulu diucapkan oleh *Matoa Bila* atas nama rakyat kepada *Datu* yang menerima pemerintahan kekayaan Soppeng antara lain berbunyi: ”*Dongirikeng temmatipa, salipurikkeng temmadinging, wessekkeng temmakap*”, yang memiliki makna :
 - a. *Dongiri Temmatipa*, yaitu membimbing dan para pejabat pemerintah setiap waktu memberikan perhatian kepada karya rakyat dan dimana perlu memberi bimbingan kepada kesempurnaannya supaya kerja itu membawa hasil yang menguntungkan.
 - b. *Salipuri Temmadinging*, yaitu memelihara kesehatan badaniah dan bathiniah. Dimaksud agar pejabat pemerintah mengusahakan pengadaan sandang, perumahan dan pendidikan, supaya rakyat dengan segala kegiatannya dapat dilaksanakan dengan baik. Hendaknya dipergunakan semboyan ”Beribadahlah agar dalam tubuh yang sehat bersemayam jiwa yang sehat”;
 - c. *Wesse Temmakapa*, yaitu mengusahakan kerukunan dan kedamaian antara semua golongan dan anggota-anggota masyarakat supaya masyarakat itu dapat menjadi kesatuan tenaga yang besar guna menghadapi setiap kerja pembangunan. Hubungan semboyan *Dongiri Temmatipa* dan *Wesse Temmakapa* mengisyaratkan bahwa pengadaan bahan pangan rakyat mendapat perhatian sepenuhnya guna kemajuannya dimana daerah ini terkenal dengan julukan lumbung padi.
8. Warna Lambang :
 - a. Latar belakang berwarna biru muda;
 - b. Bulu kakatua berwarna putih;
 - c. Paruh dan Kaki berwarna abu-abu;
 - d. Padi berwarna kuning emas
 - e. Buah Kapas berwarna :
 - 1) Bijinya berwarna putih;
 - 2) Kelopaknya berwarna kuning muda.

- f. *Karawi* berwarna kuning emas dan huruf bugisnya berwarna hitam
- g. Pita dibawah lambang berwarna merah dan huruf bugisnya berwarna putih.
- h. Kata-kata bahasa daerah dalam lukisan *karawi*, begitupun semboyan diatas pita diukir dengan bahasa daerah dan huruf *lontara* yang menggambarkan kebudayaan daerah yang sudah tua umurnya.

3.3. Kondisi Fisik Kabupaten Soppeng

3.3.1. Aspek Fisik Dasar

Kabupaten Soppeng memiliki luas wilayah 1500 km² yang terbagi ke dalam 8 (delapan) wilayah kecamatan. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas yaitu Kecamatan Marioriwawo dengan luas 300 km² atau seperlima luas wilayah Kabupaten Soppeng. Jarak ibukota kecamatan Citta ke ibukota kabupaten Soppeng sejauh 35 km dan merupakan ibu kota kecamatan terjauh.

Secara geografis, Kabupaten Soppeng terletak antara 5⁰2'56" sampai 5⁰21'16" Lintang Selatan dan antara 119⁰ 56' 30" sampai 120⁰ 25' 33" Bujur Timur. Secara morfologi, kabupaten Soppeng berada pada ketinggian antara 5 – 1500 meter di atas permukaan laut. Dari luas wilayah tersebut, terdapat lebih dari 55,5 % daerah dataran tinggi 100 – 500 meter dari permukaan laut). Secara klimatologi terletak pada posisi iklim musim timur dimana bulan basah jatuh antara bulan April sampai Oktober dan bulan kering antara Oktober sampai dengan April.

Secara administratif, Kabupaten Soppeng yang memiliki jumlah Desa sebanyak 49 dan 21 kelurahan satuan lingkungan di bawah desa, kelurahan sebanyak 125 lingkungan, 43 dusun, 445 RW, dan 1.191 RT dengan batas-batas wilayah Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Sidenreng Rappang
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Bone.
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone.
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Barru.

Kabupaten Soppeng dialiri oleh 5 sungai antara lain Sungai Langkemme, Soppeng, Lawo, Paddangeng dan Lajaroko. Sementara gunung yang ada di Soppeng antara lain Gunung Nene Conang, Sewo, Lapancu, Pulu-pulu dan Paowengeng. Gunung tertinggi yaitu Gunung Nene Conang yang memiliki ketinggian puncak 1.463 meter di atas permukaan laut.

Untuk lebih jelasnya gambaran mengenai wilayah administratif Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.2
Peta Wilayah Administratif Kabupaten Soppeng



Sumber : Hasil Penelitian, 2018

3.3.2. Aspek Kependudukan

Pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah sangat ditentukan oleh jumlah penduduknya. Berdasarkan data statistik tahun 2018, jumlah penduduk kabupaten Soppeng tahun 2017 sebesar 226.466 jiwa dengan rasio jenis kelamin penduduk berjumlah 89%, terdiri dari 106.594 jiwa penduduk laki-laki dan 119.872 jiwa penduduk perempuan dengan penyebaran penduduk terbesar adalah Kecamatan Marioriwawa yaitu sebanyak 44.899

jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Citta dengan jumlah penduduk yang hanya sebesar 8.101 jiwa. Penyebaran penduduk berdasarkan wilayah kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2017

No.	Kecamatan	Luas/ Area km ²	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1.	Marioriwawo	300	44.899	149,66
2.	Lalabata	278	44.828	161,25
3.	Liliriaja	96	27.244	283,79
4.	Ganra	57	11.448	200,84
5.	Citta	40	8.101	202,53
6.	Lilirilau	187	38.650	206,68
7.	Donri-Donri	222	23.162	104,33
8.	Marioriawa	320	28.134	87,92
Jumlah		1.500	226.466	150,98

Sumber : Kantor BPS Kabupaten Soppeng, Tahun 2018

Pada tahun 2017, Jumlah rumah tangga di Kabupaten Soppeng sebanyak 58 353 rumah tangga dimana kecamatan yang memiliki rumah tangga terbanyak yaitu Kecamatan Marioriwawo sebanyak 11214 rumah tangga. Pada akhir tahun 2017, terdapat sebanyak 441 orang pencari kerja yang terdaftar yang terdiri dari 237 laki- laki dan 204 perempuan. Pencari kerja tersebut paling banyak berada pada kisaran umur 20-29 tahun dan merupakan lulusan SMA Sederajat

Sedangkan kepadatan penduduk setiap km² dihuni sebanyak 150,98 jiwa. Wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar adalah kecamatan Liliriaja yang mencapai 283,79 jiwa per km², dan kepadatan penduduk terendah terletak di wilayah kecamatan Marioriawa yang hanya mencapai 87,92 jiwa per km².

3.4. Potensi Pariwisata Kabupaten Soppeng

Daya tarik wisata Kabupaten Soppeng sangat dipengaruhi oleh karakteristik geografis wilayah pegunungan sehingga didominasi oleh daya tarik wisata tirta berupa permandian wisata alam, agro, situs sejarah dan budaya masyarakat tradisional termasuk kuliner tradisional, maupun *events* (peristiwa pariwisata). Adapun potensi daya tarik wisata Kabupaten Soppeng dilihat dari aspek sejarah, aspek sosial budaya masyarakat, dan sektor-sektor lain yang terkait lainnya

3.4.1. Potensi Wisata Alam

Daya Tarik wisata alam sebagai salah satu daya tarik wisata kabupaten Soppeng menjadi daya tarik utama bagi wisatawan

untuk berkunjung. Data dan sebaran potensi wisata alam kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Potensi Wisata Alam Kabupaten Soppeng Tahun 2018

No	Nama Destinasi	Daya Tarik	Lokasi
1	Kawasan TWA Lejja	1. Permandian air panas 2. Panorama alam 3. Hutan lindung	Desa Babbae Kecamatan Marioriawa
2	Kawasan TWA Danau Tempe	1. Danau 2. Pemukiman terapung	Kel. Limpomajang Kec. Marioriawa
3	Kawasan TWA Citta	1. Permandian alam 2. Panorama alam	Desa Citta Kecamatan Citta
4	Kawasan TWA Goa Coddong	1. Goa puba 2. Panorama Alam	Desa Citta Kecamatan Citta
5	Kawasan Pesuteraan Alam	1. Budidaya murbei 2. Budidaya ulat sutra	Kecamatan Donri- Donri
6	AppejengÉ	1. Sumber mata air asin 2. Panorama alam	Desa Lalabata Riaja Kec, Donri-Donri
7	Kawasan Matabulu	Panorama alam	Desa Matabulu Kec. Lalabata
8	Puncak Biccuing	Panorama alam	Dusun Biccuing Kel. Botto Kec. Lalabata
9	Air Terjun Sarasa Tanre - Gellenge	1. Air terjun 2. Panorama alam	Desa Bulue Kec. Marioriawa
10	Air Terjun Lapasarengi - Datae	1. Air terjun 2. Panorama alam	Desa Bulue Kec. Marioriawa
11	Air Terjun Batumurue-Datae	1. Air terjun 2. Panorama alam	Desa Bulue Kec. Marioriawa
12	Air Terjun Lamelle TeppoE	1. Air terjun 2. Panorama alam	Desa Matabulu Kec. Lalabata
13	Air Terjun Luppereng Kajoe	1. Air terjun 2. Panorama alam	Kec. Donri-Donri
14	Air Terjun Laposo	1. Air terjun 2. Panorama alam	Desa Gattareng Toa Kec. Marioriwawo
15	Puncak Sewo	1. Panorama	Kec. Lalabata

Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2018

3.4.2. Potensi Wisata Sejarah dan Budaya

Selain potensi keindahan alam, tinggalan benda sejarah masa lampau yang dimiliki oleh kabupaten Soppeng memiliki keunikan tersendiri serta memiliki keterkaitan sejarah dengan berbagai masyarakat di berbagai belahan dunia masa lampau. Hal ini menunjukkan posisi dan peran strategis kabupaten Soppeng dalam kehidupan dan peradaban masa lalu termasuk lintas sejarah yang menempatkan kabupaten Soppeng menjadi salah satu bagian dari sejarah tersebut

Kabupaten Soppeng juga memiliki berbagai jenis atraksi budaya sebagai tinggalan kebudayaan berbagai masyarakat yang mendiami dan bermukim serta melakukan hubungan sosial ekonomi di masa lalu. Adapun jenis daya tarik wisata sejarah budaya kabupaten Soppeng terdiri dari benda tinggalan sejarah, tarian, ritual, permainan rakyat, benda pusaka, dan benda cagar budaya lainnya. Jenis daya tarik tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Potensi Wisata Sejarah dan Budaya Kabupaten Soppeng
Tahun 2018

No	Nama Destinasi	Daya Tarik	Lokasi
1	Prosesi Perkawinan	1. Ritual budaya 2. Pakaian adat 3. Musik Tradisional 4. Tari Tradisional 5. Lagu Daerah	Seluruh wilayah kabupaten Soppeng
2	Musik Tradisional	Alat musik tradisional	Seluruh wilayah kabupaten Soppeng
3	Tari Tradisional	Pakaian adat dan jenis tarian tradisional	Seluruh wilayah kabupaten Soppeng
4	Lagu daerah	Alat musik tradisional	Seluruh wilayah kabupaten Soppeng
5	Villa Yuliana (Bola MaccacaE)	Villa peninggalan Belanda	Kecamatan Lalabata
6	Kawasan makam Kuno Jera LompoE	Makam Raja-raja Soppeng	Kecamatan Lalabata
7	Kompleks Istana Datu Soppeng	1. Rumah adat <i>Bola Ridie</i> 2. Atribut Kerajaan 3. Istana/ Salassae Datu Soppeng	Kecamatan Lalabata
8	Makam Syekh Abdul Majid (Tuang Uddunge)	Makam penyebar Agama Islam	Kelurahan Bila Kec. Lalabata
9	Makam Petta Bulu Matanre	Makam sejarah	Kec. Lalabata
10	Situs Megalitik Lawo	Benda cagar budaya	Kec. Lalabata
11	Situs Megalitik Tinco	Benda cagar budaya	Kec. Lalabata
12	Situs Megalitik Sewo	Benda cagar budaya	Kec. Lalabata
13	Situs Megalitik Umpungeng	Pusat/ Titik tengah Indonesia	Kec. Lalabata
14	Makam Petta Seppang	Makam sejarah	Kec. Lalabata
15	Kompleks Makam Datu Soppeng	Makam sejarah	Kec. Lalabata

Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Soppeng 2018-2033

16	Gereja Khatolik Patung Bunda Maria	Patung/ Pieta Bunda Maria	Kec. Lalabata
No	Nama Destinasi	Daya Tarik	Lokasi
17	Rumah Tradisional Batu Laiya	Rumah tradisional	Kec. Lalabata
18	Kompleks makam Jera CaddiE	Makam sejarah	Kec. Lalabata
19	Menhir Latemmamala (LamumpatuE)	Benda cagar budaya	Kec. Lalabata
20	Situs Petta BanuangE	Benda cagar budaya	Kec. Lalabata
21	Situs Petta Wanua	Benda cagar budaya	Kec. Lalabata
22	Makam Lato Gapping	Makam sejarah	Kec. Lalabata
23	Makam Petta Awo	Makam sejarah	Kec. Lalabata
24	Menhir La Temma Pole	Benda cagar budaya	Kec. Lalabata
25	Makam Petta Sering	Makam sejarah	Kec, Donri-Donri
26	Situs Tomanurung Sanyili	Benda cagar budaya	Kec, Donri-Donri
27	Makam Petta AbbaraningngE	Makam sejarah	Kec, Donri-Donri
28	Makam Petta BalubuE	Makam sejarah	Kec, Donri-Donri
29	Bulu BottingngE	Panorama	Kec, Donri-Donri
30	Makam Petta AddagangE	Makam sejarah	Kec, Donri-Donri
31	Makam Datu Mario	Makam sejarah	Kec. Marioriawa
32	Kompleks Makam Petta Jangko	Makam sejarah	Kec. Marioriawa
33	Kompleks Sao Mario	Rumah adat	Kec. Marioriawa
34	Situs Tampaning	Benda cagar budaya	Kec. Marioriawa
35	Makam Kuno Padali	Makam sejarah	Kec. Marioriawa
36	Makam Petta Kajuara	Makam sejarah	Kec. Marioriawa
37	Makam Kuno Datu Lompulle	Makam sejarah	Kec. Ganra
38	Kompleks Makam Pakka SaloE	Makam sejarah	Kec. Ganra
39	Makam Petta Sara'E	Makam sejarah	Kec. Ganra

Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Soppeng 2018-2033

40	Makam Sullewatang Kebo dan Petta Karama	Makam sejarah	Kec. Ganra
No	Nama Destinasi	Daya Tarik	Lokasi
41	Museum Calio	Benda cagar budaya	Kec. Lilirilau
42	Situs Kecce	Benda cagar budaya	Kec. Lilirilau
43	Situs Marale	Benda cagar budaya	Kec. Lilirilau
44	Situs Paroto	Benda cagar budaya	Kec. Lilirilau
45	Kompleks Makam Datu Salaonro	Makam sejarah	Kec. Lilirilau
46	Makam Arung Baringeng	Makam sejarah	Kec. Lilirilau
47	Makam AbbanuangE	Makam sejarah	Kec. Lilirilau
48	Situs Megalitik Samoling	Benda cagar budaya	Kec. Lilirilau
49	Situs Paleolitik Jampu	Benda cagar budaya	Kec. Lilirilau
50	Situs Talepu	Benda cagar budaya	Kec. Liliriaja
51	Situs Lonrong	Benda cagar budaya	Kec. Liliriaja
52	Situs Lenrang	Benda cagar budaya	Kec. Liliriaja
53	Kompleks Makam AbbanuangE	Makam sejarah	Kec. Liliriaja
54	Kompleks Makam Datu Pattojo	Makam sejarah	Kec. Liliriaja
55	Benteng Pattojo	Benda cagar budaya	Kec. Liliriaja
56	Saoraja Seng	Rumah tradisional	Kec. Liliriaja
57	Gua Lakaroci	Gua dan panorama alam	Kec. Liliriaja
58	Gua Coddong	Panorama alam, gua karst dan tengkorak	Desa Citta Kec. Citta
59	Situs Paleolitik Lakibong	Benda cagar budaya	Kec. Citta
60	Makam Datu Citta	Makam sejarah	Kec. Citta
61	Makam KalokoE Watu	Makam sejarah	Kec. Marioriwawo
62	Makam Lato Garimpang	Makam sejarah	Kec. Marioriwawo

63	Situs GoariE	Benda cagar budaya	Kec. Marioriwawo
No	Nama Destinasi	Daya Tarik	Lokasi
64	Situs Megalitik Madenra	Benda cagar budaya	Kec. Marioriwawo
65	Sumur Tua TettikenraraE	Sumur tua	Kec. Marioriwawo
66	Makam Arung Sekkang	Makam sejarah	Kec. Marioriwawo
67	Rumah Arrajang	Rudah adat	Kec. Marioriwawo

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Soppeng, 2018

3.4.3. Potensi Wisata Buatan Manusia (*Manmade*) dan Minat Khusus

Selain potensi wisata alam, sejarah dan budaya, kabupaten Soppeng juga memiliki potensi daya tarik wisata buatan manusia yang cukup menarik minat wisatawan pada saat melakukan kunjungan di kabupaten Soppeng. Potensi wisata buatan merupakan segala bentuk daya tarik yang dibuat atau dibangun oleh manusia secara terencana sebagai sarana bagi wisatawan dalam melakukan aktivitas wisata,

Selain potensi wisata buatan manusia (*man-made*) dan potensi wisata minat khusus juga merupakan sarana atau aktivitas yang dibutuhkan oleh wisatawan pada saat melaksanakan kunjungan ke kabupaten Soppeng. Potensi wisata buatan manusia di kabupaten Soppeng didominasi oleh aktivitas wisata tirta, mengingat potensi alam kabupaten Soppeng sangat didominasi oleh wilayah pegunungan yang kaya akan sumber air.

Selain itu, potensi minat khusus yang dimaksudkan dalam hal ini adalah aktivitas wisata petualangan (*adventure*) yang telah melekat secara operasional dengan daya tarik wisata alam yang telah di kemukakan pada tabel potensi tersebut di atas. Aktivitas wisata petualangan yang telah banyak dilakukan oleh wisatawan di kabupaten Soppeng adalah *trail adventure* oleh berbagai komunitas motor petualangan. Adapun Daya Tarik wisata buatan manusia dan minat khusus kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Potensi Wisata Buatan Manusia dan Minat Khusus
Kabupaten Soppeng Tahun 2018

No	Nama Destinasi	Daya Tarik	Lokasi
1	Kawasan wisata Ompo	Kolam renang dan memancing	Kec. Lalabata
2	Kawasan Wisata Agro	Panorama alam, sayuran dan buah-	Desa Mariorilau Kec. Marioriwawo

No	Nama Destinasi	Daya Tarik	Lokasi
		buahan	
3	Kawasan Wisata Agro	Panorama alam, sayuran dan buah-buahan	Desa Gattareng Kec. Marioriwawo
4	Kawasan TWA Lereng Hijau Bulu Dua	1. Panorama alam 2. Permandian	Desa Gattareng Kec. Marioriwawo
5	Kawasan Adventure Park Gattareng Toa	Panorama alam	Desa Gattareng Kec. Marioriwawo
6	Kawasan Populasi Kelelawar (Taman Kalong)	Populasi Kalelawar	Botto Kecamatan Lalabata

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Soppeng, 2018

3.5. Perekonomian Kabupaten Soppeng

Nilai PDRB Kabupaten Soppeng atas dasar dasar harga berlaku pada tahun 2017 mencapai 8,497 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB tersebut mengalami kenaikan sekitar 1,026 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 7,920 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 5,550 triliun rupiah pada tahun 2016 menjadi 6,012 triliun rupiah pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2017, kabupaten Soppeng mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 8,34 persen, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, dan tidak dipengaruhi oleh inflasi.

3.5.1. Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Dalam lima tahun terakhir yaitu periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, struktur perekonomian kabupaten Soppeng didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan

masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Soppeng.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Soppeng pada tahun 2017 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 30,60 persen atau bertambah dari 30,07 persen pada tahun 2013. Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,63 persen yang menunjukkan penurunan dari 13,01 persen pada tahun 2013, disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 12,59 persen yang juga turun dari 13,36 persen di tahun 2013. Berikutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 10,47 persen atau naik dari 9,48 persen di tahun 2013, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,27 persen. Keadaan ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Soppeng masih mengandalkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sehingga struktur ekonomi daerah ini masih bertumpu pada sektor agraris.

Pada Tahun 2017 kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami peningkatan sebesar 0,53% dari tahun sebelumnya. Sementara untuk sektor pariwisata berupa penyediaan akomodasi dan makan minum hanya mampu menyumbang dan memberikan kontribusi sebesar 1,43 % dan menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2013. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata agar dapat berkontribusi lebih besar dalam struktur perekonomian kabupaten Soppeng. Adapun gambaran mengenai struktur ekonomi Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Distribusi Prosentase PDRB Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 - 2017 (dalam persen)

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017
1.	Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	30,33	28,41	30,26	30,60
2.	Pertambangan Dan Penggalian	3,91	4,19	4,50	4,29
3.	Industri Pengolahan	10,16	10,65	10,39	10,47
4.	Pengadaan Listrik Dan Gas	0,09	0,08	0,08	0,08
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,04	0,05
6.	Konstruksi	12,92	12,91	12,14	12,59
7.	Perdagangan Besar Dan	12,26	12,61	12,57	12,63

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017
8.	Transportasi Dan Pergudangan	2,95	3,46	3,25	3,06
9.	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	1,54	1,52	1,44	1,43
10.	Informasi Dan Komunikasi	2,88	2,72	2,75	2,93
11.	Jasa Keuangan Dan Asuransi	3,44	3,43	3,49	3,30
12.	Real Estate	5,44	5,62	5,61	5,50
13.	Jasa Perusahaan	0,20	0,20	0,20	0,20
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	7,02	7,32	6,58	6,27
15.	Jasa Pendidikan	4,51	4,51	4,35	4,24
16.	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	1,62	1,63	1,63	1,63
17.	Jasa Lainnya	0,67	0,71	0,72	0,72

Sumber : BPS Kabupaten Soppeng, Tahun 2018

3.5.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB kabupaten Soppeng pada tahun 2017 menunjukkan terjadinya peningkatan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Soppeng atas dasar harga konstan 2010, mencapai 6,012 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 5,550 triliun rupiah di tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2017 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 8,34 persen, meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang sebesar 8,14 persen.

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Soppeng selama tahun 2017 meningkat karena sektor Industri Pengolahan dan Konstruksi sebagai salah satu sektor utama penyumbang terbesar PDRB

kabupaten Soppeng mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi. Produksi hasil sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan meningkat dari tahun sebelumnya, tetapi tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya petani tanaman pangan yang beralih pekerjaan dan pelaku usaha di bidang perikanan beralih profesi ke sektor lain terutama ke Perdagangan. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah kabupaten Soppeng untuk membuat kebijakan yang tepat, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan dan saluran irigasi.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh sektor Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 11,99 persen. Salah satu sebabnya adalah karena semakin banyak masyarakat yang membutuhkan kemudahan berkomunikasi menggunakan telepon genggam dengan pulsa. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. 14 lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar lima hingga sepuluh persen. Adapun gambaran mengenai laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Soppeng Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 - 2017 (dalam persen)

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017
1.	Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	7,54	1,48	11,48	8,90
2.	Pertambangan Dan Penggalian	9,42	4,78	10,84	7,69
3.	Industri Pengolahan	11,77	6,54	6,68	10,15
4.	Pengadaan Listrik Dan Gas	5,54	7,95	8,31	5,12
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	1,07	0,52	2,46	7,49
6.	Konstruksi	2,06	5,65	4,03	8,28
7.	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	6,90	7,13	9,71	9,51
8.	Transportasi Dan Pergudangan	9,36	9,05	6,13	7,87
9.	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	8,82	5,54	7,91	10,36
10.	Informasi Dan Komunikasi	0,65	10,43	10,53	11,99
11.	Jasa Keuangan Dan	9,45	5,64	11,56	3,03

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017
12.	Real Estate	12,62	7,89	2,90	3,39
13.	Jasa Perusahaan	4,88	5,84	8,62	7,78
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	3,25	5,07	0,55	4,91
15.	Jasa Pendidikan	5,29	5,77	9,63	7,69
16.	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	8,44	9,17	8,85	9,74
17.	Jasa Lainnya	5,57	7,63	8,00	9,19

Sumber : BPS Kabupaten Soppeng, Tahun 2018

3.5.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/ wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita kabupaten Soppeng atas dasar harga berlaku sejak tahun 2014 hingga tahun 2017 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2013, PDRB per kapita tercatat sebesar 21,15 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 mencapai 39,51 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi

PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya

Perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPR, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel serta lainnya.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/*Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga); c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri. Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut; b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencakup pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang modal. Barang modal dimaksud adalah barang-barang yang digunakan untuk proses produksi, tahan lama atau yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan, mesin-mesin dan alat angkut. Termasuk pula di sini perbaikan besar (berat) yang sifatnya memperpanjang umur atau mengubah bentuk atau kapasitas barang modal tersebut. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer juga dicakup sebagai PMTB. Klasifikasi

komponen PMTB dibagi menjadi 6 sub komponen yaitu Konstruksi; Mesin dan Peralatan; Kendaraan; Peralatan Lainnya; *Cultivated Biological Resources* (CBR) dan Produk Kekayaan Intelektual

Ekspor barang dan jasa merupakan transaksi perdagangan barang dan jasa dari penduduk (residen) ke bukan penduduk (nonresiden). Impor barang dan jasa adalah transaksi perdagangan dari bukan penduduk ke penduduk. Ekspor atau impor barang terjadi pada saat terjadi perubahan hak kepemilikan barang antara penduduk dengan bukan penduduk (dengan atau tanpa perpindahan fisik barang tersebut). Pada PDB dengan tahun dasar 2010, ekspor dan impor barang dirinci menjadi nonmigas dan migas.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya terdiri dalam dua versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu.

Data mengenai laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Soppeng pada tahun 2014-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng
Tahun 2014-2017 (Dalam Persen)

Nilai PDRB (dalam Milyar Rupiah)					
No	Uraian	2014	2015	2016	2017
1	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	6.172,93	6.843,61	7.920,14	8.947,11
2	Atas Dasar harga Konstan (ADHK)	4.567,54	4.882,20	5.131,72	5.549,50
PDRB Per Kapita (dalam Juta Rupiah)					
1	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	27,35	30,27	35,00	39,51
2	Atas Dasar harga Konstan (ADHK)	21,63	22,70	24,52	26,55
3	Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar harga Konstan (ADHK) 2010	6,89	5,11	8,14	8,34
4	Jumlah Peduduk (orang)	225.709	226.116	226.305	226.466
	Pertumbuhan Jumlah Peduduk (persen)	0.09	0.18	0.08	0.07

Sumber : BPS Kabupaten Soppeng, Tahun 2018

BAB - 4

KABUPATEN SOPPENG SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA

4.1. Daya Tarik dan Sumber Daya Wisata Kab. Soppeng

Kabupaten Soppeng memiliki potensi pariwisata yang begitu beragam, khususnya dari sisi produk wisata. Dengan potensi alam dan budaya yang dimiliki, Kabupaten Soppeng menawarkan berbagai daya tarik wisata. Produk wisata Kabupaten Soppeng memiliki keragaman, baik alam yang terdiri panorama alam, gunung, danau, sungai, hutan, air terjun dan sumber mata air, beserta keanekaragaman flora dan faunanya, dataran rendah dengan pola kehidupan masyarakat agraris,. Adapun jenis potensi daya Tarik wisata yang dimiliki oleh kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

4.1.1. Daya Tarik Wisata Alam

1) Kawasan TWA Lejja

Pemandian Alam Air Panas Lejja berada di kawasan hutan lindung berbukit dengan panorama yang indah di Desa Bulu, Kecamatan Marioriawa, 44 km utara Kota Watansopeng yang merupakan ibukota Kabupaten Soppeng. Di tempat ini memiliki sumber air panas dengan suhu mencapai 60°C dengan kadar belerang 1,5% yang dapat menyembuhkan penyakit reumatik, rasa gatal dan sebagai tempat terapi. Pemandian ini merupakan obyek wisata andalan yang banyak dikunjungi oleh wisatawan baik nusantara maupun mancanegara.

Fasilitas yang tersedia di Pemandian Alam Air Panas Lejja ini cukup memadai dengan adanya kolam pemandian umum dan *private*, toilet, ruang bilas, tempat ganti pakaian, pondok peristirahatan, lapangan tenis dan baruga wisata sebagai tempat pertemuan yang bisa menampung 300 orang. Untuk kolam pemandian *private* disediakan dengan rumah panggung kecil yang memiliki kolam di belakangnya dengan lebar 3 meter. Sedangkan untuk kolam pemandian umumnya terdapat 5 kolam dengan fungsi yang berbeda, yaitu :

- a) **Kolam I:** airnya sangat panas, harus berhati-hati jika berada di tempat ini karena telur yang dicelupkan di kolam ini bisa menjadi setengah matang.
- b) **Kolam II:** kolam dangkal dengan air suam-suam kuku yang bisa dipakai untuk anak-anak kecil atau bagi anda yang tidak bisa berenang bisa juga memakai kolam ini.

- c) **Kolam III:** kolam dengan kedalaman sebatas leher dan air suam-suam kuku untuk orang dewasa. Ada pelampung yang disewakan jika anda takut berenang di kolam ini.
- d) **Kolam IV:** air di kolam ini sudah normal, tidak terlalu panas ataupun terlalu dingin dan kolam ini khusus orang dewasa saja.
- e) **Kolam V:** kolam yang berada di sebelah timur ini dilengkapi dengan papan loncatan.

Pengunjung juga bisa melihat sumber air panas dari permandian alam ini dengan menyusuri jalan setapak di sebelah kolam pemandian menuju bukit. Di sana terdapat sungai kecil dengan air panas dan bebatuan yang dialiri air panas dan mengeluarkan asap. Pada ujung jalan, terdapat pohon yang dibawah akarnya terdapat lubang dengan diameter sekitar 50 cm. Disitulah sumber air panas pemandian air panas Lejja.

Di sekitar pohon tersebut banyak dijumpai kaleng dan botol terikat yang dipercaya oleh masyarakat bahwa hal tersebut merupakan simbol pengharapan bagi yang menggantungkan botol atau kaleng tersebut, dimana ketika harapan tersebut sudah terwujud maka orang tersebut akan datang lagi ke Lejja untuk melepas ikatan botol atau kalengnya dan juga sebagai simbol pengikatan hubungan pasangan sejiwa yang datang ke tempat ini.

*Gambar 4-1
Kawasan TWA Lejja*



Sumber : <http://makassar.tribunnews.com/2016/06/20/selama-ini-dikenal-air-panas-lejja-yuk-mandi-air-dingin-lereng-hijau-soppeng>

2) **Kawasan TWA Danau Tempe.**

Danau Tempe terletak di bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan yang meliputi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Soppeng. Pada saat memasuki area danau, terlihat perkampungan terapung yang berjejer indah di atas perairan. Sehari-hari penduduk beraktivitas di kawasan ini dan mereka hanya memiliki izin tinggal di kawasan tersebut. Setiap enam bulan, pemerintah daerah mengkapling pembagian 'lahan' tangkapan ikan bagi nelayan sekitar. Di sekitar

danau, terdapat puluhan perahu terparkir yang digunakan untuk menangkap ikan pada saat air di kawasan danau sedang pasang.

Warga yang tinggal di permukiman terapung Danau Tempe adalah para nelayan yang dulunya tinggal di daratan. Potensi perikanan danau yang besar menjadi daya tarik utama bagi nelayan untuk tinggal di danau. Mereka ingin lebih dekat dengan tempat mereka menangkap ikan sehingga bisa menghemat waktu, tenaga dan biaya bahan bakar. Sebagian lagi tinggal di danau karena tidak memiliki lahan untuk membuat rumah di daratan.

Bagi sebagian warga permukiman terapung menjadi tempat tinggal bagi utama mereka, namun bagi sebagian yang lain hanya menjadikan rumah terapung sebagai tempat istirahat ataupun menyimpan peralatan menangkap ikan karena mereka masih memiliki rumah di daratan. Seluruh aktivitas keseharian dilakukan diatas air. Tidak ada fasilitas umum seperti sarana pendidikan, kesehatan, pasar dan peribadahtan di permukiman terapung. Untuk untuk memenuhi keperluan tersebut penduduk harus naik ke daratan. Sumber air utama untuk mandi dan mencuci adalah air danau, sementara untuk air minum diambil dari sumber air yang ada di daratan

Permukiman terapung Danau Tempe merupakan suatu bentuk permukiman yang unik. Siklus tahunan pasang surut air danau tidak hanya mempengaruhi mata pencaharian penduduk, tetapi juga mempengaruhi posisi permukiman. Adapun posisi permukiman pada saat air pasang adalah di pinggir danau dekat dengan daratan, sementara pada saat air surut posisi permukiman berpindah ke tengah danau atau area di mana air masih ada menggenangi danau.

*Gambar 4-2
Kawasan TWA Danau Tempe*



Sumber : <http://makassar.tribunnews.com/2016/04/13/indahnyaperkampungan-terapung-di-kabupaten-soppeng>

3) Kawasan TWA Citta

Permandian Alam Citta terletak di Desa Citta, yang berjarak sekitar 35 kilometer sebelah timur Kota Watansoppeng. Selain tempat permandian, mata airnya yang jernih mengalir dari celah akar pepohonan sepanjang hari dan penduduk sekitar sering menggunakan mata airnya sebagai obat. Di tempat ini juga disuguhkan dengan pemandangan beberapa air terjun yang menghiasi dinding tebing. Karena kejernihan airnya, kedua permandian alam ini juga menjadi sumber air bersih melalui pengolahan menjadi air mineral oleh sebuah perusahaan swasta nasional.

Pemandian alam citta memiliki tiga kolam renang, dua diantaranya kondisinya masih alami yaitu bagian bawah kolam beralaskan bebatuan. Ketiga kolam memiliki kedalaman yang berbeda sehingga pengunjung yang datang dapat memilih. Kolam pertama diperuntukkan bagi anak-anak karena kedalaman kurang dari 0,5 meter sehingga aman bagi anak-anak yang ingin berenang sedangkan kolam kedua dan ketiga diperuntukkan bagi pengunjung dewasa. Air di kolam yang mengalir terus menerus menjadi kelebihan tersendiri bagi permandian alam Citta di bandingkan dengan permandian yang lain karena pengunjung akan merasakan air jernih dan menyegarkan saat berenang serta aman bagi kesehatan.

*Gambar 4-3
Kawasan TWA Citta*



Sumber : <http://gambarsulsel.blogspot.com/2016/09/di-desa-citta-kecamatan-citta-kabupaten.html>

4) Kawasan TWA Gua Coddong

Kawasan TWA Gua Coddong terletak di Desa Citta, kecamatan Citta, sekitar 53 Km sebelah timur kota Watansoppeng. Kawasan ini merupakan salah satu fenomena alam yang terbentuk di kawasan batu gamping karst sekitar jutaan tahun yang lalu.

Dahulu gua ini digunakan oleh manusia purba sebagai pemukiman, tempat berlindung dari cuaca buruk dan serangan binatang buas. Di dalam gua ini juga ditemukan tengkorak manusia dari spesies etnis bugis.

*Gambar 4-4
Gua Coddong*



Sumber : <https://nyero.id/tempat-wisata-di-soppeng/>

5) Kawasan TWA Lereng Hijau Bulu Dua

Kawasan TWA Lereng Hijau Bulu Dua terletak di Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo. Kawasan TWA Lereng Hijau Bulu Dua terletak pada salah satu akses utama menuju kabupaten Soppeng dari kota Makassar melalui kabupaten Barru.

Pada wilayah ini sangat didominasi oleh Panorama alam yang sangat memukau dengan kombinasi pegunungan, hutan, kebun dan sawah serta air terjun. Pada kawasan ini pula telah dikembangkan kolam permandian yang menarik pengunjung khususnya pada hari libur ataupun yang kebetulan melintas melalui wilayah tersebut.

Kolam permandian permandian yang terletak dekat dengan jalan raya serta berada tepat di lereng bukit menyajikan pemandangan indah dan didukung oleh ketersediaan fasilitas makan minum dan ruang ibadah (mushalla) menjadikan kawasan ini sebagai area peristirahatan yang banyak dikunjungi.

*Gambar 4-5
Kawasan TWA Lereng Hijau Bulu Dua*



Sumber : <https://gosulsel.com/2016/05/22/indahnyakolamrenangyangdiapitlerenghijaubulu-dua/>

6) Kawasan Populasi Kalelawa Taman Kalong

Kawasan populasi kalelawa yang merupakan salah satu fauna identitas kabupaten Soppeng berada di alun-alun Kota Watansoppeng, yaitu Botto, Kecamatan Lalabata. Kawasan populasi kalelawa ini telah dibangun dan menjadi ikon kota Soppeng dan dikenal dengan nama Taman Kalong.

Kawasan Taman Kalong menjadi destinasi wisata murah meriah kebanggaan warga Soppeng. Taman yang diresmikan pada bulan Desember 2017 ini identik dengan ribuan kelelawa yang bersarang di pepohonan. Taman ini juga dilengkapi dengan air mancur warna warni yang membuat suasana malam di Bumi Latemmamala semakin meriah dan penuh warna

*Gambar 4-6
Kawasan Taman Kalong*



Sumber : <https://disbudpar.soppengkab.go.id/taman-kalong-soppeng/>

7) Kawasan Persuteraan Alam Donri-Donri

Pengembangan sutera alam merupakan salah satu ikon kabupaten Soppeng yang sangat dikenal sebagai wilayah penghasil sutera di Sulawesi Selatan. Kondisi alam kabupaten Soppeng yang sangat ideal dalam pembudidayaan tanaman murbei sebagai makanan utama dari ulat sutera, serta tradisi dan kemampuan masyarakat dalam mengolah kokon menjadi benang sutera sebagai bahan baku pembuatan berbagai jenis kain dan kerajinan sutera.

Kawasan persuteraan di kabupaten Soppeng terletak di kecamatan Donri-Donri dimana terdapat kelompok tani sutera, yang tersebar di beberapa desa antara lain: desa Sering, desa Pising, desa Donri-Donri, desa Labokong dan desa Lalabata Riaja.

*Gambar 4-7
Pengolahan Kerajian Sutera*



Sumber : <https://www.antarafoto.com/foto-cerita/v1479999620/menengok-proses-benang-sutera-soppeng>

8) Kawasan *Adventure Park* Gattareng Toa

Kawasan *adventure park* terletak di desa Gattareng Toa kecamatan Marioriwawo. Kawasan ini dapat diakses dari jalur utama kota Makassar ke kabupaten Soppeng melalui kabupaten Barru. Wilayah dengan panorama alam dan kehidupan masyarakat yang sangat mendukung keberadaannya sebagai area wisata petualangan.

Kawasan ini sangat dikenal oleh wisatawan minat khusus petualangan, khususnya komunitas *motor cross* yang ingin menguji adrenalin dalam menikmati hobby sambil menjajal tantangan dan keindahan alam yang masih sangat asri dan bersahaja.

Gambar 4-8
Kawasan Adventure Park Gattareng Toa



Sumber : <http://gattarengtoa.desa.id/2018/07/09/potensi-wisata-desa-gattareng-toa-kecamatan-marioriwawo-kabupaten-soppeng/>

9) **Mattabulu**

Desa Mattabulu kecamatan Lalabata merupakan salah satu daya Tarik wisata alam berupa panorama yang dikembangkan dalam konteks wisata kekinian yang banyak diminati oleh wisatawan, khususnya wisatawan domestik dan masyarakat setempat untuk ber-swafoto (*selfie*). Pesona alam yang dimiliki Desa Mattabulu terletak di puncak gunung Cirowali, Tellongeng sebagai salah satu objek wisata yang menyuguhkan pemandangan jantung kota Soppeng dari ketinggian yang tampak begitu indah dan sangat mempesona

Di lokasi ini, wisatawan juga dapat berkemah di pohon pinus yang ada di Mattabulu. Selain itu, untuk mengikuti tren wisata kekinian di desa ini terdapat Lembah Cinta yang menyediakan gardu pandang, sangkar burung, hingga pohon jomblo untuk menikmati panorama alam cantik dari ketinggian

Gambar 4-9
Kawasan Mattabulu



Sumber : https://www.google.com/search?safe=strict&biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=RBkqXI_eN4zpvqTqrrygAw&q=puncak+matabulu+soppeng

10) Puncak Biccuing

Puncak Biccuing terletak di Dusun Biccuing, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata. Daya Tarik wisata ini merupakan destinasi baru yang digagas oleh generasi muda

Berkembangnya pariwisata di Kabupaten Soppeng mendorong masyarakat untuk berlomba-lomba membuat destinasi wisata baru. Anak-anak muda di Soppeng, tergugah untuk mengoptimalkan potensi wisata di daerahnya. Seperti halnya di lingkungan Biccuing Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Soppeng, para anak muda bersama Tim *Lapanning* Soppeng membuat destinasi Wisata Alam yang dapat memanjakan mata bagi para pengunjung. Panorama alam wisata *Biccuing* tak kalah indah dengan berapa daerah di Sulawesi Selatan, dari puncak ketinggian Kabupaten Soppeng pengunjung dapat melihat keindahan Kota Watansoppeng serta menikmati matahari terbit.

Berburu spot foto cantik ala generasi kekinian yang sedang hits, bisa dilakukan di Puncak Biccuing. Di lokasi wisata ini terdapat monumen cinta, anjungan Biccuing, rumah pohon, dan juga ayunan langit yang akan memberikan sensasi bagi pengunjung.

*Gambar 4-10
Puncak Biccuing*



Sumber : https://www.google.com/search?safe=strict&biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=RBkqXI_eN4z

11) AppejjengngE

Appejjengnge merupakan sebuah sumber mata air garam di kaki bukit di kampung PekkaE desa Lalabata Riaja kecamatan Donri-Donri. Warga yang bermukim di daerah ini memperoleh garam bukan dari laut tapi dari yang bernama AppejjengngE.

Tempat ini sering dijadikan obyek penelitian oleh kalangan kampus dari beberapa perguruan tinggi di Sulawesi Selatan bahkan menurut informasi, beberapa pohon yang tumbuh di sekitar area sumber mata air termasuk pohon-pohon yang langka dan sudah berumur ratusan tahun.

Keunikan lain di sekitar kawasan ini adalah rasa asin dari mata air di AppejjengngE ini ternyata tidak didapati di sumber mata air

lain yang ada di sekitarnya. Sumur yang hanya beberapa meter dari sumber mata air Appejengnge ternyata rasanya tidak asin sedikitpun seperti di tempat ini.

Gambar 4-11
Appejengnge



Sumber : <https://www.google.com/search?safe=strict&biw=>

12) Air terjun *Sarasa Tanre*

Kabupaten Soppeng dikenal kaya akan potensi wisata tirta, termasuk air terjun. Salah satu air terjun yang ada di kabupaten Soppeng adalah air terjun *Sarasa Tanre* yang terletak di dusun Gellenge Desa Bulu Kecamatan Marioriawa.

Air terjun ini berjarak sekitar 60 kilometer dari jantung kota Watangsoppeng dan berdekatan dengan permandian air panas Lejja. Akses ke lokasi air terjun, pengunjung akan memasuki kawasan hutan lindung, tapi bisa dilalui kendaraan roda dua dan roda empat. Dari dusun Gellenge menuju ke kawasan air terjun *Sarasa Tanre* harus ditempuh dengan berjalan kaki dan melitasi beberapa sungai kecil dan melewati trek pendakian sekitar 200 meter. Selama perjalanan pengunjung menikmati pemandangan perbukitan dan persawahan yang luas.

Sesuai namanya, *Sarasa Tanre* disebut sebagai air terjun tingkat tiga, dengan ketinggian sekitar 20 meter, dengan aliran deras yang memanjakan mata. Perjalanan ke lokasi air terjun sebaiknya dilakukan pada pagi hari, untuk menghindari saat balik di sore hari agar menghindari binatang liar seperti babi hutan yang mencari makan di sepanjang jalur menuju air terjun pada waktu sore menjelang malam hari.

Gambar 4-12
Air Terjun *Sarasa Tanre*



Sumber : <https://makassar.terkini.id/sarasa-tanre-wisata-air-terjun- memacu-adrenalin-kamu/>

13) Air Terjun Lapasarengi

Air terjun lainnya Lapaserengi merupakan salah satu air terjun yang terletak di Datae Dusun Mattirobulu Desa Bulue Kecamatan Marioriawa yang menawarkan panorama keindahan alam yang belum diketahui khalayak umum, termasuk masyarakat kabupaten Soppeng. Kebersihan dan keaslian air terjun masih terjaga dan posisinya yang berada di ketinggian membuat wisatawan dapat melihat tebing-tebing tinggi dan lekukan bebatuan yang sangat indah serta kesejukan dan udara segar.

Untuk menuju lokasi air terjun, pengunjung harus melintasi sungai dan menembus hutan belantara adalah hal yang tidak dapat dihindari sehingga pengunjung akan disuguhkan dengan variasi pesona alam hutan dan air terjun.

Untuk mencapai lokasi air terjun Lapaserengi, terdapat dua rute alternatif yang bisa ditempuh yaitu alternatif pertama melalui Kampung Datae sekitar 1 km dari arah barat kampung Datae. dan alternatif kedua melalui jalur kampung Gellenge yang sangat menantang dan sangat sesuai bagi wisatawan petualangan yang hobi naik motor trail dengan menempuh jarak sekitar 2 km.

Pengunjung yang menempuh jalur berjalan kaki menelusuri jalan setapak akan menikmati pemandangan air terjun dari atas karena air terjun di Lapaserengi terdapat tiga buah yang jaraknya hanya sekitar 10 meter dari air terjun yang lainnya sehingga pengunjung yang melalui jalur alternatif kedua akan dapat melihat semua air terjun dari atas, walaupun pengunjung yang melalui jalur kampung Datae yang hanya melihat satu air terjun tapi juga dapat mengaksesnya melalui jalan setapak.

Gambar 4-13
Air Terjun Lapaserengi



Sumber : <http://www.bugiswarta.com/2016/04/ayo-ke-soppeng-kunjungi-pesona-air.html>

14) Air Terjun Batu Murue

Air terjun lainnya yang berada di sekotara lokasi air terjun Lapaserengi yang terletak di Datae Dusun Mattirobulu Desa Bulue Kecamatan Marioriawa adalah air terjun Batu Murue. Sebagaimana halnya dengan dua air terjun lain di sekitarnya, air terjun Batu Murue menawarkan panorama keindahan alam yang belum diketahui khalayak umum, termasuk masyarakat kabupaten Soppeng. Kebersihan dan keaslian air terjun masih terjaga dan posisinya yang berada di ketinggian membuat wisatawan dapat melihat tebing-tebing tinggi dan lekukan bebatuan yang sangat indah serta kesejukan dan udara segar.

Untuk menuju lokasi air terjun, pengunjung harus melintasi sungai dan menembus hutan belantara adalah hal yang tidak dapat dihindari sehingga pengunjung akan disuguhkan dengan variasi pesona alam hutan dan air terjun.

Untuk mencapai lokasi air terjun Batu Murue, terdapat dua rute alternatif yang bisa ditempuh yaitu alternatif pertama melalui Kampung Datae sekitar 1 km dari arah barat kampung Datae. dan alternatif kedua melalui jalur kampung Gellenge yang sangat menantang dan sangat sesuai bagi wisatawan petualangan yang hobi naik motor trail dengan menempuh jarak sekitar 2 km.

Gambar 4-14
Air Terjun Batu Murue



Sumber : <https://makassar.terkini.id/menengok-pesona-air-terjun-batu-murue-soppeng/>

15) Air Terjun Lamelle TeppoE

Air terjun Lamelle TeppoE terletak di Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata dan berada pada ketinggian kurang lebih 1800 meter di atas permukaan laut. Air terjun Lamelle memiliki panorama alam yang sangat indah dan menawan dengan rimbunan pepohonan yang menghijau disekelilingnya.

Aktivitas yang bisa dilakukan di air terjun Lamelle adalah duduk santai di atas batu untuk menikmati indahnya air terjun dan mendengar gemuruh air, mandi atau jika bagi pengunjung yang memiliki cukup nyali untuk menguji adrenalin, pengunjung dapat melompat dari atas air terjun, atau sekedar bermain air, serta berfoto untuk mengabadikan momen indah.

Gambar 4-15
Air Terjun Lamelle TeppoE



Sumber : <http://www.soppengterkini.com/2017/05/air-terjun-lamelle-soppeng-yang-exotic.html>

16) Air terjun Luppereng Kajoe

Air terjun Luppereng Kajoe merupakan salah satu potensi wisata alam air terjun yang memiliki keindahan alam yang sangat eksotis di kabupaten Soppeng. Air terjun ini terletak di kecamatan Donri-Donri, sekitar 20 kilometer dari Ibukota kabupaten Soppeng dan dapat diakses dengan menggunakan kendaraan roda empat maupun roda dua.

Air terjun Luppereng Kajoe memiliki air terjun setinggi 5 meter yang menurut cerita masyarakat sekitar, nama air terjun Luppereng Kajoe yang berarti nenek melompat adalah karena konon di air terjun Luppereng Kajoe ini pernah ada nenek yang melompat di atasnya.

Lokasi air terjun Luppereng Kajoe tidak terlalu terjal sehingga bebatuan yang berada di sekitar air terjun menambah keindahan daerah tersebut dialiri oleh air terjun dapat dijadikan seluncuran oleh pengunjung dan membuat daya Tarik wisata ini ideal untuk melakukan aktivitas *river tubing*.

Gambar 4-16
Air Terjun Luppereng Kajoe



Sumber : <http://makassar.tribunnews.com/2016/03/06/panorama-air-terjun-luppereng-kajoe-soppeng-bisa-berseluncur-di-bebatuan>

17) Air Terjun Laposo

Air terjun Laposo terletak di Bulu Dua desa Gattaraeng Toa kecamatan Marioriwawo, tepatnya di area perbatasan kabupaten Barru dengan kabupaten Soppeng. Akses ke lokasi air terjun membutuhkan waktu sekitar 1 jam dengan berjalan kaki dari pinggir jalan raya.

Untuk menuju ke lokasi air terjun Laposo, pengunjung harus melalui jalur yang sulit dengan hamparan hutan lebat dan hawa dingin. Jalan menuju Air Terjun Laposo juga terjal dan melewati akar-akar pepohonan yang terlihat menua serta rumput-rumput liar.

Perjalanan yang melelahkan dan penuh tantangan menuju lokasi air terjun akan terbayarkan dengan pesona keindahan alam

dan kesejukan alam yang membuat pengunjung betah berlama-lama menikmati keindahan Air Terjun Laposo.

Gambar 4-17
Air Terjun Laposo



Sumber : http://wajoterkini.blogspot.com/2016/03/air-terjun-laposo-di-bulu-dua_27.html

18) Puncak Sewo

Letak geografis, kabupaten Soppeng terdiri perbukitan sehingga daerah ini memiliki banyak tempat atau potensi daya tarik wisata untuk dinikmati, salah satunya adalah Puncak Sewo untuk dapat menikmati kota Soppeng di atas ketinggian 450 mdpl. Puncak Sewo terletak di kecamatan Lalabata, sekitar 45 menit dari kota Watansoppeng dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat.

Setelah sampai di kaki gunung puncak Sewo, pengunjung harus memarkir kendaraan, kemudian melakukan *tracking* melewati tanjakan hingga sampai ke Puncak Sewo dengan jarak untuk mencapai puncak dengan menempuh perjalanan dari kaki bukit, sekitar 1 jam.

Di puncak bukit ini para pengunjung dapat menikmati panorama kota Soppeng baik pada saat matahari terbit pada pagi hari maupun pada saat matahari terbenam di sore hari. Saat berada di puncak, pengunjung akan dimanjakan oleh pemandangan yang sangat menakjubkan dari seluruh kota Soppeng, deretan gunung, hamparan sawah, termasuk danau Tempe dapat terlihat dari puncak bukit Sewo. Kawasan puncaknya yang datar menjadikan kawasan ini sangat cocok dijadikan tempat wisata *camping*.

Gambar 4-18
Puncak Sewo



Sumber : <https://nyero.id/tempat-wisata-di-soppeng/>

4.1.2. Daya Tarik Wisata Sejarah dan Budaya

Potensi wisata sejarah tidak hanya mencakup budaya dan proses perkembangan peradaban suatu masyarakat, tetapi juga termasuk sejarah pembentukan alam. Sejarah budaya Kabupaten Soppeng sebagai wilayah tempat bermukim berbagai masyarakat dengan latar belakang budaya berbeda merupakan potensi tidak kalah menariknya dengan sejarah alam, walaupun pembabakan sejarah budaya Soppeng yang masih harus diteliti lebih jauh.

Kekayaan sejarah kabupaten Soppeng beserta peninggalannya yang begitu beragam dan khas merupakan potensi yang besar bagi pariwisata kabupaten Soppeng. Pengemasan cerita sejarah melalui interpretasi yang baik dan menarik dapat meningkatkan nilai tambah daya tarik wisata sejarah kabupaten Soppeng dan tentu saja merupakan potensi untuk menjaring wisatawan dalam jumlah yang lebih banyak.

Masyarakat kabupaten Soppeng yang religius dan memiliki aturan serta berbagai ciri warisan budaya khas dan nilai-nilai tradisional yang masih tetap dipertahankan merupakan potensi yang sangat besar bagi pengembangan pariwisata kabupaten Soppeng. Kebudayaan Kabupaten Soppeng lainnya yang dijumpai di masyarakat adalah alat musik tradisional, pertunjukan kesenian khas seperti berbagai jenis tarian tradisional, upacara keagamaan serta prosesi adat, merupakan warisan budaya yang bernilai tinggi bagi kepariwisataan kabupaten Soppeng.

Kabupaten Soppeng juga kaya akan event-event pariwisata yang diselenggarakan di beberapa kecamatan setiap tahun, baik yang termasuk dalam *core event*, *major event* maupun *supporting event*. Event-event lainnya yang juga dilaksanakan secara besar-besaran adalah peristiwa peringatan hari-hari besar keagamaan maupun upacara-upacara adat yang terkait dengan mata pencaharian penduduk, seperti pesta panen, dan sebagainya.

Adapun potensi daya tarik wisata sejarah dan budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

1) **Prosesi perkawinan**

Prosesi perkawinan bagi masyarakat Soppeng yang mayoritas merupakan suku Bugis, merupakan hal yang sakral dan penuh dengan atraksi budaya termasuk menggunakan pakaian adat/ tradisional. Upacara ini terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yaitu prosesi lamaran, prosesi malam pacar, prosesi akad nikah, dan prosesi lainnya yang sangat menarik.

*Gambar 4-19
Proses Perkawinan Masyarakat Soppeng*



Sumber : <https://soppengkab.go.id/2017/05/15/putri-bupati-soppeng-menikah-dengan-prosesi-adat-bugis/>

2) **Tari tradisional**

Tari tradisional merupakan kekayaan budaya bugis yang sangat berakar di tengah masyarakat Soppeng. Berbagai jenis tari tradisional hanya dilakukan pada upacara ritual atau prosesi tertentu namun ada pula yang dipertunjukkan pada suasana yang tidak terikat dengan prosesi adat. Beberapa jenis tarian tradisional yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat kabupaten Soppeng dalam beberapa jenis tarian rumpun etnis Bugis, namun khusus untuk beberapa tarian yang identik dengan kabupaten Soppeng adalah Tari Pakkuru Sumange, dan Tari Pattennung.

Gambar 4-20
Tari Pattennung



Sumber : <https://www.google.co.id/search?q=tari+tradisional+di+soppeng&hl>

3) Musik dan lagu tradisional

Sebagaimana halnya dengan tari tradisional maka musik tradisional yang dimiliki dan dipergunakan oleh masyarakat Soppeng juga sangat beragam seperti alat musik tiup, gesek dan pukul pada kebudayaan masyarakat Bugis pada umumnya.

4) Villa Yuliana

Villa Yuliana yang merupakan salah satu bangunan peninggalan Belanda yang lebih dikenal masyarakat Soppeng dengan sebutan Mes Tinggi dibangun tahun 1905. Sebutan itu didasari atas fungsi awal bangunan sebagai tempat beristirahat yang berada di daerah ketinggian kota Watansoppeng.

Keberadaan Villa Yuliana merupakan salah satu bukti sejarah bahwa pemerintah kolonial Belanda pernah menguasai pemerintahan di Sulawesi, termasuk di wilayah kabupaten Soppeng. Kerajaan Soppeng termasuk salah satu dari kerajaan-kerajaan lokal yang turut menyetujui tuntutan pemerintah Belanda untuk menandatangani *korte verklaring* atau pernyataan takluk. Akhirnya pada tahun 1908 seluruh Sulawesi Selatan resmi menjadi daerah jajahan Belanda.

Villa Yuliana konon kabarnya dibangun dalam rangka menyambut kunjungan Ratu Belanda di Sulawesi Selatan namun karena situasi dan kondisi keamanan saat itu yang sangat tidak mendukung, akhirnya Ratu Yuliana mengurungkan niatnya untuk berkunjung ke Sulawesi Selatan. Villa Yuliana kemudian masih tetap difungsikan sebagai salah satu tempat peristirahatan bagi pejabat pemerintah Belanda.

Seiring perjalanan waktu hingga tumbangny masa kejayaan pemerintahan Belanda di Indonesia, maka sejak tahun 1957 sampai dengan 1992 Villa Yuliana tidak lagi ditempati dan difungsikan. Berselang 35 tahun kemudian, tepatnya tahun 1992-

1995 bangunan berarsitektur perpaduan antara bangunan khas Eropa dan rumah Bugis tersebut difungsikan kembali sebagai asrama yang ditempati khusus pegawai bujang Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Villa Yuliana yang memiliki empat kamar masing-masing 2 buah dilantai dasar dan 2 buah di lantai dua yang dilengkapi dengan dua ruang utama, beralih fungsi menjadi Meseum. Meseum yang diberi nama Museum Latemmamala diresmikan oleh penjabat Gubernur Sulsel, Ahmad Tenribali Lamo pada puncak peringatan hari jadi Soppeng ke-747, Ahad 23 Maret 2008.

Di dalam Meseum ini tersimpan beraneka ragam koleksi benda-benda kuno abad 15 sampai 18. Di antaranya mangkok, piring, baki cepuk, guci-guci botol eropa, pasu dan vas bunga eropa abad 18. Selain benda kuno tersebut, di Museum Latemmamala pengunjung juga dapat melihat pajangan beberapa jenis fosil gajah purba (*stegodon sompoensis*) seperti gigi rahang atas, rahang bawah dan *fragmen fort* kura-kura raksasa (*geochelonca atlas*) dan beberapa jenis keramik guci besar-kecil.

Benda koleksi lain dari museum Latemmamala adalah fosil gading gajah purba dan taring babi rusa raksasa (*celebochoerus-heekereni*) yang ditemukan ditemukan G.J Bartstra di Tanjonge di kampung TanjongE, kecamatan Lilirilau, fosil kerbau hutan (*anoa-depresicornis*) berupa kerangka tulang dan giginya, replika fosil tengkorak *homo crectus* (*sangiran-man*), *homo floreensis* (*liang-buah-man*), koleksi uang belanda satu gulden, mata uang jepang senilai lima sen, uang Philipinas limang piso dan uang Indonesia buatan *tempoe doloe* senilai Rp.5 dan Rp.10.

Pada tiga buah ruangan lainnya yang terdapat dilantai dua Meseum ini, juga dipenuhi pajangan benda kuno lainnya seperti kapak genggam (*hand-axe*), kapak perimbas, kapak penetak, alat pemotong, alat serpihan besar, serut samping, pisau batu. serpih bila, alat pelubang, alat serpih persegian dan alat batu *neolitik* (kapak persegian), alat batu zaman kuno berupa pahat bertangkai dan alat penarah.

Di salah satu kamar lantai dua Meseum Latemmamala (Villa Yuliana) Soppeng dipajang khusus peralatan pengantin bugis dilengkapi sepasang boneka sedang bersanding dipelaminan.

Gambar 4-21
Villa Yuliana



Sumber: <https://soppengkab.go.id/2017/07/07/villa-yuliana/>

5) Kawasan Makam Kuno Jera Lompoe

Kawasan makam kuno Jera Lompoe berada di tengah-tengah kota Watansoppeng yaitu di kelurahan Bila kecamatan Lalabata. Lingkungan situs berada di atas bukit kecil yang dikelilingi oleh jalan dan lembah yang tidak begitu dalam. Kompleks makam ini telah dipugar dan ditata oleh Kantor Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar pada tahun 1978. Sehingga status pemilikinya sekarang berada di tangannya pemerintah.

Jera Lompoe, yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti Makam Agung, merupakan kompleks pemakaman raja-raja Soppeng, Luwu dan Sidenreng pada abad ke-17. Pemakaman yang bentuknya merupakan perpaduan pengaruh Hindu dan Islam ini terletak di Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, sekitar satu kilometer sebelah utara Watansoppeng.

Kompleks Makam Jera' Lompoe merupakan pemakaman islam. Di dalam kompleks makam dikuburkan raja-raja Soppeng. Jika dilihat dari keletakan geografisnya, makam ini berada pada ketinggian yang menunjukkan adanya hirarki atau status sosial. Jika ditinjau dari makam-makam yang beragam motif hias pada makam, terbatas hanya pada sulur-suluran, geometris dan flora. Yang paling unik adalah bentuk nisan pada delapan makam di dalam kompleks pemakaman ini yang mengadopsi tradisi mengalik yaitu menhir. Nisan menhir yang paling tinggi mencapai ukuran $\pm 180\text{cm}$ dan yang paling kecil $\pm 50\text{cm}$. nisan menhir pada makam tidak diberi motif hias, batunya merupakan batu andesit yang dihaluskan hingga permukaannya lebih rata. Pada beberapa makam yang bernisan menhir juga diberi lagi nisan yang lebih lebar daripada badan. Sedang bagian kepala nisan dibuat lebih lebar lagi. Nisan ini dibentuk persegi hingga menyerupai nisan pipih. Selain nisan menhir, terdapat jenis nisan lain seperti pipih, gadah dan hulu keris. Dalam kompleks makam ini juga terdapat tiga makam yang mempunyai dua nisan tapi bentuk nisannya berbeda dalam satu makam, yaitu: gadah dengan hulu keris, gadah dengan ulu keris, dan pipih bermahkota dengan ulu keris.

Pemugaran kompleks makam kuno Jera Lompoe dapat diselesaikan dengan tiga tahap yaitu dimulai pada tahun anggaran 1977-1978, dan selesai pada tahun 1979-1980. Letak makam di atas bukit 135 mdpl dan di kelilingi oleh tanah yang lebih rendah, ideal untuk tempat istirahat dan rekreasi. Makam yang berbentuk sebuah kotak batu persegi empat pada dinding sebelah utara dan selatan di bagian atasnya dibuat meruncing di bagian tengah. Makam yang secara susun timbun dengan menyusun balok-balok batu persegi dan di atasnya di tutupi dengan atap, dan bentuknya menyerupai bentuk atap rumah Bugis / Makassar. Di atas atap di tancapkan batu Nisan dan jenisnya vulkanik yang keras dengan ukuran yang cukup.

Bentuk makam pada kompleks makam Jera Lompoe lebih sederhana bila dibandingkan dengan makam Raja-Raja Islam lainnya di Sulawesi selatan. Secara keseluruhan bentuk makam sama bangunan Rumah dengan bangunan atap Rumah Bugis/

Makassar di atasnya di tancapkan nisan besar satu atau dua buah mengingatkan kita batu megalithik. Keunikan yang dimiliki Makam Jera' Lompoe ialah dengan memiliki nisan yang berbentuk keris dua buah dengan hiasan ukiran tumbuh-tumbuhan. Gaya hias menunjukkan transisi antara pra Islam dan Islam.

Makam-makam yang ada dikelilingi oleh pagar batu padas berbentuk empat persegi panjang yang disusun timbun dengan ukuran panjang 27 meter, lebar 23 meter dan tinggi 2 meter. Di dalam pagar inilah terdapat 30 buah makam, namun sekarang baru 13 tokoh yang diketahui dimakamkan di pemakaman tersebut, masing-masing Petta Lawareang; We Ada (Datu Soppeng ke-16); La Tenri Bali (Datu Soppeng); We Tenri Kawareng; Addatuang Sidenreng; La Unru (Datu Soppeng ke-20); Datu Mari-mari; Datu Madello; PajungngE ri Luwu; Petta BuluE; Petta Ambona Salengke; Besse Darapeng; dan Petta SojoE.

Makam-makam yang berada dalam kompleks pemakaman ini terbuat dari batuan andesit. Nisan yang berbentuk Gada berarti makam laki-laki, dan nisan yang berbentuk Pipih berarti makam perempuan. Makam yang memiliki hanya satu nisan berarti makam laki-laki dan makam yang memiliki dua buah nisan berarti makam perempuan. La berarti laki-laki dan We berarti perempuan.

Gambar 4-22

Kompleks Makam Jera' Lompoe



Sumber: <http://makassar.tribunnews.com/2016/04/14/foto-cagar-budaya-jera-lompoe-di-soppeng>

6) Kompleks Istana Datu Soppeng

Kompleks Istana yang dibangun pada tahun 1261 M ini berlokasi di jantung Kota Soppeng, berhadapan dengan Villa Yuliana. Kota Soppeng pada masa lalu merupakan bekas Kota Kerajaan yang memiliki kekuasaan cukup luas. Komplek ini dahulu dibangun oleh I Latemmamala yang bergelar Petta Bakkae.

Di dalam komplek ini terdapat beberapa bangunan bersejarah. Di antaranya *Bola Ridie* (rumah kuning) untuk menyimpan benda-benda atribut Kerajaan Soppeng, Komplek makam Jera Lompoe yang merupakan pemakaman raja-raja Soppeng dan *Kalokoe Watu* yang di dalamnya terdapat makam We Tenri Sui, Ibunda Arung Palakka, *Salassae* atau bekas Istana Datu

Soppeng, dan Menhir Latammapole yang merupakan tempat melaksanakan hukuman bagi pelanggar adat.

*Gambar 4-23
Kompleks Instana Datu Soppeng*



Sumber: <http://ahmadfandysugestiawan.blogspot.com/2014/01/harapan-soppeng-sebagai-kota-budaya-dan.html>

7) Makam Syekh Abdul Madjid (*Tuang Uddunge*)

Cagar budaya Tuan Uddungeng adalah makam Syekh Abdul Majid bin Syadiq al Khahar. Syekh Abdul Majid menyiarkan Islam Tahun 1609 di Bumi Latemmamala pada masa Datu Soppeng ke XIV Beowe dan wafat tahun 1635 dan di makam kan di Uddungeng Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

Syekh Abdul Madjid menyampaikan ajaran agama Islam melalui tatanan adat mereka. Datu soppeng bersama pemangku adat dapat menerima ajaran agama Islam dan dengan mengucapkan kalimat Syahadat dihadapan Khatib tunggal sebagai saksi dari kerajaan Gowa yang di tuntun oleh Syekh Abdul Madjid bin Syadiq Al Kahar. Datu Soppeng Beowe XIV secara resmi memeluk agama Islam dengan gelar Petta Mula Sellenge. Syekh Abdul Madjid bermukim di sebelah barat kota Watansoppeng sekitar 5 km dari ibu kota Watansoppeng sebelah selatan Gunung Dua. Disanalah beliau dimakamkan dengan nama kebesarannya Tuan Uddungeng.

Sebelum masuk dan berziarah di pemakaman tersebut, pengunjung harus benar-benar bersih. Pengunjung harus berwudhu disumur dekat pemakaman tersebut. Konon katanya, sumur tersebut ada karena pada masa itu Soppeng pernah mengalami musim kemarau panjang. Bertemulah Datuk Ribandang dan Datu Soppeng membicarakan bagaimana agar sesegera mungkin mendapatkan sumber air. Kemudian seketika itu Datu Soppeng menghentakkan tongkatnya ke tanah, lalu muncul sebuah titik mata air yang kemudian dijadikan sumur dan

digunakan hingga sekarang. Orang-orang yang datang berziarah dimakam itupun tidak sedikit yang mengambil dan membawa pulang air tersebut untuk mereka jadikan obat. Didalam area pemakaman, terdapat sekitar 23 jumlah pemakaman diantaranya pemakaman *Syekh Abdul Madjid* itu sendiri, istrinya, Raja Leworeng, dan selebihnya adalah keluarga bangsawan.

Orang-orang yang datang berziarah kemakam *Tuan Uddungeng* tidak hanya berziarah seperti ziarah biasanya. Umumnya mereka membawa sesajian, biasanya juga ada yang menyembelih kambing, ayam, atau sapi ditempat pemakaman itu. Sebelum Sesajian itu dimakan, mereka terlebih dahulu melakukan sebuah ritual. Ritual yang dimaksud bukan berupa penyembahan selain Allah, karena mungkin banyak yang mengartikan salah ritual tersebut, ritual tersebut dilakukan hanya sebagai pelepas nadzar. Biasanya pemakaman Tuan Uddungeng ramai dikunjungi pada waktu-waktu tertentu saja. Hanya pada waktu Musim Haji, Sesudah Hari Raya, sesudah musim panen, dan waktu-waktu tertentu lainnya seperti ketika ada keluarga yang melaksanakan pesta pernikahan kemudian keluarga dari yang melaksanakan pesta bernadzar akan datang berziarah kemakam Tuan Uddungeng setelah acara pernikahannya selesai dilaksanakan. Adapula dari mereka yang datang karena memimpikan tempat pemakaman Tuan Uddungeng tersebut. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang sedang sakit dan sudah berobat kemana-mana namun belum juga sembuh.

*Gambar 4-24
Kompleks Makam Tuan Uddungeng*



Sumber: <http://www.soppengterkini.com/2016/04/paska-pengerusakan-makam-petta.html>

8) Makam Petta Bulu Matanre

Warga Soppeng menyebut situs keramat yang berlokasi di Desa Mattabulu, Kecamatan Lalabata, tersebut dengan Petta Bulu Matanre. Lokasi makam dapat diakses dengan menggunakan kendaraan roda dua sekitar 1 jam melalui medan yang sangat menantang karena melalui beberapa jurang di sisi kiri dan kanan jalan. Lokasi makam yang berada pada kawasan hutan yang sangat lebat sehingga memungkinkan pengunjung untuk

menjumpai kelompok kera yang bermain dan bergelantungan di pohon-pohon.

Beragam versi cerita tentang sosok Petta Bulu Matanre. Salah satunya menyebutkan Petta Bulu Matanre sebagai sosok bangsawan tertinggi yang diyakini masih keturunan Raja Luwu. Kerajaan Soppeng makmur dan tersohor selama dipimpin Petta Bulu Matanre sehingga rakyat sangat mencintai dan menghormatinya. Untuk menghormati beliau, maka makamnya dibuat di puncak gunung tertinggi di Kota Soppeng beserta dengan kerabat dan para pengikut setianya.

Selain dikenal karena sifatnya, Petta Bulu Matanre juga diyakini masyarakat Soppeng memiliki kesaktian yang bisa mendatangkan keberuntungan serta keselamatan hidup. Masyarakat hampir setiap tahun gelar pesta Adat *Mattaungeng* dengan acara puncak mengorbankan seekor sapi atau kerbau. Acara ini juga dimaksudkan sebagai wujud syukur masyarakat atas penerimaan penghidupan selama setahun penuh dengan harapan kehidupan yang akan datang tetap diberi berkah dan keselamatan dari Allah SWT.

Pagelaran pesta adat *Mattaungeng* juga dimeriahkan dengan tarian sakral Bugis kuno yang disebut *Mappadendang*. Irama serta tarian dari para penari akan semakin menghentak secara magis seiring malam yang semakin larut. Penari terkadang kerasukan dan diyakini dirasuki oleh roh leluhur yang ada pada makam keramat Petta Bulu Matanre tersebut.

*Gambar 4-25
Makam Petta Bulu Matanre*



Sumber: <http://makassar.tribunnews.com/2016/04/12/makam-raja-bulue-soppeng-dirusak-dinding-berlubang>

Hingga saat ini, belum ada yang bisa memberikan kepastian sosok Petta Bulu Matanre tersebut. Selain dikenal sebagai raja yang merupakan keturunan Raja Luwu, keyakinan masyarakat Soppeng lainnya juga ada yang meyakini jika Petta Bulu Matanre adalah seorang kiai dari kota suci Mekkah.

Bagi pengunjung yang ingin berziarah sebelumnya harus melapor pada petugas. Situs ini mempunyai juru kunci makam

yang telah dipegang secara turun-temurun. Diyakini bahwa hanya dari garis keturunan merekalah yang berhak untuk menjaga makam kuno yang dianggap keramat tersebut

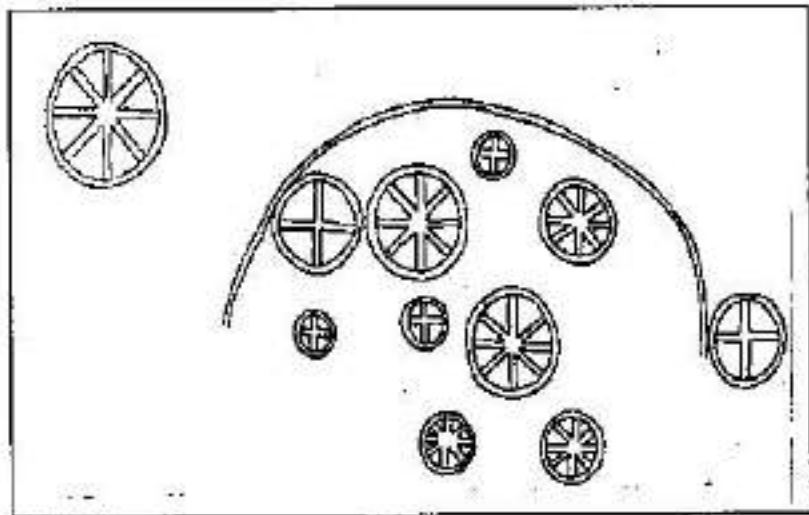
9) Situs Megalitik Lawo

Situs Lawo terletak di permukiman sebelah utara temuan terdapat sungai Lawo di sebelah barat situs Tinco. Temuan ini terletak di dusun Lawo, desa Ompo, kecamatan Lalabata. Situs ini berjarak dari jalan raya sekitar ± 50 meter. Temuan pada situs ini berupa unsur-unsur peninggalan megalitik berupa batu dakon, lumping, batu berlubang persegi, dolmen, dan batu bergores yang tersebar di sekitar pemukiman penduduk.

Bentuk goresan terdapat pada batu yang berposisi arah timur-barat, dari jenis batuan andesit. Tinggi batu sekitar 400 cm, lebar 440 cm, dan tebalnya 135 cm. Pada sisi bagian selatan batu terdapat goresan berupa garis-garis melingkar menyerupai bentuk roda atau cakera dalam agama Hindu sebanyak 11 buah berdiameter 13 cm – 40 cm dengan jari-jari lingkaran berjumlah 4 dan 8.

Sejumlah 9 buah lingkaran berada dalam bingkai setengah lingkaran. Lingkaran yang berada di sisi timur dan barat bingkai masing-masing berjari-jari 4 dan 8. Orientasi gambar menunjukkan susunan goresan garis melingkar adalah timur-barat.

*Gambar 4-26
Sketsa Gambar Pada Situs Lawo*



Sumber: Jurnal WalennaE, Vol.V No. 9, November 2002, Hal. 38

10) Situs Megalitik Tinco

Situs megalitik Tinco terletak di Dusun Tinco Desa Ompo. Berada ± 600 meter sebelah timur jalan provinsi pada kilo meter 7 jurusan Watansoppeng-Sidrap, karena letak benda cagar budayanya berada di dua tempat, maka diputuskan untuk memberi nama dengan sebutan Tinco 1 dan Tinco 2.

Tinco 1 dan Tinco 2 telah dipagari oleh Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulselra (sekarang Kantor Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar) pada tahun 1993. Lingkungan situs berada pada lereng bukit yang ditumbuhi pohon bamboo dan kebun murbei.

Benda cagar budaya yang ditemukan di Tinco 1 ini berupa dolmen sebanyak 2 buah. Antara dolmen pertama dan yang ke 2, berjarak ± 30 meter. Dolmen pertama cenderung berbentuk lonjong, namun pada bagian permukaannya yang datar terdapat sebuah goresan melintang. Di bawah meja batu yang tidak berkaki ini terdapat sebuah lubang sedalam 30 cm. Oleh masyarakat sekitar dolmen pertama dipersonifikasikan sebagai tokoh Petta Passaunge.

Dolmen ke-2 berbentuk lonjong, namun permukaannya datar. Di bawahnya terdapat lubang kedalam tanah. Oleh masyarakat sekitarnya dolmen kedua dipersonifikasikan sebagai tokoh Petta Pallunrumae, kedua dolmen ini berfungsi sebagai media upacara.

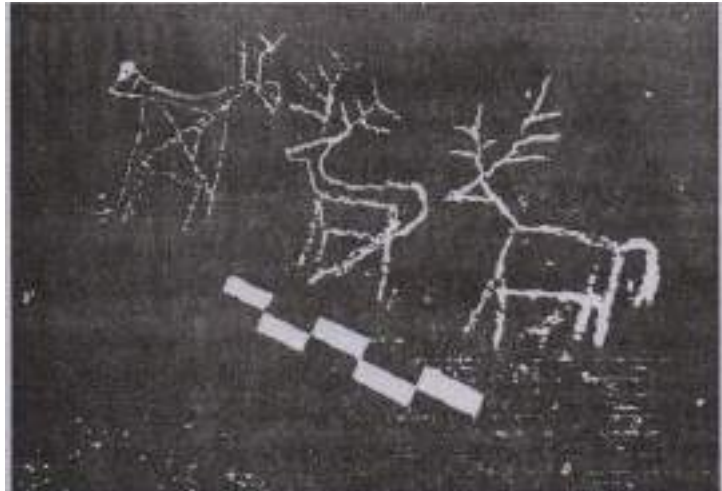
Tinco 2 terletak ± 100 meter sebelah timur Tinco 1. Lingkungan alamnya diapit oleh sebuah irigasi pada bagian utaranya, kebun kelapa pada bagian timurnya dan diapit oleh sungai Lawo pada bagian barat dan timurnya.

Benda cagar budaya yang ditemukan di Tinco 2 ini adalah sebuah batu alam berbentuk lonjong berukuran tinggi 53 cm dan panjang 97 cm. Di sekeliling batu ini telah dilantai tembok dan sudah diatapi. Sedangkan pada sisi lantai terdapat teras-teras dari batu kali yang disusun rapi. Menurut cerita dari masyarakat, tempat ini dianggap sebagai tempat duduk Latemmamala Petta ManurungngE ri Sekannyili. Sekarang difungsikan sebagai media upacara yang dikelilingi para Bissu.

Temuan-temuan yang terdapat di situs ini adalah sebagai berikut:

- a. Batu dakon. Batu ini terletak di kebun coklat.
- b. Batu bergores. Batu ini memiliki dakon dibagian atasnya, serta gambar rusa dibagian samping batu.
- c. Lumpang batu
- d. Altar batu
- e. Batu dulang
- f. Batu dakon. Batu ini dipagari dengan pondasi.
- g. Batu bergores. Batu ini juga dipagari dengan pondasi.

Gambar 4-27
Sketsa Gambar Pada Situs Tinco



Sumber: Jurnal WalennaE, Vol.V No. 9, November 2002, Hal. 37

Saat ini Situs Tinco merupakan kebun penduduk yang menyebabkan banyak data arkeologis yang tidak insitu lagi, bahkan rusak dan hilang. Data artefaktual yang ada adalah batu tegak (menhir), batu dulang, lumping batu, dakon, batu berlubang persegi, teras berundak, temu gelang, dolmen, batu bergores, makam kuno, fragmen gerabah dan keramik asing.

11) Situs Megalitik Sewo

Menurut Naskah Lontarak Bugis, di situs Megalitik Sewo merupakan tempat pelantikan raja Soppeng. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya peninggalan berupa Batu Lumpang (Batu tempat pencucian kaki sang raja). Situs Sewo merupakan situs Petta Allangkanang-e (batu pemujaan). Dimana Petta merupakan orang yang dituakan, sedangkan Allangkanang-e merupakan rumah tempat pertemuan pada waktu zaman air/ taman menurun. Di situs ini terdapat:

- a. Di sebelah utara terdapat dakon yang digunakan untuk mengitung hari baik.
- b. Di sebelah utara terdapat dolmen yang berguna sebagai tempat sesajian/ tempat duduk.
- c. Disebelah selatan terdapat batu pemujaan yang digunakan untuk tempat pertemuan. Batu ini terdiri dari batu-batu bersusun dan bertingkat dua (teras berundak). Dimana sesuai konsep kosmologi bahwa semakin tinggi, semakin sakral.
- d. Batu pemujaan yang digunakan untuk pemujaan atau upacara untuk keperluan aktivitas berladang.
- e. Lumpang batu berada disekitar batu pemujaan nomor empat.
- f. Dolmen berguna sebagai tempat diletakkan sesajian untuk upacara.

- g. Dakon berfungsi untuk menghitung hari-hari baik. Lubangnya berukuran 7 x 7 cm.
- h. Dulang yang berguna untuk tempat air suci.
- i. Batu pemujaan berbentuk kerucut dan besar. Berada dekat dengan pohon besar. Di dekat batu pemujaan terdapat lubang batu dan altar. Tempat batu pemujaan ini berbentuk teras berundak.
- j. Lumpang batu terletak di sebelah barat dari batu pemujaan dan berada di daerah yang lebih rendah dari batu pemujaan. Lumpang batu memiliki lubang yang kecil dan berada di tempat batu yang besar.
- k. Lumpang batu terletak di sebelah barat dibagian ketinggian dekat dengan batu pemujaan, dakon, dan dolmen. Lumpang batu memiliki lubang yang besar dan sudah sedikit patah.
- l.

*Gambar 4-28
Lumpang Batu Pada Situs Megalitik Sewo*



Sumber: <http://guraru.org/guru-berbagi/pembelajaran-sejarah-melalui-edutainment-education-and-entertainment-2/>

Dibagian luar kompleks yang dipagari diatas, ternyata dibagian luar masih terdapat lumpang batu. Batu pemujaan = Langkan = Istana = Tempat tamu. Batu ini disebut Bongketau. Batu tersebut melengket pada akar pohon yang masih terdapat bekas-bekas sesajen seperti gelas dan talangnya (mangkuk kecil) yang berada sekitar ± 6 meter. Situs sewo berada pada ketinggian yang menambahkan indikasi kalau batu pemujaan ini memang masih digunakan sebagai tempat pemujaan, selain temuan non artefak lainnya yang menunjang data mengenai hal tersebut.

Batu pemujaan ini diberi undakan, jarak undakan pertama mengelilingi batu altar berjumlah dua buah. Undakan kedua dua meter sedangkan undangan atau teras ke tiga mengarah ke utara berjarak ± 1 meter dari pagar kawat situs ini.

12) Situs Megalitik Umpungeng

Situs Umpungeng terletak di sebuah kawasan yang hingga saat ini masih sangat terisolir meski berada di sebuah kecamatan kota bernama Lalabata di Kabupaten Soppeng. Kampung beradaban kuno Bugis bernama Tanah Rigella, Tanah Maradeka, Tanah Ancajingeng, Toddang Angin, Tanah Boccoe, Lalabata atau yang kini dikenal dengan nama Umpungeng.

Umpungeng berasal dari kata Assisumpungeng yang berarti Silaturrahiim. Inilah tempat dimana pernah menjadi pusat pertemuan bangsa-bangsa Bugis, Menggelar upacara-upacara pelantikan dan termasuk wilayah yang aman untuk persembunyian para tokoh penting seperti Arung Palakka.

Posisi kampung Umpungeng berada di puncak salah satu dari tiga deretan bukit yang terbentang dari timur ke barat. Nampak menyerupai tubuh manusia yang tengah terbujur dengan posisi kaki di sebelah timur dan kepala di sebelah barat. Kampung Umpungeng terletak persis di atas puncak bukit bagian tengah. Di tengah-tengah perkampungan ini terdapat situs megalitikum berupa lingkaran batu yang dinamakan GarugaE. Di tengah lingkaran tersebut terdapat satu batu yang menjadi tanda *possit tanah* (pusat bumi). Yang menarik adalah kampung Umpungeng diapit oleh dua sungai yang indah serta dikelilingi oleh Gunung yang ketinggiannya berkisar 1000 s.d 1500 mdpl.

Secara regional posisi Umpungeng berada diantara pusaran 5 Kabupaten dan 1 Kota yang penduduknya merupakan suku Bugis yakni sebelah barat terdapat Kabupaten Barru, sebelah utara terdapat kota Pare-Pare dan kabupaten Sidrap, sebelah timur terdapat kota Soppeng dan kabupaten Wajo, sebelah selatan terdapat Kabupaten Bone. Hal ini membuat Posisi Umpungeng memiliki posisi sebagai titik pusaran regional suku Bugis yang sangat strategis.

Batu memiliki karakter sebagai benda padat yang keras, di beberapa tempat bersejarah dan berpengaruh di berbagai belahan dunia ini umumnya terdapat tanda-tanda sejarah yang terbuat dari batu. Sebegitu pentingnya yang bernama batu, maka pernah berlalu suatu zaman di dunia ini yang masyarakatnya hanya mengenal batu sebagai alat utama, maka disebutlah era tersebut sebagai zaman batu.

Secara khusus, sebuah batu yang disebut Batu Pertengahan (*Possit Tanah*) pada *Laleng Batul Lalabata* (dalam lingkaran batu) bernama *GarugaE*. Batu yang bentuknya biasa-biasa saja ini sepiantas tidaklah bernilai apa-apa. Batu yang merupakan tanda pertengahan (*Possit Tanah*) itu diletakkan persis pada posisi pertengahan.

Fakta bahwa antara data manual dan berbasis teknologi terdapat keselarasan diantara sebuah tanda (Pusat Tanah) manual yang sudah terlebih dahulu dikenal dan dipersepsikan masyarakat lokal sebagai titik pertengahan tiba-tiba hadir sebuah aplikasi teknologi super canggih yang dapat membenarkan posisi tanda

yang berada di Lalabata Umpungeng tersebut sebagai Titik Tengah Indonesia.

*Gambar 4-29
Umpungeng*



Sumber: <http://titik0indonesia.blogspot.com/2015/08/titik-tengah-indonesia-2.html>

13) Gereja Katholik Patung Bunda Maria

Salah satu daya tarik wisata di kabupaten Soppeng adalah Patung Bunda Maria Pieta. Patung tersebut didatangkan langsung dari Vatikan pada masa kolonial Belanda. Keberadaan patung tersebut di Soppeng adalah hal yang tidak disengaja karena sebenarnya bangsa kolonial ingin menyebarkan agama Katolik di Bandung, tapi karena waktu itu Soppeng menjadi salah satu wilayah yang teraman dan damai, maka patung tersebut dibawa dan disembunyikan oleh anggota militer Belanda yaitu Pastor Leo Blot, CICM, sekaligus orang pertama yang diangkat jadi pastor di gereja Gereja Katolik Paroki Santa Perawan Maria Bunda Pengharapan Suci Soppeng yang berlokasi di Jalan Samudera No 48, Watansoppeng, sekitar 20 menit dari pusat kota.

Patung Pieta mengisahkan sosok Bunda Maria yang memangku jenazah anaknya, yaitu Yesus Kristus yang telah mati disalib. Keunikan tersebut membuat ribuan umat Katolik berbondong-bondong datang sepanjang bulan Mei yang diperingati sebagai bulan Mariam, dan Oktober sebagai bulan Rosario. Warga sekitar yang berasal dari berbagai agama pun membantu menyediakan makanan hingga *homestay* bagi wisatawan

*Gambar 4-30
Patung Bunda Maria Pieta*



Sumber: <http://travel.tribunnews.com/2016/12/02/soppeng-inilah-satu-satunya-patung-bunda-maria-dari-vatikan-di-indonesia-ini-keistimewaannya>

14) Kompleks Makam Petta Ujung

Kompleks makam Petta Ujung termasuk dalam wilayah administratif Dusun Donriaja, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Jarak dari ibukota Kecamatan ke kompleks makam ini kira-kira 8 Km arah timur. Kompleks Petta Ujung ini terletak di atas bukit dengan ketinggian \pm 82 mdpl. Keadaan lingkungan di sebelah utara dan timur terdapat perkebunan coklat, sebelah selatan dan barat terdapat lembah Calio. Luas keiling kompleks makam ini 100 m².

Unsur bangunan asli hanya terdiri dari tancapan nisan tunggal yang menyerupai menhir, tidak menyerupai bentuk tertentu. Makam dibuat dengan sistim susun timbun, dengan orientasi makam utara selatan. Jumlah makam sebanyak 17 buah dan satu buah makam terletak di luar pagar dengan ukuran nisan sebagai berikut:

- a. Ukuran besar 6 buah dengan Tinggi 160 cm; Lebar 50 cm; dan Tebal 20 cm
- b. Ukuran sedang 11 buah dengan Tinggi 59 cm; Lebar 54 cm; dan Tebal 10 cm.

Yang menarik pada situs ini yaitu pada bentuk nisan yang besar menyerupai menhir dan pada bagian permukaan tanah di sekitar kompleks makam ini ditemukan pecahan keramik local dan keramik asing serta beberapa lumping batu dari berbagai ukuran.

Di dalam kompleks makam terdapat makam seorang tokoh, yaitu Andi Mastuang yang digelar Petta Ujung. Pada masa hidup beliau pernah menjabat sebagai panglima perang di kerajaan Bone dan juga pernah terlibat dalam perang melawan tekanan dari kerajaan Gowa. Menjelang akhir hidupnya, beliau hijrah ke daerah perbatasan Bone dan Soppeng (sekarang Desa Parinring). Di

tempat inilah bersama keluarga dan pengikutnya membuat suatu perkampungan yang disebut Kampung Ujung dan di tempat ini pula beliau wafat.

15) Kompleks Makam Jera CaddiE

Kompleks makam Jera CaddiE terletak di kelurahan Bila kecamatan Lalabata berada sekitar 500 meter sebelah timur dari kompleks makam Jera Lompoe. Lingkungan situs berada di sebuah bukit kecil yang dikelilingi oleh perumahan penduduk, kecuali bagian selatan diapit oleh jalan beraspal. Kompleks makam ini telah dipagar oleh Pemerintah kabupaten Soppeng status kepemilikan berada ditangan pemerintahan daerah.

Disamping makam kuno, di kompleks makam ini juga terdapat makam-makam baru. Makam kuno yang terdapat di kompleks ini berjumlah 56 buah. Tokoh utama yang dimakamkan di tempat tersebut adalah La Mappa Poleonro, Datu Soppeng ke-28 yang memerintah pada tahun 1765-1820. Tokoh lainnya adalah Abdullah Gani Baso Batupute, Datu Soppeng yang ke-34 dan memerintah tahun 1878-1895.

Jirat makam yang ada ditempat ini berbentuk peti batu, dibuat dengan 2 cara. Cara 1 ; dibuat dengan batu monolit yang dipahat hingga membentuk peti batu tanpa dasar, dan cara 2; papan batu disambung dan saling mengikat pada ujung papan batu tersebut. Unsur lain yang melengkapi makam adalah gunung, pelipit dan ragam hias.

Gunung terletak dibagian atas kedua ujung jirat. Pelipit adalah suatu bidang tebal yang lebih tinggi dari bidang di bawahnya yang memanjang secara horizontal pada badan jirat bagian atas. Ragam hias yang ditemukan di kompleks makam ini terdiri dari sulur-sulur daun dan bunga matahari yang distelir, ragam hias spiral, sisik, dan inskripsi. Penempatan bentuk ragam hias sulur daun dan bunga matahari serta spiral umumnya mengambil tempat pada bagian badan jirat, namun ada juga yang ditemukan pada bagian gunungannya. Inskripsi dan ragam hias sisik ditempatkan pada bidang pelipit dan gunung. Khusus pada inskripsi medallion dan menerangkan tokoh siapa yang dimakamkan dan dilengkapi dengan angka tahun meninggalnya. Seperti pada salah satu makam yang menerangkan angka tahun 1200 H. Biasanya berbentuk sebuah wacana ayat Al-Quran yang selalu didahului dengan Lailahaillallah. Inskripsi ini menggunakan huruf Arab.

Teknik pembuatan ragam hiasnya dilakukan dengan cara memahat/ukir batu makam hingga membentuk ornament-ornamen timbul. Kalau diperhatikan secara seksama terdapat jirat yang dibuat dari papan batu sedangkan yang berasal dari batu monolit seringkali tidak ditemukan. Jirat makam terbesar milik tokoh Abdul Gani berukuran panjang 267 cm, lebar 93 cm, dan tinggi 35 cm.

Nisan yang ditemukan dari makam Jera Caddie terdiri dari nisan berbentuk balok, bentuk balok bertingkat, balok bermahkota, bentuk gada, bentuk pipih dan bentuk tiang batu. Nisan bentuk

balok yaitu nisan batu dimana dimensi lebar dan tebalnya seimbang. Nisan balok bertingkat pada dasarnya adalah balok batu yang bersusun dimana kesan susunannya dipisahkan oleh yang lebih lebar dari ukuran balok di atasnya.

Nisan balok bermahkota yaitu nisan yang pada bagian ujung atasnya berbentuk mahkota. Nisan bentuk gada adalah nisan yang berbentuk bulat dan hanya dapat diukur secara melingkar atau diameternya. Nisan bentuk pipih ditandai dengan dimensi lebarnya yang lebih besar dibanding dimensi tebalnya. Sedang yang dimaksud dengan nisan bentuk tiang batu adalah nisan yang hanya menggunakan batu alam biasa tanpa suatu pengerjaan lebih lanjut.

16) Menhir Latemmamala (LamumpatuE)

Menhir Latemmamala (lamumpatue) merupakan sebuah batu (menhir) yang terletak tepat di tengah kota Watansoppeng, dan merupakan tempat pelantikan Datu Soppeng di masa lalu.

Terdapat 3 buah batu andesit berwarna hitam yang tidak dibentuk dan ditancapkan membentuk pola segitiga. Tempat penancapan batu ditembok dan ditinggikan. Untuk mencapai batu dibuatkan tangga yang juga menyatu dengan tempat batu-batu tersebut ditancapkan.

*Gambar 4-31
Menhir Latemmamala (LamumpatuE)*



Sumber: <http://www.bugiswarta.com/2015/12/usai-penetapan-akar-super-akan-pidato.html>

17) Situs Tomanurung Sanyili

Menurut kepercayaan masyarakat bahwa di lokasi inilah Sanyili sebagai Tomanurung Soppeng pertama kali muncul. Lokasinya sendiri berbentuk sebangkah batu sedimen berwarna coklat kehitaman yang berukuran sekitar panjang 4 meter dan lebar 3 meter yang tidak mengalami pengerjaan secara fisik. Situs ini dikelilingi oleh perkebunan jambu mete pendidikan. Untuk dapat

mencapainya dapat menggunakan kendaraan bermotor dan dilanjutkan dengan berjalan kaki sejauh 1 km.

18) Makam Datu Mario

Situs makam ini terletak di desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng. Letaknya di puncak bukit Bulue, bagian utara dan timur terdapat danau Tempe, sedangkan sisi lainnya terdapat perkebunan rakyat. Jumlah makam yang ada sebanyak \pm 17 buah dan orientasi makam tidak dapat dipastikan karena hanya memakai nisan tancapan tunggal dan nisan guci yang terkesan sebagai tempat penyimpanan abu jenazah. Di dalam kompleks ini juga terdapat tungku pembakaran makanan sesajian yang sampai saat ini masih di fungsikan oleh masyarakat sekitarnya pada waktu mereka berkunjung untuk melaksanakan upacara atau meminta doa keselamatan turun sawah dan panen.

Nisan-nisan di tempat ini banyak yang tidak pada tempatnya, sedangkan tipe yang dijumpai hanya dua, yaitu tipe pipih dan guci (keramik). Tipe nisan pipih diberikan pada nisan yang cenderung berprofil lurus (batu tancapan), yang terkesan monoton. Sedangkan tipe nisan guci diberikan kepada nisan yang terkesan sebagai tempat penyimpanan abu jenazah (pemakaman sekunder). Data nisan yang di kompleks makam Datu Mario adalah sebagai berikut:

- a. Ukuran besar sebanyak 3 buah dengan Panjang 50 cm; Lebar 10 cm;
- b. Ukuran sedang sebanyak 4 buah dengan Panjang 18 cm dan Lebar 9 cm.

Yang menarik pada situs ini adalah ditemukannya sejumlah nisan berbentuk guci dan tempat pembakaran sesajian (tungku). Menurut cerita yang berkembang dalam masyarakat bahwa yang dimakamkan dalam guci tersebut adalah Datu Mario dan keluarganya, beliau meninggal sebelum masuk agama Islam di daerah Soppeng.

19) Makam Petta Jangko

Secara administratif, situs ini terletak di kelurahan Attang Salo, kecamatan Mario Riawa. Panjang keliling kompleks makam sekitar 125 meter, lingkungan sebelah barat berbatasan dengan Sungai Attang Salo, sedangkan yang lainnya berupa kebun rakyat dan perkampungan penduduk.

Unsur bangunan asli hanya terdiri dari nisan tunggal yang berbentuk gada yang berprofil lurus sehingga terkesan monoton. Pada bagian atas nisan agak mengecil dibatasi oleh lekukan kedalam, kemudian lurus dan pada bagian puncak nisan mengecil dengan permukaan yang rata. Sedangkan pada bagian tengah nisan terdapat ragam hias berupa garis-garis vertikal. Bahan baku nisan pada umumnya terbuat dari batu andesit berwarna hitam.

Jumlah makam sebanyak 12 buah, semua nisan berbentuk gada sehingga terkesan tidak bervariasi dengan ukuran, makam

ukuran besar sebanyak 4 buah, dengan Panjang 72,5 cm dan Lebar 38 cm; ukuran sedang dengan Panjang 20 cm dan Lebar 32 cm; dan ukuran kecil dengan Panjang 30 cm dan Lebar 20 cm

Tokoh utama yang dimakamkan di tempat ini adalah Puang Janggo. Pada masa hidup beliau pernah membantu Arung Palakka (Bone) dalam perang melawan kerajaan Gowa. Serangan-serangan dari Gowa selalu dapat dipatahkan oleh pasukan Bone berkat kepiawaian Petta Janggo dan kawan-kawan, dan pada masa itu pula beliau wafat. Dikalangan masyarakat pada masa pemerintahannya (pemimpin local) Petta Janggo dikenal sebagai orang yang taat beragama dan pemberani dalam menegakkan kebenaran, khususnya dalam membela dan mempertahankan wilayah dan rakyat yang dipimpinnya atas ekspansi dari luar.

Dalam konsep ajaran Islam tentang penggunaan nisan kubur atau makam sangat sederhana, tidak lebih sebagai tanda untuk membedakan bagian kepala dan kaki serta memperlihatkan orientasi keletakan mayat. Namun pada kenyataannya nisan kubur atau makam tersebut sangat parallel dengan ketokohan atau peranan si mati.

Sebagaimana tradisi pemakaman Petta Janggo yang telah memperoleh perlakuan khusus dari masyarakat, sehingga kompleks Petta Janggo ini seperti berada dalam konteks system perilaku, yakni sebagai objek persiarahan. Akhirnya menimbulkan dampak menjadi yang dikeramatkan, dan secara keliru sebagai media tempat meminta sesuatu.

20) Makam Sulewattang Kebo dan Petta Karame

Kompleks makam ini terletak di desa Lompule, kecamatan Lirililau. Lokasi kompleks makam di tepi sungai Walanae bagian Timur, di sebelah Utara dan Selatan terdapat perkebunan coklat, sedangkan pada bagian barat terdapat jalan raya yang ditepinya berderet rumah-rumah penduduk.

Jumlah makam di dalam kompleks ini sebanyak 16 buah. Sebahagian makam dalam kondisi rusak dan tertimbun oleh daun coklat. Dengan demikian sulit mengidentifikasi bentuk jirat dan makam yang terdapat dalam situs ini, adalah makam ukuran besar sebanyak 12 buah, dengan Panjang 72,5 cm dan Lebar 38 cm; makam ukuran sedang sebanyak 10 buah, dengan Panjang 20 cm dan Lebar 32 cm; dan makam ukuran kecil 14 buah dengan Panjang 30 cm dan Lebar 20 cm.

Yang menarik pada kompleks makam ini yaitu tokoh Sulewattang Kebo yang mempunyai nisan tancapan meriam berpasangan dengan jirat. Sesuai dengan gelar yang disandangnya yaitu Sulewattang; Sule artinya orang, Wattang artinya kekuasaan atau seorang penguasa dalam wilayah tertentu (Distrik). Hal ini menunjukkan bahwa Sulewattang Kebo, adalah seorang raja/ tokoh yang pernah memerintah sebelum dihapuskannya Swapraja (Kepala Distrik). Ragam hias pada nisan terdapat daun yang distelir yang saling berkaitan. Sedangkan tipe nisan yang ada terdiri dari nisan gada, nisan pipih, dan nisan tancapan meriam VOC.

21) Situs Kecce

Luas wilayah situs Kecce sekitar 800 m² yang terdiri atas dua sektor, yaitu sektor pertama meliputi Bulu Kecce yang diapiti oleh sungai Cipe anak sungai Walanae, dan Sektor dua meliputi Bontokedung dan sekitarnya.

Situs Kecce berada di atas ketinggian 20 sampai 30 meter dari permukaan laut atau pada teras dua dan tiga. Temuan di situs Kecce berupa alat-alat batu seperti kapak genggam, pencerut, kapak perimbas, dan sejumlah alat serpih.

22) Situs Marale

Situs ini berada di sebelah timur situs Paroto dan berada pada posisi sebelah selatan situs Calio, tepatnya terletak di Kampung Pajalele, desa Paroto, kecamatan Lilirilau. Luas situs sekitar 5 km², terdiri atas 4 sektor temuan, yaitu sektor temuan, yaitu sektor Marale I, meliputi Bulu Lawo, Labonyo, dan Ale Marale. Sedang sektor Marale II meliputi kampung Pajalele, Lompo Tabiro, BuluSebong. Sektor Marale III mencakup Kampung Pallakalukue, Bulu Cepo, Pattunuange, serta sektor Marale IV meliputi sekitar Bulu Tociafa. Temuan yang menonjol dari lokasi ini adalah jenis fosil vertebrata. Salah satu areal yang mengandung temuan alat-alat batu, yaitu areal Labonyo di sektor Marale I, sekitar 1 km arah utara kampung Pajalele tepatnya di sekitar bekas ekskavasi Van Heekeren tahun 1970.

Luas arealnya sekitar 400 m² dan terdiri dari dua sektor, yaitu sektor timur dan sektor barat. Di areal sektor timur ditemukan 7 buah lumpang batu, 3 buah nisan dan 1 buah altar batu.

23) Kompleks Makam Datu Salaonro

Kompleks Makam Arung Lompengeng Datu Salaonro, terletak di Kampung Salaonro Kelurahan Ujung Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng. Lokasi situs itu berada di lingkungan perkebunan rakyat (coklat), pada jarak sekitar 500 meter dari jalan poros Sengkang-Watansoppeng. Lokasi itu berada pada titik E 119°59'28" dan S 04°20'35", pada tanah milik Drs. H.A. Sinring.

Di lokasi situs ditemukan delapan buah bangunan makam, tujuh buah diantaranya menghadap utara selatan dan satu buah diantaranya (dalam cungkup), tidak jelas arahnya. Bangunan makam di kompleks tersebut secara umum berukuran kecil, yang terdiri atas jirat makam dan nisan. Satu buah diantara bangunan makam itu menggunakan nisan berbentuk menhir. Nisan itu dibuat dari bahan batu padas tanpa diolah dengan ukuran tinggi 38 cm, lebar 20 cm dengan ketebalan 15 cm.

Bangunan Makam Arung Lompengeng Datu Salaonro yang menjadi tokoh utama di kompleks makam tersebut, berada di dalam sebuah cungkup berbentuk rumah. Dinding cungkup dibuat dari bahan tembok, atap seng menggunakan satu buah pintu masuk. Bangunan makam Datu Salaonro mempunyai jirat dan nisan

berukuran tinggi 33 cm, lebar bawah 35 cm, lebar atas 22 cm, tebal 12 cm. Jirat dan nisan dibuat dari batu padas berbentuk badan dan kepala manusia (massif).

Selain temuan berupa bangunan makam, di lokasi tersebut juga ditemukan beberapa pecahan keramik asing, alat-alat batu prasejarah berupa kapak lonjong, alat serut dan lain-lain. Pada jarak sekitar 100 meter arah timur ditemukan empat buah lumpang batu, masing-masing berukuran diameter 60 cm, tinggi 25 cm, dengan diameter lubang 28 cm dan kedalaman 30 cm. Tiga buah dakon lainnya kondisinya pecah/rusak.

24) Kompleks Makam AbbanuangE

Kompleks makam AbbanuangE terletak di kampung Jennae, kelurahan Jennae Kecamatan Lili Riaja. Situs ini oleh masyarakat setempat dianggap sebagai tempat pemakaman raja-raja Galung. Kompleks makam itu pada saat sekarang terletak di tengah perkampungan.

Di sekitar kompleks makam tersebut pada jaman kerajaan juga terdapat Saoraja (Istana Raja) yang sekarang ditempati sekolah dasar. Selain itu juga disebutkan bahwa tidak jauh dari tempat itu terdapat sebuah sumur yang masih tetap dipergunakan. Selain itu, di kompleks makam tersebut juga ditemukan batu datar yang diidentifikasi sebagai batu pelantikan raja-raja Galung pada masanya.

Kompleks makam AbbanuangE sekarang pada satu sisinya telah dipugar oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Namun pada sisi yang lain terdapat bangunan rumah penduduk, termasuk masjid pada sisi yang lain bagian selatan. Oleh karena itu lokasi makam yang diperkirakan berukuran 50 x 100 meter itu tidak jelas lagi batas-batasnya. Disamping itu, banyak makam-makam tua yang tidak dapat diidentifikasi lagi baik keletakannya, arah makam dan bahkan banyak nisan-nisan makam tua yang tidak pada tempatnya lagi.

Dari segi sejarah dan arkeologis kompleks makam itu bahwa tokoh-tokoh yang dimakamkan di tempat tersebut adalah keturunan raja-raja Galung, antara lain La Mattoriang, Ambo Cubbe, Andi Sessu (Datu Galung), Andi Lonrong (Datu Pattiro), Andi Patonangi, Andi Jai (Datu Galung dan Datu Lompulle), dan Andi Cubbe, namun makam tokoh-tokoh masyarakat yang dimakamkan tersebut tidak dapat lagi dikenal. Bangunan makam berorientasi utara selatan sesuai dengan tradisi pemakaman Islam mempunyai keunikan dan ciri-ciri kepurbakalan khusus.

Sebagai gambaran berikut deskripsi bentuk bangunan makam, ragam hias dan sistem pembuatan makam di kompleks makam tersebut.

- a. Bangunan makam, didominasi oleh bentuk makam dengan sistem pahatan batu berbentuk segi empat panjang, yang selanjutnya ditancapkan nisan ditengahnya. Bentuk lain, yakni susunan batu pahat pada segala sisinya, bagian tengah kosong/tindak berisi sekaligus sebagai tempat pemasangan

- batu nisan.
- b. Bentuk nisan, secara garis besar nisan pada situs itu dapat dibagi tiga yakni bentuk gada/ mahkota, terdapat ± 18 buah yang teridentifikasi; bentuk Pipih/Trisula ± 8 buah; dan bentuk Menhir ± 7 buah
 - c. Ragam hias makam, terdapat beberapa macam ragam hias makam pada situs tersebut, yaitu sulur daun, tali; goresan, Kaligrafi Arab, dan tumpal

25) Saoraja Pattojo

Saoraja Pattojo terletak di kampung Tessiabeng desa Pattojo kecamatan Liliraja. Lokasi Saoraja itu berada pada S 04'23"55 dan E 119'55"27. Saoraja itu sekarang merupakan milik ahli waris Datu Pattojo. Saoraja Pattojo terletak di samping sebelah selatan Madrasah Aliyah DDI Pattojo dan SD Negeri 71 Maccopa. Saoraja Pattojo, dibuat dari bahan dasar atap seng, dinding dan lantai dari papan kayu, tiang kayu dan pada bagian bawah terdapat tembok yang dibentuk melengkung.

Pada sisikiri dan kanan bangunan menonjol, yang difungsikan sebagai ruang tamu dan kamar. Pada sisi depan bangunan terdapat empat buah jendela. Bangunan utama memanjang kebelakang berukuran sekitar 12 x 7 meter, ditambah bagian bangunan yang menonjol keluar berukuran 3 x 6 meter. Bangunan itu menggunakan tiang dari kayu berbentuk rumah panggung. Namun tembok pada bagian bawah rumah mencirikan bangunan pada masa colonial Belanda.

Bangunan dapur terletak di bagian belakang sisi kiri, dan kelihatan menonjol keluar sejajar dengan bangunan teras atas. Pada sisi Utara Saoraja Pattojo terdapat sebuah bangunan rumah yang berarsitektur kolonial Belanda, yang juga berada di lokasi tanah Saoraja tersebut dan juga merupakan milik keturunan raja Pattojo. Bangunan itu berada pada lokasi sekitar 50 x 75 meter. Bangunan kedua itu terdiri atas bangunan induk dan bangunan dapur yang dihubungkan dengan sebuah selasar. Bangunan itu mempunyai empat buah kamar tidur, teras serta kamar mandi.

26) Makam KalokoE Watu

Kompleks Makam Kalokoe Watu terletak di kampung Massampu desa Watu Tua kecamatan Marioriwawo pada ketinggian 240 m dari permukaan laut. Pengertian kalokoe Watu secara etimologi adalah batu besar, jadi berdasarkan makna katanya, merupakan kompleks pemakaman batu besar, status tanahnya adalah tanah negara.

Kompleks pemakaman tersebut adalah kompleks pemakaman raja-raja Watu. Kerajaan Watu sendiri adalah sebuah kerajaan kecil di wilayah Marioriwawo yang selanjutnya menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Marioriwawo sejak masa pemerintahan Arung Palakka.

Berdasarkan tata ruang makam tersebut, kompleks itu dibatasi oleh susunan batu pahat berupa banteng. Banteng makam tersebut berukuran pada sisi Utara, 24 m; sisi Barat, 18 m; sisi Selatan, 16 m; dan sisi Timur, 10 m. Sedangkan tambahan banteng pada sisi selatan dan timur terlihat menonjol, berukuran pada sisi Timur, 8 m; dan pada sisi Selatan 9 m

Ukuran kompleks makam dalam banteng menjadi sekitar 360 m². Banteng makam tersebut berukuran tinggi antara 110-150 cm dengan lebar penampang atas antara 155 s.d 255 cm. jumlah makam yang berada di dalam banteng 32 buah, dengan klasifikasi ukuran besar 2 buah, ukuran menengah 8 buah, dan ukuran kecil sebanyak 22 buah.

Bangunan makam di kompleks tersebut rata-rata berbentuk persegi empat panjang. Salah satu makam yang berukuran besar diidentifikasi sebagai makam Ibunda Arung Palakka (La Tenri Sui) memiliki ukuran makam dengan Panjang 450 cm, Lebar 271 cm, dan Tinggi 182 cm. Nisan terdiri dari 2 buah dengan ukuran tinggi 120 cm, lebar 35 – 42 cm, dan tebal 10 cm. Ukuran batu susun pada makam dengan ukuran besar 85 x 85 x 45 cm, ukuran menengah 63 x 63 x 45 cm, dan ukuran kecil 34 x 34 x 45 cm.

Bentuk lainnya, makam yang bagian penutup/ penampang bangunan makam ditambah batu padas yang bentuknya serong, sehingga tampak pada bagian tengah lebih tinggi. Bentuk lainnya hanya berupa papan batu, kemudian ditancapkan nisan. Ada beberapa tipe nisan di kompleks makam tersebut antara lain berbentuk Pipih sebanyak 6 buah, bentuk Trisula 2 buah, bentuk Gada 3 buah, dan bentuk Menhir 22 buah.

Ragam hias pada makam khususnya makam ibunda Arung Palakka, ornamennya berupa garis-garis geometris dalam bentuk tumpal dan silang. Adapun tokoh-tokoh yang dimakamkan di kompleks makam tersebut antara lain We Tenri Sui, Andi Tenri Abeng Datu Watu, Andi Patoppongi Tau Pute, Andi Colli, Andi Pasuloi, Andi Saenabe dg Ma'rang, Daeng Pajara Pabbicara Watu, Andi Rana Petta Pince Pute, dan Petta Pince.

Terdapat dua buah lumpang batu pada kompleks makam ini pertama berbentuk persegi dengan ukuran panjang 59 cm, lebar 38 cm, tinggi 27 cm, panjang lubang 41 cm, dalam lubang 25 cm, diameter lubang 11 cm. Lumpang kedua, berbentuk bundar dengan ukuran diameter luar 55 cm, tinggi 38 cm, diameter 25 cm. Berdasarkan keletakannya kedua lumpang ini tidak di situ lagi dalam arti sudah pernah dipindahkan dari tempatnya sejak awal.

27) Situs GoariE

Neolitik adalah babakan masa dimana manusia telah mengenal kegiatan bercocok tanam, berternak dan hidup menetap sehingga dengan sendirinya muncul bentuk kegiatan rohani dengan mengacu pada pemujaan arwah leluhur (*uncestor worship*). Di situs Goa Rie I dan II (wilayah administrasi desa Gowa Rie kecamatan Marioriwawo) ditemukan sebuah bentuk media pemujaan. Identifikasi masing-masing objek adalah ; 1) Gowa Rie I, terdapat

pada lereng bukit ketinggian ± 200 meter merupakan susunan batu berundak tiga meskipun undakan kedua dan ketiga telah ditembok (1993) dengan ukuran masing-masing: undakan pertama $5,20 \times 5,40 \times 1,30$, undakan ke-2; $1, 10 \times 100 \times 0,15$ dan undakan ke-3; $60 \times 50 \times 0,25$ meter. Pada undakan pertama susunan batunya miring mengikuti kemiringan tanah ke arah barat sehingga praktis hanya sisi timur, utara dan selatan yang di tanggul untuk memperoleh permukaan yang datar.

Pada permukaan undakan pertama tersebut dijumpai artefak unik seperti: batu dakon 2 buah masing-masing berlubang 18, batu kutika bergores 7×7 dan batu lumping dengan ukuran lubang diameter mulut 17 cm dan kedalaman 12 cm. Pada undakan ke-2 dan ke-3 tidak ada lagi yang khas karena telah dirusak oleh tembok semen. Namun dengan lelehan lilin pada pundak undakan. Tim memperoleh kesan bahwa keletakan artefak dakon, lumping dan ketika tidak disitu lagi karena posisinya acak, dan tidak terpelihara.

Untuk mencapai situs ini cukup mudah karena tidak jauh dari jalan poros Soppeng-Bone. Goa Rie II, tidak jauh berbeda dengan Goa Rie I, oleh penduduk setempat menyebutkannya sebagai media isteri. Letaknya lebih rendah, bila diukur dengan altimeter maka angka menunjukkan ketinggian 150 meter dari permukaan laut. Berjarak ± 700 meter ke Utara dan Goa Rie I, terkesan kurang terawat dengan kata lain sudah tercemar karena dekat perkampungan penduduk. Susunan batunya terdiri atas 5 undakan juga mengikuti kemiringan tanah ke utara (puncak).

Ukuran masing-masing undakan adalah ; undakan pertama $5 \times 2 \times 0,20$ m, undakan ke-2 $4,25 \times 4,25 \times 0,15$ m., undakan ke-3 $2,35 \times 2,35 \times 0,45$ m, undakan ke-4 $1,80 \times 1,80 \times 0,15$ m, undakan ke-5 ukuran $50 \times 50 \times 60$ cm sebagai puncak, terdiri atas 3 susun batu papan. Perlu diinformasikan bahwa terdapat dua buah lubang pada bagian bawah susunan batu puncak yang memberik kesan adanya sarana penumpahan (pengaliran air suci) dari sisi selatan. Hal ini cocok dengan keberadaan undakan puncak tepat disisi utara sehingga menuntun pelaksanaan upacara dari sisi selatan. Tampaknya susunan batu-batu tersebut telah berubah karena dijumpai salah satu potongan batu telah dijadikan pengalas susunan batu puncak dalam posisi terbalik. Mungkin pernah terjadi kerusakan, lalu saat ditata kembali kurang memperhatikan material penyusunannya. Baik Goa Rie I maupun Goa Rie II, oleh penduduk setempat dijadikan tempat keramat dan pada saat-saat tertentu dilakukan upacara adat.

28) Museum Calio

Museum Situs Calio terletak di Kampung Beru kelurahan Lilirilau ± 19 Km sebelah timur Kota Watansoppeng. Koleksi Museum Calio terdiri dari fosil binatang purba temuan dari Walanae, artefak alat batu, peta geologi lembah Walanae, papan dokumentasi kegiatan dan papan informasi mengenai data arkeologi, data paleontologi, manusia purba, dan evolusi gajah yang tergantung di dinding ruang pameran

Museum prasejarah Calio berdiri atas prakarsa Anwar Akib, seorang warga lokal yang ikut dalam hampir semua penelitian arkeologi yang dilakukan di Depresi Walanae sampai sekarang, termasuk penelitian tahapan awal yang dilakukan oleh *Van Heekeren*. Pemilihan Calio sebagai lokasi berdirinya museum karena salah satu titik sebaran temuan yang cukup penting ada di daerah Calio (Berru).

Pada awalnya Museum Calio hanya pondok penyimpanan fosil yang berisi temuan fosil dan artefak Walanae yang dibangun pada tahun 1986. Sebelum berdiri pondok penyimpanan fosil, temuan fosil dan artefak tersimpan di rumah pribadi Anwar Akib sehingga ketika fosil dan artefak terkumpul cukup banyak memerlukan ruang tersendiri untuk menyimpan koleksi ini. Pondok fosil Calio ini berpindah tempat sejak tahun 1990 ke bangunan yang lebih besar. Pendirian bangunan yang sekarang menjadi Museum Calio ini atas bantuan G.J. Barstra dan R.P. Soejono yang juga melakukan penelitian di kawasan Cabbenge, Walanae.

Museum Calio hanya terdiri dari satu ruang pameran (*display*) yang berukuran sekitar 7×7 m. Museum ini merupakan museum prasejarah berupa tinggalan-tinggalan dari masa prasejarah yang ada di kabupaten Soppeng, yaitu alat pembelah, alat pemukul, alat pemanah/ penarah, point/ alat runcing, fragmen Archdiscodon Celebencis yang ditemukan sekitar tahun 1979-1985 pada bagian lapisan Plestosen (kurun waktu 1.500.000 tahun), alat batu masa Paleolitik zaman purba kurun waktu kehidupan antara 80.000 tahun – 40.000 tahun silam.

*Gambar 4-32
Museum Calio*



Sumber: <https://soppengkab.go.id/museum-calio/>

4.1.3. Daya Tarik Wisata Buatan (*man-made*) dan Wisata Minat Khusus

Selain potensi wisata alam, sejarah dan budaya yang dimiliki oleh kabupaten Soppeng, seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi dan peradaban yang mempengaruhi pertumbuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat serta wisatawan maka

pemerintah dan masyarakat kabupaten Soppeng juga membangun dan memiliki beberapa daya tarik buatan dan wisata minat khusus yang sudah dikenal oleh masyarakat. Adapun potensi daya tarik wisata buatan manusia (*man-made*) dan wisata minat khusus yang dimiliki oleh Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

1) Kawasan Wisata Ompo

Menurut cerita yang telah menjadi buah bibir masyarakat secara turun-temurun, tempat sumber mata air Ompo dulunya merupakan area persawahan penduduk. Ketika itu, penduduk setempat membajak sawah menggunakan sepasang kerbau. Suatu hari, seorang petani yang sedang membajak di sawahnya tiba-tiba *tassobo* (tenggelam ke dalam lumpur sawah) dan hilang.

Warga kampung yang mengetahui peristiwa tersebut segera mencari petani itu hingga berhari-hari namun tidak ditemukan. Pada suatu waktu, tiba-tiba petani itu muncul di sepetak sawah bersama dengan semburan air yang sangat jernih. Para warga pun berbondong-bondong untuk menyaksikan peristiwa ajaib itu. Usai peristiwa tersebut, para penduduk bersepakat menjadikan mata air itu sebagai pemandian yang kini disebut Pemandian Alam Ompo.

Pemandian Alam Ompo atau masyarakat setempat biasa menyebutnya Ompo, terletak di Jalan Trans Sulawesi, kelurahan Ompo kecamatan Lalabata Kota Watansoppeng. Tempat pemandian ini telah menjadi ikon Soppeng jauh sebelum Pemandian Air Panas Lejja dan Pemandian Alam Citta dikenal masyarakat. Pemandian Alam Ompo telah menjadi tujuan favorit para wisatawan. Obyek wisata ini tak pernah sepi dari pengunjung, terutama pada akhir pekan, dan hari-hari libur nasional. Pengunjung Ompo tidak hanya para warga Soppeng tetapi juga luar daerah, seperti Kabupaten Sidrap, Bone, Sengkang (Wajo), Kota Makassar, bahkan wisatawan mancanegara.

Ompo memiliki tiga kolam, yaitu kolam renang untuk orang dewasa, kolam renang untuk anak-anak, dan kolam sumber mata air. Kolam sumber mata air yang berada di dalam lokasi obyek wisata ini tidak digunakan untuk mandi sehingga diberi pagar beton agar pengunjung tidak masuk di dalamnya.

Pemandian Alam Ompo menjadi tujuan wisata favorit karena selain biayanya sangat murah, lokasinya juga berada tidak jauh dari kota dan terletak di kawasan pegunungan dengan suasana alam yang asri. Area di sekitar pemandian banyak ditumbuhi oleh pohon yang rindang dan tempat duduk sehingga pengunjung akan terasa lebih nyaman. Selain suasana lingkungan yang nyaman, kejernihan dan kesegaran air pemandian ini juga akan membuat pengunjung merasa betah berenang ataupun sekadar berendam di dalam kolam.

Selain aktivitas berenang, pengunjung juga dapat bermain perahu dan memancing ikan di danau buatan bersama keluarga. Danau buatan tersebut berada persis di sebelah utara lokasi pemandian. Di sekitar danau juga terdapat area perkemahan yang cukup luas dan sering digunakan oleh sebagian pengunjung untuk

berekreasi bersama keluarga. Selain itu, terdapat pula arena lomba motocross yang sering digunakan sebagai ajang lomba motocross tingkat daerah. Fasilitas lain yang tersedia di tempat ini, seperti kamar mandi umum, musholah, kafe, warung makan, area parkir yang luas, dan gazebo untuk berteduh. Fasilitas umum lain, seperti penginapan, restoran, masjid, bank, dan mesin ATM.

*Gambar 4-33
Permandian Ompo*



Sumber: <https://www.makassarguide.com/2014/09/pemandian-alam-ompo.html>

2) Kompleks Sao Mario.

Sao Mario merupakan daya tarik wisata buatan tematik berbasis rumah tradisional yang terletak di kelurahan Manorang Salo kecamatan Mariorawa sekitar 30 km dari Kota Watansoppeng dengan lokasi yang sangat strategis pada jalur utama dari kabupaten Wajo ke kota Soppeng. Daya tarik wisata ini menawarkan berbagai jenis rumah adat berasitektur Sulawesi seperti Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja, arsitektur dari masyarakat kebudayaan lain seperti Minangkabau dan Batak.

Replikasi rumah adat Bugis sebagai daya tarik utama di kawasan ini sangat menarik karena desain berupa rumah adat panggung yang memiliki 100 tiang, sehingga juga kerap disebut sebagai *bola seratus* (rumah dengan seratus tiang).

Meski bukan merupakan peninggalan sejarah, akan tetapi rumah adat yang juga berfungsi sebagai museum di Kabupaten Soppeng ini dipenuhi dengan barang-barang antik bernilai tinggi yang merupakan barang peninggalan beberapa kerajaan di Indonesia. Benda-benda antik itu antara lain tempat tidur, perangkat meja dan kursi makan, lemari, ratusan guci, perlengkapan makan raja-raja, ratusan senjata tajam berupa badik, parang, pedang, keris, dan sebagainya.

*Gambar 4-34
Sao Mario*



Sumber: <https://pedomanrakyat.id/2018/05/15/rumah-adat-sao-mario-di-soppeng-di-mata-ketua-lpm-unm/>

4.2. Fasilitas Pariwisata Kabupaten Soppeng

Selain keberadaan keanekaragaman potensi daya tarik wisata sebagai komponen utama yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Soppeng, maka ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata memegang peran penting dalam memudahkan dan memberikan kenyamanan kepada wisatawan selama kunjungannya di kabupaten Soppeng. Adapun jenis dan kondisi sarana prasarana pariwisata yang ada di kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut:

4.2.1. Fasilitas Jalan

Jalan merupakan salah satu fasilitas transportasi darat yang memegang peran penting dalam menghubungkan antar wilayah di Kabupaten Soppeng serta antara kabupaten Soppeng dengan kabupaten lainnya di provinsi Sulawesi Selatan.

Panjang jalan kabupaten di Kabupaten Soppeng di sampai dengan tahun 2017 adalah 899.040,20 km, yang terdiri dari jalan provinsi sepanjang 159,20 km dan jalan kabupaten sepanjang 898,881 km. Jalan tersebut sepanjang 289.859 km berada dalam kondisi baik, 109.715 km berada pada kondisi sedang, 125.559 km berada pada kondisi rusak dan sepanjang 373.748 km rusak berat.

Data mengenai panjang jalan menurut jenis permukaan jalan di kabupaten Soppeng tahun 2017 adalah sebagai berikut

Tabel 4.1
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan
di Kabupaten Soppeng Tahun 2017

No	Jenis Permukaan Jalan	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten
1	Beton/ <i>Concrete</i>	-	37.314
2	Diaspal/ <i>Asphalted</i>	159.20	498.559
3	Kerikil/ <i>Gravel</i>	-	223.645
4	Tanah/ <i>Soil</i>	-	139.363
5	Lainnya/ <i>Others</i>	-	-
	Total	159.20	898.811

Sumber : BPS Kabupaten Soppeng, 2018

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa keberadaan akses jalan dalam menunjang kegiatan pariwisata di kabupaten Soppeng secara umum cukup memadai, walaupun belum mampu menjangkau seluruh potensi daya tarik wisata yang ada dalam kondisi yang baik.

Selain ketersediaan panjang jalan, faktor kondisi jalan juga memegang peranan penting dalam memberikan kenyamanan bagi masyarakat termasuk wisatawan pada saat melakukan perjalanan di kabupaten Soppeng. Data mengenai panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Data Jalan Menurut kondisi Jalan
di Kabupaten Soppeng Tahun 2017

No	Kondisi Jalan	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten
1	Baik/ <i>Good</i>	-	289.859
2	Sedang/ <i>Medium Level</i>	159,20	109.715
3	Rusak/ <i>Bad</i>	-	125.559
4	Rusak Berat/ <i>Critical</i>	-	373.748
	Total	159.20	898.811

Sumber : BPS Kabupaten Soppeng, 2018

4.2.2. Prasarana Listrik

Pelayanan kelistrikan di Kabupaten Soppeng dilayani oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Jumlah pelanggan listrik di kabupaten Soppeng pada tahun 2017 yang terdaftar adalah sebanyak 29.248 pelanggan yang tersebar pada 9 kecamatan dengan jumlah produksi listrik KWH terpakai sebesar 34.456.150 KWh. Data mengenai kelistrikan kabupaten Soppeng tahun 2017 di PLN Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Jumlah Langganan Menurut Jenis Tarif, KWH Terjual
di PLN Kabupaten Soppeng Tahun 2017 (Rp)

Jenis Tarif	Langganan/ Customer	KWH Terpakai
Tarif Sosial	461	1.635.686.388
Tarif Rumah Tangga	27.257	29.901886.448
Tarif Bisnis	1.273	6.385.928.721
Tarif Industri	27	5.151.288.164
Tarif Pemerintah dan Umum	230	5.214.253.681

Sumber : BPS Kabupaten Soppeng, 2018

4.2.3. Fasilitas Air Bersih

Pelayanan air bersih di Kabupaten Soppeng dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Jumlah pelanggan yang dilayani sampai dengan tahun 2017 sebanyak 7.439 pelanggan, terdiri dari enam kelompok segmentasi pelanggan dengan jumlah air yang terdistribusikan sebanyak 1.026.980 m³.

Data mengenai jumlah pelanggan dan air minum yang disalurkan oleh PAM Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Jumlah Pelanggan dan Air Minum Disalurkan Oleh PAM
Kabupaten Soppeng Menurut Segmentasi Tahun 2017

No.	Pelanggan	Jumlah	
		Pelanggan	Pemakaian
1.	Sosial Umum	66	13.402
2.	Sosial Khusus	126	24.993
3.	Rumah Tangga	6.988	935.338
4.	Instansi Pemerintah	119	32.207
5.	Niaga Kecil	139	20.579
6.	Niaga Besar	2	461
	Jumlah	7.439	1.026.980

Sumber : BPS Kabupaten Soppeng, 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2017 dari jumlah sebanyak 7.439 pelanggan PDAM kabupaten Soppeng, segmentasi terbesar adalah pelanggan rumah tangga sebanyak 6.988 pelanggan disusul oleh kelompok niaga kecil sebanyak 139 pelanggan, kelompok sosial khusus sebanyak 126 pelanggan, instansi pemerintah sebanyak 119 pelanggan, pelanggan social umum sebanyak 66 pelanggan dan kelompok pelanggan terkecil adalah niaga besar sebanyak 2 pelanggan.

4.2.4. Fasilitas Telekomunikasi

Fasilitas telekomunikasi yang telah dimiliki oleh Kabupaten Soppeng adalah fasilitas sambungan telepon PT. Telkom dan jaringan telepon seluler yang saat ini disediakan oleh operator jaringan seluler sudah dapat diakses sampai ke seluruh wilayah kecamatan.

Sampai dengan bulan Desember tahun 2017, kapasitas sentral di kabupaten Soppeng sebanyak 3.008 satuan sambungan telepon yang baru tersebar pada 4 buah kecamatan yaitu Lalabata, Ganra, Donri-Donri dan Marioriawa. Sedangkan dari sisi sebaran wilayah menunjukkan bahwa pelanggan di kecamatan Lalabata merupakan wilayah pelanggan tertinggi yaitu sebanyak 1000 pelanggan, dan wilayah dengan pelanggan terkecil berada di kecamatan Ganra yaitu hanya sebesar 8 pelanggan.

Dalam hal penggunaan saluran telekomunikasi berbasis kabel, seiring dengan perkembangan teknologi informasi maka terjadi pula perubahan struktur pengguna jaringan komunikasi dari konvensional menjadi nirkabel. Hal ini dapat dilihat dari penurunan jumlah pelanggan telekomunikasi telepon konvensional.

Adapun data mengenai jumlah sambungan telepon di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Banyaknya Sambungan Induk Telepon Menurut Segmen Pelanggan dan Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2017

No.	Kecamatan	Jumlah	
		Pelanggan	Sambungan
1.	Marioriwawo	-	-
2.	Lalabata	1.000	2.000
3.	Liliriaja	-	-
4.	Ganra	3	8
5.	Citta	-	-
6.	Lilirilau	-	-
7.	Donri-Donri	82	500
8.	Marioriawa	100	500
	Jumlah	1.185	3.008

Sumber : BPS Kabupaten Soppeng, 2018

4.2.5. Fasilitas Perbankan dan Lembaga Keuangan

Salah satu prasarana pariwisata yang sangat berpengaruh dalam memberikan kenyamanan bagi wisatawan dan masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan di kabupaten Soppeng adalah ketersediaan lembaga perbankan dan lembaga keuangan lain non bank.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi saat ini yang sangat memberikan kemudahan dan memanjakan wisatawan melalui penyediaan dan layanan keuangan seperti penyediaan

mesin anjungan tunai mandiri (ATM), kantor kas keliling, penukaran mata uang asing, serta layanan perbankan dan keuangan lainnya. Disisi lain, keberadaan dan ketersediaan bank dan lembaga keuangan non bank akan sangat mempengaruhi pertumbuhan investasi pariwisata di kabupaten Soppeng.

Sampai saat ini terdapat 7 (tujuh) buah bank yang beroperasi di kabupaten Soppeng yang dilengkapi dengan 22 buah Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan Kas Keliling, serta 41 buah mesin anjungan tunai mandiri (ATM) yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Soppeng.

Adapun jenis dan jumlah bank, koperasi serta lembaga keuangan lainnya yang ada di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Jumlah Bank, Koperasi dan Lembaga Keuangan di Kabupaten Soppeng Tahun 2018

No.	Jenis Lembaga	Jumlah	Keterangan
1.	Bank	7	2 Kantor Cabang 17 Kantor Cabang Pembantu 10 Kantor Kas 1 Teras Kantor Kas 24 ATM
2.	Koperasi	200	15 KUD 185 Non-KUD
3.	Pegadaian	12	2 CP 8 UPC 2 UPS

Sumber : BPS Kabupaten Soppeng, 2018

Data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah bank yang beroperasi di kabupaten Soppeng sebanyak 7 buah yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Sulselbar, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN), Bank Mandiri, Bank Danamon dan Bank Negara Indonesia (BNI). Sementara lembaga ekonomi yang terbesar adalah koperasi yaitu sebanyak 200 buah yang terdiri dari Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dan koperasi lainnya, sedangkan lembaga keuangan lainnya adalah Pegadaian sebanyak 12 buah yaitu PT. Pegadaian Persero.

4.3. Aksesibilitas Pendukung Pariwisata Kab. Soppeng

Untuk menjaring dan meningkatkan minat wisatawan melakukan perjalanan ke kabupaten Soppeng sebagai destinasi berkualitas, dibutuhkan konektivitas yang terpadu. dan memadai. Konektivitas transportasi sangat memegang peranan penting bagi perkembangan dari suatu destinasi yang selanjutnya akan memberikan dampak pertumbuhan bagi angka kunjungan wisatawan sehingga dapat menciptakan sejumlah tantangan yang

berhubungan dengan infrastuktur dan kapasitas transportasi. Pada sisi lain, jika suatu destinasi memiliki konektivitas yang tidak memadai maka destinasi tersebut tentunya akan sulit untuk dijangkau sehingga akan kurang wisatawan yang datang untuk berkunjung.

Sebagai salah satu strategi untuk menjaring wisatawan, maka konektivitas yang ada harus dapat menjangkau seluruh daya tarik yang ada di kabupaten Soppeng dengan aman, nyaman dan mudah. Ketersediaan moda transportasi darat dan laut dapat menjadi fokus dalam pengembangan aksesibilitas sehingga secara menyeluruh konektivitas dirancang untuk peningkatan kualitas perjalanan wisata.

Kemudahan aksesibilitas ini juga dapat memperpanjang lama tinggal dari wisatawan karena mereka dapat memiliki ketertarikan yang kuat untuk melakukan eksplorasi destinasi melalui perjalanan yang mereka dapat rancang lebih matang. Oleh karena itu konektivitas harus dapat mendukung pola perjalanan di kabupaten Soppeng sehingga perlu pengembangan yang tepat.

Selain ketersediaan jalan darat yang memadai, maka untuk kemudahan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh keberadaan sarana transportasi darat berupa bus angkutan dan jenis kendaraan lainnya yang dapat dipersewakan dan digunakan untuk kemudahan mobilitas oleh wisatawan menuju daya tarik wisata sehingga dapat meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke kabupaten Soppeng.

Pada tahun 2017 terdapat 705 buah kendaraan bus pribadi yang sebahagian diantara dipergunakan sebagai kendaraan penumpang umum yang melayani transportasi darat dari dan ke kabupaten Soppeng. Adapun data mengenai armada transportasi bus angkutan serta kendaraan transportasi lainnya yang tersedia di kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7
Jumlah Bus dan Angkutan Umum Lainnya
di Kabupaten Soppeng Tahun 2017

No.	Kecamatan	Jumlah Kendaraan	
		Bus	Ojek
1.	Marioriwawo	93	277
2.	Lalabata	176	450
3.	Liliriaja	78	187
4.	Ganra	48	92
5.	Citta	56	60
6.	Lilirilau	142	125
7.	Donri-Donri	57	87
8.	Marioriawa	55	55
Jumlah		705	1.333

Sumber : BPS Kabupaten Soppeng, 2018

BAB - 5

INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG

5.1. Usaha Pariwisata Kabupaten Soppeng

Dalam pengembangan destinasi wisata, terdapat beberapa masalah utama yang harus dihadapi, yaitu perubahan iklim dan bencana alam, ketidaksiapan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat belum optimal, ketidaksiapan sarana, prasarana, dan infrastruktur, ketersediaan dan konektivitas infrastruktur, dan rendahnya nilai, jumlah dan pertumbuhan investasi, serta iklim usaha yang tidak kondusif. Untuk itu, destinasi dan industri pariwisata harus dikembangkan menjadi berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan daerah agar dapat meningkatkan kontribusi ekonomi pariwisata dan meningkatkan daya saing melalui peningkatan citra dan terciptanya diversifikasi destinasi pariwisata.

Meningkatnya citra pariwisata dapat dikenali antara lain melalui jumlah destinasi pariwisata yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi yang difasilitasi dengan skema peningkatan gerakan kesadaran kolektif *stakeholders*, pengembangan manajemen destinasi, pengembangan bisnis, dan penguatan organisasi pengelolaan destinasi pariwisata sehingga akan semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata dengan tata kelola yang baik.

Dalam penciptaan diversifikasi destinasi pariwisata maka jumlah lokasi daya tarik yang dikembangkan menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) baik yang bersifat rintisan, pemeliharaan maupun revitalisasi dari daya tarik wisata yang ada, jumlah desa yang difasilitasi untuk dikembangkan sebagai desa wisata sebagai penerapan prinsip *community based tourism* untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata setempat.

Semakin banyak desa yang difasilitasi maka diharapkan desa tersebut dapat menjadi alternatif tujuan wisata dan dapat meningkatkan lama tinggal, pengeluaran wisatawan serta pola perjalanan yang dikembangkan. Pola perjalanan pariwisata adalah struktur, kerangka, dan alur perjalanan wisata dari satu titik destinasi ke titik destinasi lainnya yang saling terkait yang berisi informasi tentang fasilitas, aktivitas, dan pelayanan yang memberikan berbagai pilihan perjalanan wisata bagi industri maupun individu wisatawan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam melakukan perjalanan wisata. Semakin bervariasi

pola perjalanan yang ditawarkan maka diharapkan dapat meningkatkan minat wisatawan untuk berwisata.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan industri pariwisata yaitu Industri Pariwisata yang menggerakkan perekonomian, maka arah kebijakan dan strategi pengembangan destinasi dan industri Pariwisata dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010 – 2025 menekankan bahwa pembangunan kepariwisataan nasional meliputi 4 (empat) pilar pembangunan yaitu destinasi Pariwisata; Industri Pariwisata; Pemasaran pariwisata; dan Kelembagaan Kepariwisataan.

Dalam konteks arah kebijakan dan strategi untuk pengembangan destinasi dan industri pariwisata, maka pengembangan destinasi pariwisata meliputi perwilayahan pembangunan destinasi; pembangunan daya tarik wisata; pembangunan aksesibilitas pariwisata; pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata; pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Pembangunan industri pariwisata dilakukan melalui penguatan struktur industri pariwisata; peningkatan daya saing produk pariwisata; pengembangan kemitraan usaha pariwisata; penciptaan kredibilitas bisnis; dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Arah kebijakan dan strategi pengembangan industri pariwisata dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 yang digariskan dalam RPJMN 2015 - 2019, yaitu pembangunan industri pariwisata diarahkan untuk meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/ jasa pariwisata di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran melalui pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal; fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata; pengembangan standarisasi dan sertifikasi usaha dan produk pariwisata; serta pengembangan intergrasi ekosistem industri pariwisata.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata dalam mencapai sasaran-sasaran strategis tahun 2015 - 2019 untuk pengembangan industri pariwisata adalah pengembangan industri pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata, melalui pengembangan infrastruktur dan ekosistem kepariwisataan antara lain meliputi perancangan destinasi pariwisata, peningkatan aksesibilitas, atraksi, amenitas, dan ekosistem pariwisata; pengembangan destinasi wisata alam, budaya, dan buatan yang berdaya saing antara lain meliputi pengembangan wisata kuliner dan spa, wisata sejarah dan religi, wisata tradisi dan seni budaya, wisata pedesaan dan perkotaan, wisata bahari, wisata ekologi dan petualangan, kawasan wisata, serta wisata konvensi, olahraga dan rekreasi; peningkatan tata kelola destinasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat antara lain meliputi tata kelola destinasi pariwisata prioritas dan

khusus, internalisasi dan pengembangan sadar wisata, dan pengembangan potensi masyarakat di bidang pariwisata; pengembangan industri pariwisata antara lain meliputi peningkatan kemitraan usaha pariwisata dan investasi pariwisata, pengembangan standar usaha pariwisata dan sertifikasi usaha pariwisata, peningkatan keragaman dan daya saing produk jasa pariwisata di setiap destinasi pariwisata, dan pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal.

Pengembangan industri pariwisata yang diharapkan adalah yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya yang diwujudkan melalui pengembangan 5 (lima) pilar industri pariwisata yaitu penguatan struktur industri pariwisata; daya saing produk wisata; kemitraan usaha pariwisata melalui skema kerjasama pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat; Kredibilitas bisnis melalui standarisasi dan sertifikasi usaha, regulasi dan fasilitasi jaminan usaha; swerta tanggungjawab terhadap lingkungan yang berfokus pada 13 jenis usaha pariwisata yaitu : daya tarik wisata; kawasan pariwisata; jasa transportasi wisata; jasa perjalanan wisata; jasa makanan dan minuman; penyediaan akomodasi; penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; jasa informasi pariwisata; jasa konsultan pariwisata; jasa pramuwisata; wisata tirta; dan spa. Adapun potensi dan kondisi industri pariwisata yang dimiliki oleh kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

5.1.1. Usaha Akomodasi

Usaha akomodasi merupakan salah satu jenis usaha yang memegang peran penting dalam mendorong minat kunjungan wisatawan ke kabupaten Soppeng karena salah satu pertimbangan wisatawan dalam memutuskan untuk berkunjung ke sebuah destinasi adalah ketersediaan akomodasi yang bersih, aman dan nyaman melalui ketersediaan fasilitas, kualitas produk dan pelayanan yang baik sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Usaha Pariwisata.

Ketersediaan akomodasi di kabupaten Soppeng sampai saat ini masih sangat terbatas dari sisi kuantitas dan kualitas. Sebagian besar hotel yang ada masih dikelola secara tradisional dan peruntukan bangunan hotel tersebut belum direncanakan untuk dijadikan usaha komersil sehingga berpengaruh terhadap konstruksi dan penataan bangunan sebagai hotel yang layak.

Hal lain yang masih menjadi tantangan dalam pengembangan kabupaten Soppeng sebagai destinasi yang menarik adalah ketersediaan fasilitas pendukung lain selain fasilitas kamar, seperti fasilitas makan minum, ruang rapat dan pertemuan, hiburan, akses internet, dan fasilitas pendukung lainnya.

Berdasarkan data statistik Kabupaten Soppeng tahun 2017, menunjukkan bahwa ketersediaan kamar dari 16 buah hotel yang beroperasi adalah sebanyak 197 buah kamar dengan kapasitas

tempat tidur yang tersedia pada hotel di kabupaten Soppeng adalah sebanyak 330 buah tempat tidur.

Data mengenai jumlah hotel, kamar dan tempat tidur pada usaha akomodasi yang ada di kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Jumlah Hotel, Kamar dan Tempat Tidur di Kabupaten Soppeng Tahun 2013 - 2017

No	Tahun	Jumlah		
		Hotel	Kamar	Tempat Tidur
1.	2013	17	212	366
2.	2014	20	249	410
3.	2015	22	253	404
4.	2016	24	150	406
5.	2017	16	197	330

Sumber : BPS Kabupaten Soppeng, 2018

Untuk lebih jelasnya mengenai data masing-masing hotel berikut jumlah kamar dan jumlah tempat tidur yang dimiliki dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2
Hotel, Jumlah Kamar, Tempat Tidur pada Hotel di Kabupaten Soppeng Tahun 2017

No.	Nama Hotel	Kamar	Tempat Tidur
1	Hotel Aman	13	31
2	Hotel Munasko	5	12
3	Hotel Satria	5	9
4	Hotel Kayangan	13	21
5	Hotel Ompo Indah	8	16
6	Hotel Surya	33	55
7	Mutya Rejeki Home Stay	6	8
8	Hotel Grand Saota	16	23
9	Wisma Latappere	18	26
10	Wisma Gandaria	10	20
11	Hakata Lejja Resot & Hotel	12	15
12	Hotel Ada	21	34
13	Penginapan Sederhana	10	19
14	Wisma 3 M	6	9
15	Hotel Parbet	12	16
16	Penginapan Raodatul Janna	9	16
	Jumlah	197	330

Sumber : BPS Kabupaten Soppeng, 2018

Salah satu indikator keberhasilan operasional dan penyediaan usaha akomodasi adalah tingkat hunian kamar (*room occupancy*). Analisis terhadap data tingkat hunian kamar akan menjadi acuan dalam memahami karakteristik kebutuhan pasar wisatawan (*room seeker*) terhadap ketersediaan jenis kamar pada hotel berbintang atau non-bintang serta dari sisi sediaan terhadap jumlah dan tipe kamar beserta tempat tidur yang tersedia.

Adapun data mengenai tingkat hunian kamar hotel di kabupaten Soppeng pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3
Tingkat Penghunian Kamar Hotel
di Kabupaten Soppeng Tahun 2017

No.	Hotel	Kamar Tersedia	Jumlah Tamu	Tingkat Hunian Kamar
1.	Hotel Aman	4.745	240	5.06%
2.	Hotel Munasko	1.825	98	5.37%
3.	Hotel Satria	1.825	15	0.82%
4.	Hotel Kayangan	4.745	124	2.61%
5.	Hotel Ompo Indah	2.920	98	3.36%
6.	Hotel Surya	12.045	300	2.49%
7.	Mutya Rejeki	2.190	51	2.33%
8.	Hotel Grand Saota	5.840	1.350	23.12%
9.	Wisma Latappere	6.570	600	9.13%
10.	Wisma Gandaria	3.650	350	9.59%
11.	Hakata Lejja Resort	4.380	687	15.68%
12.	Hotel Ada	7.665	519	6.77%
13.	Sederhana	3.650	40	1.10%
14.	Wisma 3 M	2.190	50	2.28%
15.	Hotel Parbet	4.380	6.089	139.02%
16.	Raodatul Janna	3.285	270	8.22%
Jumlah		71.905	10.881	14,81%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2018

Data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah kamar yang tersedia pada tahun 2017 adalah sebanyak 71.905 kamar dan jumlah tamu menginap sebanyak 10.881 orang. Dalam menetapkan tingkat hunian kamar dibutuhkan data tentang jumlah kamar terjual menurut bulan dan diakumulasikan dalam setahun, namun pihak usaha hotel tidak menyediakan data yang akurat tentang jumlah kamar terjual maka dalam penetapan jumlah kamar terjual diasumsikan dengan menggunakan jumlah tamu menginap sehingga rata-rata tingkat penghunian kamar pada hotel di kabupaten Soppeng pada tahun 2017 adalah sebesar 14,81 %.

Selain data tentang tingkat penghunian kamar (*room occupancy*), juga dilakukan analisis terhadap data jumlah tamu menginap dan tingkat pemakaian tempat tidur wisatawan selama melakukan kunjungan ke kabupaten Soppeng sehingga dapat diketahui bagaimana struktur pemakaian kamar oleh wisatawan

pada pemakaian kamar dengan hunian tunggal (*single occupancy*) dan penggunaan kamar dobel (*double occupancy*). Data tentang komponen tersebut akan berasosiasi dengan pengeluaran rata-rata tamu terhadap pembelian produk pada hotel.

Adapun data mengenai jumlah wisatawan yang menginap beserta tingkat pemakaian tempat tidur pada hotel di kabupaten Soppeng pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4
Jumlah Tamu Menginap dan Pemakaian Tempat Tidur Pada Hotel di Kabupaten Soppeng Tahun 2017

No.	Hotel	Tempat Tidur Tersedia	Jumlah Tamu	Tingkat Pemakaian Tempat Tidur
1.	Hotel Aman	11315	240	2.12%
2.	Hotel Munasko	4380	98	2.24%
3.	Hotel Satria	3285	15	0.46%
4.	Hotel Kayangan	7665	124	1.62%
5.	Hotel Ompo Indah	5840	98	1.68%
6.	Hotel Surya	20075	300	1.49%
7.	Mutya Rejeki	2920	51	1.75%
8.	Hotel Grand Saota	8395	1.350	16.08%
9.	Wisma Latappere	9490	600	6.32%
10.	Wisma Gandaria	7300	350	4.79%
11.	Hakata Lejja Resort	5475	687	12.55%
12.	Hotel Ada	12410	519	4.18%
13.	Sederhana	6935	40	0.58%
14.	Wisma 3 M	3285	50	1.52%
15.	Hotel Parbet	5840	6.089	104.26%
16.	Raodatul Janna	5840	270	4.62%
Jumlah		120.450	10.881	10,39%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2018

Data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah wisatawan yang menginap pada hotel di kabupaten Soppeng pada tahun 2017 sebanyak 10.881 orang tamu. Jumlah tempat tidur tersedia pada 16 buah hotel di kabupaten Soppeng pada tahun 2017 adalah sebanyak 120.450 buah kamar. Dengan demikian maka pemakaian tempat tidur pada hotel tahun 2017 di kabupaten Soppeng adalah sebanyak 120.450 tempat tidur tersedia dan jumlah tamu yang menggunakan tempat tidur dengan asumsi satu buah tempat tidur per tamu hotel, maka tempat tidur terjual hanya sebanyak 10.881 tempat tidur, sehingga tingkat pemakaian tempat tidur rata-rata pada hotel adalah sebesar 10,39 %.

Data tersebut menunjukkan bahwa dari sisi ketersediaan kamar (*room supply*), jumlah kamar dan tempat tidur yang tersedia pada hotel di kabupaten Soppeng sampai saat ini masih terjadi kelebihan (*over supply*). Untuk itu dari sisi daya tarik (*pull factor*) diperlukan upaya strategis dalam memperbanyak aktivitas dan

aktraksi yang menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke kabupaten Soppeng.

Guna memenuhi kebutuhan pasar yang sudah ada (*existing market*) maka jenis wisata MICE merupakan alternatif kegiatan wisata yang perlu dikembangkan melalui penyediaan sarana ruang pertemuan, ruang rapat, serta kegiatan wisata minat khusus kuliner dan outbound lainnya yang memungkinkan sehingga lama tinggal wisatawan dapat diperpanjang.

5.1.2. Restoran dan Cafe

Selain ketersediaan kamar yang bersih, aman dan nyaman bagi wisatawan, keberadaan usaha restoran, rumah makan dan café juga menjadi salah satu daya tarik yang mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke kabupaten Soppeng.

Keberadaan restoran, rumah makan dan café di kabupaten Soppeng belum tertata dengan baik. Untuk restoran yang memenuhi standar kebutuhan wisatawan masih belum dijumpai, sebahagian besar hotel menyiapkan fasilitas restoran dan café dengan pilihan menu yang sangat terbatas. Rumah makan yang tersedia di kabupaten Soppeng sebahagian besar menawarkan sajian hidangan yang tidak spesifik menawarkan kuliner tradisional dalam racikan modern.

Sebahagian lainnya di daerah yang sering menjadi tempat singgah dan istirahat favorit bagi masyarakat yang berkunjung atau yang sekedar melintasi kabupaten Soppeng hanya menyediakan tempat terbatas berupa warung sederhana yang menjual makanan berupa mie instan beserta gogos, buras dan telur rebus, serta minuman tradisional tuak manis, kopi, teh dan minuman ringan lainnya (*soft drink*).

Dukungan potensi sumberdaya alam yang melimpah akan hasil perikanan air tawar, peternakan, pertanian dan perkebunan sebagai kontributor utama dalam perekonomian kabupaten Soppeng, sejatinya mampu membuat dan menumbuhkan minat investasi dalam penyediaan fasilitas restoran, rumah makan dan cafe.

Hal tersebut akan sangat berperan dalam mendorong kepuasan wisatawan serta memacu minat wisatawan berkunjung ke kabupaten Soppeng mengingat ketersediaan restoran di kabupaten Soppeng masih sangat terbatas. Keterbatasan tersebut bukan hanya dari segi kuantitas, namun dalam hal variasi produk kuliner yang dipasarkan, kebersihan, kenyamanan dan suasana restoran yang ada saat ini juga masih sangat terbatas. Selain itu, dari sisi distribusi lokasi restoran sebahagian besar berada pada kecamatan ibukota kabupaten. Untuk itu diperlukan upaya yang lebih terarah dalam mengangkat dan memperkenalkan kuliner tradisional melalui penyediaan fasilitas restoran yang baik, pelatihan tenaga kerja serta penyusunan ikon kuliner tradisional kabupaten Soppeng.

Adapun data tentang jumlah restoran dan café di kabupaten Soppeng tahun 2013- 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.5
Jumlah Restoran/ Cafe
di Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Jumlah Restoran/ Cafe
1.	2013	31
2.	2014	32
3.	2015	34
4.	2016	34
5.	2017	34

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2018

5.1.3. Biro Perjalanan Wisata

Usaha Biro Perjalanan Wisata ataupun Agen Perjalanan Wisata merupakan jenis usaha pariwisata yang memegang peran penting dalam menarik dan meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke kabupaten Soppeng melalui pengemasan berbagai jenis paket wisata serta promosi dan pemasaran potensi daya tarik wisata kabupaten Soppeng yang terarah, terencana dan berkelanjutan sehingga kabupaten Soppeng akan lebih dikenal oleh wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun manca negara.

Saat ini, sejumlah Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata yang ada di kabupaten Soppeng masih sangat terbatas dan berfokus dalam swa kendaraan angkutan, penjualan tiket penerbangan dan paket wisata religi Umrah dan Haji. Data mengenai jumlah usaha Biro Perjalanan Wisata yang ada di kabupaten Soppeng pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.6
Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata
di Kabupaten Soppeng Tahun 2018

No.	Nama Usaha	Alamat
1.	PT. Shafwah Tours & Travel	Bila, Kecamatan Lalabata
2.	Fauzan Travel	Jl. Bila Utara, Bila Kecamatan Lalabata
3.	Nur Tras Travel	Botto, Kecamatan Lalabata
4.	Genway Travel	Jl. Kalino No. 18 – Botto Kecamatan Lalabata
5.	WD Travel	Attang Salo Kecamatan Marioriawa

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2018

5.1.4. Usaha Jasa MICE

Usaha Jasa MICE merupakan jenis usaha pariwisata yang mendukung aktivitas pariwisata dalam menarik dan meningkatkan angka kunjungan wisatawan minat khusus MICE ke kabupaten Soppeng. Saat ini pertumbuhan kebutuhan wisatawan MICE terhadap pelayanan *Meeting, Incentive, Conference* dan *Exhibition* menunjukkan prospek yang cukup signifikan.

Pertumbuhan ekonomi dan industri kabupaten Soppeng serta posisi dan peran kabupaten Soppeng sangat memungkinkan dalam melaksanakan berbagai jenis kegiatan formal tingkat nasional, provinsi dan kabupaten seperti *event* olah raga, musyawarah nasional, festival budaya dan pameran lainnya.

Untuk dapat menangkap potensi pasar pada segmentasi MICE tersebut, dibutuhkan upaya terstruktur dalam bekerjasama dengan perusahaan event organizer (EO dan PCO) yang sudah ada, ataupun dengan mendorong masyarakat dalam membuka dan mengusahakan terbentuknya event organizer di kabupaten Soppeng.

5.1.5. Usaha Kawasan Pariwisata dan Daya Tarik Wisata

Usaha kawasan pariwisata dan daya Tarik wisata merupakan jenis usaha pariwisata yang sangat strategis dalam menarik dan meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke kabupaten Soppeng melalui penyediaan kawasan pariwisata yang menarik sehingga dapat menjadi atraksi dan aktivitas pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dibandingkan dengan daya tarik pada destinasi lainnya.

Saat ini, terdapat beberapa buah kawasan pariwisata dan daya tarik wisata yang sudah dikelola dan dikembangkan oleh komunitas masyarakat, Dinas Pariwisata kabupaten Soppeng bekerjasama dengan pemerintahan desa setempat. Kawasan pariwisata yang dibangun dan dikembangkan berbasis potensi daya tarik wilayah seperti kawasan wisata Lereng Hijau Buludua, kawasan wisata tematik, *rest area*, dan permandian.

5.1.6. Usaha Salon dan Spa

Usaha Salon dan Spa merupakan jenis usaha pariwisata yang mendukung aktivitas pariwisata dalam menarik dan meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke kabupaten Soppeng. Saat ini pertumbuhan kebutuhan wisatawan terhadap pelayanan kecantikan dan kesehatan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

Saat ini, sejumlah salon kecantikan yang ada di kabupaten Soppeng masih berfokus dalam pelayanan penataan rambut dan perawatan kulit, kuku dan wajah. Data mengenai jumlah usaha Salon dan Spa yang ada di kabupaten Soppeng pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.7
Usaha Salon dan Spa di Kabupaten Soppeng
Tahun 2018

No.	Nama Usaha	Alamat
1.	Glory Organizer	Lalabata Rilau
2.	Erick Barber	Jenna, Lili Riaja
3.	Salon Matahari	Pajalesang, Lili Rilau
4.	Sry Salon	Jl. Donri Donri, Pising, Donri Donri
5.	Jupe Salon	Pajalesang, Lili Rilau
6.	Citra Salon	Ganra
7.	Icha Salon	Jl. Merdeka No.43, Bila, Lalabata
8	Kiki Salon	Jl. Lompo, Lemba, Lalabata
9	Mampo Salon	Bila, Lalabata
10	Salon Art	Jenna, Lili Riaja
11	Salon Indry	Jenna, Lili Riaja
12	Salon Yuni	Lemba, Lalabata
13	Salon Uly	Lapajung, Lalabata

Sumber : Data Olahan Peneletian, 2018

5.1.7. Usaha Pariwisata Lainnya

Untuk usaha pariwisata lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, seperti usaha daya tarik wisata; jasa transportasi wisata; jasa informasi pariwisata; jasa konsultan pariwisata; dan jasa pramuwisata belum terdapat di kabupaten Soppeng.

5.2. Usaha Kecil dan Menengah Pendukung Pariwisata

Keberadaan usaha kecil dan menengah pendukung pariwisata selain usaha penyediaan akomodasi dan usaha makan minum adalah usaha yang berbasis kreativitas yang dapat mendorong perkembangan pariwisata kabupaten Soppeng, seperti usaha cinderamata (termasuk kuliner dan kerajinan), usaha pengolahan bahan lokal serta percetakan dan usaha kreatif berbasis digital.

Keberadaan usaha kecil dan menengah dalam mendukung pariwisata memberikan ruang kepada masyarakat untuk memperkenalkan bahan dan produk lokal dengan penanganan tradisional sehingga menarik untuk melibatkan wisatawan dalam pembuatan produknya serta memacu penjualan produk melalui pembelajaran wisatawan sebagai cinderamata, sekaligus sebagai bahan promosi yang menarik bagi kepariwisataan kabupaten Soppeng.

BAB - 6

PASAR DAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG

6.1. Perkembangan Wisatawan Kabupaten Soppeng

Pemasaran pariwisata merupakan salah satu aspek terpenting dalam perencanaan kepariwisataan (*tourism planning and development*) karena merupakan ujung tombak dalam menentukan arus kunjungan wisatawan. Pemasaran pariwisata terdiri dari dua aspek pokok yaitu aspek produk sebagai *supply side* dan pasar sebagai *demand side*. Hal tersebut sangat penting dalam menjalankan fungsi pemasaran pariwisata karena akan memberikan kontribusi yang besar dalam perancangan kebijaksanaan pemasaran kabupaten Soppeng.

Pemasaran pariwisata kabupaten Soppeng sebagai destinasi pariwisata dilaksanakan melalui penetapan pasar sasaran dan strategi pengembangan pasar melalui penciptaan, pendistribusian, dan komunikasi pemasaran yang terencana, terstruktur dan terintegrasi. Orientasi pasar diterapkan secara konsisten dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap keselarasan antara sumber daya dengan preferensi dan *trend* pasar pariwisata kabupaten Soppeng.

Untuk memenuhi kebutuhan pasar maka pariwisata kabupaten Soppeng harus mampu disesuaikan dengan tipologi dan perilaku wisatawan secara menyeluruh agar dapat disesuaikan dengan sediaan produk yang ditawarkan. Melalui strategi pemasaran yang baik, maka angka kunjungan wisatawan ke kabupaten Soppeng akan terus meningkat dan menjadi motor penggerak perekonomian daerah.

Angka kunjungan wisatawan merupakan salah satu indikator utama dari keberhasilan pembangunan kepariwisataan suatu daerah. Pertumbuhan minat kunjungan wisatawan tersebut akan memberikan pengaruh terhadap penyiapan komponen kepariwisataan lainnya seperti aksesibilitas, akomodasi, atraksi dan aktivitas wisata, serta amenitas kepariwisataan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan yang baik agar kepuasan wisatawan dapat terpenuhi dan menjadikan daya saing kepariwisataan daerah semakin meningkat.

6.1.1. Wisatawan Nusantara

Wisatawan nusantara merupakan potensi pasar yang terus disasar dan didorong oleh pemerintah dalam meningkatkan kepariwisataan nasional dengan target sebanyak 275 juta

Wisatawan Nusantara pada tahun 2019. Pergerakan wisatawan nusantara telah berkontribusi dalam menempatkan Indonesia ke dalam posisi 20 besar negara dengan pertumbuhan pariwisata tercepat dalam kurun waktu tiga tahun dengan pertumbuhan per Januari-Oktober 2017 mencapai 24%.

Wisatawan Nusantara (*wisnus*)/ *domestic tourists* adalah seseorang yang melakukan perjalanan di wilayah teritori suatu negara, dalam hal ini Indonesia, dengan lama perjalanan kurang dari 6 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan perjalanan rutin (sekolah atau bekerja), dengan mengunjungi objek wisata komersial, dan atau menginap di akomodasi komersial, dan atau jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) kilometer pergi-pulang.

Data Kementerian Pariwisata menunjukkan bahwa pada tahun 2017 jumlah perjalanan wisatawan nusantara mencapai sebanyak 270,82 juta perjalanan yang berarti mengalami peningkatan sebesar 2,45 persen dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 264,34 juta perjalanan. Sedangkan rata-rata pertumbuhan jumlah perjalanan setiap tahun selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir mencapai sekitar 2,61 persen. Peningkatan ini diduga sebagai akibat kondisi perekonomian yang semakin membaik, keamanan yang cukup kondusif serta semakin mudahnya aksesibilitas ke daerah-daerah tujuan wisata. Disamping itu, adanya kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat juga ikut berperan dalam mendorong kemajuan sektor pariwisata. Maraknya penggunaan media sosial sangat membantu dalam rangka menyebarkan informasi mengenai destinasi wisata tertentu.

Gambar 6.1
Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Total Pengeluaran, Tahun 2010-2017



Sumber : Publikasi Kajian Data Pasar Wisnus, 2017

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa total pengeluaran selama tahun 2017 mencapai sebesar 253,45 triliun rupiah. Hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar 4,87 persen dibandingkan tahun 2016 yang mencapai sebesar 241,67 triliun rupiah. Sementara untuk rata-rata pertumbuhan jumlah pengeluaran tiap tahun cukup tinggi hingga mencapai sekitar 10,24 persen.

Penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan secara garis besar dapat dibedakan menurut daerah asal dan daerah tujuan. Daerah asal adalah daerah tempat tinggal dari orang yang melakukan perjalanan, sedangkan yang dimaksud daerah tujuan adalah daerah-daerah yang dikunjungi selama melakukan perjalanan. Karakteristik penduduk yang melakukan perjalanan menurut daerah asal maupun daerah tujuan yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, status perkawinan, jenis kegiatan utama, pekerjaan utama, maksud kunjungan, akomodasi yang digunakan, moda angkutan, aktivitas wisata yang dilakukan, rata-rata lama bepergian dan rata-rata pengeluaran per kunjungan.

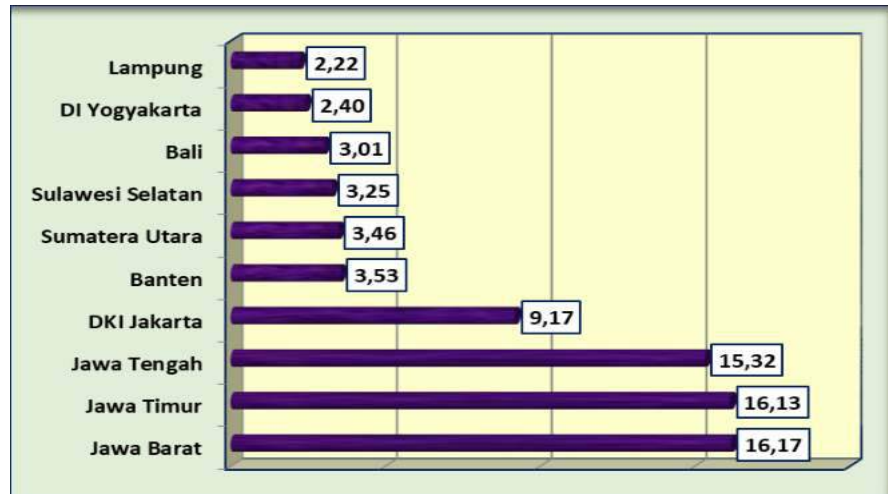
6.1.1.1. Daerah Asal Wisatawan Nusantara

Daerah asal wisatawan nusantara merupakan tempat domisili dari wisnus tersebut. Sebagian besar perjalanan wisatawan nusantara selama tahun 2017 dilakukan oleh penduduk yang berdomisili di wilayah Pulau Jawa, yaitu mencapai 62,71 persen dari seluruh perjalanan wisatawan nusantara di Indonesia.

Perjalanan yang paling banyak dilakukan oleh penduduk yang berdomisili di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah yaitu sekitar 16,17 persen, 16,13 persen serta 15,32 persen dari seluruh perjalanan wisata di Indonesia. Sementara itu, penduduk yang berdomisili di luar Pulau Jawa yang paling banyak melakukan perjalanan adalah penduduk yang berdomisili di Provinsi Sumatera Utara.

Jumlah perjalanan wisatawan nusantara yang dilakukan oleh penduduk Sumatera Utara selama tahun 2017 hingga mencapai sekitar 3,46 persen dari seluruh perjalanan wisata di Indonesia. Selanjutnya adalah perjalanan yang dilakukan oleh penduduk yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, Bali, dan Lampung yang masing-masing mencapai sekitar 3,25 persen; 3,01 persen; dan 2,22 persen

Gambar 6.2
Distribusi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi Asal, Tahun 2017 (Persen)

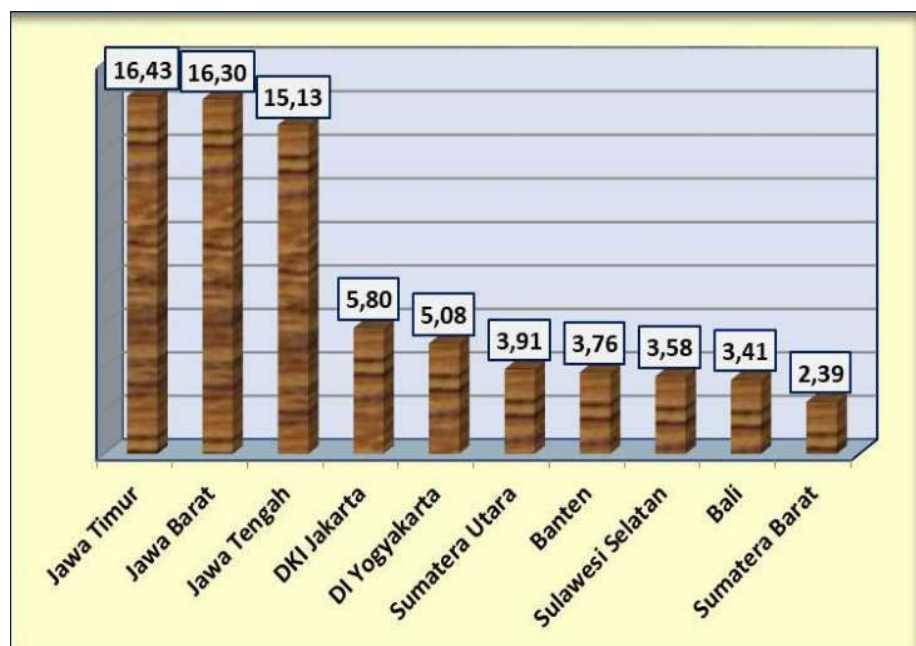


Sumber : Publikasi Kajian Data Pasar Wisnus, 2017

6.1.1.2. Daerah Tujuan Wisatawan Nusantara

Daerah tujuan wisatawan nusantara merupakan tempat tujuan dari perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan nusantara tersebut atau sering disebut dengan destinasi wisata. Pilihan daerah tujuan wisata ini akan sangat menentukan kecenderungan kabupaten/ kota dalam wilayah provinsi untuk mendapatkan kunjungan wisatawan nusantara.

Gambar 6.3
Distribusi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi Tujuan, Tahun 2017 (Persen)



Sumber : Publikasi Kajian Data Pasar Wisnus, 2017

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa jumlah perjalanan penduduk Indonesia yang bertujuan ke Provinsi Jawa Timur merupakan yang tertinggi hingga mencapai sekitar 10,37 persen dari seluruh perjalanan wisata di Indonesia. Kemudian diikuti oleh wisatawan nusantara yang bertujuan mengunjungi wilayah-wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Barat, yang masing-masing sekitar 8,77 persen dan 6,75 persen. Kondisi tersebut hampir sama dengan pola yang terjadi menurut daerah asal, dimana Pulau Jawa sangat mendominasi. Sekitar 34,33 persen dari keseluruhan perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan nusantara, bertujuan di wilayah-wilayah Pulau Jawa.

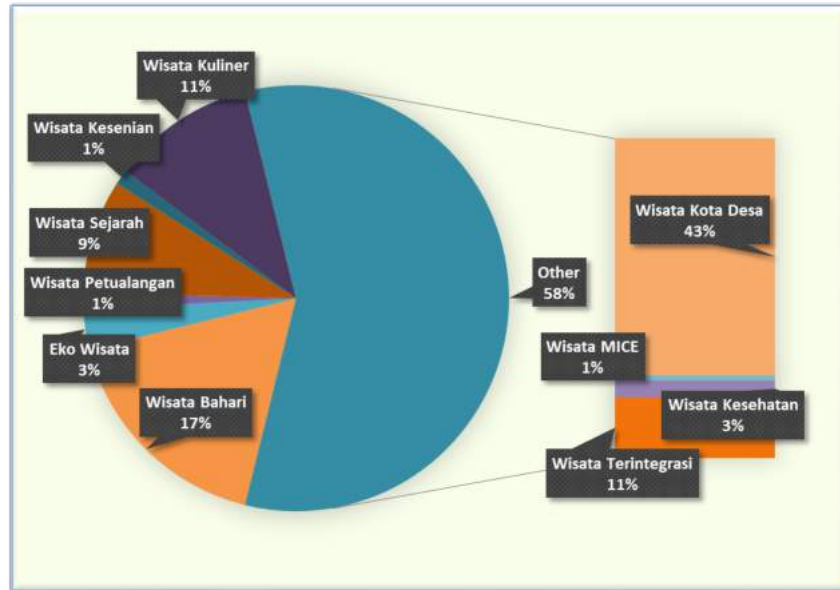
Provinsi di luar Pulau Jawa yang menjadi tujuan favorit wisatawan nusantara adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mencapai sekitar 6,64 persen dari seluruh perjalanan yang dilakukan oleh wisnus di Indonesia. Kemudian disusul oleh wisatawan dengan tujuan wilayah-wilayah di Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali dan Sumatera Barat yang masing-masing sekitar 3,91 persen; 3,58 persen; 3,41 persen; dan 2,39 persen.

6.1.1.3. Aktivitas Wisata

Aktivitas wisata merupakan jenis-jenis aktivitas yang dilakukan oleh wisatawan nusantara selama melakukan perjalanan wisata. Kegiatan/aktivitas pariwisata dikelompokkan menjadi 10 jenis aktivitas, yaitu: wisata bahari, eko wisata, wisata petualangan, wisata sejarah/religi, wisata kesenian, wisata kuliner, wisata kota & pedesaan, wisata MICE, wisata olahraga/kesehatan, dan wisata terintegrasi.

Aktivitas yang paling banyak dilakukan oleh wisatawan nusantara adalah jenis wisata kota dan pedesaan seperti wisata belanja, mengunjungi teman atau kerabat, menikmati hiburan malam, tinggal di desa tradisional/*homestay*, mengunjungi pasar tradisional, wisata darmabakti, *philantropis* (dermawan), program tanggung jawab sosial perusahaan, fotografi & *architectural visit*, dan *live-in program*. Aktivitas ini mencapai sekitar 42,76 persen dari seluruh aktivitas yang dilakukan selama melakukan perjalanan wisata. Aktivitas selanjutnya adalah wisata bahari yang mencapai sekitar 17,28 persen kemudian diikuti oleh wisata terintegrasi/terpadu dan wisata kuliner yang masing masing sekitar 11 persen. Sedangkan yang paling sedikit dilakukan oleh wisatawan nusantar adalah wisata MICE yang masih sekitar 0,92 persen.

Gambar 6.4
Distribusi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Aktivitas Wisata Yang Dilakukan Tahun 2017



Sumber : Publikasi Kajian Data Pasar Wisnus, 2017

6.1.1.4. Akomodasi Yang Digunakan

Wisatawan nusantara yang berkunjung ke wilayah-wilayah di Indonesia, berdasarkan data yang tersedia menunjukkan pola yang hampir sama dalam hal penggunaan akomodasi, dimana sebagian besar menginap di akomodasi. Pada tahun 2017, wisnus yang menggunakan akomodasi mencapai sekitar 53,65 persen sedangkan pada tahun 2016 proporsinya mencapai sebesar 56,48 persen.

Gambar 6.5
Distribusi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Akomodasi Yang Digunakan Tahun 2016-2017(Persen)



Sumber : Publikasi Kajian Data Pasar Wisnus, 2017

Akomodasi yang digunakan oleh wisnus untuk menginap sebagian besar adalah rumah teman atau keluarga. Hal ini diduga karena sebagian besar mereka bermaksud untuk mengunjungi teman atau keluarga. Berdasarkan hasil Kajian Data Pasar Wisatawan Nusantara tahun 2017 menunjukkan bahwa proporsi wisnus yang menginap di rumah teman atau keluarga mencapai sekitar 82,15 persen dari jumlah wisnus yang menginap di akomodasi, dimana proporsinya cenderung lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 79,44 persen.

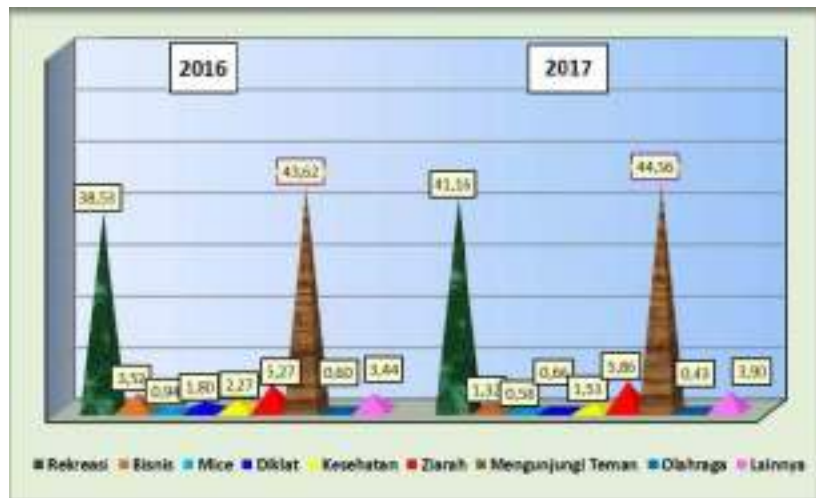
Sedangkan wisnus yang menginap di akomodasi komersial hanya sekitar 15,33 persen saja, dimana 8,94 persen menginap di hotel, baik hotel bintang maupun nonbintang, dan 6,38 persen wisnus menginap di akomodasi komersial lainnya. Proporsi wisnus yang menginap di akomodasi komersial, baik di hotel maupun di akomodasi komersial lainnya mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu yang mencapai sekitar 18,15 persen dari jumlah wisnus yang menggunakan akomodasi.

6.1.1.5. Maksud Kunjungan

Maksud atau tujuan dari wisatawan nusantara dalam melakukan bepergian/ perjalanan atau kunjungan sangat beragam. Pada tahun 2017, sebagian besar wisnus melakukan perjalanan dengan tujuan untuk mengunjungi teman/ keluarga/ mudik. Proporsi wisatawan nusantara yang mengunjungi teman/ keluarga/ mudik mencapai sekitar 44,56 persen. Kelompok ini terbagi atas 32,67 persen wisnus yang bertujuan utama untuk mengunjungi teman/keluarga dan 11,89 persen wisnus yang tujuan utamanya adalah untuk mudik/ pulang kampung pada hari raya. Selanjutnya adalah wisnus yang bertujuan untuk berlibur atau rekreasi yang mencapai sekitar 41,16 persen dari seluruh perjalanan wisatawan nusantara di Indonesia.

Proporsi wisnus yang melakukan perjalanan dengan tujuan utama berlibur/ rekreasi ini menunjukkan peningkatan dibanding 2016 yang hanya mencapai sekitar 38,53 persen. Selain itu, terdapat wisnus dengan tujuan utama untuk berziarah/ keagamaan (5,86 persen), kesehatan/berobat (1,53 persen), profesi/ bisnis (1,32 persen), sedangkan sisanya terbagi dengan tujuan utama pertemuan/ kongres/ seminar, training/ pelatihan, olahraga/ kesenian, dan lainnya

Gambar 6.6
Distribusi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Maksud Kunjungan Tahun 2016-2017(Persen)

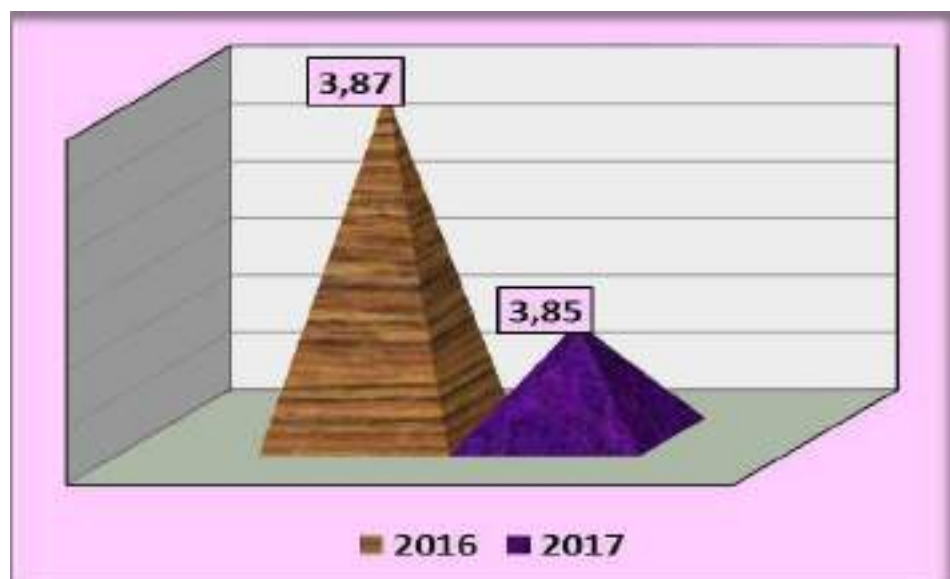


Sumber : Publikasi Kajian Data Pasar Wisnus, 2017

6.1.1.6. Rata-Rata Lama Bepergian

Rata-rata lama bepergian penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan wisata selama dua tahun terakhir tidak mengalami banyak perubahan meskipun cenderung mengalami penurunan. Selama dua tahun terakhir, baik tahun 2017 maupun 2016, rata-rata lama bepergian wisatawan nusantara adalah 3,85 hari dan 3,87, atau sedikit menurun dibandingkan tahun 2016.

Gambar 6.7
Rata-Rata Lama Bepergian Wisatawan Nusantara Tahun 2016-2017 (Hari)



Sumber : Publikasi Kajian Data Pasar Wisnus, 2017

Wisatawan yang berasal dari Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku, dan Maluku Utara cenderung bepergian dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan wisnus dari provinsi-provinsi lain di Indonesia. Rata-rata lama bepergian dari ke empat provinsi ini berkisar antara 7,63 hingga 14,07 hari. Sedangkan wisatawan yang berasal dari Pulau Jawa, rata-rata lama bepergiannya hanya sekitar 2 hingga 5 hari. Apabila dilihat dari provinsi yang menjadi tujuan utama, wisatawan yang melakukan perjalanan ke Provinsi Papua Barat, dan Maluku juga cenderung lebih lama waktu bepergiannya. Rata-rata lama bepergian wisatawan nusantara yang berkunjung ke provinsi tersebut mencapai sekitar 7 hingga 12 hari, sedangkan penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan dengan tujuan ke wilayah-wilayah di Pulau Jawa hanya sekitar 2 hingga 6 hari.

6.1.1.7. Rata-Rata Pengeluaran

Rata-rata pengeluaran setiap perjalanan yang dilakukan wisatawan nusantara dalam melakukan kunjungan ke berbagai wilayah-wilayah di Indonesia selama tahun 2017 mencapai sebesar 935,84 ribu rupiah. Sementara itu, rata-rata pengeluaran pada tahun 2016 hanya sekitar 914,3 ribu rupiah. Hal ini berarti terjadi kenaikan sebesar 2,36 persen dibandingkan tahun 2016.

Pada tahun 2017, rata-rata pengeluaran yang terbesar adalah wisatawan yang berasal dari provinsi-provinsi di Indonesia bagian timur. Rata-rata pengeluaran wisatawan asal Provinsi Papua Barat dan Papua mencapai lebih dari 5 juta rupiah setiap kunjungan. Di sisi lain, wisatawan yang berasal dari provinsi-provinsi di Pulau Jawa, rata-rata pengeluarannya hanya sekitar 400 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah.

Komposisi pengeluaran yang dilakukan wisatawan nusantara baik pada tahun 2016 maupun tahun 2017, memperlihatkan bahwa sebagian besar belanja yang dikeluarkan digunakan untuk membiayai angkutan (sebesar 36,5 persen pada 2016 dan 33,00 persen pada 2017). Rata-rata pengeluaran per kunjungan untuk angkutan mencapai sebesar 308,81 ribu rupiah atau terjadi penurunan sekitar 7,51 persen dibanding tahun 2016 yang mencapai 333,90 ribu rupiah.

Sementara itu, pengeluaran wisnus untuk membeli makanan, minuman, dan tembakau dalam melakukan perjalanan mencapai sekitar 30,20 persen dari total pengeluaran atau rata-rata sebesar 282,60 ribu rupiah. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 36,59 persen dibanding tahun 2016 yang hanya mencapai 206,90 ribu rupiah.

Rata-rata biaya yang dikeluarkan wisnus untuk berbelanja dan pembelian cinderamata adalah sekitar 199,84 ribu rupiah, atau sekitar 21,35 persen dari rata-rata pengeluaran total wisnus. Pengeluaran untuk berbelanja dan pembelian cinderamata mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 173,10 ribu rupiah. Rata-rata pengeluaran untuk akomodasi

menyumbang proporsi sekitar 6,42 persen atau kira-kira sekitar 60,09 ribu rupiah.

Gambar 6.8
Rata-Rata Pengeluaran Per Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2016-2017 (000 Rupiah)



Sumber : Publikasi Kajian Data Pasar Wisnus, 2017

Berdasarkan informasi dari Kajian Data Pasar Wisatawan Nusantara 2017, membuktikan bahwa aktivitas pariwisata sudah mulai berkembang. Kondisi tersebut diharapkan dapat menjadikan aktivitas pariwisata menjadi salah satu alternatif dari kegiatan ekonomi yang potensial dalam membangun suatu wilayah. Dengan memberikan dukungan atas terselenggarakannya kegiatan pariwisata dengan baik, maka kegiatan tersebut diharapkan dapat mengarah menjadi aktivitas ekonomi yang handal dan mampu mendorong sektor-sektor ekonomi lain terkait.

Aktivitas pariwisata dapat berdampak pada peningkatan lapangan usaha, pendapatan masyarakat dan produksi nasional. Dukungan tersebut dapat berupa penyediaan infrastruktur yang cukup memadai, jaminan keamanan dan keselamatan baik jiwa maupun harta benda, dan juga memberikan informasi yang cukup memadai kepada wisatawan

6.1.2. Wisatawan Mancanegara

Pertumbuhan minat kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia bertumbuh sangat signifikan seiring dengan semakin gencarnya kegiatan promosi dan bertumbuhnya daya tarik wisata baru di seluruh wilayah nusantara termasuk kabupaten Soppeng.

Letak geografis kabupaten Soppeng yang cukup strategis dalam pertimbangan wisatawan memutuskan pola perjalanan

wisata yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat internasional dalam koridor wisata Toraja-Bulukumba-Selayar sebagai ikon utama daya Tarik pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan kabupaten Soppeng sebagai destinasi wajib dikunjungi oleh wisatawan.

Kekayaan dan keindahan alam yang sangat eksotis, keragaman budaya, keunikan tinggalan sejarah dan peradaban masyarakat masa lalu serta keramah-tamahan penduduk kabupaten Soppeng menjadi daya tarik yang sangat kuat bagi wisatawan mancanegara. Hal tersebut juga ditunjang oleh kemudahan aksesibilitas dengan keragaman moda transportasi yang tersedia serta perkembangan sarana prasarana pendukung kepariwisataan lainnya yang semakin membaik menjadikan posisi kabupaten Soppeng sebagai destinasi pariwisata nasional semakin kompetitif.

Berbeda halnya dengan kunjungan wisatawan nusantara, pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kabupaten Soppeng menunjukkan angka yang sangat kurang bahkan cenderung belum ada. Hal ini tentu saja menjadi tugas prioritas dalam menata, mengembangkan, mengemas serta mempromosikan potensi pariwisata kabupaten Soppeng pada pasar pariwisata internasional.

6.2. Karakteristik Pasar Wisatawan Kabupaten Soppeng

Karakteristik atau tipologi wisatawan merupakan hal yang perlu dianalisis oleh sebuah destinasi untuk mengetahui lebih mendalam tentang kesesuaian produk pariwisata yang tersedia dan dimiliki oleh kabupaten Soppeng dengan preferensi minat kunjungan wisatawan sehingga dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata, akan dijadikan dasar dalam pengembangannya.

Secara umum, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara yang berkunjung ke kabupaten Soppeng adalah wisatawan yang terdistribusi dari pintu masuk utama ke kota atau provinsi lain yang melanjutkan kegiatan wisatanya di kota Makassar dan melintasi kabupaten Soppeng sehingga dalam identifikasi karakteristik pasar harus melihat perkembangan pada wilayah tersebut.

6.2.1. Karakteristik Wisatawan Nusantara

Wisatawan nusantara yang berkunjung ke kabupaten Soppeng sebahagian besar adalah wisatawan bisnis dan tujuan urusan dinas, baik yang bersifat individu maupun kelompok berupa komunitas dan profesi yang berasal dari dalam provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk wisatawan nusantara, wisatawan asal pulau Jawa termasuk Jakarta merupakan pasar wisatawan yang bertumbuh sangat signifikan sehingga diperlukan strategi promosi dan pemasaran yang lebih baik. Selain itu, perlu penambahan dan

perbaikan sarana transportasi darat dan laut dari berbagai jalur pelayaran baik komersil penumpang umum maupun kapal pesiar pribadi.

Berdasarkan distribusi kelompok umur, wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Soppeng di dominasi oleh wisatawan pada kelompok usia 26 sampai dengan 50 tahun sebesar 72,14%, disusul oleh wisatawan kelompok usia 17 sampai dengan 25 tahun sebesar 23,06%, dan yang terkecil adalah wisatawan pada kelompok usia kurang dari 17 tahun sebesar 4,80%.

Berdasarkan data tersebut, wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Soppeng merupakan wisatawan pada pada kelompok umur yang sangat produktif, matang (*mature*), selektif dan aktif. Kelompok wisatawan pada rentang usia 17 sampai dengan 50 tahun merupakan kelompok yang sangat produktif dan aktif sehingga menjadi pangsa pasar yang sangat baik dan potensial untuk berkembang.

Untuk dapat mengetahui kualitas wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Soppeng, maka penelusuran data dan informasi terhadap pekerjaan/ profesi wisatawan menjadi bagian penting dalam menganalisis kecenderungan pilihan destinasi yang diminati wisatawan, serta menjadi referensi dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas destinasi dan atraksi wisata kabupaten Soppeng.

Berdasarkan pekerjaan dan profesi, wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Soppeng sebahagian besar adalah pegawai negeri sipil dan BUMN yaitu sebesar 70 %, disusul oleh kelompok pegawai swasta sebesar 18 %, kelompok profesional sebesar 8 % dan yang terkecil adalah kelompok mahasiswa/ pelajar yaitu hanya sebesar 4 %.

Dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil, BUMN, swasta dan profesional, maka dapat diyakini bahwa kemampuan daya beli terhadap produk wisata sangat kompetitif. Untuk itu kemasan paket wisata dengan daya tarik dan atraksi yang menantang, unik dan memberikan kenangan merupakan peluang yang perlu diantisipasi.

Motivasi dan tujuan kunjungan ke kabupaten Soppeng oleh wisatawan menunjukkan bahwa wisatawan sebahagian besar datang dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas dan rapat, yaitu sebesar 63%. Selanjutnya adalah wisatawan yang bermaksud untuk bisnis dan perdagangan sebesar 14%, wisatawan dengan aktivitas menghadiri event, seminar serta penelitian sebesar 13%, wisatawan dengan tujuan liburan sebesar 6%, dan motivasi yang paling kecil adalah mengunjungi teman, kerabat, keluarga yaitu sebesar 4%.

Jumlah kunjungan wisatawan ke kabupaten Soppeng berdasarkan jumlah kunjungan menunjukkan bahwa sebanyak 32% wisatawan merupakan kunjungan pertama ke kabupaten Soppeng, dan sisanya sebanyak 68% telah berkunjung ke kabupaten Soppeng sebanyak 2 sampai dengan 5 kali. Dalam hal jumlah wisatawan per kunjungan, sebanyak 21% wisatawan melakukan kunjungan secara sendiri-sendiri, dan sisanya sebanyak 79%

melakukan kunjungan bersama keluarga atau teman dengan jumlah 2 sampai dengan 3 orang.

Besaran pendapatan dari wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa sebahagian besar wisatawan (87%) merupakan kelompok masyarakat sejahtera dengan pendapatan antara 5,1 sampai dengan 10 juta rupiah per bulan dan hanya sebahagian kecil wisatawan yang berpenghasilan kurang dari 2 juta rupiah per bulan.

Data dan informasi ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya strategis dalam hal pengembangan kualitas serta diversifikasi produk dan destinasi serta atraksi wisata sehingga dapat memacu minat wisatawan dalam melakukan kunjungan ulang (*repeater*) dengan membawa keluarga, rekan maupun kerabat untuk menjadikan kabupaten Soppeng sebagai destinasi wisata.

Berdasarkan sumber informasi yang diperoleh wisatawan tentang kabupaten Soppeng, sebahagian besar wisatawan (68%) memperoleh informasi melalui penelusuran terhadap media *on-line* termasuk media sosial, disusul oleh wisatawan yang memperoleh informasi dari teman/ keluarga 14 %, dan informasi dari media lain seperti koran, majalah, buletin dan jurnal sebanyak 18%, dan tidak ada wisatawan yang memperoleh informasi tentang kabupaten Soppeng melalui biro perjalanan wisata.

Berdasarkan data tersebut, maka diperlukan upaya yang lebih intensif dalam membangun relasi dengan kantor atau perusahaan serta biro perjalanan wisata sehingga pelaksanaan kegiatannya dapat dilaksanakan di kabupaten Soppeng. Selain itu, pemanfaatan media sebagai saluran distribusi (*distribution channel*) dalam mempromosikan dan memasarkan pariwisata kabupaten Soppeng perlu lebih dioptimalkan.

Sumber biaya yang dikeluarkan oleh wisatawan selama melakukan kunjungan ke kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa sebanyak 32% melakukan perjalanan dengan biaya sendiri, 65% wisatawan melakukan perjalanan atas biaya kantor/ perusahaan, dan sisanya sebanyak 3% dibiayai oleh rekan, keluarga maupun kerabatnya.

Rata-rata lama kunjungan wisatawan di kabupaten Soppeng adalah 1 hari. Sebahagian besar wisatawan (89%) belum menjadikan kabupaten Soppeng sebagai destinasi utama. Sebanyak 64% dari wisatawan yang menjadikan kabupaten Soppeng sebagai tujuan utama wisata minat khusus budaya dan sejarah, alam, dan menghadiri event tertentu yang tinggal selama 2 sampai dengan 3 hari. Lama tinggal yang terbesar yaitu 3 sampai dengan 4 hari hanya sebanyak 16,21% yaitu kelompok wisatawan dengan tujuan melakukan kegiatan bisnis dan kegiatan dinas atau kegiatan perusahaan/ profesi lainnya di kabupaten Soppeng.

Jenis akomodasi yang digunakan wisatawan selama melakukan kunjungan di kabupaten Soppeng menunjukkan pilihan yang bervariasi. Sebahagian besar wisatawan (63%) dikategorikan visitor karena waktu kunjungan di kabupaten Soppeng kurang dari 24 jam dan terdapat 37% responden lebih menyukai menginap di hotel.

Besarnya pengeluaran wisatawan per hari selama melakukan kunjungan ke kabupaten Soppeng sangat bervariasi dengan rata-rata sebesar Rp. 500.000. Distribusi pengeluaran terbesar untuk wisatawan adalah akomodasi, kemudian makan minum, transportasi, serta cinderamata.

Jika kecenderungan minat wisatawan dalam beraktivitas atau menikmati daya tarik destinasi pada saat melakukan kunjungan di tempat lain dikorelasikan dengan motivasi dan rencana aktivitas mereka pada saat melakukan kunjungan ke kabupaten Soppeng menunjukkan hubungan yang signifikan.

Selain aktivitas wisata yang dilakukan wisatawan, jenis atraksi wisata yang paling diminati oleh wisatawan nusantara adalah Taman Wisata Alam Lejja dan aktivitas pada malam hari di kawasan Taman Kalong.

Pilihan wisatawan terhadap kuliner dan minuman yang paling diminati selama melakukan kunjungan ke kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa sebahagian besar wisatawan tidak mengapresiasi kuliner yang ditawarkan karena lebih banyak disebabkan oleh terbatasnya restoran dan rumah makan yang layak (representatif) dan menjual makanan dan minuman tradisional serta terbatasnya kreativitas masyarakat dan pengusaha restoran dalam mengembangkan produk kuliner.

Tanggapan wisatawan terhadap ketersediaan makanan dan minuman tradisional menunjukkan terbatasnya pilihan terhadap tempat penjualan produk kuliner. Restoran, rumah makan dan warung yang menyediakan kuliner tradisional lainnya kurang layak dari sisi kenyamanan dan kebersihan.

6.2.2. Karakteristik Wisatawan Mancanegara

Untuk wisatawan mancanegara, kecenderungan minat terhadap atraksi dan aktivitas wisata yang tertinggi adalah aktivitas wisata alam seperti panorama pegunungan dan pantai. Selain itu, keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang banyak mempekerjakan konsultan asing menyebabkan meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara, walaupun sebagian dari mereka lebih senang untuk tinggal di kota Makassar.

Mengingat keberadaan kabupaten Soppeng belum menjadi destinasi utama kunjungan wisatawan mancanegara sehingga karakteristik wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kabupaten Soppeng digeneralisasi berdasarkan karakteristik wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kota Makassar. Berdasarkan analisis profil wisatawan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan tentang profil umum dan kecenderungan wisatawan ke kabupaten Soppeng berdasar kelompok dan karakter tertentu, sebagai berikut :

a. Wisatawan Malaysia :

Adapun karakteristik wisatawan asal Malaysia yang berkunjung ke kota Makassar adalah sebagai berikut :

- 1) Berusia produktif antara 35 sampai dengan 42 tahun, dan sebahagian besar merupakan profesional dan pegawai.

- 2) Motif kunjungan adalah MICE, bisnis, kunjungan keluarga dan wisata religi.
 - 3) Aktivitas utama yang diminati adalah pertemuan, kuliner, ziarah, wisata alam, spa, hiburan malam, dan belanja.
 - 4) Sebahagian besar merencanakan dan melakukan perjalanan sendiri secara sendiri-sendiri, dan melalui biro perjalanan wisata secara berkelompok.
 - 5) Menjadikan kota Makassar sebagai destinasi utama, khususnya dalam pelaksanaan *meeting* dan bisnis
 - 6) Rata-rata lama tinggal di kota Makassar adalah 4 malam.
 - 7) Pengeluaran rata-rata di kota Makassar sebesar US\$. 95 atau US\$. 375 per kunjungan (tidak termasuk biaya transportasi kedatangan dan keberangkatan).
- b. Wisatawan Singapura
- Adapun karakteristik wisatawan asal Malaysia yang berkunjung ke kota Makassar adalah sebagai berikut :
- 1) Berusia produktif antara 35 sampai dengan 45 tahun, dan sebahagian besar merupakan profesional dan pegawai.
 - 2) Motif kunjungan adalah MICE, bisnis, dan belanja.
 - 3) Aktivitas utama yang diminati adalah pertemuan, kuliner, golf, spa, hiburan malam, dan belanja.
 - 4) Sebahagian besar merencanakan dan melakukan perjalanan sendiri secara sendiri-sendiri.
 - 5) Menjadikan kota Makassar sebagai destinasi utama, khususnya dalam pelaksanaan *meeting* dan bisnis
 - 6) Rata-rata lama tinggal di kota Makassar adalah 3 malam.
 - 7) Pengeluaran rata-rata di kota Makassar sebesar US\$.115 atau US\$. 350 per kunjungan (tidak termasuk biaya transportasi kedatangan dan keberangkatan).
- c. Wisatawan Jerman
- Adapun karakteristik wisatawan asal Jerman yang berkunjung ke kota Makassar adalah sebagai berikut :
- 1) Berusia cukup produktif antara 35 sampai dengan 50 tahun, dan sebahagian besar merupakan profesional.
 - 2) Motif kunjungan adalah berlibur.
 - 3) Aktivitas utama yang diminati adalah atraksi budaya, pantai dan pulau, kuliner, dan belanja
 - 4) Sangat peka terhadap kualitas akomodasi, keramahan, pelayanan, dan keunikan lokal
 - 5) Sebahagian besar merencanakan dan melakukan perjalanan sendiri secara berkelompok melalui biro perjalanan wisata secara berkelompok dan sendiri-sendiri.
 - 6) Belum menjadikan kota Makassar sebagai destinasi utama, keberadaan di kota Makassar hanya transit sebelum atau setelah melakukan perjalanan ke Tana Toraja, atau Bulukumba.
 - 7) Rata-rata lama tinggal di kota Makassar adalah 2 malam.

- 8) Pengeluaran rata-rata di kota Makassar sebesar US\$. 68 atau US\$. 130 per kunjungan (tidak termasuk biaya transportasi kedatangan dan keberangkatan).
- d. Wisatawan China
- Adapun karakteristik wisatawan asal China yang berkunjung ke kota Makassar adalah sebagai berikut :
- 1) Berusia cukup produktif antara 30 sampai dengan 55 tahun, dan sebahagian besar merupakan profesional, militer dan pegawai.
 - 2) Aktivitas utama yang diminati adalah kuliner, wisata alam, spa, hiburan malam, dan belanja.
 - 3) Motif kunjungan adalah liburan, bisnis, kuliner dan belanja.
 - 4) Sebahagian besar merencanakan dan melakukan perjalanan sendiri secara berkelompok melalui biro perjalanan wisata.
 - 5) Membutuhkan *guide* khusus berbahasa mandarin.
 - 6) Rata-rata lama tinggal di kota Makassar adalah 3 malam.
 - 7) Pengeluaran rata-rata di kota Makassar sebesar US\$. 123 atau US\$. 500 per kunjungan (tidak termasuk biaya transportasi kedatangan dan keberangkatan).

6.3. Pemasaran Pariwisata Kabupaten Soppeng

Program dan kegiatan pemasaran kabupaten Soppeng yang belum optimal menyebabkan belum terjadinya pemasaran terintegrasi secara optimal dalam konteks keseluruhan wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai sebuah wilayah yang akan dikembangkan sebagai destinasi unggulan regional Sulawesi Selatan, destinasi pariwisata nasional dengan skala internasional, diperlukan strategi pemasaran pariwisata yang lebih terencana, terarah dan berkelanjutan.

Kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata kabupaten Soppeng yang perlu menjadi perhatian utama dalam pengembangan pariwisata kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut:

- Pembuatan brosur, *flyer* dan buku informasi kepariwisataan yang belum secara optimal memberikan informasi komprehensif terhadap kepariwisataan kabupaten Soppeng.
- Pengembangan *web-site* kepariwisataan yang secara umum belum mampu mengetengahkan informasi yang komprehensif terkait dengan kepariwisataan kabupaten Soppeng.
- Pengembangan event-event budaya sebagai bentuk promosi pariwisata yang belum secara signifikan mampu menarik kunjungan wisatawan ke kabupaten Soppeng.
- Peran serta masyarakat dalam mempromosikan potensi pariwisata kabupaten Soppeng belum optimal.
- *Calendar of Event* pariwisata kabupaten Soppeng belum tersusun secara komprehensif untuk dijadikan acuan oleh

wisatawan dalam merencanakan perjalanannya.

- Identifikasi kesesuaian produk dan pasar terlaksana dengan baik.
- Keterbatasan pusat informasi kepariwisataan serta rendahnya kualitas bahan informasi pariwisata kabupaten Soppeng.

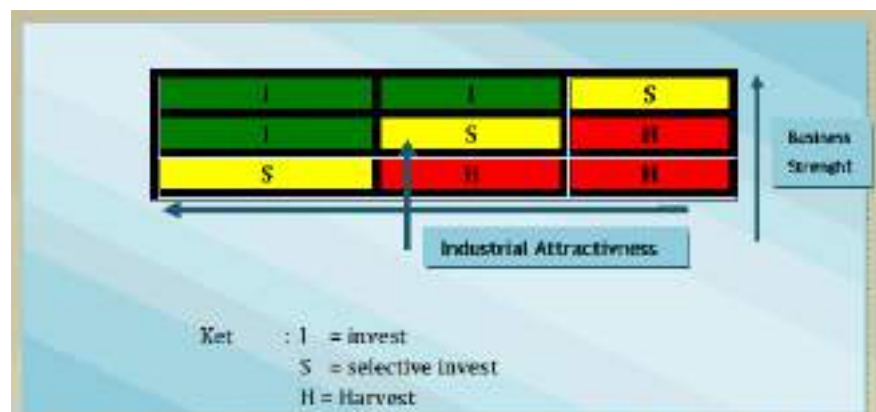
Sebagai sebuah destinasi pariwisata yang sedang berkembang dan belum dikenal oleh pasar wisatawan, peningkatan *awareness* merupakan langkah utama yang harus dikembangkan dalam pemasaran kepariwisataan sehingga dapat meningkatkan motivasi wisatawan terhadap kekayaan sumber daya dan potensi daya Tarik wisata di kabupaten Soppeng sehingga diharapkan akan berimplikasi terhadap jumlah kunjungan wisatawan.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pemasaran pariwisata kabupaten Soppeng sebagai destinasi di Provinsi Sulawesi Selatan adalah pembentukan citra destinasi (*destination image*). Citra Destinasi menggambarkan keseluruhan ekosistem pariwisata meliputi citra kognitif dan citra afektif yang merupakan bagian dari identitas destinasi melalui pembentukan produk wisata yang unik dan membedakannya dari destinasi lainnya dan membentuk persepsi wisatawan.

Kualitas informasi dapat mempengaruhi efektivitas pemasaran kepada target pasar, mengingat fungsinya sebagai alat pemasaran maupun sebagai alat untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan interaktif. Sejalan dengan perkembangan peradaban yang didominasi oleh kontribusi teknologi informasi, maka pemanfaatan media *on-line* (digitalisasi) menjadi sangat dominan dalam pemasaran pariwisata. Ekspektasi pasar terhadap ketersediaan dan kualitas informasi kawasan melalui media *on-line* berdampak pada keharusan pemerintah, pengusaha dan masyarakat kabupaten Soppeng untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran pariwisata.

Analisis kekuatan bisnis pariwisata kabupaten Soppeng melalui dengan daya tarik potensi pariwisata dapat dianalisis melalui matriks Mc Kinsey berikut ini:

Gambar 6.9
Matriks Mc. Kinsey



Sumber : Mc. Kinsey Analysis

Posisi kepariwisataan kabupaten Soppeng saat ini berada pada kolom I (*invest*) yaitu kegiatan pengembangan pariwisata kabupaten Soppeng harus ditata dan dibangun dengan investasi dalam upaya perbaikan-perbaikan di berbagai aspek. Manifestasi dari strategi dasar tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Penciptaan dan pemeliharaan sumber-sumber kompetitif yang terdapat pada aspek nilai beda/daya tarik dan komitmen stakeholders.
- 2) Penciptaan kebijakan dan iklim Investasi di bidang pariwisata yang mampu menarik minat investor.
- 3) Perencanaan pengembangan pariwisata yang berimbang antara manfaat (*benefit*) dan korbanan (*cost*) yang dihasilkan.
- 4) Perluasan akses masyarakat lokal dalam investasi pariwisata

Berdasarkan strategi dasar tersebut, maka untuk menyelaraskan antara strategi pengembangan produk dan pasar dalam pengembangan pariwisata, terdapat beberapa langkah strategik yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Penetrasi Pasar (*Market Penetration*), yang ditujukan untuk mendayagunakan atau mengoptimalkan kapasitas produk dan pasar yang ada. Saat ini, kabupaten Soppeng hanya dikenal sebagai dengan wisata tirta dengan daya tarik utama adalah Lejja, Citta dan Ompo. Sementara potensi yang dimiliki sangat besar dalam potensi wisata sejarah dan budaya serta potensi bukit dengan panorama yang sangat variatif. Maka langkah penetrasi pasar yang dilakukan adalah dengan menggiatkan kegiatan pariwisata pada pasar existing, namun lebih mengetengahkan wisata sejarah dan budaya
- b. Pengembangan Produk (*Product Development*), yang ditujukan untuk mengembangkan produk-produk baru bagi pasar yang ada saat ini. Misalnya, dengan mengembangkan kegiatan wisata *leisure and experience*, berupa pembangunan geowisata, *eco heritage*, maupun *eco beach* atau kegiatan wisata lain termasuk mengangkat potensi wisata tirta dan alam lain yang potensial di kabupaten Soppeng.
- c. Pengembangan Pasar (*Market Development*), yang ditujukan untuk mengembangkan pasar wisatawan baru agar berkunjung ke kabupaten Soppeng dan menikmati produk wisata yang telah berkembang saat ini maupun yang akan dikembangkan. Pasar tersebut dapat berasal dari pasar wisata nusantara maupun pasar wisata mancanegara dengan melakukan promosi pada daerah-daerah yang secara geografis merupakan pintu masuk aksesibilitas wisatawan ke kabupaten Soppeng.
- d. Diversifikasi Produk (*Product Diversification*), yang ditujukan untuk menciptakan produk dan pasar yang baru bagi pariwisata kabupaten Soppeng. Strategi ini utamanya ditujukan bagi pasar Internasional maupun *niche market* (eco, sejarah dan budaya, MICE).

Berdasarkan kajian pada masing-masing aspek pemasaran tersebut, perlu diterapkan beberapa prinsip-prinsip pengembangan

pemasaran kepariwisataan sebagai berikut:

a. Memahami Profil Pasar Sasaran

Pengamatan terhadap pasar dibutuhkan untuk dapat mengembangkan produk-produk pariwisata yang menarik dan mampu mengakomodasi keinginan dan kebutuhan pasar wisatawan. Utamanya untuk menciptakan produk dan pelayanan pariwisata yang dapat menciptakan kepuasan wisatawan. Selain itu, pemahaman terhadap profil pasar sasaran dapat mengarahkan desain produk wisata agar pengalaman wisatawan dalam berwisata menjadi semakin berkesan sehingga sektor pariwisata semakin maju dan unggul. Pemahaman terhadap profil pasar sasaran juga akan semakin meningkatkan harmonisasi produk pariwisata dengan kegiatan pemasaran pariwisata.

b. Peningkatan Kualitas Produk Wisata

Kualitas pariwisata ditentukan oleh keberadaan produk wisata yang bersifat nyata (*tangible*) dan pelayanan (*intangible*) yang secara keseluruhan bertumpu pada kualitas sumberdaya manusia yang mengelola dan yang memberikan pelayanan terhadap wisatawan. Oleh sebab itu, kualitas pariwisata yang unggul dapat dipicu melalui peningkatan dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan penerapan standar usaha pariwisata.

c. Pengembangan Inovasi

Inovasi berupa pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas yang menghasilkan nilai tambah dan daya saing merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Inovasi dimulai dari pengembangan ide dan gagasan kreatif untuk menghasilkan identitas (*branding*) sebagai ciri pembeda kepariwisataan kabupaten Soppeng. Hal tersebut diperoleh dari proses belajar yang terus menerus dari segenap *stakeholders* yang terlibat didalam pengembangan kepariwisataan. Oleh sebab itu, pengembangan pariwisata harus dapat memfasilitasi proses belajar, bertumbuh, dan berkembang bagi seluruh *stakeholders* yang terkait.

d. Penguatan Posisi Strategik

Kabupaten Soppeng memiliki keunggulan bersaing dengan destinasi lain di Indonesia. Oleh sebab itu kabupaten Soppeng harus mampu mengidentifikasi faktor keunggulan sekaligus mengeliminir kekurangan serta memantapkan posisinya untuk dapat bersaing dengan destinasi lain dengan memanfaatkan peluang pasar yang semakin terbuka.

Penjelasan dari prinsip-prinsip tersebut terdapat pada Gambar berikut ini:

Gambar 6.1
Prinsip dan Langkah Stratejik Pengembangan
Daya Saing Pariwisata



BAB - 7

KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SOPPENG

Perubahan paradigma sistem pemerintahan pada era otonomi daerah memberikan peluang dan ruang kepada pemerintah kabupaten Soppeng untuk merencanakan dan mengelola pembangunan kepariwisataan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan kepariwisataan nasional dan provinsi Sulawesi Selatan.

Tuntutan terhadap partisipasi aktif dari seluruh komponen yang dikenal dengan peristilahan *pentahelix* pembangunan pariwisata yang terdiri dari unsur akademisi, pengusaha, masyarakat, pemerintah dan media (ABCGM) dalam proses pembangunan kepariwisataan kabupaten Soppeng, mulai dari dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sehingga pengembangan potensi lokal yang bersumber dari alam, sosial budaya ataupun ekonomi masyarakat dari diangkat sebagai bagian dari potensi pariwisata yang dikembangkan.

Pelibatan komponen kelembagaan kepariwisataan dalam pembangunan pariwisata dalam mewujudkan peningkatan daya saing kepariwisataan kabupaten Soppeng sampai saat ini belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan oleh banyak hal yang secara akumulatif menyebabkan masing-masing pihak masih berjalan secara sendiri-sendiri.

7.1 Unsur Akademisi (*Academician*)

Unsur akademisi merupakan komponen yang memegang peran penting dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi program pengembangan pariwisata kabupaten Soppeng. Pihak perguruan tinggi memiliki tugas pokok dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan, penelitian serta pengabdian pada masyarakat di bidang pariwisata seharusnya secara terpadu dan berkelanjutan melaksanakan sinergi program khususnya dalam membantu unsur lainnya (pemerintah, masyarakat, pengusaha) dalam menyampaikan hasil-hasil kajian ilmiah yang relevan dengan kebutuhan pembangunan kabupaten Soppeng.

Selain hal tersebut, unsur akademisi juga bertanggungjawab dalam membuat program dan jenjang pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha sehingga dapat mendorong ketersediaan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten pada tingkat pelaksana dan manajerial dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dan daya saing industri dan destinasi pariwisata kabupaten Soppeng.

Kajian-kajian ilmiah serta program pendidikan dan pelatihan terhadap masyarakat, pengusaha dan pemerintah yang dilakukan oleh unsur akademisi, selanjutnya dikomunikasi kepada unsur media sehingga

penyebarluasan informasi kepada masyarakat termasuk wisatawan tentang ketersediaan sumberdaya dan daya tarik wisata kabupaten Soppeng dapat dikenal oleh masyarakat luas.

Saat ini di kabupaten Soppeng telah berdiri beberapa perguruan tinggi antara lain Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Lamappoleonro, Akademi Kebidanan (AKBID) Menara Primadani, Akademi Perawat (AKPER) Putra Pertiwi, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Lamappoleonro, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Petta Baringeng, dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Ghazali. Dari keseluruhan perguruan tinggi tersebut, belum ada yang membuka jurusan atau program studi kepariwisataan.

Untuk jenjang pendidikan pada tingkat pendidikan menengah, saat ini di kabupaten Soppeng telah terdapat 13 buah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) namun hanya 1 buah Sekolah Menengah Kejuruan yang menyelenggarakan pendidikan bidang Pariwisata sebagai wadah pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pariwisata di kabupaten Soppeng, yaitu SMK Negeri 1 Watansoppeng. Program studi yang diselenggarakan masih berfokus pada bidang akomodasi perhotelan dan jasa boga.

Selain potensi unsur akademisi yang berada di kabupaten Soppeng, pemerintah daerah kabupaten Soppeng juga menjalin kerjasama kelembagaan dengan berbagai perguruan tinggi untuk mendukung berbagai program pembangunan kepariwisataan kabupaten Soppeng seperti pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, sertifikasi usaha serta sertifikasi kompetensi tenaga kerja pariwisata.

7.2 Unsur Birokrasi (*Government*)

Unsur birokrasi merupakan komponen yang sangat dominan dan menentukan arah pembangunan kepariwisataan. Melalui pengkajian dan penyusunan kebijakan yang efektif, maka arah pelaksanaan pengembangan pariwisata akan terwujud secara efektif dan efisien serta menjadi acuan bagi seluruh komponen kepariwisataan yang ada (*stakeholders*) dalam merencanakan dalam melaksanakan kegiatan menurut tugas dan tanggungjawab para pihak.

Peran birokrasi dalam pembangunan kepariwisataan di kabupaten Soppeng belum berjalan secara optimal dan masih bertumpu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, sementara dalam pembangunan kepariwisataan yang baik harus melibatkan seluruh komponen birokrasi menurut kewenangan yang dimiliki oleh masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kabupaten Soppeng, termasuk hubungan dengan pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dalam pelaksanaan kewenangan pengembangan kepariwisataan.

Beberapa komponen pariwisata yang harus dilakukan melalui koordinasi dan sinergi program antara lain sebagai berikut :

- a. Aksesibilitas pariwisata, dibutuhkan koordinasi dalam hal perluasan kapasitas dan fasilitas pelabuhan, pengembangan frekuensi dan pembukaan jalur pelayaran, peningkatan dan pengembangan kualitas jalan dan jembatan, pengembangan kualitas akses dari

- dan ke destinasi dan atraksi wisata, pengembangan moda transportasi, dan sebagainya.
- b. Atraksi wisata, dibutuhkan koordinasi dalam hal perencanaan dan pengembangan destinasi dan daya tarik wisata, penataan lingkungan pariwisata, pengembangan dan pelestarian nilai dan tinggalan sejarah budaya, dan sebagainya
 - c. Aktivitas wisata, dibutuhkan koordinasi dalam hal penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan investasi, dan sebagainya.
 - d. Akomodasi, koordinasi dibutuhkan dalam hal kebijakan investasi usaha akomodasi, pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia, pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan sertifikasi usaha, penyediaan lahan (*land clearing*) untuk usaha akomodasi, dan sebagainya.
 - e. Amenitas, dibutuhkan koordinasi dan sinkronisasi program dalam penyediaan listrik, air bersih, sarana telekomunikasi, fasilitas perbankan, toilet umum, dermaga, fasilitas kesehatan, dan sebagainya.

Mengingat pentingnya koordinasi dan sinkronisasi program antar lembaga pemerintahan dalam pembangunan pariwisata kabupaten Soppeng, diperlukan sebuah bentuk Badan Koordinasi Pembangunan Kepariwisata sebagai pelengkap dari Badan Promosi dan Pengembangan Pariwisata kabupaten Soppeng yang belum terbentuk. Melalui keberadaan kedua badan tersebut diharapkan akan lebih memudahkan dalam koordinasi dan sinergitas program antar satuan kerja perangkat daerah dengan masyarakat, pengusaha dan komponen kepariwisataan lainnya.

7.3 Unsur Masyarakat (*Community*)

Unsur masyarakat merupakan obyek sekaligus subyek pembangunan kepariwisataan daerah karena pengembangan kepariwisataan disesuaikan dengan ketersediaan potensi yang berasal dari budaya masyarakat, dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat, serta dampaknya harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat sehingga arah pembangunan kepariwisataan kabupaten Soppeng didesain berbasis masyarakat (*community based tourism development*)

Pengembangan wisata alam dan wisata budaya dalam perspektif kemandirian lokal merupakan perwujudan interkoneksi dalam tatanan masyarakat yang dilakukan secara mandiri oleh tatanan itu sendiri guna meningkatkan kualitas dengan tetap memelihara kelestarian alam dan nilai-nilai budaya lokal, serta obyek wisata alam dan wisata budaya yang ada. Selama ini pengembangan pariwisata kabupaten Soppeng ditujukan untuk mengembangkan potensi lokal yang bersumber dari alam, sosial budaya ataupun ekonomi guna memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, saat ini perencanaan pengembangan pariwisata menggunakan *community approach* atau

community based development. Dalam hal ini masyarakat lokal yang akan membangun, memiliki dan mengelola langsung fasilitas wisata serta pelayanannya, sehingga dengan demikian masyarakat diharapkan dapat menerima secara langsung keuntungan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraannya dan pada akhirnya akan mengurangi urbanisasi.

Pengembangan pariwisata yang berorientasi pada masyarakat lokal masih minim karena masyarakat tidak memiliki kemampuan secara finansial dan keahlian yang berkualitas untuk mengelola potensi pariwisata daerah atau terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata yang berbasis alam dan budaya. Sehingga perlunya partisipasi aktif masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik, menyediakan sesuatu yang terbaik sesuai kemampuan, ikut menjaga keamanan, ketentraman, keindahan dan kebersihan lingkungan, memberikan kenangan dan kesan yang baik bagi wisatawan dalam rangka mendukung program sapta pesona, serta menanamkan kesadaran masyarakat dalam rangka pengembangan desa wisata.

Pemerintah kabupaten Soppeng melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah membentuk berbagai kelompok sadar wisata serta komunitas pendukung kepariwisataan lainnya di kabupaten Soppeng sebagai perwujudan penyiapan masyarakat dalam mengelola dan mengambil bagian secara aktif dalam pembangunan kepariwisataan. Dukungan pemerintah daerah tersebut berupa pembentukan wadah organisasi, pelatihan dan pemberdayaan, fasilitasi akses dan modal usaha, serta fasilitasi pemasaran produk dalam menunjang pembangunan kepariwisataan kabupaten Soppeng.

Beberapa hal yang masih harus didorong adalah pembentukan komunitas usaha industri kreatif berbasis potensi daerah seperti kuliner khas kabupaten Soppeng, kerajinan dan cinderamata, pengemasan produk kuliner, pembentukan usaha kuliner, pelestarian nilai budaya melalui pembentukan sanggar seni budaya, serta peran serta masyarakat dalam mengelola dan mempromosikan potensi dan daya tarik destinasi wisata di kabupaten Soppeng.

Selain pembentukan komunitas masyarakat pariwisata tersebut, juga diperlukan untuk membentuk asosiasi profesi pariwisata sesuai jenis profesi yang sudah ada di kabupaten Soppeng seperti *Indonesia Hotel General Manager Association* (IHGMA), *Hotel Frontliner Association* (HAFLA), *Indonesia Housekeeping Association* (IHKA), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), *Indonesia Food & Beverage Association* (IFBEC), *Indonesia Chef Association* (ICA), *My Trip My Adventure* (MTMA), *Generasi Pesona Indonesia* (GENPI) dan lain sebagainya. Keberadaan asosiasi profesi pariwisata tersebut akan sangat membantu mendorong dan mempercepat peningkatan kualitas sumberdaya manusia sesuai dengan bidang profesi masing-masing. Selain itu, asosiasi profesi juga akan membantu meningkatkan kualitas usaha/ industri pariwisata dan mengenalkan potensi pariwisata daerah secara nasional.

7.4 Unsur Pengusaha (*Business*)

Unsur pengusaha merupakan salah satu komponen yang menentukan perkembangan kepariwisataan kabupaten Soppeng. Keberadaan unsur pengusaha menentukan minat kunjungan wisatawan

melalui penyediaan berbagai usaha akomodasi dan aktivitas wisata lainnya yang bisa dinikmati oleh wisatawan pada saat melakukan kunjungan wisata di kabupaten Soppeng.

Pariwisata memiliki mekanisme pengaturan yang kompleks karena mencakup pengaturan pergerakan wisatawan dari negara asalnya, di daerah tujuan wisata hingga kembali ke negara asalnya yang melibatkan berbagai hal seperti; transportasi, penginapan, restoran, pemandu wisata, dan lain-lain. Oleh karena itu, pengusaha industri pariwisata memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata.

Dalam menjalankan perannya, pengusaha pariwisata harus menerapkan konsep dan peraturan serta panduan yang berlaku dalam pengembangan pariwisata agar mampu mempertahankan dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang nantinya bermuara pada pemberian manfaat ekonomi bagi industri pariwisata dan masyarakat lokal. Industri pariwisata yang sangat berperan dalam pengembangan pariwisata adalah: biro perjalanan wisata, hotel dan restoran. Selain itu juga didukung oleh industri pendukung serta asosiasi industry pariwisata lainnya.

Jenis dan jumlah usaha pariwisata yang ada di kabupaten Soppeng sampai saat ini masih dikelola secara konvensional sehingga berdampak pada daya saing destinasi yang masih rendah. Untuk itu perlu memacu minat investasi pengusaha pariwisata dalam mengembangkan usaha akomodasi berupa pembangunan hotel dan resort berbintang, restoran, ruang pertemuan (MICE), rekreasi dan aktivitas wisata, transportasi wisata dan lain sebagainya.

Melalui penyediaan sarana pariwisata yang baik dan berkualitas, akan mendorong minat wisatawan untuk berkunjung dan mempromosikan kabupaten Soppeng sebagai destinasi yang menarik untuk dikunjungi dan menjadi surga yang memanjakan setiap wisatawan yang berkunjung.

Selain ketersediaan usaha pariwisata, keberadaan asosiasi pengusaha sebagai tempat berhimpun dan memecahkan masalah pengembangan pariwisata secara bersama-sama menjadi sebuah keharusan dalam mendukung keberlangsungan usaha/ industri pariwisata. Saat ini asosiasi pengusaha industri pariwisata yang sudah ada di kabupaten Soppeng adalah Perhimpunan Hotel dan restoran Indonesia. Keberadaan asosiasi pengusaha bidang perhotelan tersebut bertanggungjawab dalam mengembangkan dan memelihara standar industry dan pelayanan serta memberikan saran dan usulan kebijakan pengembangan usaha perhotelan di kabupaten Soppeng. Untuk itu optimalisasi peran asosiasi pengusaha pariwisata perlu terus ditingkatkan dan asosiasi pengusaha pariwisata lainnya seperti ASITA, PUTRI, GAHAWISRI perlu dibentuk seiring dengan operasionalisasi usaha pariwisata tersebut di kabupaten Soppeng.

7.5 Unsur Media (*Media*)

Unsur media memegang peran sentral yang sangat menentukan dalam melakukan promosi dan pemasaran pariwisata kabupaten Soppeng. Seiring dengan perkembangan peradaban yang sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi melalui berbagai media, baik media *on-line* maupun *off-line*. Media berkewajiban untuk mengedukasi dan

memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat termasuk wisatawan.

Saat ini, peran media khususnya media *on-line* termasuk media penyiaran lokal dan nasional sudah banyak meliput dan memberitakan potensi dan daya tarik kabupaten Soppeng sebagai salah satu destinasi pariwisata daerah, namun intensitas dan kualitas informasi yang disampaikan masih perlu dioptimalkan.

Mengingat jumlah pengguna media sosial saat ini melonjak secara spektakuler, maka salah satu media yang perlu dioptimalkan dalam menyampaikan dan menyebarkan informasi kepariwisataan kabupaten Soppeng adalah pemanfaatan media sosial. Untuk itu melalui peran serta masyarakat dan komunitas media (*blogger*, dll) dengan sendirinya akan menjadi agen penyebarluasan informasi potensi dan daya tarik pariwisata kabupaten Soppeng.

BAB - 8

PRINSIP DAN KONSEP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SOPPENG

8.1 Tantangan dan Isu Strategis Pembangunan Kepariwisata

Seiring dengan semakin menggeliatnya pertumbuhan sektor pariwisata sebagai motor penggerak perekonomian negara yang dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang semakin membaik, menjadikan setiap daerah dengan potensi alam dan budaya yang sangat beragam mulai dilirik dan dikembangkan sebagai destinasi pariwisata yang menarik bagi wisatawan.

Hal tersebut menjadikan kompetisi antar daerah kabupaten dan kota dalam provinsi Sulawesi Selatan menjadi semakin kompetitif. Tentu saja hal ini akan memberikan dampak negatif jika persaingan tersebut tidak disikapi dengan baik menjadi sebuah pola kemitraan dan integrasi bagi setiap daerah dalam bentuk pengembangan pemaketan bersama dalam pola perjalanan wisata yang menarik.

Beberapa isu strategis yang menjadi fokus perhatian pemerintah daerah kabupaten Soppeng dalam pengembangan pariwisata antara lain sebagai berikut :

- a. Pariwisata sebagai sektor prioritas pembangunan daerah.
Berdasarkan analisis potensi alam, sejarah, budaya, minat khusus, dan buatan manusia di kabupaten Soppeng, maka pemerintah daerah menetapkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan penggerak perekonomian daerah. Hal ini dilihat dari pertumbuhan yang cukup signifikan dari kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB kabupaten Soppeng.
- b. Degradasi lingkungan dan vandalisme.
Sebagai kawasan wilayah pegunungan dan pulau dimana kondisi geografis wilayah kabupaten Soppeng dengan kabupaten lain di sekitarnya dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan selama ini telah banyak mengalami degradasi lingkungan akibat pola hidup masyarakat yang tidak bertanggungjawab dan ramah terhadap lingkungan dalam melakukan eksploitasi potensi alam sebagai sumber mata pencaharian utama keluarga dan masyarakat.
Pola pembukaan lahan pada wilayah-wilayah konservasi telah menurunkan dan merusak kualitas lingkungan khususnya ekosistem hutan sehingga menurunkan kualitas destinasi kabupaten Soppeng dengan kabupaten lain di sekitarnya dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan.
Pengrusakan ekosistem hutan dengan pembukaan areal hutan sebagai lahan pertanian dan perkebunan dengan cara membakar,

menebang pohon dan melakukan alih fungsi lahan secara tidak bertanggungjawab telah menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, udara, air, dan memperluas daerah rawan bencana di kabupaten Soppeng.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perluasan wilayah pemukiman, menjadikan kawasan penyangga dan pelindung seperti kawasan hutan ikut terdegradasi dan berubah fungsi.

Faktor lain yang turut berkontribusi terhadap degradasi lingkungan adalah masalah sampah khususnya sampah plastik dan sampah lain yang timbul akibat pertumbuhan penduduk dan pemukiman. Untuk kabupaten Soppeng, selain sampah penduduk lokal juga pada waktu-waktu tertentu terdapat sampah kiriman di sungai dan danau dari kawasan lain dari luar wilayah kabupaten Soppeng sehingga jika pengembangan pariwisata tidak dilakukan secara terencana, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih parah dan menjadikan kabupaten Soppeng sebagai destinasi yang tidak menarik.

c. Koordinasi lintas sektoral yang masih rendah

Pembangunan sektor pariwisata dikenal sebagai pembangunan multi-sektor yang melibatkan banyak pihak, baik pemerintah pusat maupun provinsi Sulawesi Selatan, serta lintas sektor yang tidak hanya melibatkan instansi pemerintah namun juga sektor swasta, bahkan masyarakat dan wisatawan secara umum.

Sampai saat ini, koordinasi antar SKPD dalam pemerintahan daerah kabupaten Soppeng, kabupaten Soppeng dengan kabupaten lain di sekitarnya di dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan, kabupaten Soppeng dengan kabupaten lain di sekitarnya di luar wilayah provinsi Sulawesi Selatan, kabupaten Soppeng dengan pemerintah pusat, serta para pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata kabupaten Soppeng dengan kabupaten lain di sekitarnya dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan belum bersinergi dengan baik.

d. Regulasi yang kontraproduktif.

Regulasi merupakan salah satu masalah klasik yang dihadapi khususnya dalam hal relevansi dan tumpang tindihnya kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata.

Selain tumpang tindih kebijakan, juga terdapat banyak kebijakan yang tidak relevan dalam mendorong pembangunan pariwisata daerah seperti kebijakan investasi, pengelolaan kawasan konservasi, pengelolaan wilayah laut, pantai dan pesisir, dan sebagainya.

Masih banyak ditemukan regulasi yang tidak sinkron dengan regulasi lainnya atau regulasi yang secara operasional menimbulkan resistensi pada masyarakat ataupun regulasi yang tidak dapat diimplementasikan.

e. Infrastruktur pendukung pariwisata yang masih sangat terbatas

Sebagai wilayah dengan kondisi geografis yang cukup unik daerah dataran tinggi pada pegunungan menjadikan kabupaten Soppeng sebagai salah satu wilayah di provinsi Sulawesi Selatan yang masih cukup tertinggal dalam pembangunan infrastruktur jika dibandingkan dengan wilayah lain yang telah menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan ekonomi daerah dan masyarakat di Sulawesi Selatan.

Ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan, dan transportasi darat serta hampir seluruh jenis infrastruktur utama dalam pembangunan kepariwisataan masih sangat terbatas dari sisi jumlah dan kualitas.

Selain itu, infrastruktur dasar yang menghubungkan antara daya tarik wisata baik antar wilayah juga belum tersedia dengan baik. Hal ini berdampak pada kenyamanan dan keamanan wisatawan saat berkunjung ke kabupaten Soppeng.

- f. Kualitas sumberdaya manusia pariwisata yang masih rendah.
Kualitas sumberdaya manusia pariwisata baik pada sektor pemerintahan maupun industri masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh pola rekrutmen dan pengembangan karir pada sektor pemerintahan masih belum berjalan dengan optimal. Pada sektor swasta khususnya pada usaha/ industri pariwisata, rendahnya kualitas sumberdaya manusia lebih banyak disebabkan oleh kualitas industri pariwisata yang masih berskala kecil sehingga belum menarik minat tenaga kerja profesional untuk bekerja pada industri pariwisata di kabupaten Soppeng. Keberadaan SMK pariwisata juga masih menyelenggarakan program dan jenjang pendidikan yang sangat terbatas dengan fasilitas dan tenaga pendidik yang terbatas pula sehingga kontribusinya dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia pariwisata belum optimal. Di sisi lain, putra-putri terbaik kabupaten Soppeng yang menimba ilmu pada pendidikan tinggi dan vokasi di luar kabupaten Soppeng, selanjutnya enggan kembali untuk bekerja di kabupaten Soppeng karena pertimbangan kualitas industri dan usaha yang masih kecil serta pendapatan yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan pendapatan mereka pada industri yang lebih besar dan daerah yang lebih maju dalam pembangunan pariwisatanya.
- g. Investasi pariwisata yang masih terbatas
Investasi pariwisata yang ada di kabupaten Soppeng saat ini hampir sepenuhnya merupakan investasi dari pengusaha lokal yang dalam penyediaan usaha/ industri pariwisata dilakukan melalui pengalihan dan atau penambahan fungsi dari rumah mereka menjadi usaha hotel atau restoran serta usaha pariwisata lainnya. Hal ini mengakibatkan rendah kualitas industri/ usaha pariwisata yang ada. Bentuk dan desain bangunan yang tidak sesuai, ketersediaan fasilitas yang sangat terbatas, serta desain interior yang kurang menarik. Untuk itu diperlukan sebuah kebijakan investasi yang dapat menarik minat investor dalam menanamkan modal dan membangun usaha pariwisata di kabupaten Soppeng sehingga akan meningkatkan daya saing destinasi sekaligus mendorong minat kunjungan wisatawan ke kabupaten Soppeng.
- h. Pasar dan pemasaran pariwisata konvensional
Pengembangan pasar dan pola pemasaran pariwisata kabupaten Soppeng dilaksanakan masih cenderung konvensional melalui berbagai media namun pada tempat dan waktu yang kurang sesuai. Mengacu pada prinsip promosi *Destination-Origin-Timeline* (DOT), sejatinya kabupaten Soppeng mampu mengidentifikasi segmentasi pasar yang sesuai dengan sediaan produk yang dimiliki saat ini.

Pintu masuk utama wisatawan ke kabupaten Soppeng adalah kota Makassar, maka sebaiknya kabupaten Soppeng melakukan *branding* dan promosi di bandara dan tempat-tempat strategis di kota Makassar atau kota-kota lain yang menjadi pintu masuk wisatawan ke kabupaten Soppeng.

Digitalisasi pemasaran pariwisata juga belum dilakukan secara optimal serta pelibatan masyarakat untuk ikut mempromosikan potensi kabupaten Soppeng melalui media sosial belum dilaksanakan secara optimal. Hal lain yang perlu menjadi prioritas adalah pembuatan *branding* dan *tag-line* promosi dan pemasaran pariwisata kabupaten Soppeng sehingga lebih mudah diingat, dikenal dan menarik untuk dikunjungi. Pembuatan *branding* dan *tag-line* pariwisata harus dibuat bersesuaian dengan visi dan misi pembangunan serta sistem nilai masyarakat Soppeng.

8.2 Prinsip Pembangunan Kepariwisata

Prinsip pembangunan kepariwisataan kabupaten Soppeng disesuaikan dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Soppeng, yaitu **“Pemerintahan Yang Melayani Dan Lebih Baik”**.

Berdasarkan Visi pemerintah kabupaten Soppeng tersebut, maka misi pemerintah kabupaten Soppeng adalah :

- a. 7 Tekad Pemerintahan Yang Melayani
 - 1) Memantapkan Arah Kebijakan Pertanian Yang Melayani Dan Pro Petani;
 - 2) Mewujudkan Pendidikan Unggul (Lebih Baik) Dan Murah Serta Berkeadilan Bagi Semua Warga;
 - 3) Menjadikan Kabupaten Soppeng Yang Lebih Baik Dalam Pelayanan Publik;
 - 4) Menata Kepariwisata Dan Transportasi Publik Yang Baik Dan Nyaman;
 - 5) Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Dari Korupsi;
 - 6) Menjamin Ketersediaan Sistem Pelayanan Kesehatan Unggul (Lebih Baik) Dan Murah;
 - 7) Mendorong Peningkatan Kehidupan Beragama Serta Partisipasi Pemuda Dan Perempuan Dalam Pembangunan.
- b. 2 Tekad Menjadikan Soppeng Lebih Baik
 - 1) Menjadikan Kabupaten Soppeng Sebagai Pilar Utama Pembangunan Sulawesi Selatan;
 - 2) Menjadikan Kabupaten Soppeng Sebagai Daerah Yang Nyaman Dan Terdepan Dalam Investasi.

8.3 Konsep Pembangunan Kepariwisata

Konsep pembangunan kepariwisataan kabupaten Soppeng disusun berdasarkan integrasi dan arahan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng.

8.3.1 Tujuan Penataan Ruang

Tujuan penataan ruang Kabupaten Soppeng merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Rumusan tujuan penataan ruang ini akan berfungsi sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, memberikan arahan bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten, dan sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan :

1. Visi dan misi wilayah kabupaten;
2. Karakteristik wilayah kabupaten;
3. Isu strategis;
4. Kondisi obyektif yang diinginkan.

Kriteria yang digunakan dalam perumusan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah:

1. Tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang provinsi dan nasional;
2. Jelas dan dapat tercapai sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan;
3. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada uraian di atas, maka tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Soppeng adalah untuk mewujudkan Kabupaten Soppeng yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan berbasis agropolitan dan pariwisata dengan memperhatikan integrasi dan dinamisasi pertahanan dan keamanan negara menuju tercapainya masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera.

Peran perencanaan penataan ruang kabupaten Soppeng adalah sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Soppeng. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng berfungsi sebagai pedoman untuk :

- a. penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Soppeng;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah serta keserasian antarsektor di Kabupaten Soppeng;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kabupaten Soppeng; dan
- e. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Soppeng dengan kawasan sekitarnya.

8.3.2 Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Soppeng merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan wilayah ruang kabupaten. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Soppeng, terdiri atas :

- a. Pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan;
- b. Peningkatan akses pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara merata dan berhirarki;
- c. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur serta jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh daerah;
- d. pemeliharaan, perwujudan dan pengawasan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. penetapan kawasan perlindungan daerah bawahannya, setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, dan kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya;
- f. perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
- g. pengembangan potensi kawasan pariwisata dan obyek wisata dengan berorientasi kearifan lokal;
- h. pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kepentingan ekonomi yang berdaya saing skala kabupaten, provinsi dan nasional;
- i. pengembangan kawasan strategis sosial dan budaya untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah dan kegiatan kepariwisataan;
- j. pengembangan dan pelestarian kawasan strategis kepentingan fungsi daya dukung dan lingkungan;
- k. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
- l. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

8.3.3 Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten Soppeng merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Strategi penataan ruang Kabupaten Soppeng, terdiri atas :

1. Strategi pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan, terdiri atas :
 - a. mengembangkan kawasan perdesaan dan perkotaan dengan mengacu pada karakteristik secara fisik-morfologi dan kegiatan ekonominya;
 - b. mengembangkan kawasan sesuai dengan potensi wilayah yang dimiliki untuk perdesaan dengan berbasis pada sektor

- pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan sedangkan untuk perkotaan diarahkan berdasarkan hirarki kekotaan yakni pusat pelayanan, aksesibilitas, fasilitas dan pemusatan kegiatan ekonomi wilayah; dan
- c. mendorong kawasan perkotaan dan perdesaan serta pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya;
2. Strategi untuk peningkatan akses pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, meliputi:
 - a. meningkatkan interkoneksi dan akses pelayanan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan wilayah dengan wilayah sekitarnya;
 - b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan eksisting;
 - c. membangun dan mengembangkan kawasan agropolitan sebagai andalan pengembangan kawasan perdesaan; serta
 - d. membangun, mengembangkan dan mengintegrasikan jalur kawasan tujuan pariwisata dan daya tarik wisata secara optimal dan sinergi dengan perkembangan wilayah.
 3. Strategi untuk peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur serta jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi dan sumber daya air, meliputi:
 - a. meningkatnya kualitas dan kapasitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat;
 - b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan yang masih terisolir;
 - c. meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuhkembangkan pemanfaatan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi area mikro, dibanding pemanfaatan sumber daya yang tak terbarukan, serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - d. meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
 - e. mengembangkan kapasitas sumber energi listrik dan distribusi pelayanan hingga mencapai pusat-pusat lingkungan dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal;
 - f. mengembangkan sumber daya air untuk pemanfaatan, pengendalian dan pelestarian sumber daya air melalui pembuatan sumur-sumur resapan dan perlindungan kawasan mata air, sungai dan danau;
 - g. mengembangkan kapasitas pelayanan air minum hingga mencapai pusat-pusat pelayanan lingkungan terutama pada kawasan ketinggian atau daerah rawan air bersih;
 - h. Mengembangkan sistem jaringan drainase perkotaan dan perdesaan untuk mengendalikan genangan air dan banjir;

- i. mengembangkan sistem pengelolaan limbah di setiap kawasan dan mengamankan kawasan permukiman serta kawasan pesisir danau dan sungai dari pencemaran; dan
 - j. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana pada wilayah yang rawan bencana.
4. Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, terdiri atas:
 - a. membatasi kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu pelestarian lingkungan hidup;
 - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun sebagai akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; dan
 - c. mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung untuk menjaga fungsi lindung dan menjaga keberlanjutan pembangunan wilayah jangka panjang.
 5. Strategi penetapan kawasan perlindungan daerah bawahannya, setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya, terdiri atas:
 - a. menentukan batas-batas kawasan yang harus ditetapkan sebagai kawasan perlindungan daerah bawahannya, setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya;
 - b. mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya dengan peraturan zonasi;
 - c. menyusun mekanisme dan peraturan pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat, terutama pemanfaatan sempadan sungai; dan
 - d. menyusun ketentuan insentif dan disinsentif, ketentuan perizinan serta sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya.
 6. Strategi perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, terdiri atas:
 - a. mengembangkan potensi unggulan pada pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pemerataan pembangunan;
 - b. mengembangkan kawasan budidaya untuk mengakomodasikan kegiatan peruntukan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, energi, pariwisata serta peruntukan lainnya;
 - c. pengembangan pusat permukiman sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pengembangan kawasan;
 - d. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian meliputi peruntukan budidaya tanaman pangan, budidaya hortikultura

- diarahkan untuk menjaga ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan;
- e. mendorong pengembangan kawasan budidaya melalui penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang; dan
 - f. mengendalikan kegiatan budidaya sesuai dengan peruntukan lahan, kemampuan lahan dan konflik pemanfaatan ruang.
7. Strategi pengembangan kawasan pariwisata dan obyek wisata yang berorientasi kearifan lokal, terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata meliputi kawasan pariwisata, kawasan daya tarik wisata khusus dan kawasan daya tarik wisata;
 - b. mengembangkan obyek wisata yang memiliki potensi tinggi sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) terkemuka;
 - c. mengembangkan kepariwisataan berbasis masyarakat yang diintegrasikan dengan pengembangan pertanian pada kawasan daya tarik wisata khusus dan daya tarik wisata;
 - d. mempromosikan potensi wisata pada tingkat regional, nasional dan internasional; dan
 - e. mengembangkan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan kepariwisataan.
8. Strategi pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kepentingan ekonomi yang berdaya saing skala kabupaten, provinsi dan nasional, terdiri atas:
- a. menetapkan suatu ruang kegiatan sektor unggulan tertentu sebagai kawasan strategis yang memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - b. meningkatkan fungsi dan radius pelayanan pada suatu kawasan jasa dan perdagangan agar memiliki daya saing nasional dan internasional;
 - c. meningkatkan kualitas kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman yang memadai;
 - d. mengembangkan kawasan peruntukan kegiatan industri diarahkan pada sentra-sentra industri kreatif dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; dan
 - e. mengarahkan peruntukan permukiman perkotaan dengan konsep *compact city* dan permukiman perdesaan diarahkan mengikuti pola mengelompok, untuk menghindari perkembangan secara sporadis dan linier;
 - f. memanfaatkan sumber daya pesisir danau dan sungai melalui pemanfaatan jasa-jasa lingkungan, potensi perikanan dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem danau, sungai dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - g. mengembangkan kegiatan perekonomian perdesaan berbasis pertanian, industri kecil, dan pariwisata yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang.
9. Strategi pengembangan kawasan strategis sosial dan budaya untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah dan kegiatan kepariwisataan, terdiri atas:

- a. melestarikan dan merevitalisasi kawasan atau obyek yang memiliki nilai sejarah dan menjadikan sebagai salah satu obyek wisata; dan
 - b. mendorong pengembangan budaya lokal sebagai salah satu potensi wilayah.
10. Strategi pengembangan dan pelestarian kawasan strategis kepentingan fungsi daya dukung dan lingkungan, terdiri atas:
- a. melestarikan dan merehabilitasi hutan lindung pada kawasan lindung;
 - b. melestarikan dan melindungi sumber-sumber air bersih berupa mata air dan danau serta wilayah tangkapannya; dan
 - c. mensosialisasikan pelestarian kawasan lindung serta pengendalian pembangunan pada kawasan rawan bencana berbasis mitigasi.
11. Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, terdiri atas:
- a. mengembangkan sumber daya alam yang tersedia dengan penggunaan teknologi tinggi; dan
 - b. pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tinggi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
12. Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara terdiri atas:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan kemanan;
 - c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara; dan
 - e. menyusun perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemanfaatan ruang demi pertahanan keamanan

8.4 Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Kepariwisata

8.4.1 Visi Pembangunan Kepariwisata

Pengembangan pariwisata Kabupaten Soppeng diharapkan memberi kontribusi dalam pencapaian visi pembangunan kabupaten Soppeng secara umum. Oleh karena itu, rumusan Visi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Soppeng adalah **“Terwujudnya Kabupaten Soppeng Sebagai Destinasi Pariwisata Alam Berbasis Tirta, Sejarah dan Budaya Unggulan Provinsi Sulawesi Selatan Menuju Masyarakat Soppeng Yang Sejahtera”**.

Dari tatanan tersebut, menunjukkan bahwa dalam membangun kepariwisataan kabupaten Soppeng terdapat 4 prinsip utama yang harus diwujudkan, yaitu :

- a. Mengembangkan pariwisata yang unggul;
Dalam mengembangkan dan membangun kepariwisataan kabupaten Soppeng, dimana gabungan potensi alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang terdiri dari wilayah sungai dan danau, wilayah pegunungan, hutan, air terjun, gua, sawah, dan kebun, serta potensi sejarah dan budaya pada akhirnya memposisikan kabupaten Soppeng sebagai destinasi yang unggul dan berdaya saing pada potensi wisata alam berbasis tirta, sejarah, budaya dan minat khusus berbasis ekologi.
Berdasarkan potensi alam tersebut, masyarakat kabupaten Soppeng menempatkan sumber ekonomi utama dari perkebunan dan pertanian sehingga pola dan cara hidup masyarakat ini yang harus dioptimalkan dengan mengintegrasikannya sebagai daya tarik wisata.
Beberapa konteks kehidupan masyarakat maritim yang menarik untuk menjadi daya tarik wisata adalah pengembangan desa wisata, area bumi perkemahan (*camping ground*), kuliner tradisional, keterampilan kerajinan, kearifan lokal dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan, pengembangan destinasi wisata sungai dan danau.
- b. Berorientasi pada pelestarian alam, lingkungan, dan kebudayaan.
Pengembangan pariwisata kabupaten Soppeng yang sarat dengan kekayaan sumberdaya alam, sejarah dan budaya sehingga peran pariwisata sebagai media pelestarian alam, lingkungan serta sejarah dan budaya harus diwujudkan.
Keuntungan ekonomis yang diperoleh dari penerimaan sektor pariwisata yang tidak berorientasi pada pelestarian alam, lingkungan, sejarah dan akar budaya masyarakat Soppeng, tentu saja tidak sebanding dengan kerusakan alam dan karakter budaya masyarakat Soppeng. Untuk itu dibutuhkan peran serta dan kepedulian dari seluruh komponen masyarakat untuk memelihara dan menjaga kelestariannya.
Kabupaten Soppeng juga sarat dengan tinggalan sejarah dan nilai budaya luhur masyarakat sehingga pengembangan pariwisata harus menjamin tumbuh dan lestariannya budaya masyarakat dalam pengemasan paket dan atraksi wisata.
Berbagai jenis artefak dan tinggalan sejarah serta kebudayaan masyarakat masa lampau yang masih terpelihara dalam hidup dan kehidupan masyarakat kabupaten Soppeng saat ini harus memperoleh ruang untuk dikembangkan dan dilestarikan sekaligus menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Soppeng
- c. Berorientasi pada perwujudan kesejahteraan masyarakat;
Pengembangan pariwisata kabupaten Soppeng yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui pola keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi dengan mengedepankan sebesar-besarnya untuk kepentingan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
Pariwisata yang dibangun harus ramah lingkungan dan

membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat kabupaten Soppeng untuk terlibat dalam pengelolaan, pengembangan dan perlindungannya melalui pembentukan kelompok sadar wisata.

Eksplorasi lingkungan alam, sosial dan budaya yang berlebihan serta berpotensi menimbulkan kerusakan harus dicegah dan dihindari. Untuk itu, 2 (dua) prinsip utama dalam pengembangan pariwisata yaitu pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism development*) dan pariwisata berkelanjutan (*sustainability tourism development*) menjadi mutlak untuk diintegrasikan dan menjadi dasar pengembangan pariwisata kabupaten Soppeng.

- d. Berlandaskan pada nilai religius agama dan kepercayaan; Masyarakat kabupaten Soppeng dikenal sebagai masyarakat yang religius dan melandaskan hidup dan kehidupannya pada nilai-nilai agamis yang dianut. Mayoritas penduduk kabupaten Soppeng adalah penganut agama Islam sehingga pembangunan pariwisata harus direncanakan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai agama dan kepercayaan masyarakat.

Pembangunan pariwisata tidak boleh bertentangan apa lagi berpotensi merusak sendi-sendi agama dan kepercayaan masyarakat. Interaksi antara masyarakat lokal dengan wisatawan harus menjamin terpeliharanya nilai moralitas masyarakat sehingga asosiasi dan asimilasi budaya dari luar harus mampu memperkuat aspek agama dan kepercayaan masyarakat.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sehubungan sistem nilai masyarakat kabupaten Soppeng antara lain adalah :

- 1) Pengwilayahan kawasan sungai, danau, hutan, dan kawasan pegunungan beserta sumber mata air alam sesuai peruntukan wisatawan, karena karakteristik dan gaya hidup wisatawan asing dengan masyarakat lokal sangat berbeda.
- 2) Pengembangan produk kuliner dan minuman yang disediakan untuk wisatawan harus diyakini bersesuaian dengan kehidupan masyarakat religius sehingga harus halal dan bebas alkohol.
- 3) Penataan desa wisata atau *homestay* yang dapat menjamin perlindungan masyarakat (khususnya anak-anak dan perempuan) dari dampak negatif pengembangan pariwisata yang tidak bertanggungjawab.

8.4.2 Misi Pembangunan Kepariwisata

Untuk mewujudkan visi pengembangan pariwisata kabupaten Soppeng tersebut di atas, maka rumusan misi pengembangan pariwisata disusun bersesuaian dengan komponen utama dalam pembangunan pariwisata, yaitu :

- a. Mengembangkan Produk Pariwisata dan Kebudayaan;
- b. Membangun Infrastruktur Pariwisata dan Kebudayaan;
- c. Meningkatkan Pemasaran Pariwisata;

- d. Melestarikan nilai, Kekayaan dan Keragaman Budaya Dalam Rangka Memperkuat Karakter dan Jatidiri Masyarakat Soppeng; dan
- e. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bidang Kebudayaan dan Kepariwisata.

8.4.3 Tujuan Pembangunan Kepariwisata

Berdasarkan misi pembangunan kepariwisataan kabupaten Soppeng, maka berikut ini adalah tujuan pembangunan pariwisata kabupaten Soppeng yaitu :

- a. Mengembangkan destinasi di Kabupaten Soppeng yang berdaya saing;
- b. Mengembangkan Seni dan Budaya Tradisional Kabupaten Soppeng sebagai daya tarik Destinasi Pariwisata Alam dan Budaya berbasis ekologi;
- c. Membangun Obyek Wisata Sejarah/ Arkeologi dan Wisata Agro sebagai daya tarik Destinasi Pariwisata Alam, Budaya, dan Minat Khusus berbasis ekologi;
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata, antara lain dengan menyediakan lapangan pekerjaan, dan menyediakan kesempatan investasi bagi masyarakat;
- e. Meningkatkan keterlibatan komunitas lokal dalam penyediaan prasarana dan sarana pariwisata dan kebudayaan;
- f. Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas koordinasi antara instansi dan sektor-sektor pariwisata dan kebudayaan;
- g. Meningkatkan arus perjalanan wisata ke Kabupaten Soppeng;
- h. Meningkatkan penyediaan data dan informasi bagi wisatawan, serta pemasaran dan promosi pariwisata kabupaten Soppeng ke segmentasi pasar wisatawan yang tepat dan terarah;
- i. Mewujudkan iklim investasi yang harmonis dan menguntungkan bagi masyarakat Kabupaten Soppeng;
- j. Mempertimbangkan daya dukung lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya untuk pariwisata dalam rangka menciptakan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan; dan
- k. Membangun jaringan Promosi dan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Soppeng.

8.4.4 Sasaran Pembangunan Kepariwisata

Berdasarkan tujuan pembangunan kepariwisataan kabupaten Soppeng, maka berikut ini adalah sasaran pembangunan kepariwisataan kabupaten Soppeng yaitu :

- a. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan manca negara melalui peningkatan kualitas dan kuantitas daya tarik dan atraksi wisata dan kebudayaan, pengembangan aksesibilitas pariwisata, pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata, serta peningkatan citra pariwisata;

- b. Meningkatkan lama tinggal wisatawan melalui pelaksanaan berbagai jenis even dan festival, pengembangan usaha akomodasi, dan pengembangan amenitas pariwisata;
- c. Meningkatkan pendapatan dari belanja wisatawan melalui pemberdayaan potensi kreatif masyarakat serta penganeekaragaman produk serta atraksi wisata dan budaya;
- d. Meningkatkan perlindungan, pengelolaan dan pengembangan warisan budaya melalui pemberdayaan potensi budaya masyarakat, pengembangan sanggar seni dan budaya, pelestarian nilai-nilai sejarah dan budaya, serta pelestarian benda cagar budaya;
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan serta kerjasama dan alih teknologi bersama perguruan tinggi, usaha pariwisata, asosiasi profesi, dan pemerintah.
- f. Meningkatkan perlindungan, pengelolaan dan pengembangan potensi alam sebagai daya tarik pariwisata melalui perencanaan, pengawasan, dan konsistensi penegakan hukum yang adil dan bermartabat.

BAB - 9

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SOPPENG

9.1 Kebijakan Pembangunan Kepariwisata

Kebijakan pembangunan kepariwisataan kabupaten Soppeng tidak lepas dari kebijakan penataan ruang sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Soppeng, dengan arah Kebijakan penataan ruang, terdiri atas :

- a. Pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan;
- b. Peningkatan akses pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara merata dan berhirarki;
- c. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur serta jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh daerah;
- d. pemeliharaan, perwujudan dan pengawasan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. penetapan kawasan perlindungan daerah bawahannya, setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, dan kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya;
- f. perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
- g. pengembangan potensi kawasan pariwisata dan obyek wisata dengan berorientasi kearifan lokal;
- h. pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kepentingan ekonomi yang berdaya saing skala kabupaten, provinsi dan nasional;
- i. pengembangan kawasan strategis sosial dan budaya untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah dan kegiatan kepariwisataan;
- j. pengembangan dan pelestarian kawasan strategis kepentingan fungsi daya dukung dan lingkungan;
- k. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
- l. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

9.2 Strategi Pembangunan Kepariwisata

Strategi pembangunan kepariwisataan sebagaimana direduksi dari kebijakan pengembangan pariwisata, dikemukakan sebagai berikut :

1. Strategi pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan, terdiri atas :
 - a. mengembangkan kawasan perdesaan dan perkotaan dengan mengacu pada karakteristik secara fisik-morfologi dan kegiatan ekonominya;
 - b. mengembangkan kawasan sesuai dengan potensi wilayah yang dimiliki untuk perdesaan dengan berbasis pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan sedangkan untuk perkotaan diarahkan berdasarkan hirarki kekotaan yakni pusat pelayanan, aksesibilitas, fasilitas dan pemusatan kegiatan ekonomi wilayah; dan
 - c. mendorong kawasan perkotaan dan perdesaan serta pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya;
2. Strategi untuk peningkatan akses pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, meliputi:
 - a. meningkatkan interkoneksi dan akses pelayanan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan wilayah dengan wilayah sekitarnya;
 - b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan eksisting;
 - c. membangun dan mengembangkan kawasan agropolitan sebagai andalan pengembangan kawasan perdesaan; serta
 - d. membangun, mengembangkan dan mengintegrasikan jalur kawasan tujuan pariwisata dan daya tarik wisata secara optimal dan sinergi dengan perkembangan wilayah.
3. Strategi untuk peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur serta jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi dan sumber daya air, meliputi:
 - a. meningkatnya kualitas dan kapasitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat;
 - b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan yang masih terisolir;
 - c. meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuhkembangkan pemanfaatan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi area mikro, dibanding pemanfaatan sumber daya yang tak terbarukan, serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - d. meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
 - e. mengembangkan kapasitas sumber energi listrik dan distribusi pelayanan hingga mencapai pusat-pusat

- lingkungan dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal;
- f. mengembangkan sumber daya air untuk pemanfaatan, pengendalian dan pelestarian sumber daya air melalui pembuatan sumur-sumur resapan dan perlindungan kawasan mata air, sungai dan danau;
 - g. mengembangkan kapasitas pelayanan air minum hingga mencapai pusat-pusat pelayanan lingkungan terutama pada kawasan ketinggian atau daerah rawan air bersih;
 - h. Mengembangkan sistem jaringan drainase perkotaan dan perdesaan untuk mengendalikan genangan air dan banjir;
 - i. mengembangkan sistem pengelolaan limbah di setiap kawasan dan mengamankan kawasan permukiman serta kawasan pesisir danau dan sungai dari pencemaran; dan
 - j. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana pada wilayah yang rawan bencana.
4. Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, terdiri atas:
 - a. membatasi kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu pelestarian lingkungan hidup;
 - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun sebagai akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; dan
 - c. mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung untuk menjaga fungsi lindung dan menjaga keberlanjutan pembangunan wilayah jangka panjang.
 5. Strategi penetapan kawasan perlindungan daerah bawahannya, setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya, terdiri atas:
 - a. menentukan batas-batas kawasan yang harus ditetapkan sebagai kawasan perlindungan daerah bawahannya, setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya;
 - b. mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya dengan peraturan zonasi;
 - c. menyusun mekanisme dan peraturan pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat, terutama pemanfaatan sempadan sungai; dan
 - d. menyusun ketentuan insentif dan disinsentif, ketentuan perizinan serta sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya.
 6. Strategi perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, terdiri atas:

- a. mengembangkan potensi unggulan pada pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pemerataan pembangunan;
 - b. mengembangkan kawasan budidaya untuk mengakomodasikan kegiatan peruntukan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, energi, pariwisata serta peruntukan lainnya;
 - c. pengembangan pusat permukiman sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pengembangan kawasan;
 - d. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian meliputi peruntukan budidaya tanaman pangan, budidaya hortikultura diarahkan untuk menjaga ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan;
 - e. mendorong pengembangan kawasan budidaya melalui penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang; dan
 - f. mengendalikan kegiatan budidaya sesuai dengan peruntukan lahan, kemampuan lahan dan konflik pemanfaatan ruang.
7. Strategi pengembangan kawasan pariwisata dan obyek wisata yang berorientasi kearifan lokal, terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata meliputi kawasan pariwisata, kawasan daya tarik wisata khusus dan kawasan daya tarik wisata;
 - b. mengembangkan obyek wisata yang memiliki potensi tinggi sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) terkemuka;
 - c. mengembangkan kepariwisataan berbasis masyarakat yang diintegrasikan dengan pengembangan pertanian pada kawasan daya tarik wisata khusus dan daya tarik wisata;
 - d. mempromosikan potensi wisata pada tingkat regional, nasional dan internasional; dan
 - e. mengembangkan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan kepariwisataan.
8. Strategi pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kepentingan ekonomi yang berdaya saing skala kabupaten, provinsi dan nasional, terdiri atas:
- a. menetapkan suatu ruang kegiatan sektor unggulan tertentu sebagai kawasan strategis yang memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - b. meningkatkan fungsi dan radius pelayanan pada suatu kawasan jasa dan perdagangan agar memiliki daya saing nasional dan internasional;
 - c. meningkatkan kualitas kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman yang memadai;
 - d. mengembangkan kawasan peruntukan kegiatan industri diarahkan pada sentra-sentra industri kreatif dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; dan
 - e. mengarahkan peruntukan permukiman perkotaan dengan konsep *compact city* dan permukiman perdesaan diarahkan

- mengikuti pola mengelompok, untuk menghindari perkembangan secara sporadis dan linier;
- f. memanfaatkan sumber daya pesisir danau dan sungai melalui pemanfaatan jasa-jasa lingkungan, potensi perikanan dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem danau, sungai dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - g. mengembangkan kegiatan perekonomian perdesaan berbasis pertanian, industri kecil, dan pariwisata yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang.
9. Strategi pengembangan kawasan strategis sosial dan budaya untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah dan kegiatan kepariwisataan, terdiri atas:
 - a. melestarikan dan merevitalisasi kawasan atau obyek yang memiliki nilai sejarah dan menjadikan sebagai salah satu obyek wisata; dan
 - b. mendorong pengembangan budaya lokal sebagai salah satu potensi wilayah.
 10. Strategi pengembangan dan pelestarian kawasan strategis kepentingan fungsi daya dukung dan lingkungan, terdiri atas:
 - a. melestarikan dan merehabilitasi hutan lindung pada kawasan lindung;
 - b. melestarikan dan melindungi sumber-sumber air bersih berupa mata air dan danau serta wilayah tangkapannya; dan
 - c. mensosialisasikan pelestarian kawasan lindung serta pengendalian pembangunan pada kawasan rawan bencana berbasis mitigasi.
 11. Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, terdiri atas:
 - a. mengembangkan sumber daya alam yang tersedia dengan penggunaan teknologi tinggi; dan
 - b. pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tinggi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
 12. Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara terdiri atas:
 - a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara; dan
 - e. menyusun perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemanfaatan ruang demi pertahanan keamanan

Untuk mendukung strategi pembangunan kabupaten Soppeng, dalam rencana tata ruang wilayah direncanakan struktur ruang wilayah yang meliputi pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama, dan sistem jaringan prasarana lainnya. Pusat-pusat kegiatan dimaksud, terdiri

atas Pusat Kegiatan Lokal (PKL); Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp); Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan Pusat Pelayanan Lokal (PPL).

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) kabupaten Soppeng adalah di Kawasan Perkotaan Watansoppeng di kecamatan Lalabata. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) terdiri Kawasan Perkotaan Takalala di Kecamatan Marioriwawo; dan Kawasan Perkotaan Batu-Batu di Kecamatan Marioriawa.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) kabupaten Soppeng terdiri atas Kawasan Perkotaan Cangadi di Kecamatan Liriaja; Kawasan Perkotaan Citta di Kecamatan Citta; Kawasan Perkotaan Ganra di Kecamatan Ganra; Kawasan Perkotaan Tajuncu di Kecamatan Donri-Donri; dan Kawasan Perkotaan Cabenge di Kecamatan Lirilau. Sedangkan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), meliputi pusat-pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa terdiri atas Pusat permukiman perdesaan Rompegading dan pusat permukiman perdesaan Barang Kecamatan Liriaja; Pusat Permukiman perdesaan Watu dan pusat permukiman perdesaan Goarie Kecamatan Marioriawa; Pusat Permukiman perdesaan Baringeng dan pusat perdesaan Tetewatu Kecamatan Lirilau; Pusat Permukiman perdesaan Panincong Kecamatan Marioriawa; Pusat Permukiman perdesaan Lalabata Riaja Kecamatan Donri-donri; Pusat Permukiman perdesaan Belo Kecamatan Ganra; dan Pusat Permukiman perdesaan Kampiri Kecamatan Citta.

9.3 Sistem Jaringan Prasarana Utama

Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Soppeng adalah sistem jaringan transportasi yang diharapkan dapat mendukung aksesibilitas daerah sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi termasuk sektor pariwisata. Sistem jaringan prasarana utama tersebut terdiri atas sistem jaringan transportasi darat; dan sistem jaringan transportasi danau.

9.3.1 Sistem Jaringan Transportasi Darat

Sistem jaringan transportasi darat kabupaten Soppeng adalah sistem jaringan jalan yang terdiri atas jaringan jalan serta lalu lintas dan angkutan jalan. Sistem jaringan transportasi Sungai, danau dan penyeberangan.

Jaringan jalan kabupaten Soppeng, terdiri atas jaringan jalan kolektor (K2) yang merupakan sistem jaringan jalan provinsi yang ada di kabupaten Soppeng, yaitu ruas jalan Batas Bone-Takalala sepanjang 11,08 km; ruas jalan Takalala-Cabenge-Salaonro sepanjang 18,43 km; ruas jalan Salaonro-Batas Wajo sepanjang 7,88 km; ruas jalan Salaonro-Batas Bone sepanjang 10,60 km; ruas jalan Batas Barru-Takalala sepanjang 25,82 km; ruas jalan Cabenge-Soppeng sepanjang 11,81 km; dan ruas jalan Soppeng-Batas Sidrap sepanjang 35,17 km.

Lalu lintas dan angkutan jalan di kabupaten Soppeng meliputi trayek angkutan dan terminal. Trayek angkutan meliputi trayek angkutan barang terdiri atas sentra-sentra produksi di Kabupaten Soppeng menuju ke Kota Makassar, Kota Pare-Pare dan Kabupaten Bone; trayek angkutan penumpang antar kota antar provinsi (AKAP); trayek angkutan

penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP); dan trayek angkutan penumpang perdesaan.

Terminal di kabupaten Soppeng meliputi rencana pembangunan terminal penumpang tipe C di kecamatan Lalabata; pembangunan terminal penumpang yang terdiri dari terminal Cabenge di kecamatan Lilirilau, terminal Takalala di kecamatan Marioriwawo, terminal Batu-Batu di kecamatan Marioriawa, terminal Tajuncu di kecamatan Donri-Donri, terminal Ganra di Kecamatan Ganra; dan rencana pembangunan terminal barang di Kecamatan Lilirilau.

9.3.2 Sistem Jaringan Transportasi Danau, Sungai, dan Penyeberangan

Sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan di kabupaten Soppeng dikembangkan di danau Tempe kecamatan Marioriawa; sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan berupa pelabuhan danau dan penyeberangan di kabupaten Soppeng dikembangkan untuk melayani pergerakan keluar masuk arus penumpang dan barang yang menghubungkan antara kabupaten Soppeng dengan pusat permukiman di kabupaten sekitarnya.

Simpul transportasi penyeberangan di kabupaten Soppeng terdiri dari Pelabuhan penyeberangan danau di Dermaga TPI Salomate Kecamatan Marioriawa; dan Pelabuhan penyeberangan danau di PPI Anetue Kecamatan Marioriawa.

9.4 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Sistem jaringan prasarana lainnya dalam pembangunan kabupaten Soppeng adalah keseluruhan jaringan prasarana yang terdiri atas sistem jaringan energi; sistem jaringan telekomunikasi; sistem jaringan sumber daya air; dan sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

9.4.1 Sistem Jaringan Energi

Sistem jaringan energi kabupaten Soppeng meliputi pembangkit tenaga listrik; dan jaringan transmisi tenaga listrik. Pembangkit tenaga listrik merupakan rencana pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Soppeng terdiri atas rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dengan sumber daya spekulatif sebesar 25 (dua puluh lima) megawatt di kecamatan Marioriawa; dan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan kapasitas 25 (dua puluh lima) megawatt di kecamatan Marioriwawo.

Jaringan transmisi tenaga listrik kabupaten Soppeng terdiri atas saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) kapasitas 70 (tujuh puluh) KV yang menghubungkan GI Sidrap – GI Soppeng, GI Soppeng - GI Bone; dan GI Soppeng – Sengkang; dan Gardu Induk (GI) dengan kapasitas 20 (dua puluh) MVA terdapat di Desa Maccile kecamatan Lalabata.

9.4.2 Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi kabupaten Soppeng ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi. Sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas jaringan teresterial; dan jaringan satelit.

Jaringan terestrial kabupaten Soppeng ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaringan satelit meliputi satelit dan transponden diselenggarakan melalui pelayanan stasiun bumi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain jaringan terestrial dan satelit, sistem jaringan telekomunikasi di kabupaten Soppeng juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem jaringan telekomunikasi dilayani oleh Sentral Telepon Otomat (STO) Soppeng di kecamatan Lalabata dan kecamatan Liliriaja.

9.4.3 Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem jaringan sumber daya air kabupaten Soppeng ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Sistem jaringan sumberdaya air terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air. Sumber air terdiri atas air permukaan pada sungai, bendung, dan embung.

Sumber air terdiri atas Wilayah Sungai (WS) yaitu WS Walanae Cenranae yang merupakan wilayah sungai strategis nasional yang meliputi DAS Cenrana; Bendung, yaitu Bendung Salobunne dan Bendung Lajaroko di kecamatan Marioriawa, Bendung Leworeng di Kecamatan Donri-Donri dan Bendung Tinco di kecamatan Lalabata, Bendung Langkemme di kecamatan Marioriwawo, dan Bendung Paroto di kecamatan Lilirilau. Embung di kabupaten Soppeng terdiri dari embung Allopereng di kecamatan Donri-donri, dan Embung Lapince di kecamatan Marioriwawo.

Prasarana sumber daya air di kabupaten Soppeng terdiri atas sistem jaringan irigasi, dan sistem pengendalian banjir. Sistem jaringan irigasi meliputi jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier yang melayani daerah irigasi di wilayah Kabupaten Soppeng. Daerah Irigasi (DI) terdiri atas Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah yaitu DI Langkemme dengan luas pelayanan 6.708 (enam ribu tujuh ratus delapan) hektar, DI Tinco Kanan/ Kiri dengan luas pelayanan 3.520 (tiga ribu lima ratus dua puluh) hektar, dan DI Lawo dengan luas pelayanan 3.600 (tiga ribu enam ratus) hektar;

Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu DI Salobunne dengan luas pelayanan 1.386 (seribu tiga ratus delapan puluh enam), DI Leworeng dengan luas pelayanan 2.258 (dua ribu dua ratus lima puluh delapan) hektar, DI Latenreng dengan luas pelayanan 1.700 (seribu tujuh ratus) hektar, DI Padangnge dengan luas pelayanan 2.950 (dua ribu sembilan ratus lima puluh) hektar dan DI Walanae dengan luas pelayanan 2.650 (dua ribu enam ratus lima puluh) hektar. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Kabupaten terdiri dari 118 (seratus delapan

belas) DI meliputi total luas pelayanan 10.111 (sepuluh ribu seratus sebelas) hektar.

Jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier di kabupaten Soppeng ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sistem pengendalian banjir terdiri atas rencana pembangunan tanggul Sungai Walanae di kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, kecamatan Citta, kecamatan Ganra, kecamatan Liliriaja dan kecamatan Marioriwawo.; dan pengendalian terhadap luapan air Sungai Walanae.

9.4.4 Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan kabupaten Soppeng terdiri atas sistem jaringan persampahan; sistem jaringan air minum; sistem Jaringan air limbah; sistem jaringan drainase; dan jalur evakuasi bencana.

9.4.4.1. Sistem Pengelolaan Persampahan

Sistem pengelolaan persampahan kabupaten Soppeng ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Sistem pengelolaan persampahan di kabupaten Soppeng terdiri atas tempat penampungan sementara (TPS), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah. Lokasi TPS di kabupaten Soppeng ditetapkan di perkotaan PKL, PKLp, PPK dan PPL yang dikembangkan dengan sistem transfer depo.

Lokasi TPST dan TPA di kabupaten Soppeng ditetapkan di Kawasan TPA Lempa di Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata yang dilengkapi dengan kawasan industri pengolahan sampah. Pengelolaan persampahan di Kabupaten Soppeng diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang mengaturnya.

9.4.4.2. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kabupaten Soppeng ditetapkan dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan. SPAM kabupaten Soppeng terdiri atas jaringan instalasi perpipaan dan bukan jaringan instalasi perpipaan.

SPAM jaringan instalasi perpipaan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di kabupaten Soppeng. SPAM bukan jaringan instalasi perpipaan yang meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan

perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SPAM di kabupaten Soppeng dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku. SPAM jaringan perpipaan terdiri atas unit air baku yang bersumber dari Sungai Lawo, Sungai Walannae, Sungai Langkemme dan Sungai Lajaroko.; dan Mata air Ompo di kecamatan Lalabata dan mata air Citta di kecamatan Citta.

Unit produksi air minum kabupaten Soppeng meliputi Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Ompo melayani kecamatan Lalabata; Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Lawo melayani kecamatan Donri-donri; Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Paroto melayani kecamatan Lilirilau; Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Asanae melayani kecamatan Marioriwawo; Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Barang melayani kecamatan Liliriaja; Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Citta melayani kecamatan Citta; Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Ganra melayani kecamatan Ganra; dan Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Batu-batu melayani kecamatan Marioriwawo.

Unit distribusi air minum kabupaten Soppeng ditetapkan di Ompo Kecamatan Lalabata. Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum dapat juga diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku.

9.4.4.3. Sistem Jaringan Drainase

Sistem jaringan drainase di kabupaten Soppeng meliputi sistem saluran drainase primer, sistem saluran drainase sekunder dan sistem saluran drainase tersier yang ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan, dan kawasan pariwisata.

Sistem saluran drainase primer di kabupaten Soppeng dikembangkan melalui saluran pembuangan utama meliputi sungai Lawo dan sungai Masewali yang melayani kawasan perkotaan di Kabupaten Soppeng. Sistem saluran drainase sekunder di kabupaten Soppeng dikembangkan tersendiri pada kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata yang terhubung ke saluran primer, sehingga tidak mengganggu saluran drainase permukiman. Sistem saluran drainase tersier di kabupaten Soppeng dikembangkan pada kawasan permukiman; dan sistem jaringan drainase dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir;

9.4.4.4. Sistem Jaringan Air Limbah

Sistem jaringan air limbah di kabupaten Soppeng ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem jaringan air limbah di kabupaten Soppeng meliputi sistem pembuangan air limbah setempat dan sistem pembuangan air limbah terpusat.

Sistem pembuangan air limbah setempat di kabupaten Soppeng dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat. Sistem pembuangan air limbah

terpusat di kabupaten Soppeng dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada kawasan permukiman padat, kawasan perdagangan, kawasan industri dan kawasan rumah sakit.

Sistem pembuangan air limbah terpusat di kabupaten Soppeng mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah. Sistem pembuangan air limbah terpusat dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga.

Sistem pembuangan air limbah terpusat di kabupaten Soppeng meliputi sistem pembuangan air limbah terpusat rumah sakit di kecamatan Lalabata; dan sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan perkotaan Watansoppeng di kecamatan Lalabata. Sistem pembuangan air limbah terpusat di kabupaten Soppeng dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

9.4.4.5. Jalur Dan Ruang Evakuasi Bencana

Jalur dan ruang evakuasi bencana di kabupaten Soppeng bertujuan sebagai penyediaan jalur dan ruang yang dapat digunakan untuk tempat keselamatan dan tempat berlindung jika terjadi bencana. Jalur dan ruang evakuasi bencana ditetapkan dalam skala kota, skala kawasan, dan skala lingkungan berupa jalur evakuasi bencana (*escape way*) dan ruang evakuasi bencana (*melting point*).

Jalur evakuasi bencana di kabupaten Soppeng meliputi jalur dan ruang evakuasi bencana banjir meliputi ruas jalan di kecamatan Lilirilau, kecamatan Liriaja, kecamatan Donri-donri, kecamatan Marioriawa, kecamatan Citta, dan kecamatan Ganra. Jalur dan ruang evakuasi bencana longsor meliputi desa Gattareng kecamatan Marioriwawo, desa Mattabulu kecamatan Lalabata, dan desa Citta kecamatan Citta.

Jalur evakuasi bencana di kabupaten Soppeng direncanakan mengikuti dan/ atau menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana, serta merupakan tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana. Ruang evakuasi bencana (*Melting point*) di kabupaten Soppeng merupakan kawasan yang dipersiapkan sebagai tempat sementara evakuasi korban bencana ditetapkan di kecamatan Lilirilau, kecamatan Liriaja, kecamatan Lalabata, kecamatan Donri-donri, kecamatan Marioriawa, kecamatan Citta, dan kecamatan Ganra.

9.5 Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Soppeng ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Rencana pola ruang wilayah kabupaten Soppeng meliputi rencana peruntukan kawasan lindung dan rencana peruntukan kawasan budidaya.

9.5.1 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan suaka alam, pelestarian alam dan kawasan cagar budaya; kawasan rawan bencana alam; kawasan lindung geologi; dan kawasan lindung lainnya.

9.5.1.1 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi, menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan serta memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air.

Kawasan hutan lindung di kabupaten Soppeng dengan luas 34.287 (tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Marioriawa, sebagian wilayah kecamatan Lalabata, sebagian wilayah kecamatan Liliraja, sebagian wilayah kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah kecamatan Donri-donri, dan sebagian wilayah kecamatan Citta.

Kawasan resapan air di kabupaten Soppeng ditetapkan di kawasan sekitar Danau Tempe kecamatan Marioriawa; kawasan sekitar rawa di sebagian wilayah kecamatan Ganra dan sebagian wilayah kecamatan Lilirilau; kawasan sekitar cekdam di sebagian wilayah kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah kecamatan Lalabata, sebagian wilayah kecamatan Marioriawa, sebagian wilayah kecamatan Marioriwawo, dan sebagian wilayah kecamatan Donri-donri; dan kawasan sekitar waduk Ompo di sebagian wilayah kecamatan Lalabata.

9.5.1.2 Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat di kabupaten Soppeng merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan melindungi sungai, danau atau waduk, dan RTH kawasan perkotaan dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya. Kawasan perlindungan setempat terdiri atas kawasan sempadan sungai; kawasan sekitar danau atau waduk; dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

Kawasan sempadan sungai di kabupaten Soppeng ditetapkan di Sungai Lawo, Sungai Walanae, Sungai Langkemme, dan Sungai Lajaroko dengan ketentuan bahwa daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar; daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

Kawasan sekitar danau atau waduk di kabupaten Soppeng ditetapkan di Danau Tempe kecamatan Marioriawa, di kawasan waduk ompo kecamatan Lalabata dan kawasan cek dam kecamatan Lilirilau, kecamatan Liliriaja, kecamatan Marioriawa, kecamatan Marioriwawo, dan kecamatan Donri-donri dengan ketentuan bahwa daratan dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi; atau daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.

Kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan di kabupaten Soppeng adalah berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu PKL, PKLp dan PPK di Kabupaten Soppeng.

9.5.1.3 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya di kabupaten Soppeng ditetapkan dalam rangka melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, dan pembangunan pada umumnya serta melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, dan keragaman bentuk geologi yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia. Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya terdiri atas: Kawasan wisata alam; dan Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Kawasan wisata alam di kabupaten Soppeng merupakan Kawasan Taman Wisata Alam Lejja dengan luasan 1.572 (seribu lima ratus tujuh puluh dua) hektar ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Marioriwawo. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi bangunan dan lingkungan arkeologi yang ditetapkan di kawasan situs Megalitik Lawo, situs Tinco, situs Sewo dan situs Umpungeng di kecamatan Lalabata; kawasan situs Megalitik Samoling, Situs Paleolitik Jampu, Situs Kecce, Situs Marale, dan Situs Paroto di kecamatan Lilirilau; kawasan situs Tampaning di kecamatan Marioriawa; kawasan situs Talepu, Lonrong, Lenrang dan Gua Lakaroci di kecamatan Liliriaja; kawasan Gua Codong, dan situs Paleolitik Lakibong di Kecamatan Citta; dan kawasan situs Goarie, dan Situs Megalitik Madenra di Kecamatan Marioriwawo.

Bangunan dan lingkungan peninggalan sejarah ditetapkan di Villa Yuliana (Museum Latemammala), Kawasan Makam Kuno Jera Lompoe, Kompleks Istana Datu Soppeng, Makam Syekh Abdul Majid digelar Tuang Uddungeng, Makam Petta Bulu Matanre, Makam Petta Seppang, Kompleks Makam Datu Soppeng, Gereja Khatolik Patung Bunda Maria, Rumah Tradisional Batu Laiya, Kompleks Makam Jera'Caddie, Menhir Latemammala (Lamumpatu'E), Situs Petta Banuang'E, Situs Petta Wanua, Di Kecamatan Lalabata; Makam Petta Sering, Situs Tomanurung Sanyili, Makam Petta Abbaraningge, Makam Petta Balubue, Bulu

Bottingnge, Appejeng'E, Makam Petta Addagang'E di kecamatan Donri-Donri; Makam Datu Mario, Makam Petta Jangko, Kompleks Sao Mario, Makam Kuno Padali, Makam Petta Kajuara di Kecamatan Marioriawa; Makam Kuno Datu Lompulle, Kompleks Makam Pakka Saloe, Makam Petta Sara'e, Makam Sullewatang kebo dan Petta Karame, di kecamatan Ganra; Museum Calio, Kompleks Makam Datu Salaonro, Makam Arung Baringeng, Makam Abbanuange, di kecamatan Lilirilau; Kompleks Makam Abbanuangnge, Kompleks Makam Datu Pattojo, Benteng Pattojo, Saoraja Seng, di kecamatan Liliriaja; Makam Datu Citta di kecamatan Citta; Makam Kalokoe Watu, Makan Lato Garimpang, Sumur Tua Tettikengrarae, Makam Arung Sekkang, Rumah Arrajang di kecamatan Marioriwawo.

9.5.1.4 Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam di kabupaten Soppeng ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya. Kawasan rawan bencana alam terdiri atas kawasan rawan banjir; dan kawasan rawan tanah longsor.

Kawasan rawan banjir di kabupaten Soppeng ditetapkan di kawasan daerah aliran Sungai Walanae yang meliputi sebagian wilayah kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah kecamatan Marioriawa, sebagian wilayah kecamatan Citta, dan sebagian wilayah kecamatan Ganra.

Kawasan rawan tanah longsor di kabupaten Soppeng ditetapkan di sebagian wilayah desa Gattareng kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah desa Mattabulu kecamatan Lalabata, dan sebagian wilayah desa Citta kecamatan Citta;

9.5.1.5 Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi di kabupaten Soppeng ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam geologi dan perlindungan terhadap air tanah. Kawasan lindung geologi di kabupaten Soppeng terdiri atas kawasan cagar alam geologi berupa kawasan keunikan batuan dan fosil dan kawasan keunikan bentang alam; dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah.

Kawasan keunikan batuan dan fosil ditetapkan di sebagian wilayah desa Calio kecamatan Lilirilau. Kawasan keunikan bentang alam merupakan kawasan *karst* yang membentang dari kabupaten Wajo ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Lilirilau. Kawasan imbuhan air tanah meliputi daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi air tanah berupa kawasan Cadangan Air Tanah Pinrang Sidenreng ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Marioriawa, kecamatan Donri-Donri dan kecamatan Lalabata.

9.5.1.6 Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya di kabupaten Soppeng ditetapkan dalam rangka melindungi kelestarian satwa dan ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, dan kelestarian satwa dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungannya. Kawasan lindung lainnya merupakan kawasan perlindungan satwa kelelawar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lalabata

9.5.2 Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya kabupaten Soppeng, terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi; kawasan peruntukan hutan rakyat; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; dan kawasan peruntukan lainnya.

9.5.2.1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi dan Hutan Rakyat

Kawasan peruntukan hutan produksi di kabupaten Soppeng terdiri atas kawasan hutan produksi dengan luas 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Lilirilau; dan kawasan hutan produksi terbatas dengan luas 10.876 (sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh enam) hektar ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Donri-donri dengan luas 4.200 (empat ribu dua ratus) hektar, sebagian wilayah kecamatan Marioriwawo dengan luas 417 (empat ratus tujuh belas) hektar, dan sebagian wilayah kecamatan Marioriawa dengan luas 6.268 (enam ribu dua ratus enam puluh delapan) hektar.

Kawasan peruntukan hutan rakyat di kabupaten Soppeng dengan luas 2.352 (dua ribu tiga ratus lima puluh dua) ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah kecamatan Lalabata, sebagian wilayah kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah kecamatan Donri-donri dan sebagian wilayah kecamatan Marioriawa.

9.5.2.2 Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Soppeng terdiri atas kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; kawasan peruntukan pertanian hortikultura; kawasan peruntukan perkebunan; dan kawasan peruntukan peternakan.

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Soppeng dengan luas 46.491 (empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam) hektar ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Citta, sebagian wilayah kecamatan Lalabata, sebagian wilayah kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah kecamatan Ganra, sebagian wilayah kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah kecamatan Lilirilau.

Kawasan peruntukan pertanian hortikultura di Kabupaten Soppeng dengan luas 21.549 (dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh sembilan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Citta, sebagian wilayah kecamatan Lalabata, sebagian wilayah kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah kecamatan Lilirilau.

Kawasan peruntukan perkebunan di Kabupaten Soppeng dengan luas 1.615 (seribu enam ratus lima belas) hektar terdiri atas kawasan peruntukan perkebunan kakao dan kelapa ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Citta, sebagian wilayah kecamatan Lalabata, sebagian wilayah kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah kecamatan Ganra, sebagian wilayah kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah kecamatan Lilirilau.

Kawasan peruntukan perkebunan kopi ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Lalabata, sebagian wilayah kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah kecamatan Ganra, sebagian wilayah kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah kecamatan Donridonri, sebagian wilayah kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah kecamatan Lilirilau. Kawasan peruntukan perkebunan cengkeh ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Citta, sebagian wilayah kecamatan Lalabata, dan sebagian wilayah kecamatan Marioriwawo. Kawasan peruntukan perkebunan lada ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Citta, sebagian wilayah kecamatan Lalabata, sebagian wilayah kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah kecamatan Ganra, sebagian wilayah kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah kecamatan Donri-donri, dan sebagian wilayah kecamatan Lilirilau.

Kawasan peruntukan perkebunan aren ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Citta, sebagian wilayah kecamatan Lalabata, sebagian wilayah kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah kecamatan Lilirilau. Kawasan peruntukan perkebunan jambu mete ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Citta, sebagian wilayah kecamatan Lalabata, sebagian wilayah kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah kecamatan Lilirilau;

Kawasan peruntukan perkebunan kemiri ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Citta, sebagian wilayah kecamatan Lalabata, sebagian wilayah kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah kecamatan Lilirilau. Kawasan peruntukan perkebunan tembakau ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Lalabata, sebagian wilayah kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah kecamatan Ganra, sebagian wilayah kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah kecamatan Lilirilau. Kawasan peruntukan perkebunan kelapa sawit ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Donri-donri, dan sebagian wilayah kecamatan Marioriawa. Kawasan peruntukan perkebunan murbei ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Donri-donri, dan sebagian wilayah kecamatan Marioriawa.

Kawasan peruntukan peternakan di Kabupaten Soppeng terdiri atas: Kawasan peruntukan pengembangan ternak besar dengan luasan 137 (seratus tiga puluh tujuh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Citta, sebagian wilayah kecamatan Marioriwawo, dan sebagian wilayah kecamatan Liliriaja. Kawasan peruntukan pengembangan ternak unggas ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah kecamatan Ganra, dan sebagian wilayah kecamatan Lilirilau.

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Soppeng ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, dengan luas 46.491 (empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam ribu) hektar

9.5.3 Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan kabupaten Soppeng terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan budidaya perikanan, dan kawasan pengembangan balai benih ikan (BBI).

Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada wilayah sungai yang meliputi sebagian wilayah kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah kecamatan Ganra, sebagian wilayah kecamatan Citta, dan sebagian wilayah kecamatan Marioriawa.

Kawasan peruntukan budidaya perikanan merupakan kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Citta, sebagian wilayah kecamatan Lalabata, sebagian wilayah kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah kecamatan Ganra, sebagian wilayah kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah kecamatan Lilirilau.

Kawasan pengembangan balai benih ikan ditetapkan akan dikembangkan di BBI Ompo kecamatan Lalabata, BBI Lajoa kecamatan Liliriaja, dan BBI Citta Kecamatan Citta.

9.5.4 Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan di kabupaten Soppeng terdiri atas kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara; kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi; dan kawasan peruntukan wilayah pertambangan panas bumi.

Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara terdiri atas wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam berupa emas dan tembaga ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Marioriawa; wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam berupa pasir kuarsa, batu gamping, *fire clay*, dan *dolomite* ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Marioriwawo; wilayah usaha pertambangan komoditas batuan berupa kerikil berpasir alami ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Citta, sebagian wilayah kecamatan Lalabata, sebagian wilayah kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah kecamatan Ganra, sebagian wilayah kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah

kecamatan Lilirilau; wilayah usaha pertambangan komoditas batubara ditetapkan di Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo.

Kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi di kabupaten Soppeng merupakan bagian dari kawasan pertambangan minyak dan gas bumi Blok Sengkang yang berada di wilayah kabupaten Soppeng ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Marioriawa. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan panas bumi ditetapkan di Desa Bulue kecamatan Marioriawa;

9.5.5 Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri kabupaten Soppeng meliputi kawasan peruntukan industri sedang; dan kawasan peruntukan industri rumah tangga.

Kawasan peruntukan industri sedang terdiri atas kawasan peruntukan industri penggilingan padi ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Citta, sebagian wilayah kecamatan Lalabata, sebagian wilayah kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah kecamatan Ganra, sebagian wilayah kecamatan Liriaja, sebagian wilayah kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah kecamatan Lilirilau.

Kawasan peruntukan industri pemintalan sutera alam ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Donri-donri. Kawasan peruntukan industri pengolahan ikan ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Citta, sebagian wilayah kecamatan Lalabata, sebagian wilayah kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah kecamatan Ganra, sebagian wilayah kecamatan Liriaja, sebagian wilayah kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah kecamatan Lilirilau. Kawasan peruntukan industri pengolahan tembakau ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Lilirilau.

Kawasan peruntukan industri rumah tangga merupakan kawasan aglomerasi industri rumah tangga, terdiri atas kawasan peruntukan industri pembuatan gula merah ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Citta, sebagian wilayah kecamatan Lalabata, sebagian wilayah kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah kecamatan Lilirilau. Kawasan peruntukan industri pertenunan sarung sutera ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Lalabata, sebagian wilayah kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah kecamatan Lalabata.

9.5.6 Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata kabupaten Soppeng terdiri atas kawasan peruntukan pariwisata budaya; kawasan peruntukan pariwisata alam; dan kawasan peruntukan pariwisata buatan.

Kawasan peruntukan pariwisata budaya di kabupaten Soppeng terdiri atas Villa Yuliana (Museum Latemammala), Kawasan Makam Kuno Jera Lompoe, Kompleks Istana Datu Soppeng, Makam Syekh Abdul Majid digelar Tuang Uddungeng, Makam Petta Bulu Matanre, Situs Megalitik Lawo, Tinco, Sewo dan Umpungeng, Makam Petta Seppang, Kompleks

Makam Datu Soppeng, Gereja Khatolik Patung Bunda Maria, Rumah Tradisional Batu Laiya, Kompleks Makam Jera'Caddie, Menhir Latemmamala (Lamumpatu'E), Situs Petta Banuang'E, Situs Petta Wanua, di kecamatan Lalabata. Makam Petta Sering, Situs Tomanurung Sanyili, Makam Petta Abbaraningge, Makam Petta Balubue, Bulu Bottingnge, Appejeng'E, Makam Petta Addagang'E di kecamatan Donri-Donri. Makam Datu Mario, Makam Petta Jangko, Kompleks Sao Mario, Situs Tampaning, Makam Kuno Padali, Makam Petta Kajuara di kecamatan Marioriawa; Makam Kuno Datu Lompulle, Kompleks Makam Pakka Saloe, Makam Petta Sara'e, Makam Sullewatang kebo dan Petta Karame, di kecamatan Ganra. Museum Calio, Situs Kecce, Marale, dan Situs Paroto, Kompleks Makam Datu Salaonro, Makam Arung Baringeng, Makam Abbanuange, Situs Megalitik Samoling, Situs Paleolitik Jampu di kecamatan Lilirilau. Situs Talepu, Lonrong, Lenrang, Kompleks Makam Abbanuangnge, Kompleks Makam Datu Pattojo, Benteng Pattojo, Saoraja Seng, Gua Lakaroci di kecamatan Liliriaja. Gua Codong, Situs Paleolitik Lakibong, Makam Datu Citta di kecamatan Citta. Makam Kalokoe Watu, Makan Lato Garimpang, Situs Goarie, Situs Megalitik Madenra, Sumur Tua Tettikengraae, Makam Arung Sekkang, Rumah Arrajang di kecamatan Marioriwawo.

Kawasan peruntukan pariwisata alam di kabupaten Soppeng terdiri atas Kawasan TWA Lejja, dan kawasan TWA Danau Tempe di kecamatan Marioriawa; kawasan TWA Citta dan kawasan Goa Coddong di kecamatan Citta; kawasan TWA Lereng Hijau Bulu Dua di kecamatan Marioriwawo; kawasan populasi kelelawar di pusat kota Watansoppeng kecamatan Lalabata; dan kawasan Pesuteraan Alam di kecamatan Donri-Donri.

Kawasan peruntukan pariwisata buatan di kabupaten Soppeng terdiri atas kawasan wisata Ompo di kecamatan Lalabata; dan kawasan wisata agro di desa Mariolau dan desa Gattareng di kecamatan Marioriwawo.

9.5.7 Kawasan Peruntukan Pemukiman

Kawasan peruntukan permukiman kabupaten Soppeng terdiri atas kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan di kabupaten Soppeng berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan ditetapkan di kawasan permukiman perkotaan Watansoppeng di kecamatan Lalabata; kawasan permukiman perkotaan Cabenge di kecamatan Lilirilau; kawasan permukiman perkotaan Takalala di kecamatan Marioriwawo; dan kawasan permukiman perkotaan Batu-Batu di kecamatan Marioriawa.

Kawasan peruntukan permukiman perdesaan di kabupaten Soppeng berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun. Kawasan

peruntukan permukiman perdesaan ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Citta, sebagian wilayah kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah kecamatan Ganra, sebagian wilayah kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah kecamatan Lilirilau.

9.5.8 Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya di kabupaten Soppeng merupakan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan Negara, dan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa. Kawasan pertahanan dan keamanan Negara yaitu kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan di kabupaten Soppeng terdiri atas Kantor Komando Distrik Militer 1423 Soppeng di kecamatan Lalabata; Kantor Komando Rayon Militer di kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau, kecamatan Marioriawa, kecamatan Citta, kecamatan Donri-donri, kecamatan Ganra, kecamatan Marioriwawo; Kantor Kepolisian Resort Soppeng di kelurahan Lemba kecamatan Lalabata; dan Kantor Kepolisian Sektor di kecamatan Liliriaja, kecamatan Lilirilau, kecamatan Marioriawa, kecamatan Citta, kecamatan Donri-Donri, kecamatan Ganra, kecamatan Marioriwawo.

Pengembangan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara di kabupaten Soppeng meliputi peningkatan prasarana dan sarana di kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan penataan kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Kawasan peruntukan perdagangan di kabupaten Soppeng merupakan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional dan skala kabupaten dan/ atau kecamatan. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional ditetapkan di kawasan perdagangan Watansoppeng kecamatan Lalabata dan kawasan perdagangan Cabenge kecamatan Lilirilau. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala kabupaten dan/ atau kecamatan ditetapkan di kawasan perdagangan Takkalala kecamatan Marioriwawo dan kawasan perdagangan Batu-Batu kecamatan Marioriawa.

Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi. Pemanfaatan kawasan dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Soppeng.

9.6 Kawasan Strategis Kabupaten Soppeng

Kawasan strategis Kabupaten Soppeng merupakan bagian wilayah Kabupaten Soppeng yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten di bidang ekonomi, sumberdaya alam, dan/ atau lingkungan. Kawasan Strategis yang ada di Kabupaten Soppeng terdiri atas Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Soppeng terdiri atas KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya

alam dan teknologi tinggi; dan KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan Strategis Provinsi dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas kawasan lahan pangan berkelanjutan komoditas beras dan jagung ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Lalabata, sebagian wilayah kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah kecamatan Ganra, sebagian wilayah kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah kecamatan Marioriawa, sebagian wilayah kecamatan Citta, dan sebagian wilayah kecamatan Donri-donri.

Kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas perkebunan unggulan kopi robusta, kakao, dan jambu mete ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Lalabata, sebagian wilayah kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah kecamatan Ganra, sebagian wilayah kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah kecamatan Marioriawa, sebagian wilayah kecamatan Citta, dan sebagian wilayah kecamatan Donri-donri.

Kawasan Strategis Provinsi dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi merupakan kawasan penambangan minyak dan gas bumi Blok Sengkang di wilayah kabupaten Soppeng ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Marioriawa.

Kawasan Strategis Provinsi dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Marioriawa, sebagian wilayah kecamatan Lalabata, sebagian wilayah kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah kecamatan Donri-Donri, dan sebagian wilayah kecamatan Citta. Kawasan Danau Tempe ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Marioriawa; dan Kawasan Taman Wisata Alam Lejja ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Marioriawa.

Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas kawasan perkotaan dan pusat pemerintahan ditetapkan di kecamatan Lalabata; kawasan perkotaan Takkalala di kecamatan Marioriwawo yang dipromosikan untuk ditetapkan sebagai PKL; kawasan perkotaan Batu-Batu di kecamatan Marioriawa yang dipromosikan untuk ditetapkan sebagai PKL; Kawasan simpul transportasi dan perdagangan Cabenge di kecamatan Lilirilau; dan kawasan pengembangan lahan pertanian dan kawasan agropolitan ditetapkan di kecamatan Liliriaja, kecamatan Marioriwawo, dan kecamatan Ganra.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dengan sudut kepentingan lingkungan hidup terdiri atas kawasan Danau Tempe di kecamatan Marioriawa; kawasan Taman Wisata Alam Lejja di kecamatan Marioriawa; dan kawasan hutan lindung di sebagian wilayah kecamatan Marioriawa, sebagian wilayah kecamatan Lalabata, sebagian wilayah kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah kecamatan Donri-Donri, dan sebagian wilayah kecamatan Ganra.

BAB - 10

RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG

10.1 Destinasi Pariwisata Daerah (DPD)

Perwilayahan Destinasi Pariwisata merupakan perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) kabupaten Soppeng ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

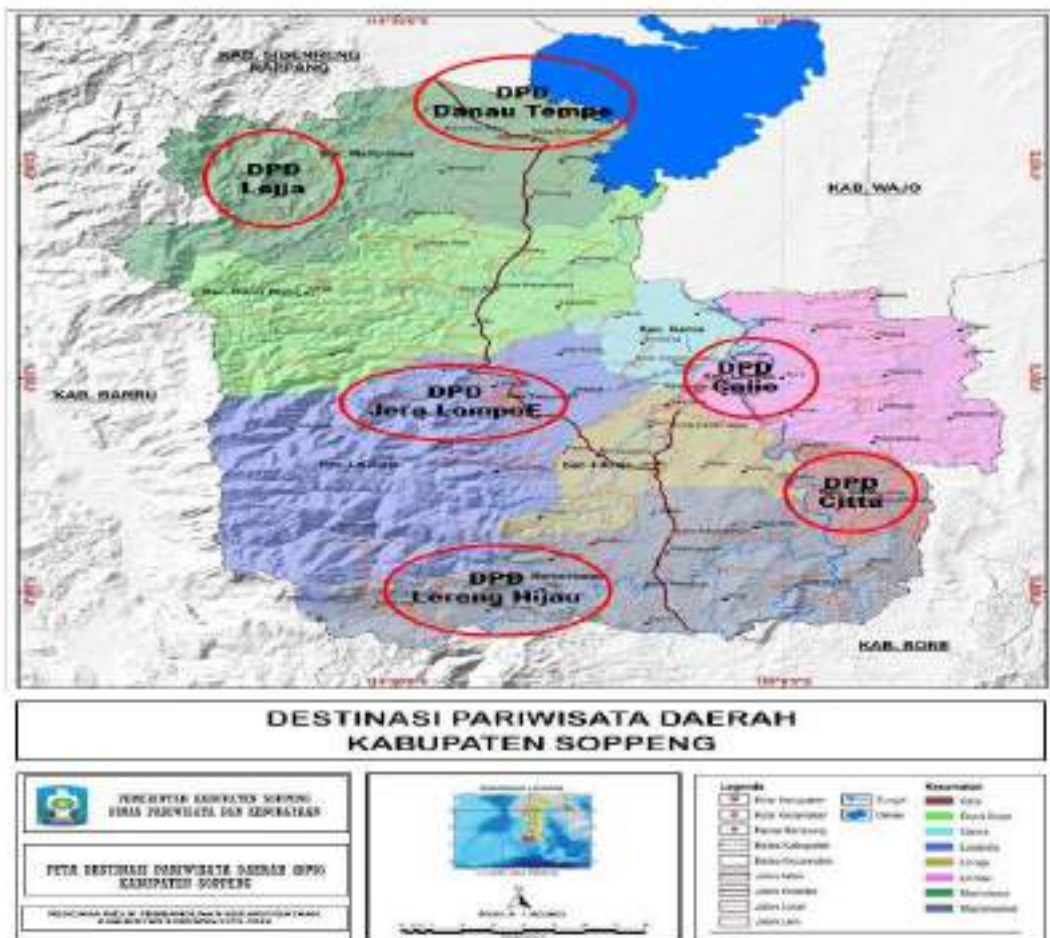
- a. Merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten dan/ atau lintas kabupaten yang di dalamnya terdapat kawasan-Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD), diantaranya merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD);
- b. Memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara lokal, regional, nasional dan/ atau internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
- c. Memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. Memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
- e. Memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas serta keterkaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Soppeng, maka Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) kabupaten Soppeng ditetapkan sebagai berikut :

- a. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) **Taman Wisata Alam (TWA) Lejja dan Sekitarnya**. Daya tarik utama DPD ini adalah wisata alam berbasis pemandian air panas, panorama gunung dan hutan yang terletak di Desa Babbae Kecamatan Marioriawa. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD TWA Lejja adalah mandi dan berenang pada mata air panas alam, *photo spot*, tracking pada alam bebas berbasis ekologi, dan rekreasi wisata keluarga.
- b. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) **Danau Tempe dan Sekitarnya**. Daya tarik utama DPD ini adalah wisata alam berbasis danau dan panorama yang terletak di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD Danau Tempe adalah memancing dan rekreasi wisata keluarga, wisata perahu, wisata ekologi berbasis desa wisata dan kehidupan masyarakat.
- c. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) **Jera LompoE dan Sekitarnya**. Daya tarik utama DPD ini adalah wisata sejarah makam Raja-Raja yang terletak di kota Watansoppeng kecamatan Lalabata. Aktivitas

- wisata yang ditawarkan pada DPD Jera LompoE adalah wisata ziarah dan wisata edukasi berbasis sejarah dan arkeologi.
- d. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) **Museum Calio dan Sekitarnya**. Daya tarik utama DPD ini adalah wisata sejarah dan budaya situs dan tinggalan akkeologi yang terletak di kecamatan Lirililau. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD Museum Calio adalah wisata wisata edukasi berbasis sejarah dan arkeologi.
 - e. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) **Taman Wisata Alam (TWA) Citta dan Sekitarnya**. Daya tarik utama DPD ini adalah wisata alam tirta berbasis permandian air alam dan panorama yang terletak di kecamatan Citta. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD TWA Citta adalah mandi dan berenang pada mata air alami, *photo spot*, dan rekreasi wisata keluarga.
 - f. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) **Lereng Hijau Bulu Dua dan Sekitarnya**. Daya tarik utama DPD ini adalah wisata buatan (*man-made*) rekreasi keluarga berbasis tirta dan panorama alam pegunungan yang terletak di Bulu Dua kecamatan Marioriwawo. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD Lereng Hijau Bulu Dua adalah mandi dan berenang pada mata kolam renang, *photo spot*, dan rekreasi wisata keluarga.

Gambar 10.1
Peta Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Kabupaten Soppeng



Sumber : Data Olah, 2018

10.2 Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD)

Berdasarkan penetapan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) kabupaten Soppeng, selanjutnya diidentifikasi potensi daya tarik wisata yang menjadi tema utama sehingga akan memudahkan dalam menyusun pemaketan dan pola perjalanan wisata termasuk dalam menyesuaikan beberapa komponen pendukung seperti pusat pelayan wisata, aksesibilitas pariwisata, amenitas serta infrastruktur pendukung lainnya.

Berdasarkan hasil analisis potensi daya Tarik wisata dan pendekatan zonasi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, ditetapkan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) kabupaten Soppeng sebagai berikut :

- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Utara, terdiri dari kecamatan Marioriawa dan kecamatan Donri-Donri;
- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Barat, terdiri dari kecamatan Ganra dan kecamatan Lilirilau;
- c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Timur, terdiri dari kecamatan Lalabata; dan
- d. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Selatan, terdiri dari kecamatan Liriaja, kecamatan Citta, dan kecamatan Marioriwawo.

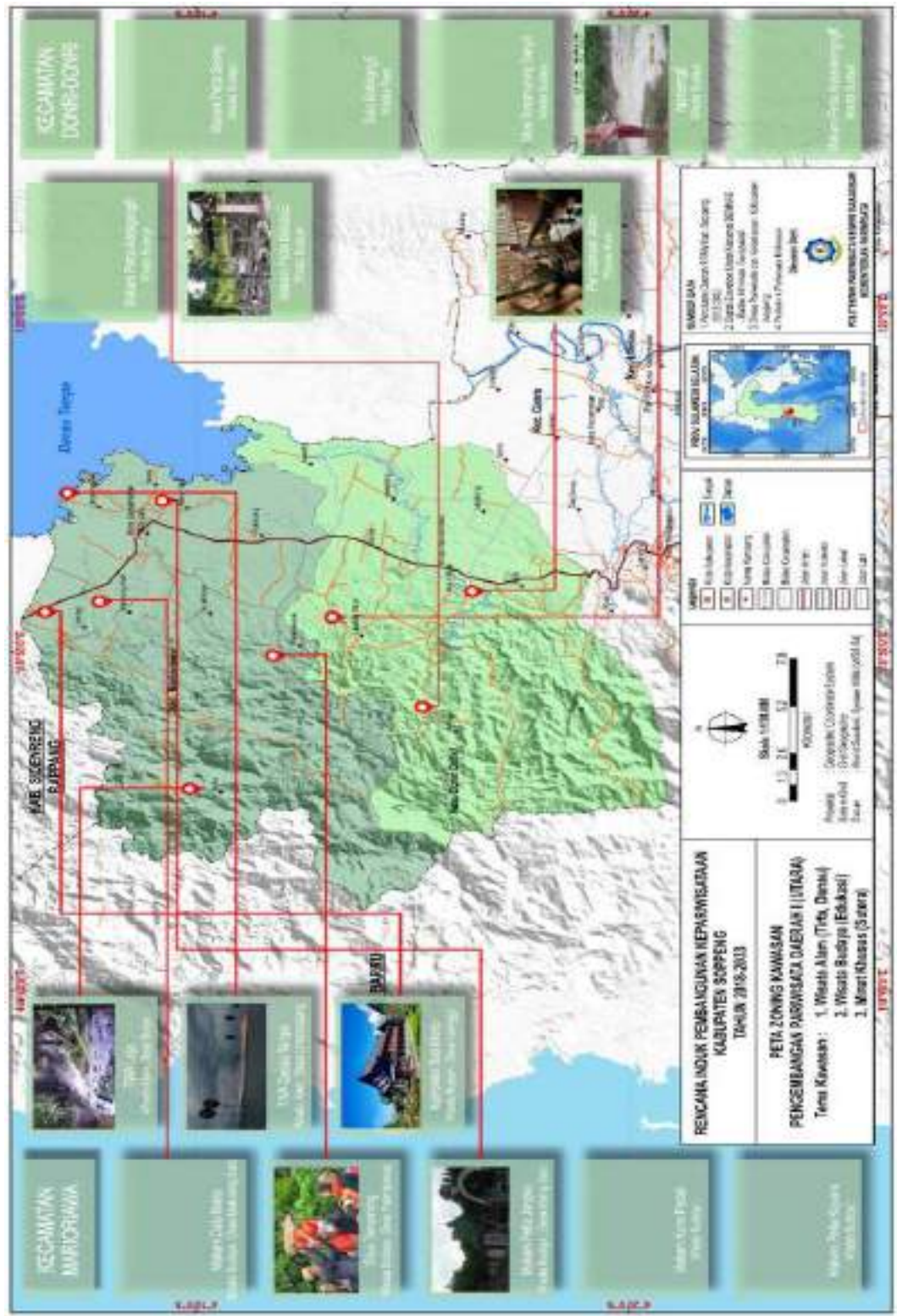
10.2.1 Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Utara

Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 1 merupakan kawasan pengembangan pariwisata kabupaten Soppeng yang meliputi kecamatan Marioriawa dan kecamatan Donri-Donri. Karakteristik wilayah dari kedua kecamatan ini didominasi oleh daerah dengan ketinggian 5 meter pada kawasan dataran rendah sampai dengan 1.025 mdpl pada kawasan dataran tinggi.

Kondisi geografis wilayah pada kawasan ini mempengaruhi jenis daya tarik dan atraksi wisata yang dimiliki yang terdiri dari daya tarik wisata alam berupa bukit, danau, air terjun dan panorama. Daya tarik wisata sejarah dan budaya berupa rumah adat, makam, dan tinggalan sejarah masa lampau berupa situs

Sebagai kecamatan yang berbatasan langsung dengan kabupaten Wajo dan Sidenreng Rappang sebagai pintu masuk ke kabupaten Soppeng dari arah kota Pare-Pare melalui akses transportasi darat, maka kecamatan Marioriawa harus mampu menjadi gerbang yang memberikan gambaran menarik bagi pengunjung dengan tujuan utama berwisata atau sekedar melewati kabupaten Soppeng sebagai salah satu akses menuju kabupaten Bone ke arah kabupaten Sinjai atau ke kota Makassar melalui Camba, serta menuju kota Makassar melalui Bulu Dua.

Gambar 10.2
Peta KPPD Zona Utara



Sumber : Data Olahan, 2018

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KPPD ZONA UTARA



Lapasarengi – Datae, Air Terjun Batumurue- Datae, Kawasan Pesuteraan Alam, AppejengÉ, Air Terjun Luppereng Kajoe, Makam Petta Sering, Situs Tomanurung Sanyili, Makam Petta AbbaraningngE, Makam Petta BalubuE, Bulu BottingngE, Makam Petta AddagangE, Makam Datu Mario, Kompleks Makam Petta Jangko, Kompleks Sao Mario, Situs Tampaning, Makam Kuno Padali, dan Makam Petta Kajuara.

Tema Pengembangan Wisata alam permandian air panas, sungai, danau, air terjun dan panorama alam; wisata sejarah dan budaya, serta wisata minat khusus ekologi dan edukasi sutera alam sebagai daya tarik utama

Komponen Pengembangan	Jabaran
Atraksi Wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan DTW Alam Tirta 2. Pengembangan DTW Sejarah dan Budaya 3. Pengembangan DTW Minat Khusus
Fasilitas Wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan <i>resort</i> dan <i>homestay</i>; 2. Pengembangan fasilitas olah raga dan rekreasi keluarga; 3. Pengembangan Sistem Informasi, Guiding, Interpretasi, serta <i>Tourist Information Centre</i>; 4. Pengembangan fasilitas <i>Money Changer</i>, ATM dan Internet; 5. Penataan dan pengembangan kawasan wisata kuliner di kawasan Lejja dan Danau Tempe; 6. Penataan dan pengembangan fasilitas wisata di kawasan Lejja dan Danau Tempe; 7. Pengembangan usaha kreatif cinderamata; 8. Penataan dan pengembangan fasilitas wisata di wisata sejarah dan budaya; dan

	9. Pengembangan Desa Wisata (<i>Tourism Village</i>) dan Wisata Pedesaan (<i>Rural Tourism</i>).
Aksesibilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan jalur dan moda transportasi ke Daya Tarik Wisata yang lain yang berada di dalam kawasan dan antar kawasan;2. Pengembangan dermaga dan fasilitas transportasi wisata bahari di kawasan Danau Tempe.
Manajemen Tata Ruang	<p>Pembagian zona terhadap Daya Tarik Wisata.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zona inti adalah daerah dimana objek itu berada dan sekaligus sebagai zona konservasi.2. Pengembangan fasilitas tambahan diluar dari zona inti.

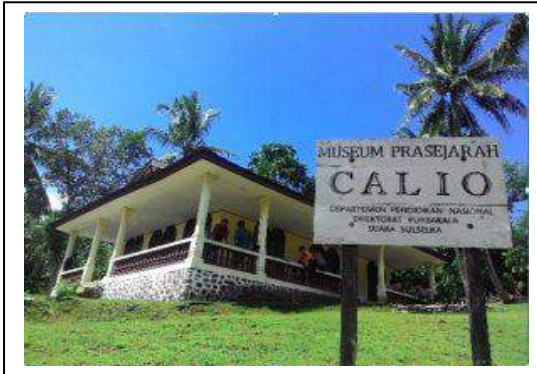
10.2.2 Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Timur

Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Timur merupakan kawasan pariwisata kabupaten Soppeng yang meliputi kecamatan Ganra dan kecamatan Lilirilau. Karakteristik wilayah di kedua kecamatan tersebut berada di daerah dengan ketinggian 10 meter sampai dengan 190 mdpl, sehingga terdapat variasi yang sangat berbeda antara kondisi dataran rendah di kecamatan Ganra dengan daerah perbukitan di kecamatan Lilirilau.

Kondisi geografis wilayah pada kawasan pengembangan pariwisata ini mempengaruhi jenis daya tarik dan atraksi wisata yang dimiliki yang terdiri dari daya tarik wisata budaya dan sejarah berupa makam, rumah adat, situs dan tinggalan sejarah arkeologi lainnya.

Sebagai wilayah kawasan pengembangan pariwisata daerah dengan karakter geografis dan potensi daya tarik serta atraksi wisata yang sangat spesifik pada wisata budaya dan sejarah. Mengingat kelompok peminat selaku pasar sasaran sangat terbatas, maka prioritas pengembangan yang harus dilakukan adalah pengembangan sarana aktivitas wisata di sekitar daya tarik yang telah ada dengan mengandalkan panorama alam serta keunikan budaya dan pola hidup masyarakat setempat yang masih ada dan terus berkembang dalam masyarakat berupa pengembangan wisata agro.

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KPPD ZONA TIMUR



Daya Tarik Wisata Makam Kuno Datu Lompulle, Kompleks Makam Pakka SaloE, Makam Petta Sara'E, Makam Sullewatang Kebo dan Petta Karama, Museum Calio, Situs Kecce, Situs Marale, Situs Paroto, Kompleks Makam Datu Salaonro, Makam Arung Baringeng, Makam AbbanuangE, Situs Megalitik Samoling, Situs Paleolitik Jampu

Tema Pengembangan Wisata Budaya, Wisata Sejarah, dan Wisata Minat Khusus

Komponen Pengembangan	Jabaran
Atraksi Wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan DTW Sejarah dan Budaya 2. Pengembangan DTW Minat Khusus
Fasilitas Wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan usaha kreatif cinderamata. 2. Pengembangan Desa Wisata 3. Pengembangan Museum Calio 4. Pengembangan fasilitas wisata pada kawasan Situs Sejarah dan Budaya.
Aksesibilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan jalur dan moda transportasi ke Daya Tarik Wisata yang lain
Manajemen Tata Ruang	<p>Pembagian zona terhadap Daya Tarik Wisata.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zona inti adalah daerah dimana objek itu berada dan sekaligus sebagai zona konservasi. 2. Pengembangan fasilitas tambahan diluar dari zona inti.

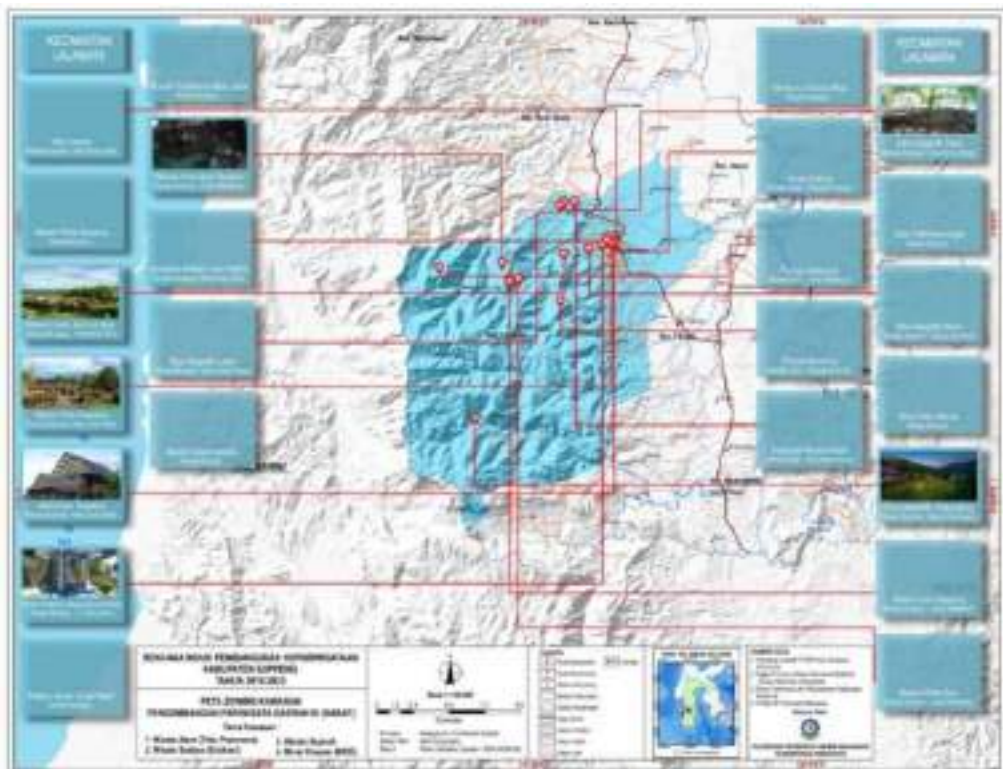
10.1.3 Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Barat

Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Barat merupakan kawasan pariwisata kabupaten Soppeng yang hanya meliputi kecamatan Lalabata sekaligus sebagai ibukota kabupaten Soppeng. Karakteristik wilayah di kecamatan Lalabata didominasi oleh daerah dengan ketinggian 25 mdpl pada beberapa bagian di dataran rendah sampai dengan 1.500 mdpl di daerah dataran tinggi.

Kondisi geografis wilayah pada kawasan pengembangan pariwisata yang sangat variatif ini mempengaruhi jenis daya tarik dan atraksi wisata yang dimiliki yang sangat beragam terdiri dari daya tarik wisata alam berupa air terjun, permandian, dan panorama puncak bukit. Daya tarik wisata budaya berupa pesta adat dan makam, rumah adat, dan tinggalan sejarah masa lampau serta berbagai daya tarik minat khusus seperti wisata MICE dan kuliner.

Sebagai wilayah dengan potensi pariwisata yang sangat beragam, dan fasilitas pariwisata yang paling lengkap serta aksesibilitas yang menghubungkan kabupaten Soppeng dengan berbagai wilayah kabupaten lainnya, maka potensi kawasan pengembangan pariwisata daerah pada zona ini menjadi sangat besar dibandingkan dengan kawasan lain di kabupaten Soppeng.

Gambar 10.4
Peta KPPD Zona Barat



Sumber : Data Olahan, 2018

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KPPD ZONA BARAT



Daya Tarik Wisata

Kawasan Mattabulu, Puncak Biccuing, Air Terjun Lamelle TeppoE, Puncak Sewo, Villa Yuliana (Bola MaccacaE), Kawasan makam Kuno Jera LompoE, Kompleks Istana Datu Soppeng, Makam Syekh Abdul Majid (Tuang Uddunge), Makam Petta Bulu Matanre, Situs Megalitik Lawo, Situs Megalitik Tinco, Situs Megalitik Sewo, Situs Megalitik Umpungeng, Makam Petta Seppang, Kompleks Makam Datu Soppeng, Gereja Khatolik Patung Bunda Maria, Rumah Tradisional Batu Laiya, Kompleks makam Jera CaddiE, Menhir Latemmamala (LamumpatuE), Situs Petta BanuangÉ, Situs Petta Wanua, Makam Lato Gapping, Makam Petta Awo, Menhir La Temma Pole, Kawasan wisata Ompo, dan Kawasan Populasi Kelelawar (Taman Kalong)

Tema Pengembangan

Wisata Alam, Wisata Sejarah dan Budaya, MICE, serta Wisata minat khusus Kuliner

Komponen Pengembangan

Jabaran

Atraksi Wisata

1. Pengembangan DTW Alam
2. Pengembangan DTW Sejarah dan Budaya
3. Pengembangan DTW Minat Khusus MICE dan Kuliner

Fasilitas Wisata

1. Penataan kawasan dan pengembangan fasilitas wisata di Kawasan Taman Kalong
2. Penataan kawasan dan pengembangan fasilitas wisata di Kawasan Puncak Biccuing, Mattabulu dan Sewo.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengembangan fasilitas olah raga dan rekreasi wisata petualangan dan <i>camping</i> 4. Pengembangan fasilitas minat khusus photography 5. Pengembangan resort area dan hotel. 6. Pengembangan pasar wisata milenial 7. Pengembangan fasilitas wisata persawahan (<i>rice field tracking and riding</i>) 8. Pengembangan fasilitas Restoran dan Kuliner tradisional 9. Pengembangan event pariwisata 10. Pengembangan fasilitas pembuatan dan penjualan cinderamata 11. Pengembangan Sistem Informasi, Guiding, Interpretasi, serta <i>Tourist Information Centre</i>
Aksesibilitas	Pengembangan jalur dan moda transportasi ke Daya Tarik Wisata yang lain yang berada di Soppeng
Manajemen Tata Ruang	<p>Pembagian zona terhadap Daya Tarik Wisata.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zona inti adalah daerah dimana objek berada dan sekaligus sebagai zona konservasi. 2. Pengembangan fasilitas tambahan diluar dari zona inti.

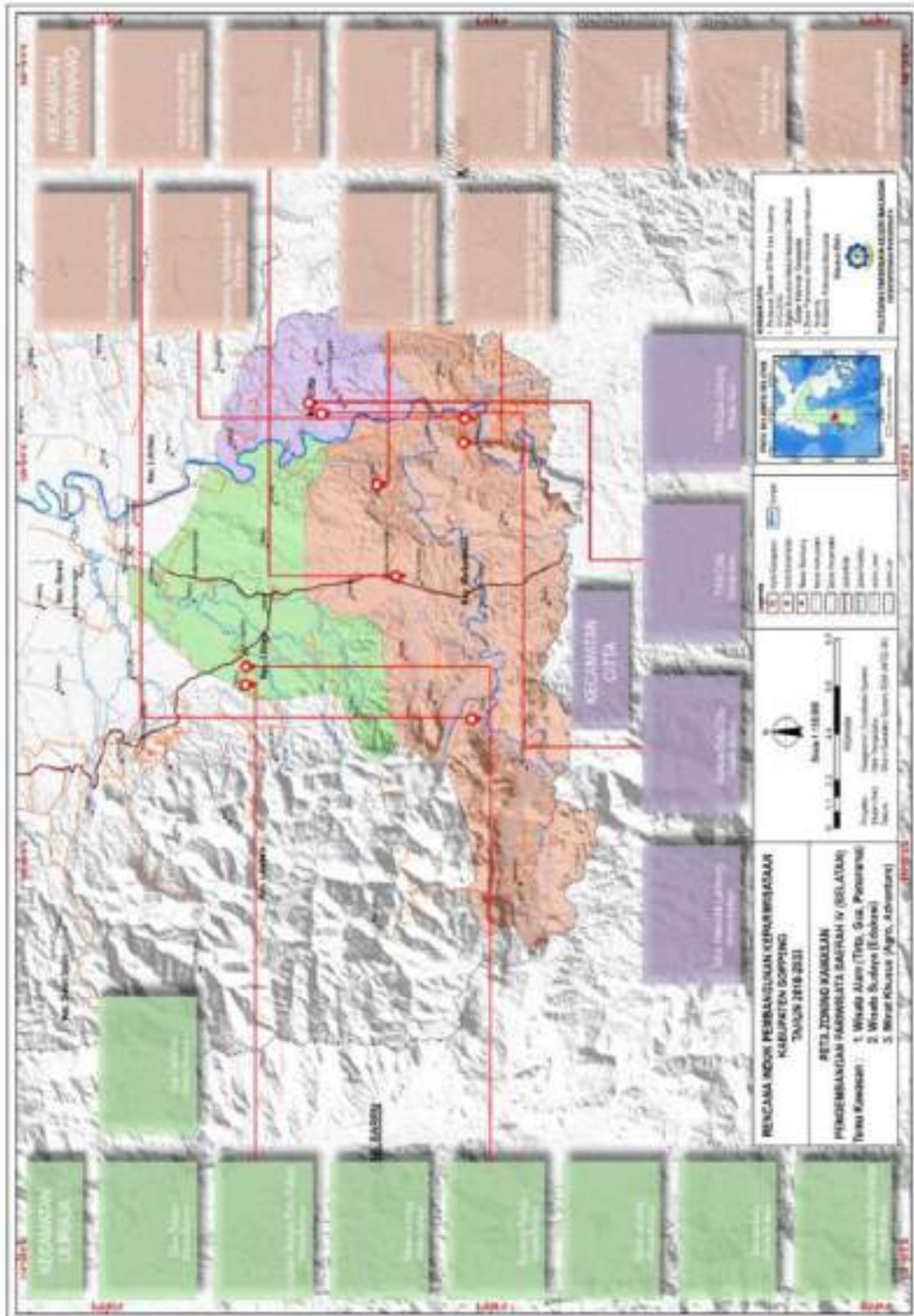
10.1.4 Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Selatan

Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Selatan merupakan kawasan pariwisata kabupaten Soppeng yang meliputi kecamatan Marioriwawo, kecamatan Citta dan kecamatan Liliriaja. Karakteristik wilayah dari ketiga kecamatan pada zona ini yang didominasi oleh daerah dengan ketinggian 20 mdpl pada kawasan dataran rendah sampai dengan 1.400 mdpl di daerah daratan tinggi di kecamatan Marioriwawo.

Kondisi geografis wilayah pada kawasan pengembangan pariwisata ini mempengaruhi jenis daya tarik dan atraksi wisata yang dimiliki yang terdiri dari daya tarik wisata alam berupa air terjun, permandian, *adventure park* dan panorama. Daya tarik wisata sejarah dan budaya berupa makam, rumah adat, dan ritual budaya, serta berbagai potensi ekonomi masyarakat sebagai daya tarik minat khusus wisata agro kabupaten Soppeng.

Sebagai wilayah kecamatan yang berbatasan dengan akses utama kota Makassar melalui Buludua kabupaten Barru, maka kawasan pengembangan pariwisata daerah ini membutuhkan infrastruktur aksesibilitas serta fasilitas pariwisata yang lebih baik sehingga menarik minat wisatawan untuk singgah dan berkunjung ke kabupaten Soppeng.

Gambar 10.5
Peta KPPD Zona Selatan



Sumber : Data Olahan, 2018

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KPPD ZONA SELATAN



Daya Tarik Wisata

Kawasan TWA Citta, Kawasan TWA Goa Coddong, Air Terjun Laposu, Situs Talepu, Situs Lonrong, Situs Lenrang, Kompleks Makam AbbanuangE, Kompleks Makam Datu Pattojo, Benteng Pattojo, Saoraja Seng, Gua Lakaroci, Gua Coddong, Situs Paleolitik Lakibong, Makam Datu Citta, Makam KalokoE Watu, Makam Lato Garimpang, Situs GoariE, Situs Megalitik Madendra, Sumur Tua TettikengraraE, Makam Arung Sekkang, Rumah Arrajang, Kawasan Wisata Agro Mariorilau dan Gattareng, Kawasan TWA Lereng Hijau Bulu Dua, dan Kawasan *Adventure Park* Gattareng Toa

Tema Pengembangan

Pengembangan Wisata Alam, Minat Khusus wisata agro dan *adventure*, Wisata Sejarah dan Budaya

Komponen Pengembangan

Jabaran

Atraksi Wisata

1. Pengembangan DTW Alam
2. Pengembangan DTW Sejarah dan Budaya
3. Pengembangan DTW Minat Khusus Agrowisata dan Wisata Petualangan

Fasilitas Wisata

1. Pengembangan fasilitas makan minum dan fasilitas penunjang di kawasan Agrowisata dan Wisata *Adventure*.
2. Pengembangan fasilitas rekreasi wisata terintegrasi di kawasan wisata Lereng Hijau Buludua
3. Pengembangan fasilitas rekreasi wisata terintegrasi di kawasan wisata Citta
4. Pengembangan *Homestay* dan sarana akomodasi lainnya

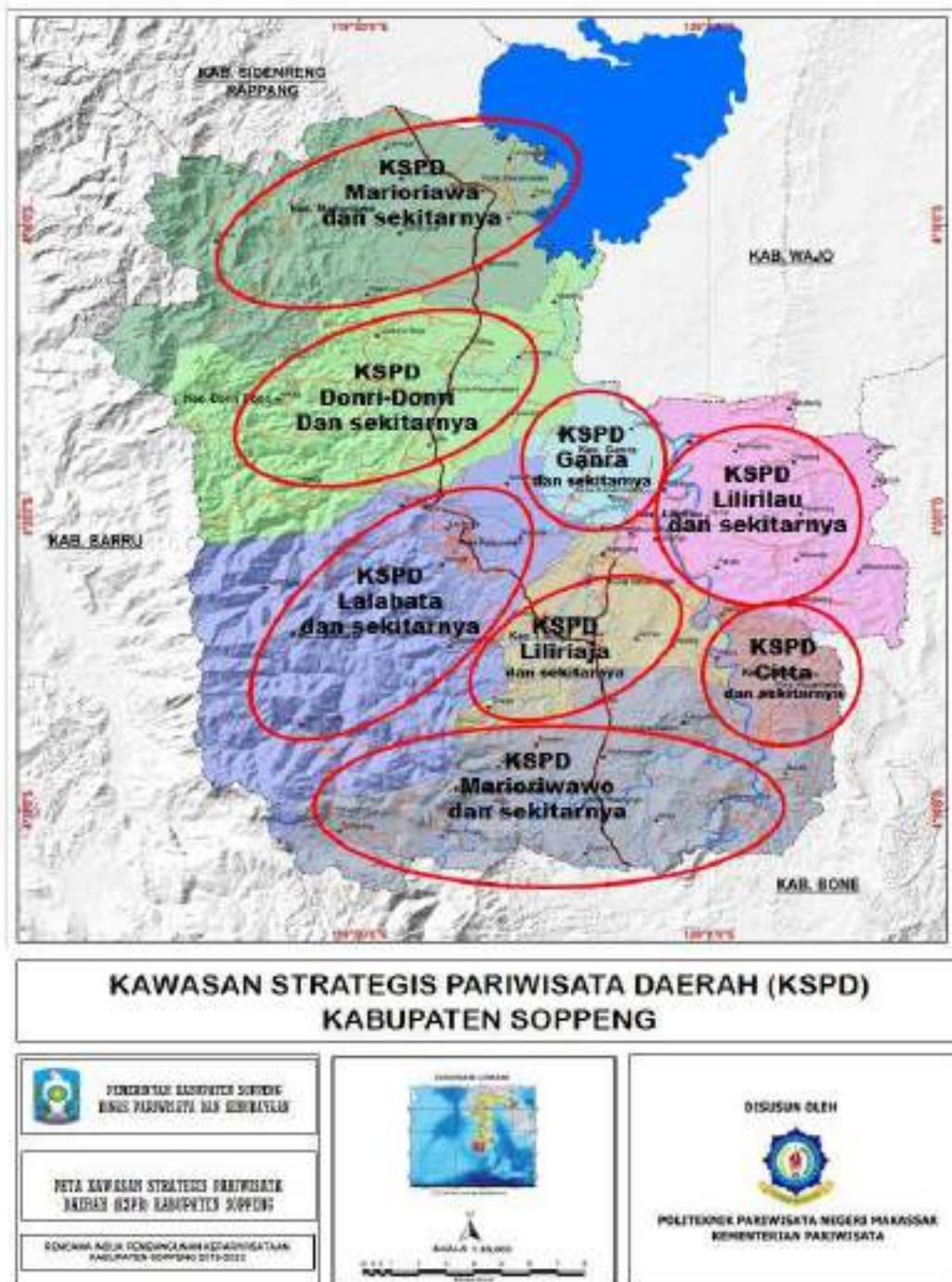
	<ol style="list-style-type: none">5. Pengembangan Sistem Informasi, Guiding, Interpretasi, serta <i>Tourist Information Centre</i>.6. Pengembangan <i>Rest Area</i>7. Pengembangan fasilitas ATM8. Pengembangan sentra penjualan cinderamata
Aksesibilitas	Pengembangan jalur dan moda transportasi ke Daya Tarik Wisata yang lain yang berada di dalam kawasan dan antar kawasan.
Manajemen Tata Ruang	Pembagian zona terhadap Daya Tarik Wisata. <ol style="list-style-type: none">1. Zona inti adalah daerah dimana objek berada dan sekaligus sebagai zona konservasi.2. Pengembangan fasilitas tambahan diluar dari zona inti.

10.3 Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kabupaten Soppeng ditentukan dengan potensi dan kriteria spesifik sebagai berikut:

- a. Memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. Memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c. Memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya nasional;
- d. Memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. Memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan keperbukalaan;
- h. Memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. Memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. Berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah, provinsi dan/ atau nasional; dan
- k. Memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Gambar 10.6
Peta Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)
Kabupaten Soppeng



Sumber : Data Olahan, 2018

Rencana pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kabupaten Soppeng juga dibagi berdasarkan kelompok wilayah administrative dan karakter paket wisata dengan pertimbangan arah perjalanan wisata yang efektif dan efisien dengan tetap menikmati beberapa jenis daya tarik wisata dalam tiap paket perwilayahan yang dikembangkan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi aksesibilitas dan karakter budaya yang ada di kabupaten Soppeng.

Berdasarkan pengertian, kriteria dan pertimbangan-pertimbangan karakter wilayah tersebut, maka Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kabupaten Soppeng meliputi:

a. KSPD Marioriawa dan Sekitarnya

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Marioriawa dan sekitarnya merupakan kawasan strategis dengan tema unggulan aktivitas dan atraksi wisata yang sangat variatif dari sisi sebaran wilayah maupun jenis atraksi dan aktivitas berbasis danau, air terjun, permandian air pana alami, dan pesona panorama dataran tinggi dengan variasi wisata sejarah dan budaya.

Daya tarik utama dari kawasan ini adalah Kawasan Taman Wisata Alam Lejja, Kawasan Taman Wisata Alam Danau Tempe, Air Terjun Batumurue- Datae, Air Terjun Sarasa Tanre – Gellenge, dan Air Terjun Lapasarengi - Datae. Diantara perjalanan wisata tersebut terdapat potensi wisata sejarah dan budaya berupa makam, rumah adat, artefak dan tinggalan sejarah lainnya yaitu Makam Datu Mario, Kompleks Makam Petta Jangko, Kompleks Sao Mario, Situs Tampaning, Makam Kuno Padali, dan Makam Petta Kajuara.

Kondisi potensi wisata pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Marioriawandan Sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10.1
Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata
KSPD Marioriawa dan Sekitarnya

No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual
DTW Alam			
1	Kawasan TWA Lejja	1. Permandian air panas 2. Panorama alam 3. Hutan lindung	Potensial
2	Kawasan TWA Danau Tempe	1. Danau 2. Pemukiman terapung	Potensial
3	Air Terjun Batumurue- Datae	1. Air terjun 2. Panorama alam	Potensial
4	Air Terjun Sarasa Tanre - Gellenge	1. Air terjun 2. Panorama alam	Potensial
5	Air Terjun Lapasarengi – Datae	1. Air terjun 2. Panorama alam	Potensial
DTW Sejarah dan Budaya			
6	Makam Datu Mario	Makam sejarah	Baik
7	Kompleks Makam Petta Jangko	Makam sejarah	Baik
8	Kompleks Sao Mario	Rumah adat	Potensial

9	Situs Tampaning	Benda cagar budaya	Kurang
10	Makam Kuno Padali	Makam sejarah	Kurang
11	Makam Petta Kajuara	Makam sejarah	Kurang

Sumber : Data Olahan, 2018

Kondisi aktual Daya Tarik Wisata di KSPD Marioriawa dan sekitarnya bervariasi, dari 11 daya tarik dan atraksi wisata yang ada, terdapat 6 buah daya tarik termasuk “Potensial” untuk dikembangkan, 3 buah daya tarik termasuk “kurang”, dan 2 buah daya tarik termasuk dalam kategori “Baik”.

b. KSPD Donri-Donri dan Sekitarnya

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Donri-Donri dan sekitarnya merupakan kawasan strategis dengan tema unggulan aktivitas dan atraksi wisata berbasis wisata minat khusus persuteraan alam, sejarah dan budaya dengan variasi wisata alam air terjun dan sungai mata air asin dan sumber garam masyarakat.

Daya tarik utama dari kawasan ini adalah kawasan persuteraan alam berupa budidaya pohon murbei, pemeliharaan ulat sutera, pemintalan benang sutera, hingga pembuatan sarung dan kerajinan sutera secara tradisional. Kabupaten Soppeng merupakan daerah yang sangat dikenal di Provinsi Sulawesi Selatan dengan produk dan kerajinan sutera yang hingga saat ini masih terus dikembangkan oleh masyarakat di kecamatan Donri-Donri. Daya tarik lain dari kawasan ini adalah serta tinggalan budaya berupa situs dan makam sejarah sebagai variasi aktivitas wisata yang ditawarkan.

Kondisi potensi wisata pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Donri-Donri dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10.2
Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata
KSPD Donri-Donri dan Sekitarnya

No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual
DTW Alam			
1	AppejengÉ	1. Sumber mata air asin 2. Panorama alam	Baik
2	Air Terjun Luppereng Kajoe	1. Air terjun 2. Panorama alam	Potensial
3	Bulu BottingngE	Panorama	Kurang
DTW Sejarah dan Budaya			
4	Makam Petta Sering	Makam sejarah	Kurang

5	Situs Tomanurung Sanyili	Benda cagar budaya	Kurang
6	Makam Petta AbbaraningngE	Makam sejarah	Kurang
7	Makam Petta BalubuE	Makam sejarah	Kurang
8	Makam Petta AddagangE	Makam sejarah	Kurang
DTW Minat Khusus			
9	Kawasan Pesuteraan Alam	1. Budidaya murbei 2. Budidaya ulat sutra 3. Pemintalan benang	Potensial

Sumber : Data Olahan, 2018

Kondisi aktual Daya Tarik dan Atraksi Wisata di Kawasan Strategis Pariwisata Donri-Donri dan sekitarnya cukup bervariasi, dari 9 buah Daya Tarik dan Atraksi Wisata yang ada, terdapat 2 buah Daya Tarik Wisata dan atraksi diantaranya termasuk “Potensial”, 1 buah Daya Tarik dan Atraksi Wisata termasuk “Baik” dan 6 buah Daya Tarik dan Atraksi Wisata termasuk “Kurang”.

c. KSPD Lilirilau dan Sekitarnya

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Lilirilau dan sekitarnya merupakan kawasan strategis dengan tema unggulan aktivitas dan atraksi wisata edukasi berbasis sejarah dan budaya dengan variasi sawah dan kebun masyarakat.

Daya tarik utama dari kawasan ini adalah potensi wisata budaya berupa situs, artefak dan tinggalan sejarah dan budaya lainnya yaitu Museum Calio, Situs Kecce, Situs Marale, Situs Paroto, Kompleks Makam Datu Salaonro, Makam Arung Baringeng, Makam AbbanuangE, Situs Megalitik Samoling , dan Situs Paleolitik Jampu.

Ketersediaan potensi daya tarik yang monoton pada atraksi dan aktivitas wisata sejarah dan budaya dengan pasar wisatawan yang sangat spesifik dan terbatas, maka dibutuhkan upaya terstruktur dan terencana dalam mengembangkan kawasan ini dengan mengintegrasikan potensi dasar dengan potensi kehidupan masyarakat seperti pemanfaatan kawasan persawahan untuk dijadikan areal bersepeda di pematang sawah (*bike riding*), wisata agro pada perkebunan dan pengolahan tembakau masyarakat yang sangat terkenal di provinsi Sulawesi Selatan yaitu di Cabbenge.

Kondisi potensi wisata pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Binamu dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10.3
Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata
KSPD Liliirilau dan Sekitarnya

No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual
DTW Sejarah dan Budaya			
1	Museum Calio	Benda cagar budaya	Potensial
2	Situs Kecce	Benda cagar budaya	Kurang
3	Situs Marale	Benda cagar budaya	Kurang
4	Situs Paroto	Benda cagar budaya	Kurang
5	Kompleks Makam Datu Salaonro	Makam sejarah	Kurang
6	Makam Arung Baringeng	Makam sejarah	Kurang
7	Makam AbbanuangE	Makam sejarah	Kurang
8	Situs Megalitik Samoling	Benda cagar budaya	Kurang
9	Situs Paleolitik Jampu	Benda cagar budaya	Kurang
DTW Minat Khusus			
10	Perkebunan Tembakau	1. Kebun Tembakau 2. Pengolahan Tembakau	Potensial
11	Areal Persawahan	1. Bike Riding	Baik

Sumber : Hasil Olahan, 2018

Kondisi aktual Daya Tarik dan Atraksi Wisata di Kawasan Strategis Pariwisata Liliirilau dan sekitarnya cukup bervariasi, dari 11 buah Daya Tarik dan Atraksi Wisata yang ada terdapat 2 buah Daya Tarik Wisata dan atraksi diantaranya termasuk “Potensial”, 1 buah Daya Tarik dan Atraksi Wisata termasuk “Baik” dan 8 buah Daya Tarik dan Atraksi Wisata termasuk “Kurang”.

d. KSPD Ganra dan Sekitarnya

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Ganra dan sekitarnya merupakan kawasan strategis dengan tema unggulan aktivitas dan atraksi wisata edukasi berbasis sejarah. Daya tarik utama dari kawasan ini adalah Makam Kuno Datu Lompulle, Kompleks Makam Pakka SaloE, Makam Petta Sara'E, Makam Sullewatang Kebo dan Makam Petta Karame.

Ketersediaan potensi daya tarik yang sangat terbatas dan monoton pada atraksi dan aktivitas wisata sejarah berupa makam yang hanya memiliki pasar wisatawan yang sangat spesifik dan

terbatas, maka dibutuhkan upaya terstruktur dan terencana dalam mengembangkan kawasan ini dengan mengintegrasikan potensi dasar dengan potensi kehidupan masyarakat seperti pemanfaatan kawasan persawahan untuk dijadikan areal bersepeda di pematang sawah (*bike riding*), wisata agro pada perkebunan dan pengolahan kakao masyarakat yang luas areal perkebunannya cukup memadai di kawasan ini.

Selain itu, integrasi aktivitas wisata dengan kawasan yang memiliki daya tarik di sekitar batas wilayah seperti kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Liliriaja, dan Kecamatan Lilirialau perlu untuk dilaksanakan, termasuk didalamnya pemanfaatan potensi aliran sungai Walanae dan Sungai Lawo yang sangat potensial.

Kondisi potensi wisata pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Ganra dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10.4
Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata
KSPD Ganra dan Sekitarnya

No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual
DTW Sejarah dan Budaya			
1	Makam Kuno Datu Lompulle	Makam sejarah	Kurang
2	Kompleks Makam Pakka SaloE	Makam sejarah	Kurang
3	Makam Petta Sara'E	Makam sejarah	Kurang
4	Makam Sullewatang Kebo dan Petta Karame	Makam sejarah	Kurang
DTW Minat Khusus			
5	Areal Persawahan	1. <i>Bike Riding</i> 2. <i>Out bound</i> 3. Kuliner Tradisional	Kurang
6	Perkebunan Kakao	1. Agro wisata	Potensial
7	Aliran Sungai Lawo dan Walanae	3. <i>River Tubing</i>	Kurang

Sumber : Hasil Olahan, 2018

Kondisi aktual Daya Tarik dan Atraksi Wisata di Kawasan Strategis Pariwisata Ganra dan sekitarnya bervariasi, dari 7 buah Daya Tarik dan Atraksi Wisata yang ada terdapat 1 buah Daya Tarik Wisata dan atraksi diantaranya termasuk “Potensial”, dan sisanya sebanyak 6 buah Daya Tarik dan Atraksi Wisata termasuk “Kurang”.

e. **KSPD Lalabata dan Sekitarnya**

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Lalabata dan sekitarnya merupakan kawasan strategis dengan tema unggulan aktivitas dan atraksi wisata ekologi terintegrasi antara keindahan alam berupa air terjun, gunung, sungai dan hutan dengan wisata buatan berupa kolam permandian, sawah, perkebunan, wisata sejarah dan budaya serta wisata minat khusus.

Sebagai wilayah kecamatan yang sekaligus ibukota kabupaten Soppeng, maka kawasan strategis ini selain memiliki daya tarik yang sangat beragam juga memiliki kelengkapan sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang paling lengkap dan memadai di kabupaten Soppeng.

Daya tarik utama dari kawasan ini adalah daya tarik wisata alam, yaitu Kawasan Matabulu, Puncak Biccuing, Air Terjun Lamelle TeppoE, Puncak Sewo. Daya tarik wisata sejarah dan budaya, yaitu Villa Yuliana (Bola MaccacaE), Kawasan makam Kuno Jera LompoE, Kompleks Istana Datu Soppeng, Makam Syekh Abdul Majid (Tuang Uddunge), Makam Petta Bulu Matanre, Situs Megalitik Lawo, Situs Megalitik Tinco, Situs Megalitik Sewo, Situs Megalitik Umpungeng, Makam Petta Seppang, Kompleks Makam Datu Soppeng, Gereja Khatolik Patung Bunda Maria, Rumah Tradisional Batu Laiya, Kompleks makam Jera CaddiE, Menhir Latemmamala (LamumpatuE), Situs Petta BanuangÉ, Situs Petta Wanua,, Makam Lato Gapping, Makam Petta Awo, dan Menhir La Temma Pole. Daya tarik wisata buatan yaitu Kawasan wisata Ompo, dan Kawasan Populasi Kelelawar (Taman Kalong).

Kondisi potensi wisata pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Lalabata dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10.5
Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata
KSPD Lalabata dan Sekitarnya

No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual
DTW Alam			
1	Kawasan Matabulu	Panorama alam	Potensial
2	Puncak Biccuing	Panorama alam	Potensial
3	Air Terjun Lamelle TeppoE	3. Air terjun 4. Panorama alam	Potensial
4	Puncak Sewo	2. Panorama	Potensial
DTW Sejarah dan Budaya			
5	Villa Yuliana (Bola MaccacaE)	Villa peninggalan Belanda	Potensial
6	Kawasan makam Kuno Jera LompoE	Makam Raja-raja Soppeng	Potensial
7	Kompleks Istana Datu Soppeng	4. Rumah adat <i>Bola Ridie</i> 5. Atribut Kerajaan 6. Istana/ Salassae Datu Soppeng	Baik

No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual
8	Makam Syekh Abdul Majid (Tuang Uddunge)	Makam penyebar Agama Islam	Baik
9	Makam Petta Bulu Matanre	Makam sejarah	Kurang
10	Situs Megalitik Lawo	Benda cagar budaya	Kurang
11	Situs Megalitik Tinco	Benda cagar budaya	Kurang
12	Situs Megalitik Sewo	Benda cagar budaya	Kurang
13	Situs Megalitik Umpungeng	Pusat/ Titik tengah Indonesia	Baik
14	Makam Petta Seppang	Makam sejarah	Kurang
15	Kompleks Makam Datu Soppeng	Makam sejarah	Baik
16	Gereja Khatolik	Patung/ Pieta Bunda Maria	Potensial
17	Rumah Tradisional Batu Laiya	Rumah tradisional	Kurang
18	Kompleks makam Jera CaddiE	Makam sejarah	Kurang
19	Menhir Latemmamala	Benda cagar budaya	Baik
20	Situs Petta BanuangÉ	Benda cagar budaya	Kurang
21	Situs Petta Wanua	Benda cagar budaya	Kurang
22	Makam Lato Gapping	Makam sejarah	Baik
23	Makam Petta Awo	Makam sejarah	Kurang
24	Menhir La Temma Pole	Benda cagar budaya	Kurang
DTW Buatan Manuasia (Man Made)			
25	Kawasan wisata Ompo	Kolam renang dan memancing	Potensial
26	Taman Kalong	Populasi Kalelawar	Potensial

Sumber : Hasil Olahan, 2018

Kondisi aktual Daya Tarik dan Atraksi Wisata di Kawasan Strategis Pariwisata Lalabata dan sekitarnya cukup bervariasi, dari 26 buah Daya Tarik dan Atraksi Wisata yang ada terdapat 9 buah Daya Tarik Wisata dan atraksi diantaranya termasuk “Potensial”, 6 buah Daya Tarik dan Atraksi Wisata termasuk “Baik” dan 11 buah Daya Tarik dan Atraksi Wisata termasuk “Kurang”.

f. **KSPD Marioriwawo dan Sekitarnya**

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Marioriwawo dan sekitarnya merupakan kawasan strategis dengan tema unggulan aktivitas dan atraksi wisata ekologi terintegrasi antara keindahan alam berupa air terjun, gunung, sungai dan hutan dengan wisata buatan berupa kolam permandian, sawah, perkebunan, wisata sejarah dan budaya serta wisata minat khusus.

Daya tarik utama dari kawasan ini adalah daya tarik wisata alam, yaitu Air Terjun Laposo dan Kawasan *Adventure Park* Gattareng Toa. Daya tarik wisata sejarah dan budaya, yaitu Makam KalokoE Watu, Makam Lato Garimpang, Situs GoariE, Situs Megalitik Madenra, Sumur Tua TettikenraraE, Makam Arung Sekkang, dan Rumah Arrajang. Daya tarik wisata buatan yaitu Kawasan Wisata Agro desa Mariorilau, Kawasan Wisata Agro desa Gattareng, dan Kawasan TWA Lereng Hijau Bulu Dua.

Mengingat letak strategis kawasan ini sbagai salah satu gerbang utama aksesibilitas dari dan ke kabupaten Soppeng – kota Makassar melalui Buludua dan kabupaten Barru, maka keunggulan likasi strategis dan keindahan alam menjadi sebuah kolaborasi yang sangat apik terhadap kualitas kawasan Marioriwawo. Untuk itu perlu dikembangkan perencanaan yang lebih baik bagi kawasan ini sebagai area persinggahan (*rest area*) sekaligus sebagai kawasan pelaksanaan wisata minat khusus MICE, *adventure*, *out bound* dan rekreasi keluarga.

Kondisi potensi wisata pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Marioriwawo dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10.6
Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata
KSPD Marioriwawo dan Sekitarnya

No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual
DTW Alam			
1	Air Terjun Laposo	3. Air terjun 4. Panorama alam	Potensial
2	Kawasan Adventure Park Gattareng Toa	Panorama alam	Potensial
DTW Sejarah dan Budaya			
3	Makam KalokoE Watu	Makam sejarah	Baik
4	Makam Lato Garimpang	Makam sejarah	Kurang
5	Situs GoariE	Benda cagar budaya	Kurang
6	Situs Megalitik Madenra	Benda cagar budaya	Kurang
7	Sumur Tua	Sumur tua	Kurang

	TettikenraraE		
8	Makam Arung Sekkang	Makam sejarah	Kurang
9	Rumah Arrajang	Rudah adat	Kurang
DTW Buatan Manuasia (Man Made)			
10	Kawasan Wisata Agro	Panorama alam, sayuran dan buah-buahan	Baik
11	Kawasan Wisata Agro	Panorama alam, sayuran dan buah-buahan	Baik
12	Kawasan TWA Lereng Hijau Bulu Dua	3. Panorama alam 4. Permandian	Potensial

Sumber : Hasil Olahan, 2018

Kondisi aktual Daya Tarik dan Atraksi Wisata di Kawasan Strategis Pariwisata Marioriwawo dan sekitarnya cukup bervariasi, dari 12 buah Daya Tarik dan Atraksi Wisata yang ada terdapat 3 buah Daya Tarik Wisata dan atraksi diantaranya termasuk “Potensial”, 3 buah Daya Tarik dan Atraksi Wisata termasuk “Baik” dan 6 buah Daya Tarik dan Atraksi Wisata termasuk “Kurang”.

g. KSPD Citta dan Sekitarnya

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Citta dan sekitarnya merupakan kawasan strategis dengan tema unggulan aktivitas dan atraksi wisata tirta, wisata sejarah dan budaya serta wisata minat khusus goa.

Daya tarik utama dari kawasan ini adalah kawasan Taman Wisata Alam Citta dan Goa Coddong, serta daya tarik wisata sejarah dan budaya, yaitu Situs Paleolitik Lakibong dan makam Datu Citta.

Kawasan strategis wisata ini merupakan salah satu daya tarik yang telah sejak lama dikenal di Sulawesi Selatan yang sangat melekat dengan kabupaten Soppeng sebagai primadona wisata tirta dengan sumber air alami. Mengingat keterbatas jumlah dan jenis daya tarik wisata yang tersedia, maka dalam rencana pengembangan kawasan ini diharapkan dengan mengintegrasikan potensi alam yang ada yaitu persawahan dan perkebunan kakao, kelapa dan kemiri yang setiap tahun mengalami pertumbuhan cukup signifikan sehingga potensial dalam wisata agro.

Kondisi potensi wisata pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Citta dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10.7
Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata
KSPD Citta dan Sekitarnya

No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual
DTW Alam			
1	Kawasan TWA Citta	4. Permandian alam 5. Panorama alam	Potensial
2	Kawasan TWA Goa Coddong	3. Goa puba 4. Panorama Alam	Potensial
DTW Sejarah dan Budaya			
3	Situs Paleolitik Lakibong	Benda cagar budaya	Kurang
4	Makam Datu Citta	Makam sejarah	Baik

Sumber : Hasil Olahan, 2018

Kondisi aktual Daya Tarik dan Atraksi Wisata di Kawasan Strategis Pariwisata Citta dan sekitarnya bervariasi, dari 4 buah Daya Tarik dan Atraksi Wisata yang ada terdapat 2 buah Daya Tarik Wisata dan atraksi diantaranya termasuk “Potensial”, 1 buah Daya Tarik dan Atraksi Wisata termasuk “Baik” dan 1 buah Daya Tarik dan Atraksi Wisata termasuk “Kurang”.

h. KSPD Liriaja dan Sekitarnya

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Liriaja dan sekitarnya merupakan kawasan strategis dengan tema unggulan aktivitas dan atraksi wisata alam dan wisata sejarah dan budaya.

Daya tarik utama dari kawasan ini adalah Situs Talepu, Situs Lonrong, Situs Lenrang, Kompleks Makam AbbanuangE, Kompleks Makam Datu Pattojo, Benteng Pattojo, Saoraja Seng, dan Gua Lakaroci.

Keterbatasan jenis dan jumlah daya tarik wisata yang sangat monoton pada kawasan ini, maka dalam perencanaan pengembangannya harus diintegrasikan dengan pengembangan daya tarik wisata baru berbasis alam dan minat khusus yang disesuaikan dengan potensi alam dan budaya masyarakat yaitu pemanfaat areal persawahan dan perkebunan masyarakat khususnya perkebunan kakao.

Kondisi potensi wisata pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Liriaja dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10.8
Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata
KSPD Liriaja dan Sekitarnya

No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual
DTW Alam			
1	Gua Lakaroci	Gua dan panorama alam	Kurang
DTW Sejarah dan Budaya			
2	Situs Talepu	Benda cagar budaya	Kurang
3	Situs Lonrong	Benda cagar budaya	Kurang
4	Situs Lenrang	Benda cagar budaya	Kurang
5	Kompleks Makam AbbanuangE	Makam sejarah	Kurang
6	Kompleks Makam Datu Pattojo	Makam sejarah	Kurang
7	Benteng Pattojo	Benda cagar budaya	Kurang
8	Saoraja Seng	Rumah tradisional	Kurang

Sumber : Hasil Olahan, 2018

Kondisi aktual Daya Tarik dan Atraksi Wisata di Kawasan Strategis Pariwisata Liriaja dan sekitarnya menunjukkan bahwa, dari 8 buah Daya Tarik dan Atraksi Wisata yang ada secara keseluruhan termasuk “Kurang”.

BAB - 11

PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SOPPENG

Strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Soppeng mengacu pada konsep-konsep umum pengembangan pariwisata yaitu mengembangkan pariwisata Kabupaten Soppeng sebagai pariwisata dunia yang kuat, berenergi, tenteram, ekologis, dinamis, sehat, terkendali dan diperuntukkan bagi rakyat. Berlandaskan pada konsep pengembangan tersebut, maka strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Soppeng diarahkan pada konsep pengembangan dalam aspek tata ruang, pengembangan produk, pengembangan industri dan investasi, pengembangan pasar dan pemasaran, pengelolaan lingkungan, serta pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan.

11.1 Arah dan Strategi Dalam Pengwilayahan Destinasi

Arah kebijakan pengwilayahan destinasi pariwisata di Kabupaten Soppeng yang baik untuk diterapkan sesuai dengan konsep pengembangan umum pariwisata adalah kebijakan sistem ruang pariwisata yang terpadu yang merupakan sistem pengelompokan daya tarik dan atraksi wisata dengan tema khusus yang terdapat fungsi-fungsi penunjang lainnya.

Konsep strategi kepariwisataan secara spasial disusun dengan tujuan mengorganisasi daerah tujuan wisata agar terdistribusi secara terpadu dan saling mendukung satu sama lain. Dengan adanya daerah tujuan wisata yang terdistribusi secara terpadu akan menjadi pendorong untuk terwujudnya distribusi kunjungan wisatawan yang merata. Pembentukan ruang-ruang pariwisata yang bertema khusus dan berciri khas tertentu akan mendukung pengembangan karakter produk wisata. Ruang ini ditentukan melalui zonasi dengan konsep *boundaryless-tourism*.

Secara detail, pengembangan ruang atau kawasan pengembangan atau daerah tujuan wisata (DTW) dengan karakter produk tertentu tersebut memiliki tujuan :

- a. Untuk membuat delineasi produk wisata atau mengembangkan keragaman produk wisata dalam suatu wilayah pengembangan, sehingga dapat dikembangkan sejumlah kawasan pariwisata yang memiliki daya tarik atau karakter produk yang spesifik. Keragaman atau diversifikasi produk tersebut, dimaksudkan agar wilayah tersebut memiliki daya tarik yang beragam dan menarik pangsa pasar yang beragam pula. Daya tarik yang beragam akan memberi

- peluang pergerakan atau distribusi yang merata pada kawasan pengembangan pariwisata yang dikembangkan
- b. Pembentukan kawasan pengembangan pariwisata untuk mengorganisasikan sejumlah daerah tujuan wisata (DTW) dan daya tarik wisata dalam suatu keterkaitan hubungan yang saling mendukung diantara daerah tujuan wisata (DTW) yang berdekatan, sehingga kunjungan wisatawan pada salah satu daerah tujuan wisata (DTW) pada suatu kawasan pengembangan pariwisata akan dapat didistribusikan dan memberi nilai manfaat bagi daerah tujuan wisata (DTW) di sekitarnya
 - c. Pembentukan kluster pengembangan pariwisata yang menghimpun daerah tujuan wisata (DTW) yang berdekatan, memiliki kesamaan karakter, dan keterkaitan akses dan pencapaian dalam satu kawasan pengembangan juga dimaksudkan untuk membangunkan pola atau sistem layanan yang terpadu diantara daerah tujuan wisata yang saling dikaitkan tersebut.

Secara rinci strategi pengembangan pariwisata dalam aspek tata ruang dilakukan melalui pelaksanaan kebijakan dimana setiap arahan kebijakan tersebut memiliki strategi yang dapat dijadikan sebagai dasar program rencana pengembangan pariwisata Kabupaten Soppeng, diantaranya :

1. Mengembangkan pariwisata bertema khusus dan terpadu;
2. Pemeliharaan dari dampak negatif terhadap Destinasi Pariwisata Daerah (DPD), Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD), dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD).

11.1.1 Pengembangan Pariwisata Bertema Khusus Dan Terpadu

Strategi 1. Penetapan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD)

Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) merupakan landasan utama dalam pengembangan pariwisata daerah. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) kabupaten Soppeng ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten dan/ atau lintas kabupaten yang di dalamnya terdapat kawasan-Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD), diantaranya merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD);
- b. Memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara lokal, regional, nasional dan/ atau internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
- c. Memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. Memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan

- kepariwisataan; dan
- e. Memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

Berdasarkan kriteria tersebut dan sesuai dengan potensi alam, budaya dan sumberdaya pariwisata kabupaten Soppeng maka program yang akan dilaksanakan adalah penetapan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) sesuai dengan tema utama pengembangan, yaitu: DPD berbasis wisata alam, DPD berbasis wisata sejarah dan budaya, DPD berbasis wisata minat khusus dengan pusat pengembangan sebagai berikut :

- a. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) **Taman Wisata Alam (TWA) Lejja dan Sekitarnya**. Daya tarik utama DPD ini adalah wisata alam berbasis permandian air panas, panorama gunung dan hutan yang terletak di Desa Babbae Kecamatan Marioriawa. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD TWA Lejja adalah mandi dan berenang pada mata air panas alam, *photo spot*, tracking pada alam bebas berbasis ekologi, dan rekreasi wisata keluarga.
- b. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) **Danau Tempe dan Sekitarnya**. Daya tarik utama DPD ini adalah wisata alam berbasis danau dan panorama yang terletak di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD Danau Tempe adalah memancing dan rekreasi wisata keluarga, wisata perahu, wisata ekologi berbasis desa wisata dan kehidupan masyarakat.
- c. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) **Jera LompoE dan Sekitarnya**. Daya tarik utama DPD ini adalah wisata sejarah makam Raja-Raja yang terletak di kota Watansoppeng kecamatan Lalabata. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD Jera LompoE adalah wisata ziarah dan wisata edukasi berbasis sejarah dan arkeologi.
- d. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) **Museum Calio dan Sekitarnya**. Daya tarik utama DPD ini adalah wisata sejarah dan budaya situs dan tinggalan akkeologi yang terletak di kecamatan Lilirilau. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD Museum Calio adalah wisata wisata edukasi berbasis sejarah dan arkeologi.
- e. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) **Taman Wisata Alam (TWA) Citta dan Sekitarnya**. Daya tarik utama DPD ini adalah wisata alam tirta berbasis permandian air alam dan panorama yang terletak di kecamatan Citta. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD TWA Citta adalah mandi dan berenang pada mata air alami, *photo spot*, dan rekreasi wisata keluarga.
- f. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) **Lereng Hijau Bulu Dua dan Sekitarnya**. Daya tarik utama DPD ini adalah wisata buatan (*man-made*) rekreasi keluarga berbasis tirta dan panorama alam pegunungan yang terletak di Bulu Dua kecamatan Marioriwawo. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD Lereng Hijau Bulu Dua adalah mandi dan berenang pada mata kolam renang, *photo spot*, dan rekreasi wisata keluarga.

Strategi 2. Penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD)

Berdasarkan hasil analisis potensi daya Tarik wisata dan pendekatan zonasi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, maka program yang akan dilaksanakan adalah penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) kabupaten Soppeng sebagai berikut :

- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Utara, terdiri dari kecamatan Mariorawa dan kecamatan Donri-Donri;
- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Timur, terdiri dari kecamatan Ganra dan kecamatan Lilirilau;
- c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Barat, terdiri dari kecamatan Lalabata; dan
- d. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Selatan, terdiri dari kecamatan Liliraja, kecamatan Citta, dan kecamatan Mariorawo.

Selain penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD), program lain yang mendukung untuk dilaksanakan adalah penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) khususnya dalam mengantisipasi pertumbuhan daya tarik dan atraksi wisata baru yang ditemukan atau dikembangkan di kabupaten Soppeng sehingga arah pengembangan dan pengelolaannya tetap terintegrasi dengan Rencana Induk yang telah ditetapkan.

Strategi 3. Penentuan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) merupakan landasan bagi perumusan rencana lebih lanjut secara spasial. Perwilayahan ini merupakan salah satu metode yang ditujukan untuk menentukan batas-batas kesamaan produk ruang khususnya berkaitan dengan kepariwisataan (daya tarik wisata, pencapaian, dan fasilitas pendukung).

Secara spesifik, kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD) ini merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi pengembangan pariwisata dan menjadi prioritas dalam pengembangan kepariwisataan khususnya untuk pengembangan daerah tujuan wisata (DTW) atau destinasi. Mengingat pentingnya penentuan KSPD ini maka penentuannya didasarkan pada beberapa kondisi yang merujuk kepada tuntutan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan disesuaikan dengan konteks lokal Kabupaten Soppeng, yaitu :

1. Memiliki sumber daya pariwisata yang unik dan dapat diunggulkan baik untuk pasar nasional maupun internasional

2. Kedudukan dan sebaran daerah tujuan wisata (DTW) sebagai kawasan yang memiliki potensi sebagai penggerak pengembangan pariwisata guna pemerataan peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Soppeng
3. Sebaran aksesibilitas/ pencapaian pendukung yang merata antar daerah tujuan wisata (DTW)
4. Sebaran fasilitas pendukung wisata/fasilitas pelayanan antar daerah tujuan wisata (DTW)
5. Struktur ruang dan potensi daerah tujuan wisata yang dapat berfungsi sebagai pehubung antar daerah tujuan wisata (DTW) disekitarnya
6. Adanya kesamaan karakter antar daerah tujuan wisata (DTW)
7. Kawasan tersebut memiliki potensi pengembangan tren produk pariwisata ke depan
8. Kawasan tersebut telah memiliki kesiapan dan dukungan dari masyarakat untuk pengembangan pariwisata.
9. Kawasan tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan
10. Kawasan tersebut memiliki peran strategis dalam usaha pelestarian dan memanfaatkan asset budaya
11. Kawasan tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan keutuhan wilayah

Masing-masing KSPD memiliki karakter spesifik yang merupakan perpaduan antara unsur kesamaan tema, kedekatan jarak, kemudahan pencapaian, serta kedekatan terhadap pusat pelayanan wisata. Cakupan daerah tujuan wisata (DTW) yang tersebar di Kabupaten Soppeng.

Berdasarkan hasil analisis potensi daya tarik wisata dan pendekatan zonasi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, maka program yang akan dilaksanakan adalah penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kabupaten Soppeng sebagai berikut :

- a. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Marioriawa dan Sekitarnya;
- b. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Donri-Donri dan Sekitarnya;
- c. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Lirililau dan Sekitarnya;
- d. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Ganra dan Sekitarnya;
- e. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Lalabata dan Sekitarnya;
- f. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Liliriaja dan Sekitarnya;
- g. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Marioriwawo dan Sekitarnya; dan
- h. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Citta dan Sekitarnya.

Selain penetapan KSPD, pemerintah kabupaten Soppeng juga menetapkan program penyusunan pola perjalanan wisata (*travel pattern*) sehingga dapat menjadi pilihan yang menarik bagi wisatawan yang akan berkunjung ke kabupaten Soppeng dalam memilih jenis wisata yang akan dilakukan berdasarkan tema minat kunjungan atau wilayah KPPD yang akan dikunjungi sesuai dengan ketersediaan waktu kunjungan dan biaya yang dikeluarkan selama melakukan kunjungan ke kabupaten Soppeng.

Strategi 4. Penetapan Pusat Pelayanan Informasi Pariwisata Pada Setiap KPPD

Karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing KPPD disatukan oleh tema pengembangan yang mencerminkan jenis aktifitas pariwisata yang berlangsung didalamnya. Masing-masing KPPD didalamnya tersebar beberapa daya tarik dan atraksi wisata sehingga untuk mendukung aktivitas wisata didalamnya dibutuhkan fasilitas pelayanan pariwisata. Menentukan pusat pelayanan pariwisata erat kaitannya dengan fungsi KPPD sebagai prioritas pengembangan pariwisata. Dengan demikian jangkauan pelayanan yang dilakukan terhadap aktifitas wisata yang berlangsung dapat dengan mudah dicapai oleh wisatawan.

Pusat pelayanan informasi pariwisata secara spesifik merupakan cakupan wilayah yang dapat mendukung seluruh aktifitas wisatawan sehingga wisatawan dalam melakukan kegiatannya merasa nyaman, aman, terpenuhi segala kebutuhannya. Mengingat pentingnya dukungan dari pusat pelayanan ini maka menentukan wilayah yang menjadi pusat pelayanan informasi pariwisata didasarkan atas jarak, kedekatan daerah tujuan wisata (DTW)/ destinasi dan kemudahan pencapaian.

Berdasarkan arahan pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Soppeng, maka rencana program penetapan pusat pelayanan informasi pariwisata disesuaikan dengan fungsi wilayah sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Program penetapan pusat pelayanan informasi pariwisata pada masing-masing KPPD adalah sebagai berikut :

- a. Pusat pelayanan informasi pariwisata Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Utara terdiri dari kecamatan Marioriawa dan kecamatan Donri-Donri, ditempatkan di kawasan perkotaan Batu-Batu Kecamatan Marioriawa;
- b. Pusat pelayanan informasi pariwisata Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Timur terdiri dari kecamatan Ganra dan kecamatan Lilirilau, ditempatkan di Kawasan perkotaan Cabenge kecamatan Lilirilau;
- c. Pusat pelayanan informasi pariwisata Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Barat, terdiri dari kecamatan Lalabata, ditempatkan di Kawasan perkotaan Watansoppeng di kecamatan Lalabata, sekaligus sebagai pusat pelayanan informasi kabupaten Soppeng; dan

- d. Pusat pelayanan informasi pariwisata Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Selatan, terdiri dari kecamatan Marioriwawo, kecamatan Citta, dan kecamatan Liliraja di tempatkan di Kawasan perkotaan Takalala kecamatan Marioriwawo.

Selain penetapan Pusat pelayanan informasi pariwisata (*tourist information center*) pada masing-masing Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPD), program lain yang mendukung peran Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) adalah penyusunan paket wisata dengan melibatkan para pelaku pariwisata kabupaten Soppeng khususnya Biro perjalanan Wisata, pengelolaan kawasan dan daya tarik serta atraksi wisata yang ada. Dengan demikian maka setiap daya tarik prioritas dan potensial pada masing-masing KSPD dapat dipasarkan dengan baik dan terarah.

Strategi 5. Peningkatan dan Pengembangan KSPD

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) merupakan bagian penting dalam sistem kepariwisataan Kabupaten Soppeng dengan fungsi utama sebagai kawasan yang bersentuhan langsung dengan aktifitas wisatawan sehingga strategi ini diharapkan mampu mendukung aktifitas wisatawan berdasarkan aktifitas yang disenangi wisatawan pada kawasan tertentu.

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) jika dibangun sesuai dengan fungsi dan tahapan yang benar, maka sektor pariwisata akan mampu mendorong perekonomian daerah lebih cepat dan merata di Kabupaten Soppeng dengan meningkatkan distribusi peluang usaha, peluang kerja, dan peluang bagi masyarakat untuk menerima manfaatnya. Penerapan fungsi KSPD akan didukung dengan penentuan *master plan* kawasan dan zonasi kawasan sehingga akan memiliki arahan yang jelas dalam pengembangan fungsi KSPD.

Untuk dapat merencanakan dan mengembangkan potensi daya tarik dan atraksi wisata yang ada pada masing-masing KSPD, dibutuhkan dokumen perencanaan berupa Rencana Induk Pembangunan Obyek Wisata (RIPO) dengan memperhatikan tema utama pengembangan obyek dan kawasan, keterkaitan dengan daya tarik dan atraksi wisata lainnya dalam KSPD maupun dalam KPPD serta dengan KSPD dan KPPD lainnya di luar kawasan dalam kerangka perencanaan kabupaten Soppeng dengan tetap memperhatikan serta menyesuaikan dengan pelestarian alam, lingkungan dan budaya masyarakat, visi dan misi pembangunan kepariwisataan serta sistem nilai masyarakat kabupaten Soppeng.

Strategi 6. Pengembangan Daya Tarik dan Atraksi Wisata

Pengembangan daya tarik dan atraksi wisata merupakan salah satu proses untuk menjadikan destinasi menjadi lebih baik dari sebelumnya yang dapat dilakukan dengan meremajakan, membangun baru ataupun dengan memelihara yang sudah ada

agar lebih menarik dan berkembang sehingga mengundang wisatawan untuk datang berkunjung. Hal ini didukung dengan pengembangan DTW/ destinasi sebagai salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan kepariwisataan pada umumnya. Akan tetapi, hal ini akan dapat berjalan dengan lancar jika didukung dengan keterlibatan semua *stakeholders* dalam pelaksanaannya.

Mengingat pentingnya pengembangan daerah tujuan wisata/ destinasi ini, maka strategi ini dilakukan dengan membutuhkan :

- a. Kesesuaian tema pengembangan daerah tujuan wisata/ destinasi dengan tema pengembangan pada KSPD dimana daerah tujuan wisata tersebut berada.
- b. Kesesuaian pusat pelayanan wisata dan skala pengelolaannya dengan zonasi yang akan dilakukan
- c. Kesesuaian akses pencapaian harus didukung dengan mudah dan cepat
- d. Dukungan oleh masing-masing *stakeholders* terkait untuk kesuksesan implementasi

11.1.2 Pemeliharaan Dari Dampak Negatif Terhadap Daya Tarik dan Atraksi Wisata

Strategi 1. Penegakan Regulasi Perencanaan Pembangunan Kepariwisata Daerah

Usaha pengelolaan dunia pariwisata mempunyai pengaruh yang tidak dapat dihindari sebagai akibat dari datangnya wisatawan untuk melakukan aktifitas wisatanya yang mempunyai kondisi berbeda dengan daerah asal wisatawan tersebut. Perkembangan pariwisata yang cepat dan terkonsentrasi tentu saja diyakini juga memberikan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif terhadap berbagai sektor didalamnya.

Sama halnya dengan pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah yang telah direncanakan tentu saja akan memberikan berbagai dampak, baik terhadap lingkungan, dunia investasi, industri, dan masyarakatnya sendiri. Sehingga untuk memelihara perencanaan kawasan strategis pariwisata daerah ini juga harus memperhatikan regulasi-regulasi yang telah diatur didalamnya. Penegakan regulasi ini harus didukung oleh berbagai sektor dalam pelaksanaannya dilapangan sehingga dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimalisir sebanyak mungkin.

Program yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan strategi ini adalah Penetapan Naskah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA), sosialisasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA), dan konsistensi terhadap penegakan hukum Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) dengan melibatkan seluruh komponen pemangku kepentingan.

Strategi 2. Peningkatan Koordinasi Antara Pemerintah, Pelaku Usaha, Dan Masyarakat.

Penegakan regulasi untuk meminimalisir dampak negatif yang muncul, keterlibatan seluruh *stakeholders* memiliki peranan yang paling penting dalam pelaksanaannya. Kenyataan ini harus didukung dengan adanya keterlibatan dan keterbukaan dari masing-masing pihak yang memiliki hubungan didalamnya. Dalam hal ini, koordinasi dan komunikasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan wisatawan harus berlangsung dengan baik dan berkelanjutan sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri dalam pelaksanaannya.

Koordinasi dan komunikasi yang baik dan berkelanjutan ini dapat dilakukan koordinasi lintas wilayah maupun lintas sektoral terkait. Hal ini berkaitan dengan pengembangan yang akan dilakukan terhadap KSPD dan DTW dimana pengelolaannya tidak dapat diserahkan hanya kepada salah satu pihak saja, akan tetapi merupakan tanggung jawab bersama karena pada hakikatnya merupakan hal yang kompleks dan multidimensional sehingga keterpaduan dan keberlanjutan akan terus berjalan sesuai dengan yang visi misi pariwisata Kabupaten Soppeng.

Untuk mewujudkan strategi tersebut, maka program yang akan dilaksanakan adalah optimalisasi peran Badan Promosi dan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Soppeng (BPPPJ) yang telah dibentuk sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pembentukan Forum Komunikasi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Soppeng, Generasi Pesona Indonesia (GENPI), Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), dan pembentukan kelompok masyarakat Sadar Wisata

11.2 Arahan dan Strategi Pengembangan Produk Pariwisata

Produk wisata terdiri atas tiga aspek, yaitu atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Pengembangan pariwisata Kabupaten Soppeng perlu diarahkan pada peningkatan nilai produk pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan melalui perencanaan dan pengembangan produk pariwisata.

11.2.1 Pengembangan Daya Tarik Dan Atraksi Wisata

Arahan pengembangan produk wisata yang pertama adalah mengembangkan daya tarik dan DTW. Peningkatan kunjungan wisatawan dapat tercapai apabila daya tarik wisata lebih berkembang baik secara kuantitas maupun kualitas. Daya tarik wisata bukan hanya dapat diperoleh dari pembenahan dan pengembangan daerah wisata yang telah ada, melainkan juga dapat ditingkatkan dengan penambahan daerah tujuan dan daya tarik wisata baru. Oleh karena itu, strategi yang perlu disusun untuk pemenuhan arahan pengembangan daya tarik wisata di antaranya peningkatan kualitas dan kuantitas atraksi daerah tujuan

wisata yang telah ada dan pengembangan daerah tujuan wisata baru di Kabupaten Soppeng.

Strategi 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas DTW

Untuk mencapai strategi ini, dapat dilaksanakan beberapa program yang mendukung keberhasilan strategi pengembangan pariwisata. Program-program tersebut haruslah fokus terhadap lokasi maupun arah kegiatan. Pertimbangan tersebut kemudian dijadikan acuan penyusunan program pencapaian strategi yang berorientasi pada daerah tujuan wisata unggulan dan potensial pada masing-masing KSPD. Program-program tersebut di antaranya :

- a. Peningkatan aktivitas pertunjukan dan pameran (pentas seni, budaya) melalui penjadwalan rutin pertunjukan dan koordinasi antar pengelola pariwisata;
- b. Penyusunan *master plan* kawasan *night market & culinary (Food and Shopping Street)*;
- c. Pengembangan materi informasi sejarah dan inovasi audio visualisasi materi sejarah melalui pembangunan museum;
- d. Pemugaran kembali dan penataan situs makam untuk peningkatan daya tarik, daya tampung dan kualitas area penerimaan pengunjung;
- e. Pengembangan potensi kreatif dan cinderamata serta pengembangan desain arsitektural, motif dan corak bangunan berciri khas Soppeng;
- f. Pengembangan daya tarik produk serta penataan dan pembangunan kawasan wisata;
- g. Peningkatan dan perencanaan aksesibilitas wisata berupa dermaga, anjungan, dan moda transportasi danau, sungai dan penyeberangan yang mudah dan aman dari dan ke pulau;
- h. Pengembangan ekowisata pada Kawasan *Adventure Park Gattareng Toa*;
- i. Pengembangan fasilitas Wisata MICE.

Strategi 2. Pengembangan Daya Tarik dan Atraksi Wisata Baru

Untuk meningkatkan daya saing pariwisata Kabupaten Soppeng dan meningkatkan minat kunjungan wisatawan maka strategi pengembangan daya tarik dan atraksi wisata baru merupakan langkah yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan di kabupaten Soppeng.

Pola pembangunan daya tarik dan atraksi wisata sebaiknya dilakukan secara tuntas sehingga diharapkan setiap tahun akan terdapat daya tarik dan atraksi wisata baru yang akan memicu minat wisatawan berkunjung dan atau berkunjung kembali ke kabupaten Soppeng.

Adapun program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten Soppeng dalam mewujudkan strategi tersebut adalah :

- a. Pengembangan usaha dan fasilitas atraksi wisata rekreasi danau dan sungai seperti *River tubing*, *Canoeing*, dan Memancing;
- b. Pengembangan jalur pejalan kaki dan pedestrian dan jalur sepeda pada kawasan persawahan dan perkebunan;
- c. Pengembangan kampung berbasis budaya dan pelestarian aktivitas lokal masyarakat seperti pasar tradisional sebagai daya tarik wisata Kabupaten Soppeng;
- d. Perencanaan taman bermain alam liar dengan menyajikan konsep wisata pegunungan;
- e. Peningkatan dan perencanaan fasilitas akomodasi berupa, hotel, resort dengan konsep *forest* dan *glamour camping* (*glamping*) pada kawasan hutan dan pegunungan;
- f. Perencanaan dan pengembangan area perhentian/ istirahat (*resting area*) secara terpadu dengan memanfaatkan panorama alam.

Strategi 3. Pengembangan Sistem Jaringan Fungsional Pariwisata

Pengembangan Sistem Jaringan Fungsional Pariwisata merupakan keterkaitan pengembangan antar komponen fungsional dalam mendukung dan mengakomodasikan pergerakan wisatawan dari memulai perjalanan, kunjungan ke lokasi daya tarik wisata, pemanfaatan fasilitas wisata, hingga kembali ke pintu masuk.

Komponen-komponen fungsional yang dimaksud adalah (1) Gerbang (*Entry Point*), yaitu lokasi yang mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai titik rangkap kedatangan wisatawan sekaligus titik distribusi perjalanan wisatawan ke lokasi atraksi wisata utama di kawasan; (2) Destinasi, yaitu lokasi-lokasi yang dikembangkan sebagai titik tujuan wisata; (3) *Touring Base*, yaitu lokasi yang dikembangkan untuk menyandang fungsi sebagai titik-titik perhentian wisatawan dalam melakukan kunjungan wisata dimana pada lokasi tersebut dikembangkan fasilitas akomodasi untuk menginap (*Stay overnight*) dan fasilitas wisata lain untuk mendukung kebutuhan perjalanan wisata.; (4) Lokasi Persinggahan (*Rest Area*), Lokasi yang dikembangkan untuk menyandang fungsi sebagai titik persinggahan (*stop over*) wisatawan dalam melakukan kunjungan wisata.

Pada lokasi tersebut tidak diprioritaskan pengembangan fasilitas akomodasi. Pengembangan fasilitas wisata pendukung diprioritaskan pada fasilitas-fasilitas seperti: rumah makan, biro perjalanan wisata, toko cinderamata, kios informasi wisata, anjungan pandang, area parkir, dermaga dan fasilitas pelengkap lainnya; (5) Titik Transit, yaitu area ini menyandang fungsi sebagai titik simpul pergerakan untuk kegiatan transfer antar moda (terminal dan pelabuhan); (6) Kawasan Wisata Terpadu (*Integrated Resort*) yaitu area yang cukup luas yang dikembangkan untuk fungsi peristirahan dan rekreasi. (7) Jalur Wisata yang dikembangkan untuk menghubungkan lokasi-lokasi tujuan wisata dan mengakomodasikan rute pergerakan wisatawan.

Strategi 4. Pengembangan Produk Yang Berkontribusi Terhadap Pelestarian Alam dan Budaya.

Inovasi pengembangan pariwisata yang berkontribusi ada upaya pelestarian sumber daya alam dan budaya menjadi salah satu yang dapat menarik wisatawan. Perubahan paradigma berlibur oleh wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara menunjukkan bahwa mereka menginginkan pengalaman berlibur yang berkualitas. Kualitas perjalanan sangat ditentukan oleh produk wisata dan pelayanan yang ditawarkan.

Hasil survey tahunan ABTA (*Association British Travel Agent*) tahun 2008, menunjukkan bahwa 83% wisatawan yang disurvei menginginkan liburannya tidak merusak lingkungan; 71% ingin liburannya memberikan manfaat bagi masyarakat lokal di destinasi yang dikunjungi; 77% ingin agar dalam liburannya mendapatkan pengalaman mencicipi makanan dan budaya lokal; 54% ingin tahu lebih banyak tentang isu sosial dan lingkungan di destinasi sebelum mereka memutuskan membeli paket perjalanan. Walaupun tidak merefleksikan semua wisatawan mancanegara, akan tetapi hasil survey ABTA setidaknya menunjukkan bahwa wisatawan selama berlibur menginginkan kontribusi yang positif terhadap lingkungan maupun masyarakat.

Hal ini tentunya menjadi peluang untuk pengelola bisnis pariwisata Kabupaten Soppeng untuk menawarkan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan; sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Sebagai contoh dengan melibatkan masyarakat dalam monitoring sumber daya alam, maka kegiatan yang ditawarkan adalah melakukan penanaman dan penataan bersama masyarakat lokal untuk lakukan monitoring kualitas hutan dan danau, sekaligus mengamati dan menikmati keindahan wisata hutan dan danau. Sementara beberapa kegiatan bersama masyarakat, juga dapat ditawarkan seperti bagaimana melakukan proses masak-memasak dan juga persiapan kegiatan seni.

Kegiatan yang ditawarkan kepada wisatawan adalah prosesnya, bukan sekedar menikmati tarian maupun mencicipi makanan lokal, karena ikut melakukannya merupakan pengalaman yang berkesan bagi wisatawan dan juga masyarakat. Pada prinsipnya adalah menawarkan kegiatan wisata yang aktif dan interaktif dengan masyarakat lokal. Walaupun hampir merata pada setiap KSPD dapat menawarkan variasi produk wisata alam dan budaya, akan tetapi strategi menciptakan tema pada masing-masing KSPD berdasarkan keunggulannya, menjadi salah satu strategi yang akan memberikan nilai tambah. Tujuan pemberian tematik pada setiap KSPD adalah untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan, selain itu untuk meningkatkan kualitas produk karena saling menunjang satu KSPD dengan KSPD yang lain dari sisi tawaran produk kepada wisatawan.

11.2.2 Pengembangan fasilitas, pelayanan dan pengelolaan pariwisata

Pengembangan daya tarik wisata perlu ditunjang dengan fasilitas pariwisata yang memadai. Pelayanan dan pengelolaan pariwisata yang baik juga turut berperan dalam meningkatkan kualitas profuk pariwisata. Arah kebijakan fasilitas pariwisata adalah mengembangkan fasilitas, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata secara masif dan terarah.

Untuk memenuhi arahan ini, maka ada dua strategi yang perlu disusun dan dijalankan, yaitu pengembangan fasilitas pariwisata yang ramah lingkungan dan peningkatan sistem pelayanan dan pengelolaan fasilitas pariwisata yang berstandar nasional dan internasional.

Strategi 1. Pengembangan Fasilitas Pariwisata Yang Ramah Lingkungan.

Strategi ini merupakan salah satu strategi agar manajemen destinasi pariwisata Kabupaten Soppeng beradaptasi dengan isu-isu perubahan iklim yang pada masa akan datang akan semakin kuat. Isu-isu lingkungan, hemat energy juga telah mempengaruhi wisatawan dalam memilih destinasi yang ingin dikunjunginya. Destinasi yang memperhatikan dan mengelola fasilitas pariwisata dengan teknologi yang ramah lingkungan, dipastikan akan mendapatkan nilai tambah dan berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan.

Peningkatan fasilitas pendukung yang mampu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan serta meningkatkan faktor keselamatan pengunjung akan mempermudah pengelolaan daya tarik itu sendiri. Strategi ini kemudian diikuti dengan penyediaan transportasi perahu kayu yang disewakan, sehingga pengunjung yang menunggu giliran dapat melakukan aktivitas mendayung perahu di sekitar lokasi danau wisata.

Hal ini tentunya peluang usaha baru dan juga melibatkan banyak masyarakat untuk menerima manfaat. Jika jumlah kunjungan mengalami peningkatan tajam, maka pengelola dapat menentukan lama waktu kunjungan, sehingga dapat merotasi pengunjung lebih cepat dan dengan demikian penerimaan manfaat menjadi optimal, sementara dampak terhadap lingkungan masih tetap dapat terjaga.

Sejalan dengan itu maka pemerintah daerah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang pembangunan fasilitas pariwisata yang berdampak rendah pada lingkungan, hemat sumber daya alam dan menggunakan teknologi tepat guna.

Strategi 2. Peningkatan Standar Sistem Pelayanan Dan Pengelolaan Fasilitas Pariwisata Kabupaten Soppeng

Strategi ini merupakan upaya peningkatan kualitas fasilitas pariwisata Kabupaten Soppeng. Strategi ini mencakup sistem pelayanan dan pengelolaan yang memenuhi standar yang merata kepada setiap pengunjung. Untuk itu diperlukan perencanaan yang baik dalam pengadaan, penempatan dan pemeliharaan fasilitas pariwisata sehingga perkembangan aktivitas pariwisata pada daya tarik wisata tidak memberikan dampak negatif terhadap daya tarik wisata dan lingkungannya.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan informasi dalam pengelolaan fasilitas pariwisata khususnya pada daya Tarik wisata dengan potensi pengunjung yang temporer dengan karakteristik tamu rombongan yang cukup besar.

11.2.3 Peningkatan Kualitas Aksesibilitas Dari Dan Ke DTW

Aksesibilitas atau kemudahan pencapaian daerah tujuan sangatlah penting karena merupakan bagian dari tiga komponen utama pengembangan produk pariwisata. Arah kebijakan aksesibilitas pada pengembangan produk wisata Kabupaten Soppeng adalah mengembangkan tingkat pencapaian daerah tujuan wisata di Kabupaten Soppeng. Strategi yang penting untuk dijalankan sesuai dengan arahan tersebut adalah peningkatan tata informasi guna meningkatkan kualitas destinasi dan peningkatan aksesibilitas darat, danau, sungai dan penyeberangan mengingat wisata Kabupaten Soppeng sebahagian besar berbasis wisata alam pegunungan, sejarah dan budaya serta danau dengan kondisi sebaran wilayah yang cukup sulit diakses.

Strategi 1. Peningkatan Kualitas Tata informasi

Tata informasi harus mudah diakses oleh pengunjung, baik informasi di media elektronik, maupun informasi di destinasi. Strategi ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan guna peningkatan kenyamanan pengunjung. Tata informasi yang terdiri dari media cetak termasuk papan informasi umum dan khusus, papan penunjuk arah, buku panduan untuk wisatawan, dan buku panduan untuk pelaku menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pengelolaan destinasi pariwisata. Keberhasilan melakukan tata informasi diyakini dapat mempengaruhi keputusan wisatawan untuk datang kembali ke Kabupaten Soppeng. Wisatawan umumnya mengutamakan keamanan dan rasa aman diciptakan dengan informasi yang mudah diakses, dan akurat.

Informasi yang ditampilkan di mulai dari gerbang pintu masuk dan terminal regional. Tata informasi juga sangat penting di tingkat daya tarik dan titik-titik persinggahan di jalur wisata. Informasi terpenting dalam upaya mencapai visi adalah informasi

tentang kode etik yaitu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh (*don't* dan *do*) selama berada di daerah konservasi. Selain itu dalam memperkaya khasanah wisatawan tentang Kabupaten Soppeng dan menambah pengalaman yang berkualitas, maka informasi dapat berisikan: (a) informasi mengenai ekosistem hutan, danau dan sungai meliputi species-species flora dan fauna atau tempat-tempat yang perlu dilindungi sekaligus lokasi yang perlu dihindari karena berbahaya; dan kawasan konservasi (b) budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat, utamanya situs sejarah dan budaya serta benda purbakala; (c) batasan waktu kunjungan yang ditetapkan oleh pengelola bagi para wisatawan pada beberapa daya tarik tertentu, guna menjaga keutuhan ekosistem atau spesies tertentu; dan (d) informasi dan pemantauan terhadap daerah rawan bencana.

Strategi 2. Peningkatan aksesibilitas menuju daya tarik wisata

Pengembangan sistem dan jaringan aksesibilitas yang handal dapat menunjang dan membantu mobilitas para wisatawan untuk mencapai setiap daya tarik wisata di Kabupaten Soppeng. Selain itu, jaringan aksesibilitas tidak hanya bermanfaat untuk wisatawan, tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat lokal untuk aktivitas sehari-hari. Aksesibilitas difokuskan untuk meningkatkan daya saing moda transportasi darat, danau, sungai dan penyeberangan dengan standar pelayanan bertaraf nasional dan internasional.

Peningkatan aksesibilitas dilakukan melalui peningkatan frekwensi maupun kapasitas sarana transportasi yang menghubungkan wilayah kabupaten Soppeng. Oleh karena keterbatasan sumber daya, maka berbagai pihak harus ikut didorong untuk mengembangkan pelayanan ini; seperti kelompok masyarakat didorong untuk mengembangkan usaha penyewaan perahu bermotor atau kendaraan bermotor.

11.3 Arah dan Strategi Pengembangan Industri dan Investasi

Industri dan investasi dalam dunia pariwisata memainkan peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilannya. Kedua sektor ini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kabupaten Soppeng karena akan memberikan *multiplier effect* dan berfungsi sebagai katalisator dalam pembangunan pariwisata. *Multiplier effect* ini akan terjadi karena industri pariwisata ini tidak berdiri sendiri, industri dan investasi pariwisata akan mampu menghasilkan devisa karena didalamnya terdapat sektor-sektor lain yang produk-produknya dibutuhkan oleh dunia pariwisata serta dapat juga digunakan sebagai sarana untuk menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan angka kesempatan kerja. Selain itu, industri dan investasi bagaikan motor yang menggerakkan kehidupan ekonomi nasional maupun regional, karena

pembentukan modal memperbesar kapasitas produksi, meningkatkan PDB, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Arahan kebijakan pengembangan industri dan investasi pariwisata Kabupaten Soppeng juga dilakukan dengan menyesuaikan konsep pengembangan pariwisata Kabupaten Soppeng yaitu dengan arahan kebijakan pengembangan secara terpadu. Sistem terpadu ini juga merupakan sistem pengelompokan kawasan industri pariwisata yang mana dalam kelompok tersebut akan dikolaborasikan sesuai dengan kebutuhan daerah tujuan wisata yang ada didalamnya. Konsep ini disusun dengan tujuan mengorganisasikan kawasan industri pariwisata agar mampu mendukung daerah tujuan wisata yang ada sehingga mampu memberikan kemudahan kepada wisatawan dalam melakukan aktifitas wisatanya.

Secara rinci arahan kebijakan pengembangan pariwisata dalam aspek industri dan investasi dilakukan melalui pelaksanaan kebijakan dimana setiap arahan kebijakan tersebut memiliki strategi yang dapat dijadikan sebagai dasar program rencana pengembangan pariwisata Kabupaten Soppeng. Kebijakan tersebut meliputi :

1. Perencanaan Pengembangan Perwilayah Industri Pariwisata Kabupaten Soppeng
2. Peningkatan Daya Saing Dan Produktivitas Industri Pariwisata Kabupaten Soppeng
3. Peningkatan Fungsi Struktur Industri Pariwisata Kabupaten Soppeng
4. Peningkatan Pertumbuhan Investasi Industri Pariwisata Kabupaten Soppeng

Strategi 1. Penetapan Kawasan Industri Pariwisata Yang Dapat Menjangkau Skala Regional Maupun Lokal

Kawasan industri pariwisata yang dimaksud merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama sebagai kawasan industri pariwisata baik berupa industri kecil dan industri menengah yang akan menjadi prioritas pengembangan pendukung kegiatan pariwisata. Kawasan industri ini merupakan kawasan primer untuk pemenuhan fungsi seluruh rangkaian pemenuhan kebutuhan wisatawan selama melakukan perjalanan wisatanya sampai kembali ke tempat asalnya.

Penentuan kawasan industri pariwisata ini merupakan landasan dalam perumusan pemenuhan fasilitas penunjang kegiatan wisatawan yang berkaitan dengan aspek perwilayahan. Perwilayahan ini merupakan salah satu metode yang ditujukan untuk menentukan batas-batas pemenuhan kebutuhan fasilitas wisatawan khususnya berkaitan dengan kepariwisataan.

Mengingat pentingnya penentuan kawasan industri ini maka penentuannya didasarkan pada beberapa kondisi yang merujuk kepada tuntutan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan disesuaikan dengan konteks lokal

Kabupaten Soppeng, yaitu didasarkan berdasarkan jarak dan waktu tempuh, kedekatan daerah tujuan wisata (DTW)/ destinasi dan kemudahan pencapaian dalam skala pelayanannya.

Strategi 2. Peningkatan Fungsi Kawasan Industri Pariwisata

Berdasarkan fungsi kawasan industri pariwisata, maka perlu dukungan untuk melaksanakan fungsi tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dukungan dan pelibatan masyarakat untuk masuk dalam industri pariwisata masih terbatas pada pengelolaan rumah inap dengan kepemilikan sendiri ataupun jenis industri kecil yang diusahakan sendiri sehingga peluang-peluang lain tidak dimanfaatkan dengan baik, seperti industri biro perjalanan wisata, industri kerajinan tangan, industri rumahan olah makanan, pemasok bahan baku lokal dan sebagainya.

Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat dengan pelaku wisata yang datang dari luar mengenai industri dan bisnis pariwisata. Oleh karena itu, strategi ini ditawarkan untuk mendukung penentuan kawasan industri yang dengan mengidentifikasi peluang-peluang industri dan bisnis di tingkat lokal, membina secara khusus untuk menjadikan mereka pebisnis lokal dalam mengelola industri pariwisata oleh pemerintah sehingga dengan sendirinya pemasaran dan promosi dapat dilakukan secara tidak langsung oleh masyarakat pada produk-produk yang dilakukannya.

11.3.1 Pengembangan Perwilayahan Industri Pariwisata

Strategi 1. Peningkatan Kualitas Produk/ Rekayasa Inovasi Industri Pariwisata

Selain kebijakan perwilayahan kawasan industri, untuk mendukung keberhasilan pengembangan industri dan investasi pariwisata juga harus didukung dari sektor produk industri pariwisata yang ditawarkan kepada wisatawan. Produk industri wisata harus mampu memiliki keunikan yang berbeda dengan daerah lain sehingga ada ciri khas yang diperoleh wisatawan ketika datang berkunjung ke Kabupaten Soppeng. Hal ini harus dilakukan dengan memanfaatkan teknologi-teknologi terbaru yang secara tidak langsung telah banyak mempengaruhi pola-pola persaingan antar wilayah atau antar negara untuk memperebutkan minat wisatawan datang berkunjung. Peningkatan kualitas produk dan rekayasa inovasi industri pariwisata yang mencakup destinasi, fasilitas penunjang wisata (amenitas), dan aksesibilitas.

Pemanfaatan sektor industri kecil dan industri menengah yang tersedia di Kabupaten Soppeng diharapkan juga mampu menjadikan strategi ini sebagai cikal bakal dari pengembangan daya tarik wisata (atraksi) baru yang mampu menarik minat wisatawan datang berkunjung. Tentunya hal ini harus didukung dengan kesiapan masyarakat itu sendiri sebagai pelaku industri yang akan menggarap produknya untuk dijual kepada wisatawan.

Pemenuhan standar kebersihan pengelolaan, pengemasan, maupun hingga pelayanan secara berkelanjutan juga dibutuhkan untuk menimbulkan kepercayaan wisatawan akan produk yang ditawarkan.

Strategi 2. Peningkatan Efisiensi Pelaku Industri Wisata.

Sejalan dengan pengembangan produk industri pariwisata yang ditawarkan, maka untuk meningkatkan hal tersebut harus didukung dengan kualitas pelaku industri yang baik pula. Hal ini dikarenakan untuk menciptakan kreatifitas dan inovasi yang baru, maka pelaku industri harus mampu menemukan sesuatu yang spesifik yang dibutuhkan wisatawan sehingga mampu menarik minat wisatawan membeli produknya. Untuk itu, dalam menyelenggarakan pelibatan masyarakat sebagai pelaku industri yang akan mendorong peningkatan perekenomian masyarakat sendiri, maka strategi ini ditawarkan sebagai salah satu cara memotivasi masyarakat untuk menciptakan peluang bisnis industri pariwisata.

Pelaksanaan strategi ini dapat memberikan suasana atau penyegaran baru untuk memunculkan ide kreatif dan inovasi/rekayasa produk yang dimiliki oleh masyarakat sehingga dalam pemenuhan produk industri pariwisata tersebut tercipta peningkatan keterampilan yang dimiliki, standar sertifikasi ahli yang dimiliki, ataupun pelibatan produk masyarakat dalam suatu pameran penjualan langsung kepada wisatawan.

11.3.2 Peningkatan Fungsi Struktur Industri Pariwisata

Strategi 1. Pengembangan Pola Kemitraan Antar Pelaku Industri.

Strategi ini diciptakan untuk membantu menarik pelaku usaha dalam hal ini masyarakat sehingga dapat menularkan pemahaman pelayanan yang baik melalui strategi *learning by doing* dimana masyarakat belajar langsung dari pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah sehingga proses penciptaan ide kreatif atau rekayasa produk dapat dengan mudah dilakukan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dengan pelaksanaan strategi ini akan memberikan dukungan sehingga dengan mudah mempercepat proses pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

Peningkatan sumber daya manusia pada umumnya ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bisnis pariwisata, standar pelayanan wisata serta hubungan yang kuat antara pariwisata dengan usaha pelestarian budaya dan alam sebagai asset pariwisata itu sendiri. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peluang bisnis industri pariwisata skala kecil dan menengah yang dapat menunjang pariwisata.

Strategi ini tentu saja memerlukan perhatian yang besar oleh pemerintah, karena strategi ini dapat mempercepat peningkatan pelibatan masyarakat dan sekaligus mengurangi potensi konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha (pemodal

nasional maupun asing). Pola-pola kemitraan dapat diterapkan pemerintah dengan memberlakukan aturan bagi para pemodal untuk mengasuh atau membina usaha kecil dan menengah yang ada disekitar mereka melakukan investasi. Pemerintah dalam hal ini sebagai mediator yang akan memfasilitasi peningkatan jejaring di antara pengusaha pariwisata dengan usaha kecil dan menengah di tingkat masyarakat.

Strategi 2. Penguatan Implementasi Kemitraan.

Untuk mendukung dilakukannya pola kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat maka usaha penguatan implementasi perlu dilakukan oleh keterlibatan dan pemahaman posisi masing-masing pihak. Dukungan usaha kepada masyarakat dapat diberikan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat melalui beberapa kementerian, misalnya Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM Dan Koperasi, dan sebagainya. Selain itu, strategi ini ditujukan juga kepada pemerintah guna memberikan penguatan implementasi penguatan keterlibatan masyarakat dengan menarik dukungan dari pihak lain, baik berupa LSM nasional maupun internasional.

Oleh karena itu, perencanaan skema atau mekanisme penguatan pola kemitraan ini harus diperjelas sehingga masyarakat akan lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi peluang usaha yang ada. Pembentukan regulasi-regulasi oleh pemerintah sebagai fasilitator diperlukan untuk menguatkan posisi masyarakat dalam pola kemitraan tersebut juga diperlukan sehingga sosialisasi secara berkelanjutan terhadap pola kemitraan harus selalu dikembangkan. Strategi ini juga diperlukan agar pemerintah dapat memfasilitasi masyarakat dapat menggunakan teknologi- teknologi terbaru dan berkembang dengan permodalan oleh pihak swasta.

11.3.3 Peningkatan Pertumbuhan Investasi Pariwisata

Strategi 1. Penyusunan Kebijakan Investasi Pariwisata.

Keberadaan industri dan investasi pariwisata sebagai motor penggerak berkembangnya produk wisata yang akan ditawarkan kepada wisatawan tentu saja menjadi salah satu faktor penting yang perlu mendapatkan perhatian. Secara ekonomi, investasi tersebut mampu meningkatkan kelayakan sektor pariwisata yang bersifat sebagai destinasi pariwisata yang mampu menarik perhatian wisatawan datang berkunjung. Tentu saja strategi ini diharapkan menjadi salah satu hal yang mampu mendorong peningkatan keberhasilan sektor pariwisata daerah dengan mendorong peningkatan populasi pertumbuhan investasi pariwisata sehingga peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengelola industri kecil dan menengah yang dihadapi dapat berjalan dengan

lancar serta mampu meningkatkan ketertarikan wisatawan untuk datang berkunjung.

Pembuatan regulasi dan skema sistem informasi kesempatan melakukan investasi dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai fasilitator untuk mempropagandakan produk wisata Kabupaten Soppeng sehingga pihak swasta merasa tertarik untuk melakukan investasi. Hal ini juga dapat dilakukan dengan mengadakan promosi dan pameran pariwisata dengan memaparkan peluang-peluang investasi yang dapat dilakukan guna meningkatkan sektor pariwisata Kabupaten Soppeng dengan mengundang para investor mengunjungi daya tarik dan atraksi wisata yang akan ditawarkan dan jenis investasi yang dapat dilakukan.

Strategi 2. Reduksi Kendala Investasi Pariwisata

Guna mendukung strategi peningkatan pertumbuhan populasi investasi pariwisata melalui berbagai upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk melibatkan masyarakat sebagai pelaku usaha dan pihak swasta sebagai investor juga diperlukan upaya-upaya untuk meminimalisir kendala yang akan dihadapi oleh investor ketika akan melakukan kegiatan investasinya. Hal ini untuk mendukung peningkatan kerjasama yang dapat berlangsung secara berkelanjutan sehingga semakin meningkatkan kemampuan pariwisata ketika bersaing merebut pasar wisatawan. Pemberian kemudahan-kemudahan melalui berbagai program pun dapat dilakukan, seperti pemberian insentif tertentu pada sektor investasi unggulan, atau perbaikan regulasi-regulasi investasi sehingga keinginan untuk melakukan investasi dapat berlangsung dengan pola kemitraan tertentu dan berkesinambungan.

11.4 Arah dan Strategi Pengembangan Pasar dan Pemasaran

Keberhasilan pengembangan sektor pariwisata tidak terlepas dari adanya pengembangan dari aktifitas promosi dan pemasaran yang drencanakan dengan baik. Dengan demikian, kebutuhan akar manajemen pemasaran tidak dapat diabaikan begitu saja dalam perjalanan suatu bisnis atau usaha yang dilakukan oleh perorangan atau bahkan pemerintah. Manajemen pemasaran adalah bagaimana menganalisis, merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program-program yang ditujukan untuk mengadakan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan. Hal ini sangat tergantung kepada penawar dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar tersebut guna membantu dalam menentukan harga, mengadakan komunikasi, dan distribusi yang efektif untuk memberitahu, mendorong, serta melayani kebutuhan pasar.

Pemasaran pariwisata (*tourism marketing*) juga sebagai suatu sistem dan koordinasi yang dilaksanakan sebagai suatu kebijakan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kepariwisataan, baik milik swasta maupun pemerintah,

dalam ruang lingkup lokal, regional, nasional, dan internasional untuk dapat mencapai kepuasan wisatawan dengan memperoleh keuntungan yang wajar. Oleh karena itu, promosi dan pemasaran sebagai salah satu bagian penting dari sektor pariwisata yang harus dikembangkan.

Secara rinci arahan kebijakan pengembangan pariwisata dalam aspek industri dan investasi dilakukan melalui pelaksanaan kebijakan dimana setiap arahan kebijakan tersebut memiliki strategi yang dapat dijadikan sebagai dasar program rencana pengembangan pariwisata Kabupaten Soppeng. Kebijakan tersebut, meliputi :

1. Pemantapan Strategi Pasar Utama Dan Pasar Potensial Wisatawan Untuk Mendukung Pengembangan Daerah tujuan Wisata (DTW) Kabupaten Soppeng
2. Pengembangan Dan Pemantapan Citra Pariwisata Kabupaten Soppeng Sebagai Destinasi Pariwisata
3. Pengembangan Model promosi Dan Pemasaran Pariwisata Sesuai Pasar Wisatawan Kabupaten Soppeng

11.4.1 Strategi Pemantapan Segmentasi Pasar

Strategi 1. Optimalisasi Fungsi Pasar Wisatawan.

Pasar wisatawan sebagai bagian dari faktor penting yang mempunyai peranan dalam keberhasilan suatu program pemasaran sangat ditentukan oleh faktor kesamaan pandangan terhadap peranan pariwisata bagi pembangunan pariwisata daerah, karena itu sebelum program pemasaran dilaksanakan hal yang terlebih dahulu harus diketahui bagaimana segmentasi pasar wisatawan Kabupaten Soppeng yang meliputi persepsi dan preferensi wisatawan, sosio-demografi wisatawan, dan sebagainya. Hal ini menjadi sangat penting mengingat pada umumnya, calon wisatawan menginginkan suatu produk wisata tertentu yang kemudian sesuai dengan keinginan atau tujuan wisatanya. Faktor sosio-demografi dan psikografi memiliki peran yang sangat besar dalam keputusan memilih jenis produk dan daerah tujuan wisata yang diinginkan sehingga berawal dari strategi inilah strategi promosi dan pemasaran kemudian dilanjutkan.

Strategi 2. Pengembangan Orientasi Pasar Wisatawan

Disamping terdapatnya pasar utama dan pasar potensial yang dimiliki oleh pariwisata Kabupaten Soppeng, maka untuk mendatangkan wisatawan yang lebih banyak lagi maka dapat dilakukan dengan strategi pengembangan pasar wisatawan kearah orientasi yang lebih besar lagi. Hal ini juga dapat dilakukan untuk penyegaran kualitas produk wisata yang ditawarkan yang sesuai dengan kesenangan target pasar wisatawan. Dengan mengetahui kesenangan dan kebutuhan wisatawan, maka strategi promosi dan pemasaran akan lebih mudah dilakukannya sehingga materi promosi yang diberikan lebih kepada apa saja yang mereka butuhkan.

Selain itu, untuk menggaet target pasar baru wisatawan, hal yang juga dapat dilakukan dengan strategi ini seperti memberikan kemudahan-kemudahan untuk kunjungan pertama kalinya dengan memberikan dan menciptakan citra pariwisata dalam memori wisatawan sehingga menarik minat dan motivasinya untuk datang berkunjung selanjutnya. Kemudahan yang dimaksud dapat dilakukan melalui pemberian potongan harga, tiket terusan di beberapa daerah tujuan wisata (DTW), dan sebagainya

11.4.2 Pengembangan Dan Pemantapan Citra Pariwisata Strategi 1. Pembentukan Citra Pariwisata Kabupaten Soppeng

Melihat posisi geografis Kabupaten Soppeng yang memiliki sejarah yang penting, serta masyarakat yang memiliki budaya dan karakteristik yang baik maka sangat mendukung untuk dilakukan pengembangan pariwisata karena memiliki *positioning* dan peluang yang mampu bersaing merebut pasar wisatawan. Hal ini juga dilihat dengan kemampuan aksesibilitas menuju Kabupaten Soppeng yang sudah sangat mudah dicapai.

Citra pariwisata yang juga sebagai salah satu faktor penting dalam proses pengambilan keputusan berkunjung oleh wisatawan. Dukungan seluruh pihak harus bersama-sama dilakukan guna mendapatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Soppeng. Keterlibatan masyarakat sebagai salah satu *stakeholders* yang akan melakukan interaksi langsung dengan wisatawan harus mampu menjadi tuan rumah yang baik dalam menyambut wisatawan yang datang berkunjung. Strategi ini cukup mampu memberikah perhatian lebih bagi pemerintah mengingat hal ini merupakan pengetahuan awal sebelum program promosi dan pemasaran dilakukan.

Strategi 2. Peningkatan Kerjasama Dengan Media Promosi, Dalam Membentuk Citra Pariwisata.

Strategi ini tidak dapat dipisahkan dengan langkah pembentukan citra pariwisata Kabupaten Soppeng. Strategi ini dilakukan dengan berbagai cara, baik elektronik, sebagai bahan promosi media cetak, maupun dalam bentuk acara-acara promosi khusus daerah tujuan wisata. Strategi ini tidak hanya dilakukan untuk menarik wisatawan dan dilakukan pada tempat-tempat sumber wisatawan, akan tetapi juga dilakukan untuk skala internal Kabupaten Soppeng sendiri seperti pelaku usaha wisata, pegawai pemerintahan sebagai sektor terkait dan fasilitator di dalamnya, masyarakat secara umum serta bagi kelompok-kelompok pariwisata yang terlibat langsung di dalamnya.

11.4.3 Pengembangan Model Promosi Dan Pemasaran

Strategi 1. Pembentukan *Branding* Pariwisata.

Pembentukan Kasawan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Kabupaten Soppeng telah diarahkan dengan mengembangkan peta-peta tematik yang sesuai dengan karakteristik dan keunggulan yang dimiliki oleh produk wisata yang ditawarkan pada masing-masing KSPD. Berdasarkan hal tersebut, maka pengembangan KSPD ini juga akan mencerminkan keseluruhan dari kekuatan pariwisata Kabupaten Soppeng yang sesungguhnya dalam mempengaruhi minat wisatawan datang berkunjung. Untuk mewadahi keseluruhan pengembangan pariwisata Kabupaten Soppeng, maka diperlukan strategi pembentukan *branding* atau *tagline* pariwisata untuk mempromosikan dan mempromosikan Kabupaten Soppeng yang mencerminkan pariwisata secara menyeluruh dan komprehensif dan dilakukan secara terus menerus kepada wisatawan dan semua pihak hingga hal tersebut tertanam dalam memori dan secara otomatis mengenali dan memahami bahwa hal tersebut adalah promosi pariwisata Kabupaten Soppeng.

Strategi 2. Peningkatan Kegiatan Promosi

Membuat materi promosi dan pemasaran yang baik menjadi salah satu tantangan dan faktor penting dalam promosi dan pemasaran pariwisata Kabupaten Soppeng. Termasuk penyajian gambar yang baik, kualitas gambar dan audio yang baik juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Pemanfaatan materi promosi yang dilakukan melalui berbagai media sebagai salah satu strategi dalam pengembangan pemasaran pariwisata Kabupaten Soppeng. Strategi ini dilakukan dengan meningkatkan dan memperbaharui materi promosi yang sudah ada kemudian melakukan pemeliharaan terhadap materi-materi tersebut. Strategi ini kemudian disebarluaskan ke berbagai jenis media, baik media *offline* maupun *online*. Penyebaran melalui media sosial juga saat ini menjadi salah satu program yang dapat mempropagandakan pariwisata Kabupaten Soppeng secara cepat.

Strategi 3. Pengembangan Pemasaran Terpadu Dengan Bidang Lain Khususnya Bidang Industri Dan Perdagangan

Pemasaran terpadu pariwisata Kabupaten Soppeng dengan melakukan kerjasama terhadap berbagai sektor, misalnya sektor industri dan perdagangan dilakukan sebagai upaya untuk tetap mengadakan promosi dan pemasaran meskipun wisatawan telah berada di Kabupaten Soppeng guna tetap memberikan informasi mengenai pariwisata Kabupaten Soppeng sehingga wisatawan akan melakukan kunjungan selanjutnya. Pemasaran ini dilakukan setelah mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pasar wisatawan kemudian mengimplementasikan melalui tempat-tempat yang

menjadi gerbang kedatangan wisatawan, *touring base*, *rest area*, dan *transit point* sehingga ingatan akan pariwisata Kabupaten Soppeng ada dimana saja wisatawan berada.

Strategi 4. Pengembangan Pemasaran Terpadu Dengan Beberapa Destinasi Lainnya

Selain melakukan pemasaran terpadu melalui kerjasama lintas sektor, maka pemasaran terpadu Kabupaten Soppeng juga dapat dilakukan melalui kerjasama promosi dan pemasaran dengan beberapa Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) seperti perluasan kerjasama paket-paket wisata untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan sehingga akan lebih banyak perbelanjaan yang terjadi. Selain itu, kerjasama penyelenggaraan event-event secara berkala dan berkelanjutan juga dapat dilakukan guna menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung di beberapa daerah tujuan wisata (DTW).

Strategi 5. Pengembangan Kerjasama Dengan Komunitas Kreatif, Seni Budaya, Sejarah, Dan Ilmu Pengetahuan

Sebagai salah satu pihak yang paling diperhatikan dalam pariwisata Kabupaten Soppeng, komunitas kreatif, seni budaya, sejarah, dan ilmu pengetahuan, serta komunitas lainnya juga dapat mendukung aktifitas promosi dan pemasaran pariwisata Kabupaten Soppeng. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan komunitas yang mereka lakukan di Kabupaten Soppeng dan mengambil gambar pada daerah tujuan wisata (DTW) yang ada di Kabupaten Soppeng, maka secara tidak langsung penyebarluasan informasi yang mereka lakukan juga sebagai media promosi terhadap pariwisata Kabupaten Soppeng.

Berbagai strategi yang dilakukan untuk mengembangkan promosi dan pemasaran pariwisata Kabupaten Soppeng, maka strategi ini juga menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan untuk mengimplementasikan materi promosi yang akan dilakukan. Pemerlihaaran dan pemantauan harus dilakukan secara berkala dan berkesinambungan untuk mengetahui sejauh mana dampak yang telah ditimbulkan terhadap pariwisata Kabupaten Soppeng

11.5 Arah dan Strategi Pengelolaan lingkungan

Pengembangan pariwisata berpotensi menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan. Oleh sebab itu, perlu adanya pengarahan untuk mengelola lingkungan secara optimal, agar tetap terjaga keselarasan antara pengembangan daerah-daerah tujuan wisata dengan kestabilan kelestarian lingkungan.

11.5.1 Pengelolaan Lingkungan Pada Destinasi Wisata

Strategi 1. Peningkatan Pengelolaan Persampahan

Strategi ini mengkhususkan pengelolaan sampah, mengingat sampah selalu menjadi persoalan di kawasan pariwisata. Kesadaran banyak pihak masih kurang kuat di dalam pengelolaan sampah, terlebih lagi di kawasan hutan, sungai dan danau.

Mengolah sampah identik dengan pekerjaan yang rendah, sehingga sedikit sekali orang ingin terlibat di pengolahan sampah. Hal yang perlu dikembangkan adalah kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dengan konsep minimalisasi dan kelola sampah dari tingkat rumah tangga serta pengawasan ketat terhadap produksi sampah industri. Pemerintah harus secara paralel membangun sistem tata kelola sampah, termasuk menyediakan teknologi tepat guna untuk mengelola sampah mulai dari skala kampung hingga skala kecamatan.

Pengolahan sampah harus diiringi dengan peningkatan kesadaran dan pelatihan pengolahan sampah untuk dapat dimanfaatkan kembali. Sampah plastik sisa kemasan minuman yang biasa banyak dijumpai dapat diolah menjadi tas maupun dompet dengan sedikit pelatihan tentang penganyamannya. Pemerintah daerah bekerjasama dengan masyarakat kampung wisata diarahkan dapat menjadikan pengelolaan sampah sebagai salah satu daya tarik wisata Kabupaten Soppeng.

Strategi 2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

Strategi ini mengarahkan pada upaya pengadaan dan pengembangan ruang terbuka hijau pada setiap KSPD dan daerah tujuan wisata. Program pelestarian taman dan kebun pekarangan rumah juga merupakan suatu upaya dalam rangka pemenuhan strategi peningkatan ruang terbuka hijau secara vertikal maupun horisontal. Peraturan mengenai standar ruang terbuka hijau pada setiap destinasi wisata penting untuk disusun dan diberlakukan. Hal ini dilakukan untuk mencegah eksploitasi lingkungan atau sumber daya alam semata-mata bagi pengembangan ekonomi pariwisata tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

11.5.2 Optimalisasi Daya Dukung Lingkungan

Strategi 1. Pengadaan Kajian Daya Dukung Lingkungan

Sebelum membuka atau mengembangkan kawasan pariwisata, penting adanya kegiatan penelitian khusus terkait dengan daya dukung lingkungan. Pengadaan AMDAL yang benar-benar telah melalui kajian yang bermutu perlu diwajibkan dan diberikan regulasi ketat serta perlu diawasi oleh seluruh pihak terutama forum kelembagaan pariwisata. Kajian lingkungan ini

perlu didampingi oleh ahli yang berkompeten di bidangnya serta dievaluasi secara berkala.

Strategi 2. Pengelolaan Permintaan Kunjungan Wisatawan

Pengelolaan permintaan kunjungan sangat berkaitan dengan perlindungan lingkungan pariwisata konservatif. Pembatasan kunjungan terutama diterapkan pada wilayah pulau-pulau yang memiliki sumberdaya alam terbatas serta kampung-kampung ekowisata yang perlu dijaga kelestariannya. Peran pengelola pariwisata ataupun biro perjalanan wisata wajib mengatur permintaan kunjungan pada tempat-tempat tersebut dan menyampaikan aturan yang lebih ketat namun tidak mengurangi kebebasan eksplorasi pengunjung yang tetap bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan pariwisata.

11.6 Arahan dan Strategi Pengelolaan Kelembagaan dan SDM

11.6.1 Penguatan Manajemen Pariwisata

Strategi 1. Pengembangan sistem pengelolaan daya tarik wisata berbasis kelompok Masyarakat

Jika manajemen daya tarik disusun dan opsi-opsi inovasi pengelolaan daya tarik dikembangkan serta diikuti pemberdayaan masyarakat yang diarahkan untuk berpartisipasi dalam manajemen daya tarik, maka diharapkan konsep ini akan memberikan peluang usaha bagi masyarakat yang ada disekitar daya tarik. Hal ini juga akan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk memelihara sumber daya alam dan keanekaragaman hayati serta budaya bahari dan sejarah yang menjadi aset pariwisata.

Pengembangan mekanisme pengelolaan daya tarik sebaiknya memperhatikan karakteristik lokal masyarakat, sehingga pola pendekatannya mengkombinasikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat, sehingga lebih dapat menyerap. Pola pelatihan untuk pengelolaan juga dilakukan melalui pola pendampingan yang intens, kemudian dilakukan monitoring untuk jangka waktu satu tahun. Beberapa hal yang dapat dimonitoring adalah, pencatatan, administrasi, kendala-kendala yang dihadapi sebagai bahan untuk peningkatan kualitas serta potensi pengembangan ke depan.

Strategi 2. Pembentukan Forum Pariwisata

Strategi pembentukan Forum Pariwisata didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu: (1) Mengingat sumber daya manusia pengelola yang masih perlu ditingkatkan; (2) Mengingat pengelolaan pariwisata cukup kompleks, karena multi sektor, multi pihak dan multi disiplin ilmu. Oleh karenanya membutuhkan pengembangan jejaring di dalam pelaksanaannya; (3) Dalam upaya mendukung pengelolaan yang lebih efektif, adaptif, dan profesional.

Forum ini ini terdiri dari berbagai pihak, perwakilan yang ditunjuk secara tetap dari sektor yang terkait perhubungan, kehutanan, perikanan, pekerjaan umum, kesehatan, serta perwakilan asosiasi resort, asosiasi biro perjalanan, LSM, dan Akademisi. Forum ini berfungsi sebagai kelompok berfikir dan membantu Dinas Kepariwisata dalam merancang program dan membina hubungan dengan pihak- pihak lain di tingkat lokal, nasional dan internasional. Forum juga memastikan dan mengawasi jalannya program serta bersama-sama dengan Dinas Kepariwisata melakukan evaluasi dan penetapan target ke depan. Selain itu forum dapat memberikan masukan dalam penyelesaian konflik yang terjadi diantara pelaku serta juga pelaku dan masyarakat.

Strategi 3. Tata kelola dan peningkatan kapasitas dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program.

Penyusunan tata kelola destinasi hingga tingkat pelaksanaan, bisa dilakukan dengan bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata. Program DMO (*Destination Management Organization*) dapat digandeng oleh pemerintah daerah untuk penyusunan tata kelola yang lebih rinci sesuai dengan arahan dalam RIPPARKAB ini. Program dalam strategi ini di antaranya penetapan tujuan yang jelas serta tahapan pelaksanaannya. Hal penting lain yang tak kalah pentingnya adalah program pemantauan.

Di banyak destinasi di Indonesia program pemantauan selalu menjadi hal yang paling lemah, karena biasanya pemantauan tidak direncanakan sejak awal. Pada tahapan saat ini dimana pariwisata Kabupaten Soppeng sedang dalam tahap pengembangan, penting adanya penetapan indikator-indikator keberhasilan sejak tahun 2017 untuk setiap lima tahun dan setiap tahunnya. Kemudian membuat kerangka pemantauan secara periodik terhadap program-program yang telah dilakukan.

Tatakelola destinasi meliputi pengelolaan pengunjung secara umum hingga pengelolaan pengunjung di daya tarik wisata baik yang dikelola oleh swasta maupun oleh kelompok masyarakat. Strategi Tata kelola ini termasuk mengarahkan Dinas Pariwisata untuk menyusun mekanisme secara partisipatif bekerjasama dengan forum pariwisata utamanya kelompok sadar wisata yang juga perlu dibentuk.

11.6.2 Peningkatkan Kapasitas Dalam Pengembangan Pariwisata

Strategi 1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pendampingan masyarakat, dan pengelolaan pariwisata

Peningkatan kapasitas pelaku pariwisata seringkali hanya diberikan pada masyarakat atau pelaku usaha, padahal pemerintah memegang peranan penting dalam upaya pembangunan kepariwisataan. Aparatur pemerintah adalah tokoh sentral, khususnya dalam perencanaan, pembuatan regulasi, dan pengawasan. Pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga diharapkan oleh banyak pihak untuk sanggup memberikan pendampingan bagi masyarakat, dukungan teknis bagi pihak swasta, perlindungan bagi investor, dan banyak hal lagi.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah mutlak diperlukan. Karena pariwisata bersifat lintas sektor, maka peningkatan kapasitas ini juga sebaiknya juga ditujukan bagi instansi – instansi terkait. Pembekalan ini sebaiknya dilakukan pada tahapan dimana sistem kelola dan juga “*branding*” pariwisata Kabupaten Soppeng telah disepakati, sehingga pembekalan pada aparatur pemerintahan selain pada pengetahuan tentang pariwisata itu sendiri, tujuan dan target-target dari sektor pariwisata dalam 5 tahun ke depan, tentang bagaimana sektor lain dapat berkontribusi dalam memajukan sektor pariwisata untuk mendukung perekonomian lokal yang berkelanjutan.

Selain apa yang telah dijelaskan di atas, pelatihan-pelatihan untuk aparatur, khususnya di bidang perencanaan, pendampingan masyarakat dan pengelolaan daya tarik menjadi cukup penting, karena aparatur dinas merupakan komponen penggerak program dan harus betul betul memahami tujuan dan teknis pendampingan, sehingga program yang dijalankan dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Strategi 2. Peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata.

Pelaku usaha sebagai tokoh sentral lainnya juga perlu ditingkatkan fasilitasnya, terutama dalam hal peningkatan standar umum pelayanan. Pelaku usaha termasuk pemandu, pengelola fasilitas akomodasi (hotel, resor, rumah inap,), pengelola fasilitas penunjang, operator transportasi, dan sebagainya. Peningkatan ini tidak mutlak menjadi tanggung jawab Dinas Kepariwisata tetapi perlu bekerjasama dengan berbagai instansi, lembaga teknis, maupun LSM untuk melakukan strategi ini.

Strategi 3. Pendampingan bagi masyarakat sebagai bagian integral dari pengembangan aspek kepariwisataan.

Pendampingan masyarakat menjadi bagian yang tak terlepas dari pengembangan aspek pariwisata sebagai bagian program pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah diarahkan untuk membuat ketentuan bagi pihak-pihak lain yang ingin berpartisipasi di dalam membangun masyarakat dan pelestarian sumber daya alam ataupun budaya, menetapkan pola pendampingan. Dengan demikian akan membantu meringankan Pemerintah Daerah dalam implementasi program. Tantangan penerapan pola pendampingan adalah belum sejalannya dengan

birokrasi administrasi pemerintahan yang seringkali hanya melakukan program satu kali saja.

Melihat kapasitas masyarakat Kabupaten Soppeng, maka pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata, sebaiknya dilakukan sejak awal pengembangan untuk memberikan gambaran tentang sektor pariwisata secara baik, hingga implementasi program melalui pola pendampingan dan bantuan tenaga teknis dari pihak pemerintah maupun akademisi serta LSM.

Matriks Program Pengembangan, Strategi, dan Indikasi Kegiatan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB) Soppeng Tahun 2018-2033

PERWILAYAHAN DESTINASI PARIWISATA						
Arah Kebijakan 1 : Pengembangan Pariwisata Bertema Khusus dan Terpadu						
NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Penetapan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD)	Pembentukan Destinasi Pariwisata Daerah Alam, Sejarah dan Budaya, Minat Khusus, Edukasi dan Ekologi serta Buatan Manusia (<i>man-made</i>) Penyusunan Peta Sebaran Destinasi Pariwisata Daerah				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
2	Penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD)	Pembentukan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Penyusunan Pola Perjalanan Wisata (<i>Travel Pattern</i>)				
3	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)	Pembentukan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) pada masing-masing kecamatan Penyusunan Paket Wisata				
4	Penetapan Pusat Pelayanan Informasi	Pembentukan Pusat Informasi Pariwisata Daerah (<i>Tourist Information Center</i>)				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
5	Peningkatan dan Pengembangan KSPD	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata (RIPO) prioritas pada setiap KSPD				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
6	Pengembangan Daya Tarik dan Atraksi Wisata	<p>Pengembangan daya tarik dan atraksi wisata tematik pada masing-masing KSPD</p> <p>Pengendalian pembangunan daya tarik dan atraksi wisata, fasilitas pariwisata serta usaha/ industri pariwisata sesuai dengan zonasi dan peruntukan kawasan</p> <p>Pengembangan aksesibilitas dari dan ke daya tarik dan atraksi wisata</p> <p>Peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan daya tarik dan atraksi wisata</p>				
Arah Kebijakan 2 : Pemeliharaan Dari Dampak Negatif Terhadap Daya Tarik dan Atraksi Wisata						
7	Penegakan Regulasi Perencanaan Pembangunan Pariwisata Daerah	<p>Penetapan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah (RIPPARDA) dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA)</p> <p>Sosialisasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah (RIPPARDA)</p>				<p>DPRD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya</p>

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		Konsistensi terhadap penegakan hukum Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA)				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
8	Peningkatan Koordinasi antara Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat	Optimalisasi Peran Badan Promosi dan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Soppeng (BPPPS)				
		Pembentukan Forum Komunikasi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Soppeng				
		Pembentukan kelompok masyarakat Sadar Wisata				

PENGEMBANGAN PRODUK PARIWISATA						
Arah Kebijakan 1 : Pengembangan Daya Tarik dan Atraksi Wisata						
NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Peningkatan kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata	Peningkatan aktivitas pertunjukan dan pameran (pentas seni, budaya)				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Penyusunan <i>master plan</i> kawasan <i>night market & culinary (Food and Shopping Street)</i> .				
		Pengembangan informasi sejarah dan inovasi audio visualisasi materi sejarah				
		Pemugaran kembali dan penataan situs makam untuk peningkatan daya tarik, daya tampung dan kualitas area penerimaan pengunjung.				
		Pengembangan potensi kreatif dan cinderamata serta pengembangan desain arsitektural, motif dan corak bangunan berciri khas Soppeng.				
		Pengembangan daya tarik produk serta penataan dan pembangunan kawasan wisata kuliner.				
		Peningkatan dan perencanaan aksesibilitas wisata berupa dermaga, anjungan, dan moda transportasi danau, sungai dan penyeberangan yang mudah dan aman				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
2	Pengembangan daya tarik dan atraksi wisata baru	Pengembangan usaha dan fasilitas atraksi wisata rekreasi danau dan sungai seperti <i>river tubing</i> , <i>Canoeing</i> dan memancing				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Pengembangan kampung wisata berbasis budaya dan pelestarian aktivitas lokal masyarakat sebagai daya tarik wisata Kabupaten Soppeng				
		Perencanaan taman bermain alam liar dengan menyajikan konsep wisata danau, jelajah flora dan fauna hutan				
		Peningkatan dan perencanaan fasilitas akomodasi berupa, hotel, resort dengan konsep <i>forest</i> dan <i>glamour camping</i> pada kawasan hutan dan pegunungan				
		Pengembangan jalur pejalan kaki dan pedestrian dan jalur sepeda pada kawasan persawahan dan perkebunan				
		Perencanaan area perhentian/istirahat (<i>resting area</i>) secara terpadu dengan memanfaatkan daya tarik panorama alam				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
3	Pengembangan sistem jaringan fungsional pariwisata	<p>Pengembangan gerbang (<i>entry point</i>) Kabupaten Soppeng pada batas-batas kabupaten</p> <p>Pengembangan gerbang pada setiap destinasi prioritas</p> <p>Pengembangan kawasan wisata terpadu (<i>integrated resort area</i>) di kawasan Gattareng Toa <i>Adventure park</i> dan sekitarnya</p>				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
4	Pengembangan produk yang berkontribusi terhadap pelestarian alam dan budaya	<p>Penyusunan kebijakan pengelolaan daya tarik dan atraksi wisata berbasis ekologi</p> <p>Pengembangan produk kuliner dan minuman tradisional Soppeng.</p>				
Arah Kebijakan 2 : Pengembangan Fasilitas, Pelayanan dan Pengelolaan Pariwisata						
1	Pengembangan fasilitas pariwisata yang ramah lingkungan	Penyusunan kebijakan <i>green tourism</i>				
2	Peningkatan standar sistem pelayanan dan pengelolaan fasilitas pariwisata	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan pengelolaan fasilitas pariwisata				
Arah Kebijakan 3 : Peningkatan Kualitas Aksesibilitas Dari dan Ke DTW						
1	Peningkatan kualitas tata informasi	Pemasangan papan informasi pariwisata elektronik dan konvensional				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
2	Peningkatan aksesibilitas pariwisata	Pengadaan sarana transportasi darat, sungai dan penyeberangan berstandar pariwisata internasional				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Pengadaan sarana transportasi darat berstandar pariwisata yang aman dan nyaman				
		Perbaikan dan pembangunan jalan dan jembatan menuju daya tarik dan atraksi wisata				
		Pengembangan moda transportasi ramah lingkungan (sepeda dan transportasi tradisional)				

PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN INVESTASI PARIWISATA						
Arah Kebijakan 1 : Perencanaan Perwilayah Industri Pariwisata Kabupaten Soppeng						
NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Penetapan kawasan industri pariwisata yang dapat menjangkau skala regional maupun lokal	Penyusunan kebijakan pembangunan Kawasan Industri Pariwisata Pembentukan Kawasan Industri Pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
2	Peningkatan fungsi kawasan industri pariwisata	Pembentukan usaha-usaha pendukung kawasan industri pariwisata				
Arah Kebijakan 2 : Pengembangan Perwilayah Industri Pariwisata Kabupaten Soppeng						
1	Peningkatan kualitas produk/ rekayasa inovasi industri pariwisata	Pelatihan pengembangan dan inovasi produk pariwisata Standarisasi produk pariwisata sesuai standar usaha pariwisata yang telah ditetapkan Pengembangan kemitraan dengan daerah lain dalam peningkatan kualitas produk pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
2	Peningkatan Efisiensi Pelaku Industri Wisata	Pelaksanaan pameran produksi berbasis produk lokal daerah secara regular dan berkelanjutan				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
Arah Kebijakan 3 : Peningkatan Fungsi Struktur Industri Pariwisata Kabupaten Soppeng						
1	Pengembangan Pola Kemitraan Antar Pelaku Industri	Penyusunan regulasi pola kemitraan dalam pembangunan pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
2	Penguatan implementasi kemitraan	Penguatan peran Badan Investasi dan Penanaman Modal				
		Pelibatan masyarakat (adat, desa, dsb) dalam kemitraan				
Arah Kebijakan 4 : Peningkatan Pertumbuhan Investasi Pariwisata Kabupaten Soppeng						
1	Penyusunan kebijakan investasi pariwisata	Penyusunan regulasi kebijakan dan potensi investasi pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
2	Reduksi kendala investasi pariwisata	Pengembangan infrastruktur dan prasarana pendukung investasi pariwisata lainnya (listrik, air bersih, dsb)				
		Peningkatan peran dan dukungan Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Perbankan dalam investasi pariwisata				

PENGEMBANGAN PASAR DAN PEMASARAN						
Arah Kebijakan 1 : Pemantapan Segmentasi Pasar						
NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Identifikasi perkembangan pasar wisatawan	Penyusunan tipologi wisatawan dan karakteristik trend pertumbuhan pasar wisatawan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
2	Pengembangan orientasi pasar wisatawan	Penyusunan dan penetapan segmentasi pasar wisatawan Pengembangan produk pariwisata sesuai perkembangan segmentasi pasar wisatawan Pengembangan pasar wisatawan manca negara, wisatawan nusantara, dan wisatawan lokal sekitar kabupaten Pengembangan pasar khusus MICE untuk segmentasi pasar pemerintahan				
Arah Kebijakan 2 : Pengembangan dan Pemantapan Citra Pariwisata						
1	Pembentukan citra pariwisata kabupaten Soppeng	Pelaksanaan <i>Fam Trip</i> bagi tour operator, tour leader, Biro Perjalanan Wisata, Agen Perjalanan Wisata, penulis pariwisata (<i>travel writer</i>) dan media Penyusunan <i>calendar of event</i> pariwisata				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
2	Peningkatan kerjasama dengan media promosi, dalam membentuk citra pariwisata	<p>Pembangunan land-mark kabupaten Soppeng</p> <p>Pelaksanaan kerjasama dengan media cetak, media elektronik, media <i>online</i> dan <i>offline</i> dalam promosi pariwisata</p> <p>Peningkatan <i>media campaign</i> dalam promosi pariwisata Soppeng</p>				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
Arah Kebijakan 3 : Pengembangan Model Promosi dan Pemasaran Pariwisata						
1	Pembentukan <i>Branding</i> pariwisata	<p>Penyusunan dan penetapan <i>branding</i> pariwisata kabupaten Soppeng</p> <p>Penyusunan dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata kabupaten Soppeng</p>				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
2	Peningkatan kegiatan promosi	<p>Penyusunan bahan promosi dengan berbagai media</p> <p>Pemasangan promosi dengan <i>giant screen</i> pada lokasi-lokasi strategis dalam kabupaten, serta logo <i>branding</i> promosi pada kendaraan di luar kabupaten</p> <p>Penyebaran dan pemasangan bahan promosi pariwisata pada sumber/ pintu masuk wisatawan (bandara) Sultan Hasanuddin dan daerah lainnya</p>				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya

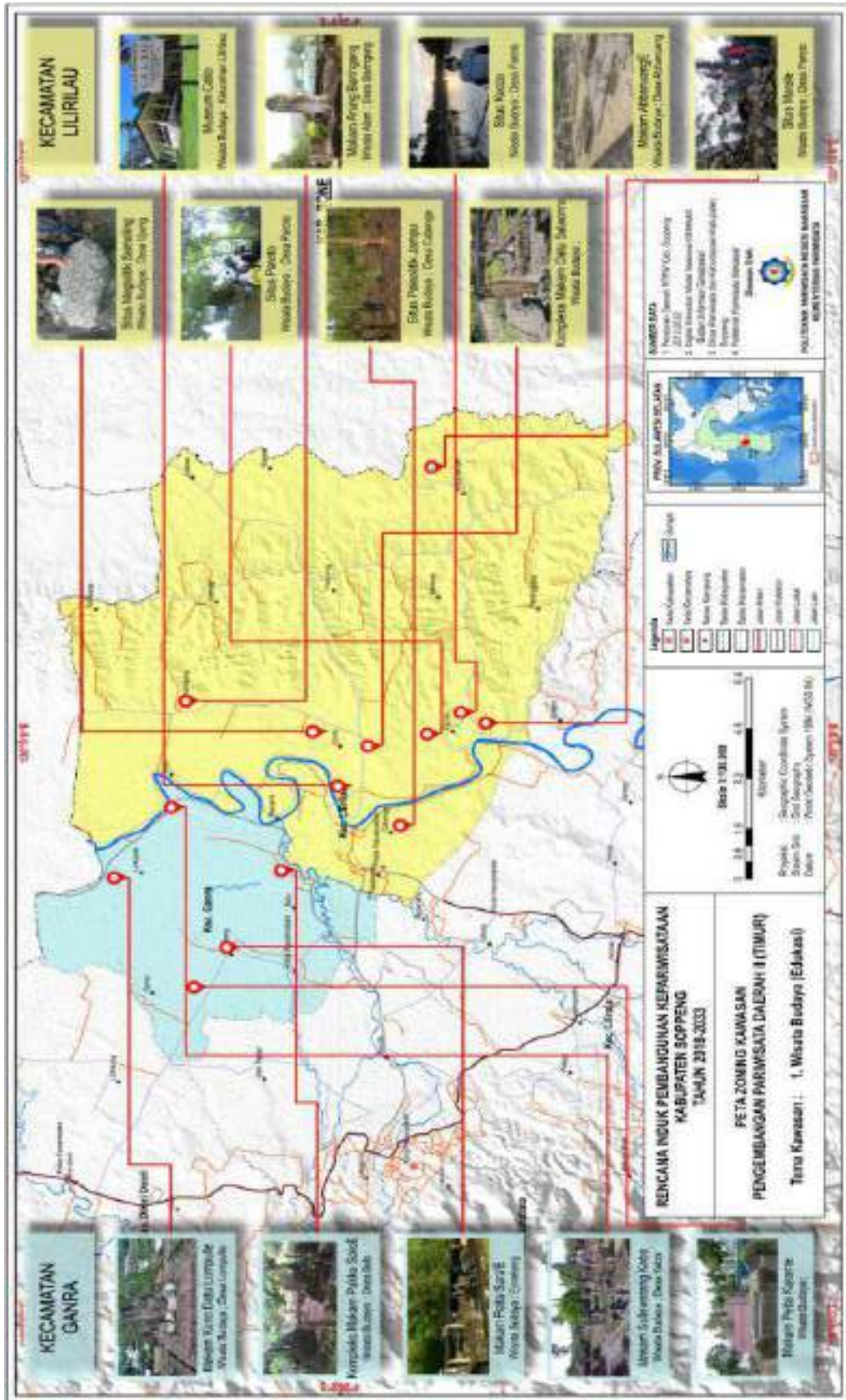
NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
3	Pengembangan pemasaran terpadu dengan bidang lain khususnya bidang industri dan perdagangan	<p>Pelaksanaan pemasaran terpadu lintas sektor dalam kerangka <i>Tourism-Trade and Investment</i></p> <p>Pemasangan logo branding pariwisata pada seluruh produk industri dan perdagangan daerah</p>				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
4	Pengembangan pemasaran terpadu dengan beberapa destinasi lainnya	<p>Pengembangan kerjasama pemasaran bersama dengan destinasi lain di sekitar kabupaten Soppeng.</p> <p>Penyusunan paket wisata bersama destinasi lain dalam konteks komplementaris atau variasi atraksi</p>				
5	Pengembangan kerjasama dengan komunitas kreatif, seni budaya, sejarah, dan ilmu pengetahuan	<p>Pemberdayaan masyarakat dan komunitas dalam penggunaan sosial media (<i>instagramable</i>) dalam promosi pariwisata</p> <p>Pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat dan komunitas dalam pelaksanaan even pariwisata</p>				

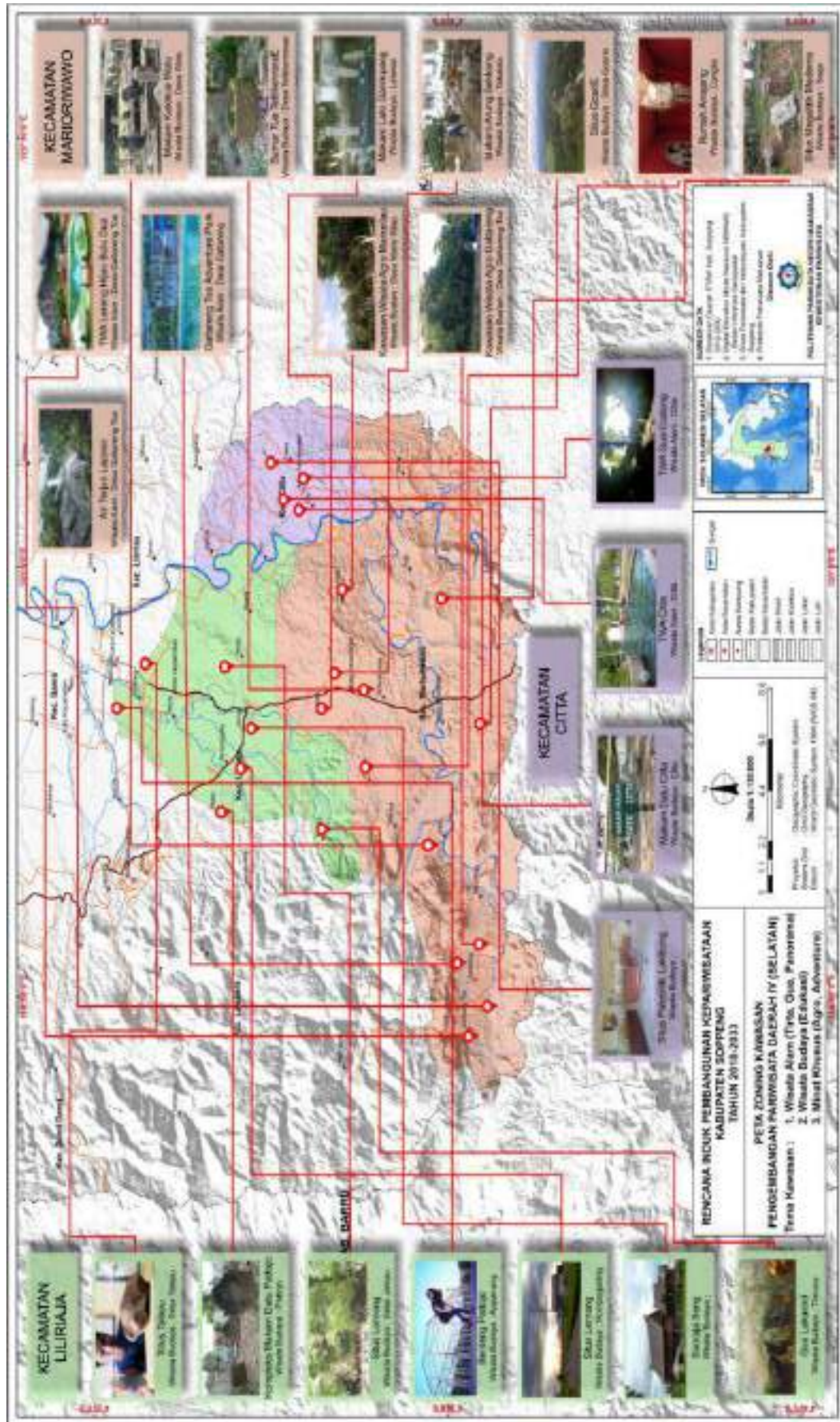
PENGELOLAAN LINGKUNGAN						
Arah Kebijakan 1 : Pengelolaan Lingkungan Pada Destinasi Wisata						
NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Peningkatan pengelolaan persampahan	Penyusunan regulasi penanganan sampah pada daya tarik dan atraksi wisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Pengembangan sistem pengelolaan sampah				
		Pelatihan pengembangan kreativitas masyarakat melalui pemanfaatan daur ulang sampah				
2	Pengembangan ruang terbuka hijau	Pembangunan dan penataan ruang terbuka hijau				
		Pelaksanaan gerakan menanam pohon dan pemanfaatan pekarangan untuk taman dan tanaman				
		Penataan dan penanaman pada kawasan jalan utama dan sekitar daya Tarik dan atraksi wisata				
Arah Kebijakan 2 : Optimalisasi Daya Dukung Lingkungan						
1	Pengadaan kajian daya dukung lingkungan	Penyusunan regulasi <i>carrying capacity</i> pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan				

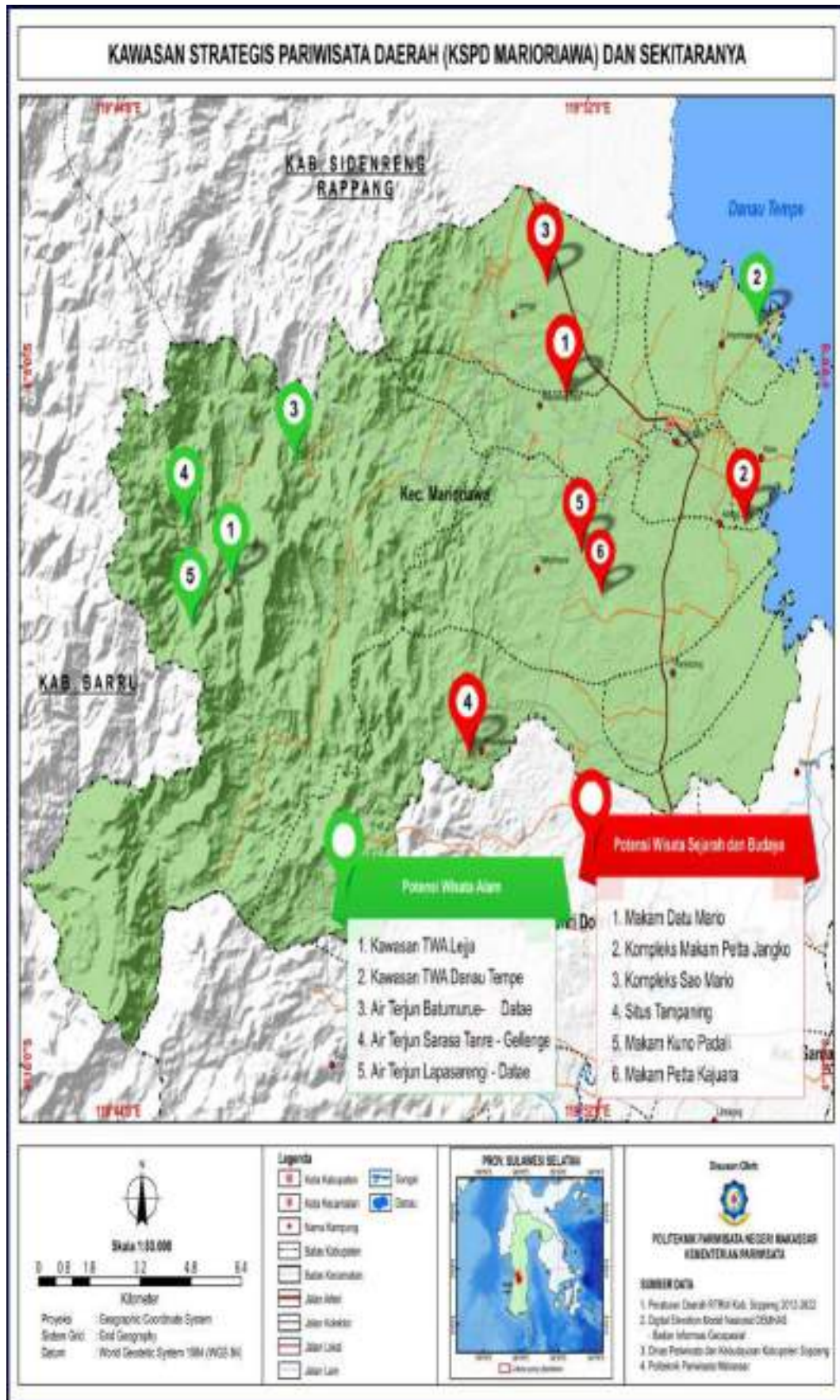
NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		Pencegahan pembukaan daya tarik, atraksi dan aktivitas wisata pada kawasan rawan bencana				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
2	Pengelolaan permintaan kunjungan wisatawan	Pengendalian kunjungan wisatawan pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan berdampak degradasi lingkungan dan vandalisme				
		Pembukaan daya Tarik dan atraksi wisata baru untuk menjaga distribusi wisatawan sesuai daya dukung lingkungan				
		Penataan kawasan dan penambahan fasilitas yang memungkinkan aktivitas wisatawan tetap nyaman dalam antrian pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan				

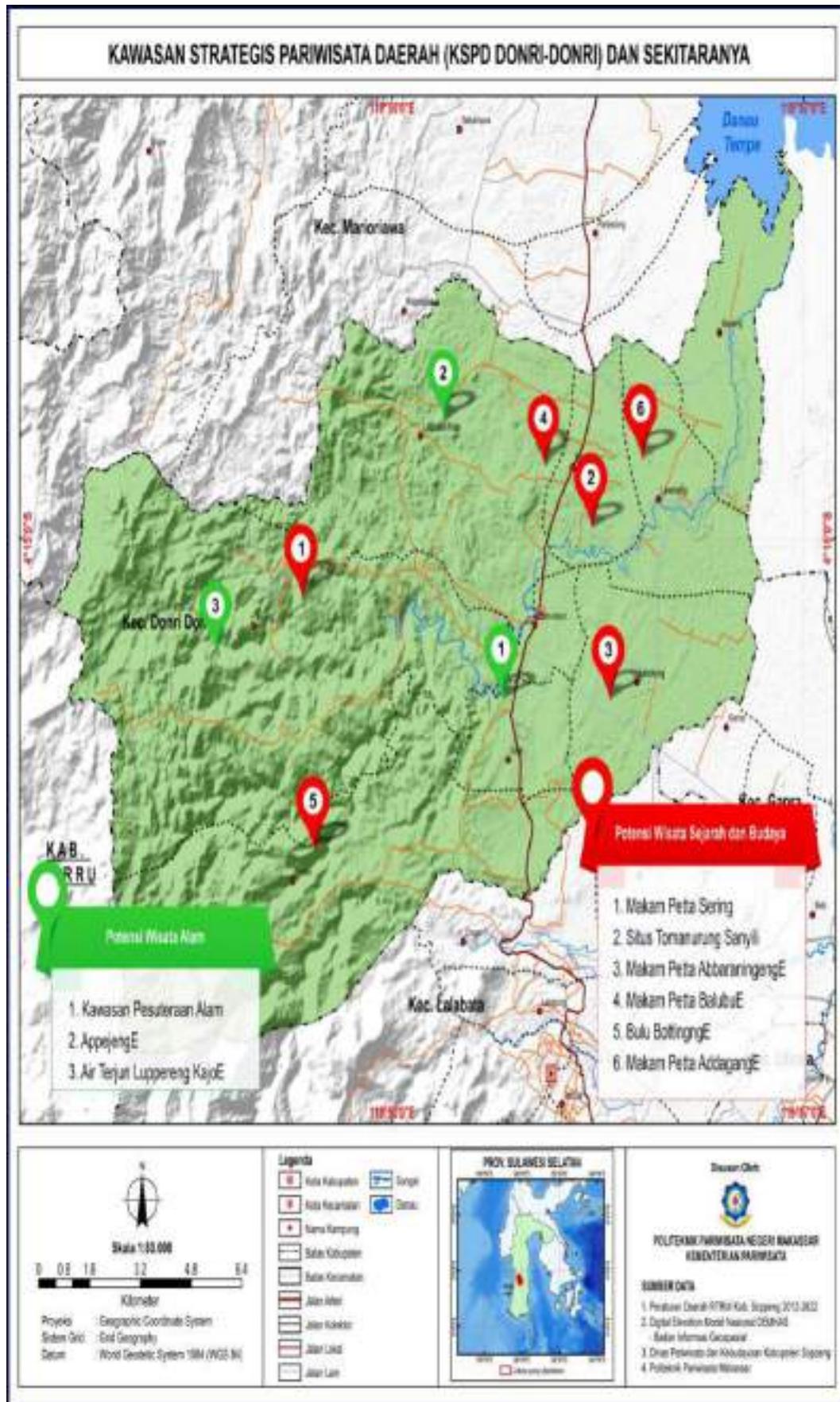
PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA						
Arah Kebijakan 1 : Penguatan Manajemen Pariwisata						
NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Pengembangan sistem pengelolaan daya tarik wisata berbasis kelompok Masyarakat	Pelatihan <i>Community Based Tourism Development</i>				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Pendampingan dan pembinaan dalam pengelolaan daya tarik dan atraksi wisata				
2	Pembentukan Forum Pariwisata	Pembentukan <i>Destination Management Organization</i>				
3	Tata kelola dan peningkatan kapasitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program	Pembentukan asosiasi kelompok masyarakat pariwisata seperti Generasi Pesona Indonesia (GENPI), My Trip My Adventure (MTMA), dsb				
		Penyusunan regulasi tata kelola destinasi pariwisata				
		Pelibatan pentahelix pariwisata dalam tata kelola dan pengembangan destinasi pariwisata				
		Pelibatan masyarakat, kelompok, komunitas, dan asosiasi profesi/ industri dalam perencanaan dan pelaksanaan tata kelola destinasi				

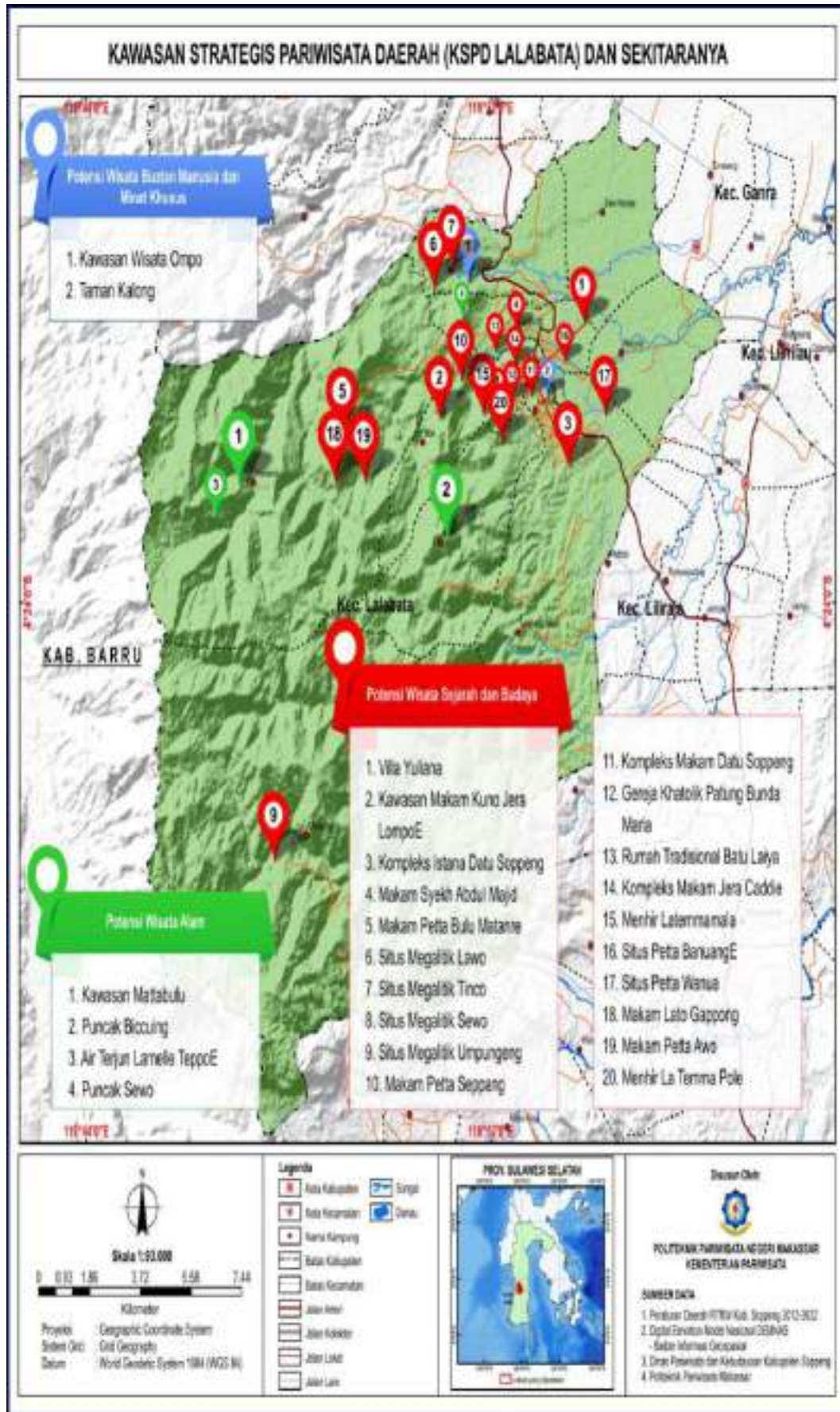
Arah Kebijakan 2 : Peningkatan Kapasitas dalam Pengembangan Pariwisata					
4	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pendampingan masyarakat, dan pengelolaan pariwisata	Pelatihan teknis kepariwisataan bagi aparatur pemerintah			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan, SKPD terkait lainnya, asosiasi profesi, industry, dan komunitas masyarakat
		Penataan jenjang karier aparatur pemerintah dalam bidang pariwisata			
5	Peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata	Pelatihan teknis pariwisata bagi pelaku pariwisata			
		Pelaksanaan sertifikasi usaha			
6	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata	Pendidikan dan Pelatihan teknis pariwisata bagi masyarakat			
		Pembukaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan kepariwisataan			
		Peningkatan kompetensi guru SMK bidang pariwisata			
		Pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja pariwisata			
		Pendampingan bagi masyarakat sebagai bagian integral dari pengembangan aspek kepariwisataan			

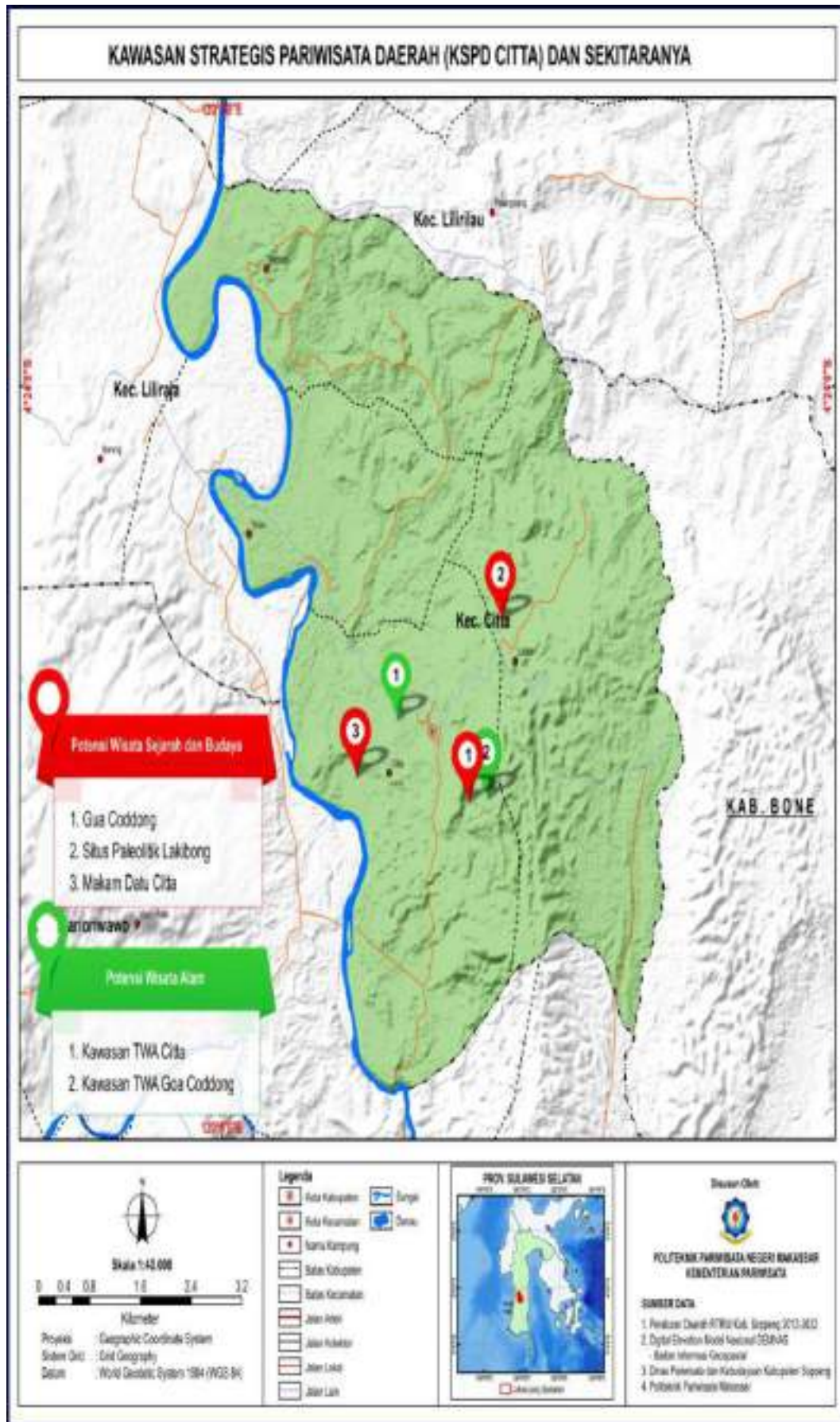


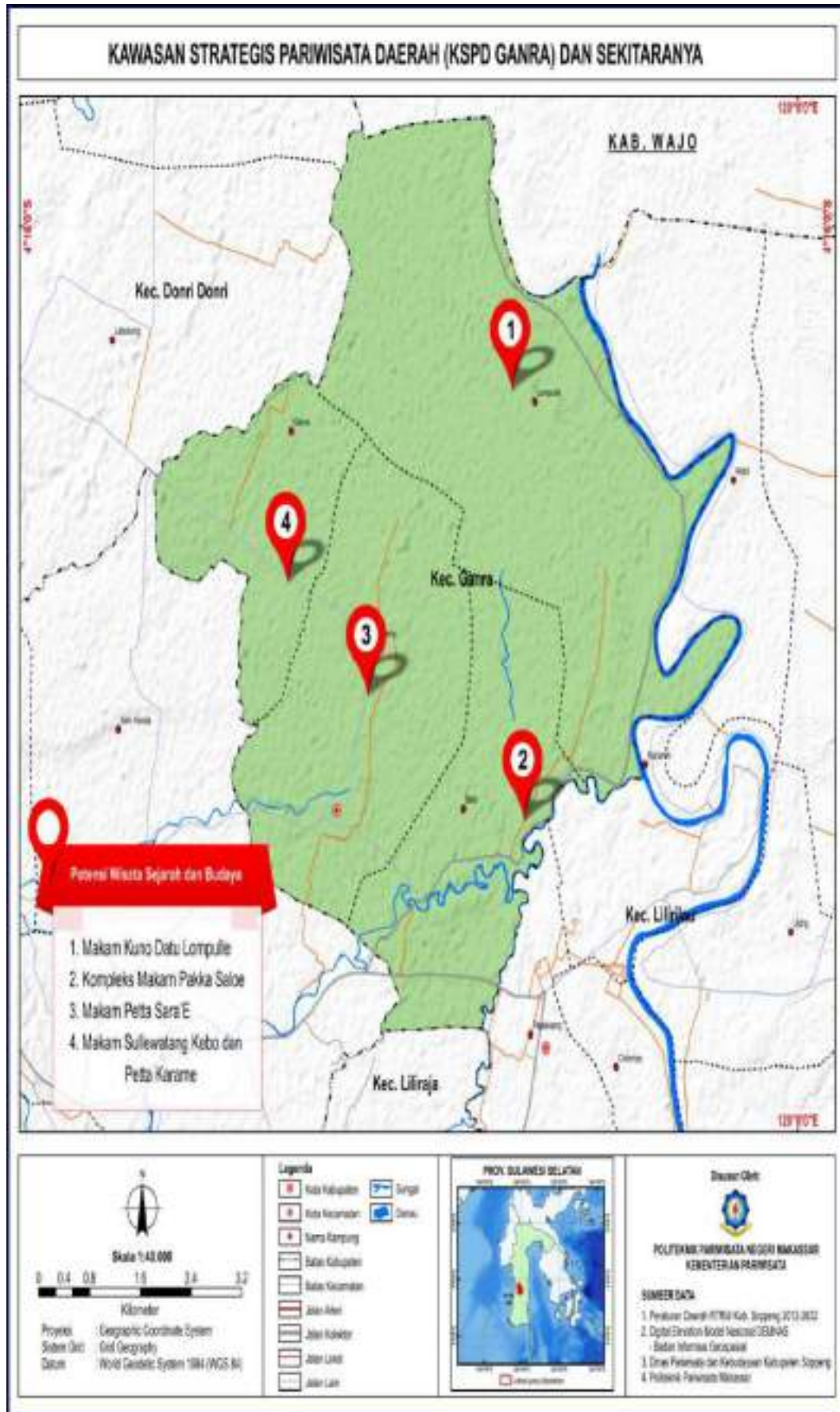


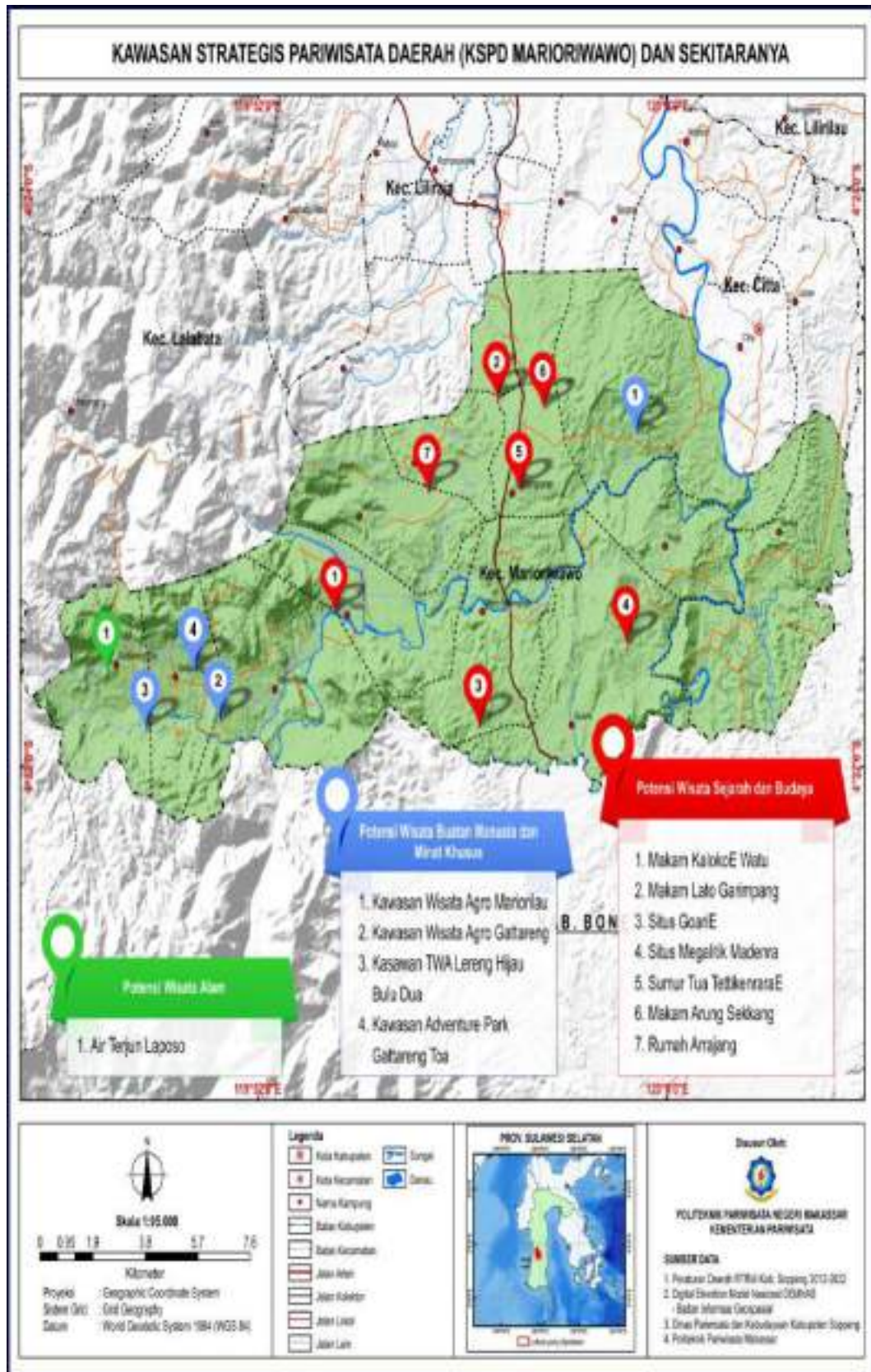












DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, P.A**, 1986, *Tourism and Its Significance in Local Development*, Michigan State University.
- Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, 2017**. Kajian Data Pasar Wisatawan Nusantara 2017
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2018**. Kabupaten Soppeng Dalam Angka, *Soppeng Regency In Figures 2018*
- Briguglio, Lino**, dkk, 1996, *Sustainable Tourism in Island and Small States : Issues and Policies*, Biddles Limited, Guildford and Kings Lynn.
- Bull, Adrian**, 1991, *The Economics of Travel and Tourism*, Halsted Press. New York.
- Cook, S.D Stewart E, Ripass K**, 1992, *Tourism and the Environment*. Travel Industry Association of America, Washington DC.
- Cool, Mc. SF**. 1995, *Linking Tourism the Environment and Concepts of Sustainability Setting the Stage. The Annual Meeting of the Nation Recreation and Park Association*. Minneapolis MN.
- Gartner, William**. 1996. *Tourism Development: Principles, Process, and Policies*. Van Nostrand Reinhold, New York.
- Gunn, Clare**. 1994. *Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases, 3rd ed.*, Taylor & Francis, Washington DC.
- Gee, Chuck Y**, dkk. 1997. *The Travel Industry: Third Edition*, Jhon Willey & Sons, Inc.
- [http/// www: kemenpar. go. id](http://www.kemenpar.go.id)**
- Inskeep, Edward**. 1993. *Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach*. Van Nostrand Reinhold, New York.
- Harrison, David**. 1992, *Tourism and the Less Development Countries*, Halsted Press. New York.
- Jhonson, Peter, Barry Thomas**, 1993, *Perspectives on Tourism Policy*, Biddles Ltd. Guildford & Kings Lynn.
- Kusudianto, Hadinoto**, 1996, *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*, UI Press. Jakarta

- Lea, Jhon, 1993, *Tourism and Development in the Third World*, Routledge. London. New York.
- L Foster, Dennis. Disadur oleh Oka A Yoeti, 2003. Cetakan Ketiga. *Marketing Hospitality Hotel, Motel and Resort*. Jakarta: PT. Perca.
- Mile Post Consultant Inc, *Promotion Of BIMP-EAGA As a Single Destination; With Empahasis on Notural and Cultural Tourism Resourses: Survey Report*, ASEAN-Japan Center. 2007.
- Mowforth, Martin dan Land Munt, *Tourism and Suatainaibility; Development and New Tourism In The Third World*; Second Edition, Reutledge Taylor & Francis Group, 2003.
- Marpaung, Happy, 2000, *Pengetahuan Kepariwisataaan*, Alfabeta. Bandung.
- Mangkudilaga, Sufwandi, 1998, *Kebudayaan dan Kesenian Sebagai Potensi Pariwisata*, Dirjen Departemen Parpostel. Jakarta
- Pearce, Douglass, 1994, *Tourist Development*, Longman Singapore Publishers Ltd. Singapore.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011**, tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015**, tentang Organisasi Kementerian Negara
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016**, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Dan Kabupaten/ Kota
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2009**, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015**, Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2030
- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012**, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2016,
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021

Ronny, S Viko, 2001, *Tourism, Trade, Investment : Yogyakarta Dalam Bingkai Otonomi*, Bigraf Publishing. Yogyakarta.

Ross, Glenn F, 1998, *Psikologi Pariwisata*, Yayasan Obor Indonesia.

Spillane, James J, 1991, *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*, Kanisius, Yogyakarta.

Suyitno, 2001, *Perencanaan Wisata*, Kanisius, Yogyakarta.

Sugiarto, Endar. 1998, *Pengantar Akomodasi dan Restoran*, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Smith, Valene L dan William R Eadington, 1992, *Tourism Alternatives, Potentials and Problems in the Development of Tourism*, John Wiley & Sons. New York.

Tisdell, Clement A dan Kartik C Roy, 1998, *Tourism and Development : Economic, Social, Political and Environment Issues*, Nova Science Inc. USA.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010, tentang Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UNDP – WTO, 1988. *Tourism Product Improvement Study*. Madrid: Final Report,.

Wahab, Salah, dkk, 1994, *Pemasaran Pariwisata*, PT. Pradnya Paramita. Jakarta.

Weaver, D.B, 2001, *Ecotourism as Mass Tourism : Contradiction or Reality? Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly*, Edisi April, Ithaca. NY.

Wiendu, Nuryanti, 1998, *Membudayakan Pariwisata dan Mempariwisatkan Budaya*, Dirjen Dep. Parpostel. Jakarta.

Yoeti, Oka. A, 1985, *Pemasaran Pariwisata*, Angkasa Bandung.

-----, 1993, *Komersialisasi Seni Budaya Dalam Pariwisata*, Angkasa Bandung.

IDENTITAS PENULIS



Syamsu Rijal, Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 21 Agustus 1968. Menyelesaikan pendidikan pada jurusan Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YAPPI Makassar pada tahun 1997, kemudian melanjutkan pendidikan pada program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar Jurusan Manajemen Pendidikan yang diselesaikan pada tahun 2001. Pada tahun 2013, menyelesaikan program S3 jurusan Ilmu Administrasi Publik pada program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar Pada tahun 2019

memperoleh gelar profesi Certified Hospitality Educator (CHE) dari American Hotel & Lodging Educational Institute (AHLEI). Selain pendidikan formal, juga pernah mengikuti berbagai pelatihan seperti CBT/CBA The Best Quality Framework di Canberra Institute of Tafe-Australia, Competency Based Assessment di Queensland Tafe-Australia, Quality Tourism pada Centro Superior de Hosteleria the Galicia (CSHG) Santiago Decampostella Spanyol, Sandwich Like Program pada Northern Illinois University-Amerika Serikat, serta berbagai aktivitas *benchmark* pada perguruan tinggi terkemuka di Hongkong, Belanda, New Zealand, Australia, dan Kanada

Saat ini aktif dalam berbagai asosiasi profesi, Direktur Eksekutif Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Phinisi, peneliti dan penulis pariwisata, Master Asesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).



Muhammad Arifin, Lahir di Enrekang pada tanggal 7 Januari 1963. Menyelesaikan Pendidikan pada jurusan Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YAPPI Makassar pada tahun 1988, kemudian melanjutkan Pendidikan pada program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar Jurusan Manajemen Pendidikan yang diselesaikan pada tahun 2002.

Pada tahun 2010 memperoleh Sertifikat Dosen dan dinyatakan sebagai Dosen Profesional pada Bidang Ilmu Manajemen Perhotelan dari Universitas Hasanuddin. Selain itu menjadi Asesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sejak tahun 2008, Asesor Lembaga sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP) dari tahun 2014 dan Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) serta berbagai aktivitas *benchmark* pada perguruan tinggi terkemuka di Malaysia, Singapura, Hongkong, Belanda, Australia, Kanada dan Arab Saudi.

Saat ini aktif sebagai Ketua Bidang Pengembangan SDM dan Sertifikasi pada Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan *Indonesian Hotel General Manager Association* (IHGMA), Peneliti dan penulis kajian Pariwisata dan menjabat sebagai Direktur Politeknik Pariwisata Negeri Makassar sejak tahun 2019 sampai sekarang.



Syafruddin, Lahir di Makassar pada 06 maret 1966. Menyelesaikan Program Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 1990 jurusan Hukum Administrasi Negara. Menyelesaikan Program Pasca Sarjana Pada Universitas Muslim Indonesia pada tahun 1999 dengan konsentrasi Managemen Sumber Daya Manusia.

Sebagai penggiat Ekowisata dari tahun 1998 hingga saat ini. Aktif sebagai Dosen pada Program Studi MICE di Politeknik Pariwisata Makassar. Sebagai Assessor LSP.



Surya Dewi, Lahir di Watansoppeng pada tanggal 4 April 1968.

Menyelesaikan pendidikan pada jurusan Sastra Perancis Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin pada tahun 1992, kemudian melanjutkan pendidikan pada program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar Jurusan Manajemen Sumber Daya manusia yang diselesaikan pada tahun 2002. Pada tahun 2019 memperoleh gelar profesi Certified Hospitality Educator (CHE) dari American Hotel & Lodging Educational Institute (AHLEI).

Selain pendidikan formal, juga pernah mengikuti berbagai pelatihan seperti pelatihan Penyuluh Standar Kompetensi Kerja nasional Indonesia (SKKNI) tahun 2006, Pelatihan di bidang MICE, Pelatihan pengajaran Bahasa perancis untuk komunikasi Professional, Train of trainers (TOT) tenaga Pengajar Lembaga Pendidikan Vokasi dan kebudayaan serta Pelatihan bidang Hospitality & Tourism, TAFE SA Queensland AuStralia tahun 2019

Saat ini aktif dalam berbagai asosiasi profesi, seperti Pengurus kajian Pariwisata & kebudayaan, Divisi Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora, Celebes Ecotourism Forum (CEF), Perhimpunan Pengajar Bahasa Perancis seluruh Indonesia (PPSI) Aktif dan terlibat dalam beberapa penelitian terapan kepariwisataan, baik secara perorangan maupun kelompok.